



KEMENDIKBUD



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013

LAKIP 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2014

"Melayani semua dengan Amanah"

LAKIP2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2013



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bagian dari upaya Kemendikbud dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban kementerian seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas penetapan kinerja yang telah diperjanjikan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Kemendikbud tahun 2013. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan diharapkan enam misi Kemendikbud dapat tercapai.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, secara umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dengan baik. Kemendikbud pada tahun 2013 melaksanakan sepuluh program pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Kemendikbud menyadari meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan masih cukup banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun-tahun mendatang, seperti membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, tercapainya opini WTP atas laporan keuangan Kemendikbud dari BPK, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disemua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pendidikan, penerapan kurikulum 2013 dan pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya Indonesia. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja tahun 2013 yang telah dihasilkan Kemendikbud dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan dalam perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013 Kemendikbud.

Jakarta, Maret 2014,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Mohammad Nuh

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA KEMDIKBUD.....	9
A. PERENCANAAN KINERJA	9
B. PERJANJIAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMDIKBUD.....	33
A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	33
1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL (PAUDNI).....	34
2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	46
3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	68
4. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	77
5. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PSDMPK dan PMP).....	107
6. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)	131
7. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.....	150
8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	163
9. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR	171

10. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	180
B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	201
C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM STRATEGIS KEMENDIKBUD	206
BAB IV PENUTUP	230
LAMPIRAN	233

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara-Perubahan
APK	Angka Parsitipasi Kasar
APM	Angka Parsitipasi Murni
APS	Angka Putus Sekolah
BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan
BAN-SM	Badan Akreditasi Nasional - Sekolah dan Madrasah
BHMN	Badan Hukum Milik Negara
BHP	Badan Hukum Pendidikan
BINDIKLAT	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
BLU	Badan Layanan Umum
BIPA	Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing
BMN	Barang Milik Negara
BOMM	Bantuan Khusus Murid Miskin
BOP	Badan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPPAUDNI	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
BPSDMPK dan PMP	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan
D-2	Diploma 2
D-3	Diploma 3
D-4	Diploma 4
DAK	Dana Alokasi Khusus
DARING	Dalam Jaringan
DIKDAS	Pendidikan Dasar
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DIKMEN	Pendidikan Menengah
DIKTI	Pendidikan Tinggi
DITJEN	Direktorat Jenderal
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	Dewan Pendidikan Tinggi
EFA	<i>Education For All</i>
EfSD	<i>Education For Sustainable Development</i>
GNP-PBA	Gerakan Nasional Percepatan – Pemberantasan Buta Aksara
HaKI	Hak Kekayaan Intelektual

HAM	Hak Asasi Manusia
IAO	<i>International Astronomy Olympiad</i>
IBO	<i>International Biology Olympiad</i>
ICDE	<i>International Council Of Distance Education</i>
IchO	<i>International Chemistry Olympiad</i>
ICPC	<i>International Collegiate Programming Contest</i>
ICT	<i>Information And Communication Technology</i>
IJSO	<i>International Junior Science Olympiad</i>
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMO	<i>International Mathematics Olympiad</i>
IMSO	<i>International Mathematics And Science Olympiad</i>
INAP	<i>Indonesia National Assessment Program</i>
INEPO	<i>International Environmental Project Olympiad</i>
INPRES	Instruksi Presiden
IOI	<i>International Olympiad In Informatics</i>
IphO	<i>International Physics Olympiad</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISO	<i>International Standard Organization</i>
ITJEN	Inspektorat Jenderal
JUKNIS	Petunjuk Teknis
KBK	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KBU	Kelompok Belajar Usaha
KEMENDIKBUD	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
KEPRES	Keputusan Presiden
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKKS	Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KKN	Kuliah Kerja Nyata
KKPS	Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
KLK	Kelas Layanan Khusus
KNIU	Komite Nasional Indonesia Untuk Unesco
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
KRCI	Kontes Robot Cerdas Indonesia
KRI	Kontes Robot Indonesia
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
LKBH	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
MenPAN RB	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
MDGs	Millenium Development Goals
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
NIGN	Nomor Induk Guru Nasional
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional
NILEM	Nomor Induk Lembaga
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NUPTK	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
OSN	Olimpiade Sains Nasional
O2SN	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
P2PAUDNI	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
P4TK	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PAUDNI	Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal
PK	Penetapan Kinerja
PKBG	Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender dan Anak
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKG	Pemantapan Kerja Guru
PKH	Pendidikan Kecakapan Hidup
PLB	Pendidikan Luar Biasa
PLK	Pendidikan Layanan Khusus
PLPG	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
PLS	Pendidikan Luar Sekolah
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PRODI	Program Studi
PSBG	Pendidikan Sekolah Berwawasan Gender dan Anak
PSPSL	Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung
PT	Perguruan Tinggi
PTK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta

PUG	Pengarusutamaan Gender
RA	Raudhatul Athfal
RBI	Reformasi Birokrasi Internal
RKB	Ruang Kelas Baru
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPPNJP	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RSBI	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
S-1	Strata 1/Sarjana
S-2	Strata 2/Pascasarjana
S-3	Strata 3/Pascasarjana
SABMN	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	Sistem Akuntansi Keuangan
SAKIP	Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
SBI	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SEA SPF	<i>South East Asia School Principal Forum</i>
SEAMEO	<i>South East Asia Ministers Of Education Organization</i>
SEAMOLEC	<i>Southeast Asian Ministers Of Education Organization For Regional Open Learning Center</i>
SETJEN	<i>Sekretariat Jenderal</i>
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	Sekolah Luar Biasa
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMALB	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMP-LB	Sekolah Menengah Pertama - Luar Biasa
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TBM	Taman Bacaan Masyarakat
THES	<i>Times Higher Education Supplement</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	<i>Trends In International Mathematics And Science Study</i>

TK	Taman Kanak-Kanak
TLD	Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat)
TPSDP	<i>Technological And Professional Development Project</i>
TUK	Tempat Uji Kompetensi
TVE	Televisi Edukasi
UKBI	Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia
UKS	Usaha Kesehatan Sekolah
UN	Ujian Nasional
UPBJJ	Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh
UPT	Unit Pelaksana Teknis
USB	Unit Sekolah Baru
UUD	Undang-Undang Dasar
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 merupakan pemenuhan kewajiban dari mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2013 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Kemendikbud tahun 2010--2014. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 Kemendikbud yang telah diperjanjikan.

Renstra tahun 2010--2014 Kemendikbud menetapkan enam misi yaitu:

Misi Kemendikbud	
NO	MISI
1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
2	Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
4	Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
5	Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
6	Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia

Keenam misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian IKU Kemendikbud tahun 2013 adalah sebesar **108,24%**. Dari sebanyak 66 IKU Kemendikbud, sebanyak 36 IKU (55%) capaian kinerjanya memuaskan, 19 IKU (29%) capaian kinerjanya sangat baik, 5

IKU (8%) capaian kerjanya baik, 3 IKU (5%) capaian kerjanya cukup, dan 3 IKU (5%) capaian kerjanya kurang.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama tahun 2013.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	%
I	Capaian \geq 100%	Memuaskan	36	55%
II	85% \leq Capaian < 100%	Sangat Baik	19	29%
III	70% \leq Capaian < 85%	Baik	5	8%
IV	55% \leq Capaian < 70%	Cukup	3	5%
V	Capaian < 55%	Kurang	3	5%

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kemendikbud tahun 2013 adalah sebesar **87,12%**. Dari sebanyak 10 program Kemendikbud, sebanyak 5 (50%) program capaian kinerja keuangannya sangat baik, 5 (50%) program capaian kinerja keuangannya baik,

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan di sepuluh program Kemendikbud selama tahun 2013.

Urutan	Rentang Capaian daya serap anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program	%
I	Capaian \geq 100%	Memuaskan	-	-
II	85% \leq Capaian < 100%	Sangat Baik	5	50%
III	70% \leq Capaian < 85%	Baik	5	50%
IV	55% \leq Capaian < 70%	Cukup	-	-
V	Capaian < 55%	Kurang	-	-

Terhadap IKU belum mencapai target, dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan dan permasalahan yang dihadapi sehingga ke depan dilakukan langkah-langkah perbaikan sehingga target dapat tercapai. Selain menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2013, LAKIP Kemendikbud juga menyampaikan capaian kinerja lain yang berhasil dicapai berkaitan dengan program-program strategis yang dilaksanakan.

Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan di tahun 2013, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu segera diselesaikan, seperti implementasi kurikulum 2013, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasarana di daerah tertinggal, terdepan dan terpendek, banyaknya sarana dan prasarana sekolah yang rusak, rendahnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Kemendikbud antara lain program rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan berprestasi, pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan, program pengabdian sarjana pendidik untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, terpendek dan terdepan, program pendidikan universal, pemberian tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, dan pelestarian dan pengembangan budaya.

Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, semoga Kemendikbud dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara baik dan akuntabel, sehingga visi **“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Membentuk Insan Indonesia Yang Cerdas dan Beradab”** dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh konstitusi tersebut pada pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat (1), pasal 31 dan pasal 32 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Dengan amanat UUD 1945, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan, meliputi ketersediaan, memberikan layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah, karena pendidikan merupakan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Pembangunan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka peningkatan sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup tercapainya suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab secara harmonis dalam berkehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kemendikbud mempunyai fungsi, yaitu:

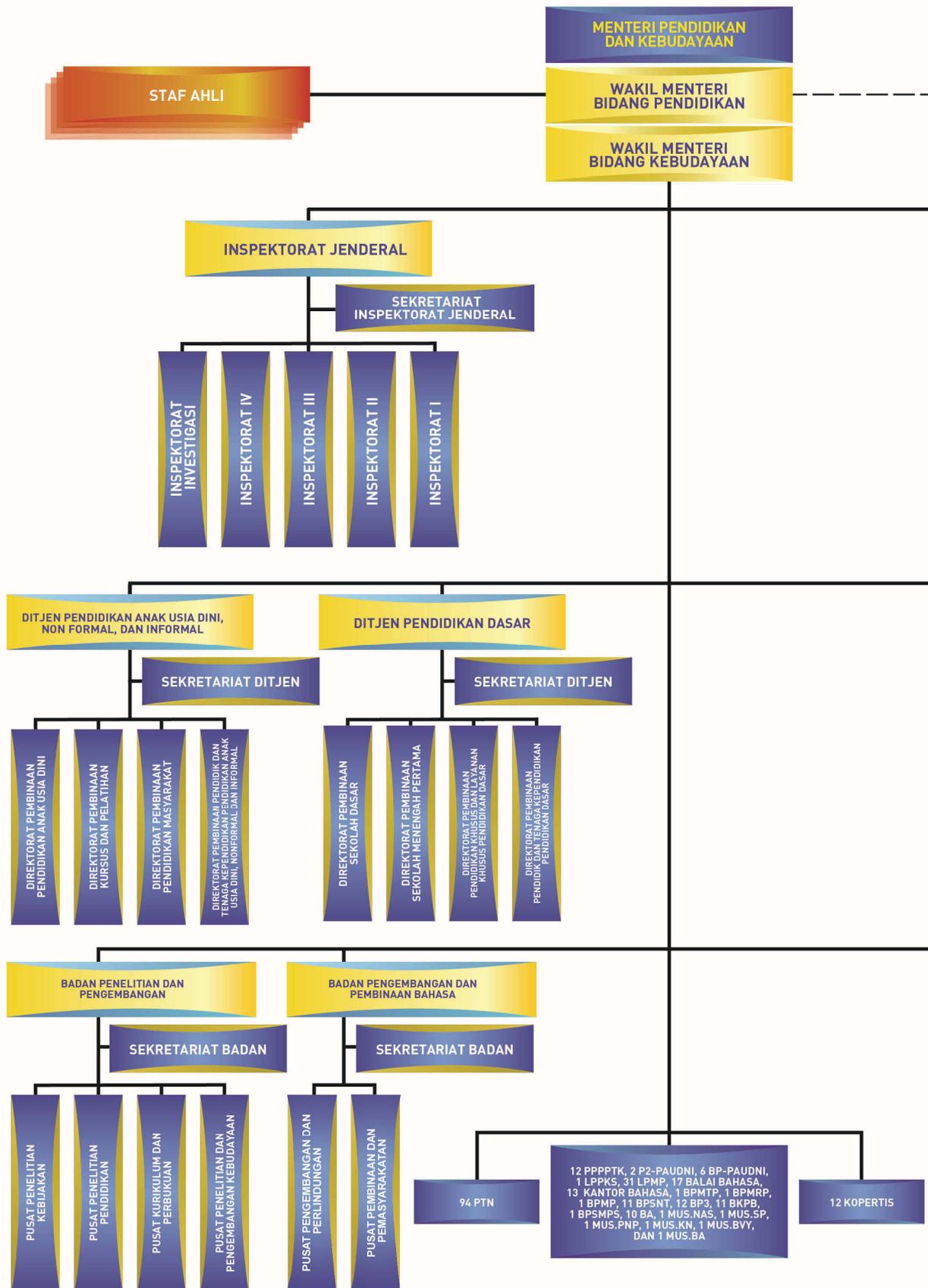
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

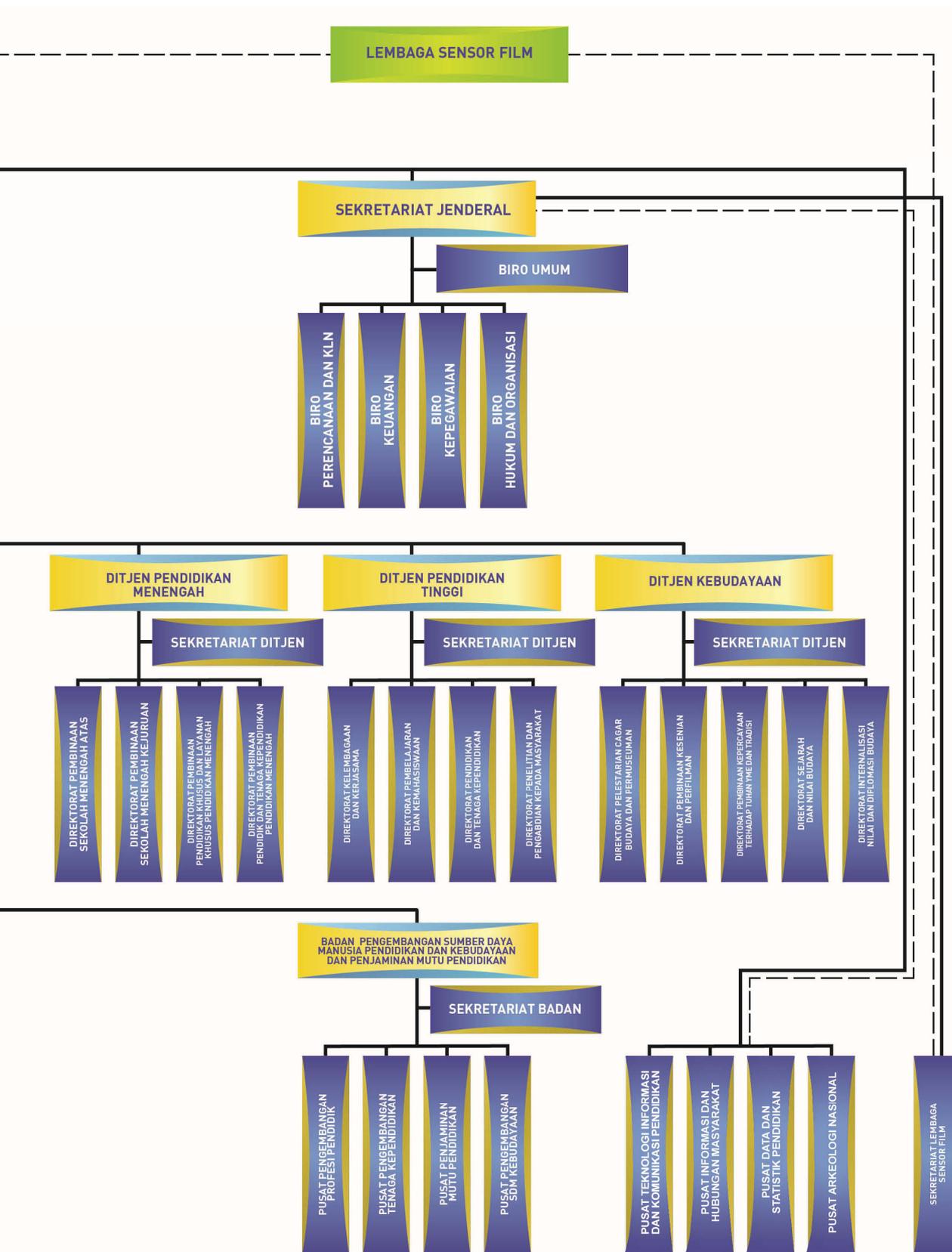
1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Penelitian dan Pengembangan
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
15. Staf Ahli Bidang Hukum
16. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan
17. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional
18. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
19. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi pendidikan.

Struktur organisasi Kemendikbud sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, digambarkan sebagai berikut:

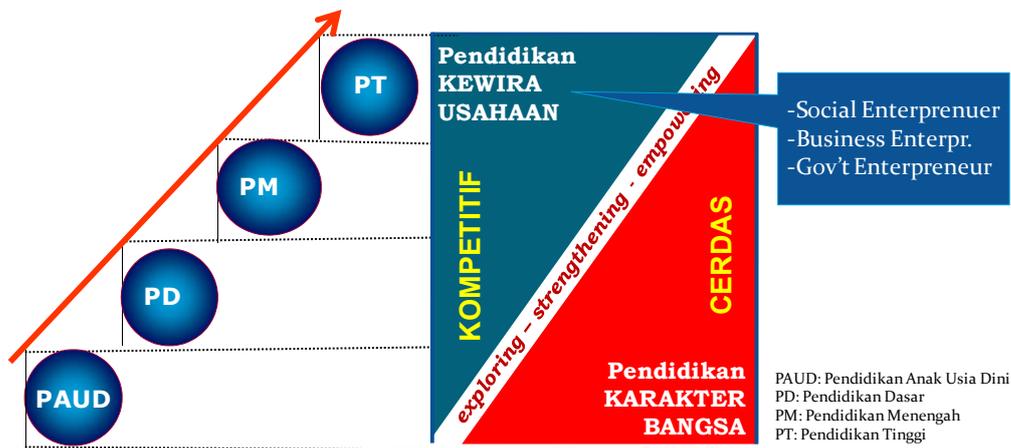


Bagan Struktur Organisasi Kemendikbud



Bagan Struktur Organisasi Kemendikbud

Mengacu pada Undang--Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010—2014, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005--2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025. Kemendikbud menjabarkan RPPNJP menjadi empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015--2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020--2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Dengan adanya pergeseran orientasi dari berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*), Kemendikbud telah merencanakan pembangunan pendidikan secara komprehensif dengan cara memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Ilustrasi pembangunan pendidikan secara komprehensif dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Rencana Pembangunan Pendidikan II (2010--2014) dengan fokus pada penguatan pelayanan telah memasuki tahun keempat. Beberapa capaian kinerja yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2013 antara lain seperti APK PAUD

Kemendikbud sebesar 68.10, APM SD/SDLB/Paket A sebesar 86.03%, APM SMP/SMLB/Paket B sebesar 65.10%, APK SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C sebesar 75.7%, APK PT dan PTA sebesar 29.87, menurunkan jumlah penduduk tuna aksara menjadi sebesar 4.03% dan masih banyak lagi. Meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan, namun masih banyak permasalahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang harus dihadapi dan diselesaikan di masa datang. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian tersebut diantaranya memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Education for All (EFA)* dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*, akuntabilitas pengelolaan di bidang keuangan (diperolehnya opini WTP dari BPK), dan akuntabilitas kinerja (diperolehnya predikat "A"), pendidikan karakter, penerapan kurikulum 2013, pelaksanaan Ujian Nasional pelestarian budaya, pemberian layanan pendidikan di daerah terpencil, perbatasan, terluar, daerah bencana, dan lain-lain.

Guna melanjutkan pembangunan pendidikan yang belum tercapai pada Rencana Pembangunan Pendidikan I (2005--2009) dan juga untuk merealisasikan Rencana Pembangunan II yang berfokus pada penguatan pelayanan, Kemendikbud telah menyusun rencana strategis 2010--2014. Layanan pendidikan yang difokuskan pada:

1. **tersedianya** pendidikan secara merata diseluruh pelosok nusantara, bahwa pendidikan harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah tanah air Indonesia dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
2. **terjangkaunya** pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat, bahwa pendidikan merupakan hak setiap warrga negara Indoneias oleh karena itu pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial maupun gender dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang terjangkau sampai pelosok negeri;
3. **berkualitas/bermutu dan relevan** pendidikan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri artinya pemerintah harus terus

mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan sesuai dengan dunia kerja;

4. **setara** bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan berkualitas, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama mendapatkan pendidikan berkualitas;
5. menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri, bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan kepastian bagi setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.

Sejalan dengan pemberian layanan dalam bidang pendidikan, Kemendikbud berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi yang dilakukan bertujuan agar setiap layanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih murah dan lebih cepat. Reformasi yang dilakukan Kemendikbud mencakup delapan area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (layanan satuan pendidikan, layanan peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan substansi pendidikan). Reformasi tersebut juga dirancang untuk dapat melaksanakan enam misi Kemendikbud yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan, kebahasaan dan kebudayaan dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.

Sejalan dengan reformasi birokrasi, Kemendikbud telah menetapkan zona bebas korupsi pada setiap unit kerja di lingkungan Kemendikbud, hal ini menandakan adanya kemauan Kemendikbud untuk melakukan pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan tanpa adanya pungutan biaya dalam memberikan layanan. Capaian kinerja Kemendikbud tahun 2014 tetap ditingkatkan semaksimal mungkin khususnya pada program-program kegiatan pemerintah yang perlu perhatian khusus.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA KEMENDIKBUD

A. PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun rencana pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan baik rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas Tahun 2005—2009. RPJMN Tahun 2010—2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010—2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014.

RPJMN Tahun 2010--2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya perekonomian. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010--2014, seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2010--2014 dalam penyusunannya telah mengacu pada RPJMN Tahun 2010--2014. Dalam perjalanannya Renstra Kemendikbud tahun 2010--2014 yang telah dilakukan beberapa kali reviu. Reviu dilakukan sebagai akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi seperti adanya perubahan organisasi. Reviu renstra bertujuan agar rumusan renstra menjadi lebih sempurna sehingga dapat dijadikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam menyusun renstra unit kerja secara baik.

1. Rencana Strategis

Renstra Kemendikbud mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Kemendikbud berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Didalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra Kemendikbud juga menjadi acuan bagi unit kerja eselon I, eselon II, Unit Kerja Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud dan SKPD pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

a. Visi, Misi, dan Tata Nilai

Visi yang ingin dicapai Kemendikbud pada tahun 2025 adalah **Menciptakan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)**.

Visi Kemendikbud ini lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan masyarakat dari keterbelakangan menuju kondisi masyarakat yang modern dan beradab.

Dari sisi hasil, visi Kemendikbud menekankan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konsep manusia seutuhnya itu meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Potensi yang dikembangkan mencakup tiga aspek paling elementer. Pertama, aspek afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kedua, aspek kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, serta menguasai teknologi. Ketiga, aspek psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis.

Terkait hal itu, maka pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan manusia secara komprehensif. Didalamnya mencakup pengembangan kecerdasan otak kiri yang lebih dikenal dengan kecerdasan intelektual (kemampuan kognitif), dan kecerdasan otak kanan yang akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan kecerdasan spiritual, sosial, emosional, estetis, dan kinestetis.

Pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik. Ini merupakan landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen *Education for All* (EFA) dari UNESCO.



Mendikbud sedang melakukan kunjungan kerja dalam rangka memastikan berjalannya program rehabilitasi sekolah di Kronjong-Tangerang

Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kreatif		
Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas Spriritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovasi dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas Emosional dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Aktualisasi insan adiraga. 	

Dalam periode perencanaan jangka menengah tahun 2010-2014, Kemendikbud menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2014, yaitu:

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia Yang Cerdas dan Beradab”

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang:

- a. **tersedia** secara merata di seluruh pelosok Nusantara;
- b. **terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
- c. **berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- d. **setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;
- e. menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- f. **melestarikan dan memperkuat** kebudayaan Indonesia.

Untuk mewujudkan visi yang akan dicapai, Kemendikbud menetapkan enam misi, yaitu:

Misi Kemendikbud	
NO	MISI
1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
2	Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
4	Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
5	Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
6	Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia

Kemendikbud menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010--2014, dari keenam tata nilai tersebut dipilih tata nilai yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kemendikbud, yaitu: **Melayani Semua Dengan Amanah.**

b. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010--2014

Untuk merealisasikan visi dan misi yang ditetapkan, Kemendikbud menetapkan tujuh tujuan strategis. Setiap tujuan strategis menaungi beberapa sasaran strategis yang akan dicapai dari tahun 2010--2014. Tujuan dan sasaran strategis tersebut disusun agar dapat memberikan gambaran atau ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi secara lebih jelas dan terukur.

Tujuan strategis Kemendikbud 2010--2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014. Dengan memperhatikan rumusan misi Kemendikbud tahun 2010--2014, ketujuh tujuan strategis yang disusun Kemendikbud tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut.

Tujuan Strategis Kemendikbud	
KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan
T2	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan
T3	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan
T4	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan
T5	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
T6	Terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat
T7	Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang

harus dicapai sampai dengan tahun 2014. Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran strategis untuk tujuan strategis T1

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1.1	APK PAUD Kemdikbud mencapai 72%.
S1.2	PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63%
S1.3	Sebanyak 15,00% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan
S1.4	Jumlah model dan program PAUD yang dikembangkan di tingkat regional sebanyak 145
S1.5	Sebanyak 20,00% lembaga dan program PAUD mendapatkan pemetaan mutu

Sasaran strategis untuk tujuan strategis T2

KODE	SASARAN STRATEGIS
S2.1	APM SD/SDLB/Paket A mencapai 83,57%
S2.2	Rasio kesetaraan jender SD/SDLB mencapai 98,00%
S2.3	Peserta didik SD/SDLB putus sekolah sebanyak 0,70%
S2.4	Lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan sebanyak 97%
S2.5	SD yang menerapkan e-pembelajaran mencapai 40%
S2.6	SD yang memiliki fasilitas internet mencapai 30%
S2.7	SD/SDLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 43,33%
S2.8	SD/SDLB yang berakreditasi mencapai 85%
S2.9	SD/SDLB yang memenuhi SPM mencapai 64%
S2.10	Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar sebanyak 191
S2.11	APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 79,53%
S2.12	APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 58,17%
S2.13	Rasio kesetaraan jender SMP/SMPLB mencapai 98%
S2.14	Peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah mencapai 1,00%
S2.15	Lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah mencapai 94%
S2.16	SMP yang menerapkan e-pembelajaran mencapai 60%
S2.17	SMP yang memiliki fasilitas internet mencapai 60%
S2.18	SMP/SMPLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 66,66%
S2.19	SMP/SMPLB yang berakreditasi mencapai 70,90%
S2.20	SMP/SMPLB yang memenuhi SPM mencapai 75%
S2.21	Guru SD/SDLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 82%

KODE	SASARAN STRATEGIS
S2.22	SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM mencapai 13%
S2.23	Rasio guru terhadap siswa SD mencapai 1:28
S2.24	Guru SMP/SMLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 98%
S2.25	SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM mencapai 13%
S2.26	Rasio guru terhadap siswa SMP mencapai 1:32
S2.27	Pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan mencapai 100%
S2.28	Kab/Kota yang memiliki tenaga kependidikan sesuai SPM mencapai 82%

Sasaran strategis untuk tujuan strategis T3

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.1	APK Nasional Kemdikbud SMA, SMK, SMLB dan Paket C mencapai 77,10%
S3.2	Meningkatkan persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 58,00% pada tahun 2014
S3.3	Meningkatkan persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP mencapai 75% pada tahun 2014
S3.4	Meningkatnya satker mendapat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pendidikan menengah mencapai 98%

Sasaran strategis untuk tujuan strategis T4

KODE	SASARAN STRATEGIS
S4.1	APK PT dan PTA Usia 19-23 tahun mencapai 30%
S4.2	Rasio kesetaraan gender PT mencapai 103,00%
S4.3	Jumlah perguruan tinggi PKBLU/BLU /PT BH mencapai 40 PT
S4.4	Jumlah perguruan tinggi beropini WTP dari KAP mencapai 30 PT
S4.5	Prodi yang terakreditasi mencapai 100%
S4.6	Prodi perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B mencapai 58%
S4.7	Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia mencapai 11 PT
S4.8	Rasio mhs vokasi : total mhs vokasi dan S-1 mencapai 30%
S4.9	APK prodi sains natural dan teknologi (Usia 19-23 Tahun) mencapai 10%
S4.10	Dosen yang berkualifikasi minimal S2 mencapai 70%
S4.11	Dosen yang berkualifikasi S-3 mencapai 15%
S4.12	Dosen yang bersertifikat mencapai 75%
S4.13	Jumlah dosen dengan publikasi nasional mencapai 5,70%
S4.14	Jumlah dosen dengan publikasi internasional mencapai 0,80%
S4.15	Jumlah HAKI yang dihasilkan mencapai 150
S4.16	Mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan mencapai 20%

Sasaran strategis untuk tujuan strategis T5

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.1	Sebanyak 19% anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan
S5.2	Sebanyak 60.000 peserta didik kursus dan pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi
S5.3	Sebanyak 20% lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B
S5.4	Penduduk buta aksara usia dewasa mencapai 3,83%
S5.5	Sebanyak 68% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan
S5.6	Sebanyak 50% kabupaten /kota telah menyelenggarakan <i>parenting education</i>
S5.7	PKBM bernomor induk lembaga mencapai 80,00%
S5.8	Sebanyak 69% kabupaten /kota telah memiliki minimal 10 TBM
S5.9	PTK nonformal dan informal yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63%
S5.10	Sebanyak 15% PTK nonformal dan informal memperoleh penghargaan dan perlindungan
S5.11	Jumlah model dan program nonformal dan informal yang dikembangkan di tingkat regional sebanyak 145
S5.12	Sebanyak 20% lembaga dan program nonformal dan informal mendapatkan pemetaan mutu

Sasaran strategis untuk tujuan strategis T6

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.1	Jumlah bahasa daerah di Indonesia teridentifikasi mencapai 634
S6.2	Jumlah guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional mencapai 17.572
S6.3	Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) bahasa Indonesia mencapai 12
S6.4	Jumlah provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mencapai 25
S6.5	Jumlah majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala mencapai 6
S6.6	Jumlah fasilitasi pembelajaran BIPA di luar negeri mencapai 50
S6.7	Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 9.470
S6.8	Jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi mencapai 5.000.000
S6.9	Sekolah yang difasilitasi sarana budaya sebanyak 3.200
S6.10	Jumlah fasilitasi film yang berkarakter sebanyak 45
S6.11	Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi sebanyak 600
S6.12	Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya mencapai 17.500.000

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.13	Jumlah rumah budaya di luar negeri mencapai 10
S6.14	Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan mencapai 40

Sasaran strategis untuk tujuan strategis T7

KODE	SASARAN STRATEGIS
S7.1	Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
S7.2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79
S7.3	Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya

Sasaran Strategis Gabungan

Selain sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuh tujuan strategis diatas, Kemendikbud juga menetapkan tiga sasaran strategis gabungan. Penetapan sasaran strategis gabungan bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) manusia Indonesia. Berikut ketiga sasaran strategis gabungan.

Sasaran strategis untuk tujuan strategis Gabungan

KODE	SASARAN STRATEGIS
SG.1	APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 85,5%.
SG.2	Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun.
SG.3	tingkat literasi nasional usia dewasa 96,17%.

c. Program dan Kegiatan Pendukung

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kemendikbud 2010--2014, sesuai dengan jumlah unit kerja eselon I-nya pada tahun 2013 Kemendikbud melaksanakan sepuluh program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Berikut sepuluh program yang dimiliki Kemendikbud.

Program Kemendikbud		
KODE	PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
P2	Program Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
P3	Program Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
P4	Program Pendidikan Tinggi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
P5	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P6	Program Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan
P7	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
P8	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
P9	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal
P10	Program Pelestarian Budaya	Direktorat Jenderal Kebudayaan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal merupakan program Kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian dua tujuan Kementerian, yaitu:

- a) Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan (T1)
- b) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (t5).

Dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, ditetapkan enam kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal maupun

UPT yang berada dibawah tanggung jawabnya. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal adalah:

- a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
- b) Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI
- c) Penyediaan Layanan PAUD
- d) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
- e) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
- f) Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

2) **Program Pendidikan Dasar**

Program Pendidikan Dasar merupakan program Kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Program ini dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan kedua (T2), yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan.

Program Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat Direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Kemendikbud menetapkan lima kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian program. Berikut adalah kegiatan-kegiatan pendukung untuk program pendidikan dasar.

- a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DITJEN DIKDAS
- b) Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD
- c) Penjaminan Kepastian Layanan pendidikan SMP
- d) Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB
- e) Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar.



3) Program Pendidikan Menengah

Program pendidikan menengah adalah program Kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan (T3).

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program pendidikan menengah, Kemendikbud menetapkan lima kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat yang ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pendidikan menengah adalah:

- a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Menengah
- b) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA
- c) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
- d) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB

- e) Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah.

4) **Program Pendidikan Tinggi**

Program pendidikan tinggi merupakan program Kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian keempat (T4), yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional, dan berkesetaraan.

Dalam upaya mencapai target setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program pendidikan tinggi, Kemendikbud menetapkan sembilan kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pendidikan tinggi adalah:

- a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- b) Layanan tridarma di perguruan tinggi
- c) Pengembangan relevansi dan efisiensi pendidikan tinggi
- d) Penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa
- e) Pengembangan mutu pendidikan politeknik
- f) Pengembangan mutu prodi profesi kesehatan dan pendidikan kesehatan
- g) Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu
- h) Penyediaan layanan kelembagaan dan kerja sama
- i) pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

5) **Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan**

Program pengembangan SDM pendidikan dan Kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan program Kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) maupun UPT yang berada dibawah tanggungjawabnya. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya empat tujuan strategis Kemendikbud, yaitu:

- a) Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan (T1)
- b) Terjaminnya layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan (T2)
- c) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan (T3)
- d) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program pendidikan pengembangan SDM pendidikan dan Kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan, Kemendikbud menetapkan enam kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat BPSDM dan PMP dan tiga pusat dibawah BPSDMP dan PMP. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengembangan SDM pendidikan dan Kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan adalah:

- a) Peningkatan layanan pengembangan pendidik untuk jenjang PAUDNI, DIKDAS, dan DIKMEN
- b) Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan
- c) Peningkatan layanan pengembangan tenaga kependidikan
- d) Peningkatan layanan pengembangan SDM Kebudayaan
- e) Peningkatan layanan DIKLAT pendidik dan tenaga kependidikan
- f) Peningkatan layanan pembinaan penjaminan mutu pendidikan
- g) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan PSDMPK dan PMP

6) Program Penelitian dan Pengembangan

Program penelitian dan pengembangan merupakan satu dari Sepuluh program Kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Penelitian dan Pengembangan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya lima tujuan strategis Kemendikbud, yaitu:

- a) tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan (T1)
- b) terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu (T2)

- c) tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan (T3)
- d) tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan (T4)
- e) tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Kemendikbud menetapkan empat kegiatan pendukung pada program penelitian dan pengembangan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Badan dan empat pusat di bawah BALITBANG. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan adalah:

- a. penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan;
- b. penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan ;
- c. penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan;
- d. penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan kebudayaan;
- e. fasilitasi standar mutu dan pelaksanaan akreditasi;
- f. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdikbud.

7) Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Program pengembangan dan pembinaan bahasa merupakan satu dari sepuluh program Kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kemendikbud keenam (T6), yaitu terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat.

Kemendikbud telah menetapkan tiga kegiatan pendukung pada program pengembangan dan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan dan dua Pusat eselon II dalam Badan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengembangan dan pembinaan bahasa adalah:

- a) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra
- b) pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra
- c) pembinaan bahasa dan sastra.

8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud merupakan program yang pelaksanaannya berada di Sekretariat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang ada di setiap unit utama dan mendukung tercapainya tujuan strategis ketujuh (T7) yaitu tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan priman pendidikan dan kebudayaan.

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kemendikbud, Kementerian menetapkan sepuluh kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro-Biro dan Pusat-Pusat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kemendikbud adalah:

- a) peningkatan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum kementerian;
- b) peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan bmn serta sarana dan prasarana kementerian;
- c) peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta kerja sama luar negeri;
- d) peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas;
- e) peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal;
- f) peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi;
- g) penyediaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- h) peningkatan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan;

- i) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendayagunaan e-pembelajaran dan e-administrasi;
- j) pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PJJ) di asia tenggara.

9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud merupakan program kementerian yang pelaksanaannya berada di Inspektorat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan (T7).

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran strategis dalam program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud, Kementerian menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan lima Inspektorat dalam Inspektorat Jenderal. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud.

- a) dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen;
- b) penguatan dan Pengawasan Inspektorat I, yang meliputi bidang PAUDNI, kebudayaan, Badan PP Bahasa beserta UPT, SKPD dan satuan pendidikan yang menerima APBN pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia;
- c) penguatan dan Pengawasan Inspektorat II, yang meliputi bidang DIKDAS, BALITBANG, beserta SKPD dan satuan pendidikan yang menerima APBN pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia;
- d) penguatan dan Pengawasan Inspektorat III, yang meliputi bidang DIKTI, PTN, PTS, Kopertis, Itjen;
- e) penguatan dan Pengawasan Inspektorat IV, yang meliputi bidang DIKMEN, Badan PSDMPK dan PMP, Setjen dan pusat-pusatnya beserta SKPD dan satuan pendidikan yang menerima APBN pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia;
- f) audit Investigasi.

10) Program Pelestarian Budaya

Program pelestarian budaya adalah program kemendikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis keenam (T6) yaitu terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat.

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran strategis program pelestarian budaya, Kementerian menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan lima Direktorat. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung program pelestarian budaya.

- a) pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b) pembinaan kesenian dan perfilman
- c) pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
- d) pengembangan sejarah dan nilai budaya;
- e) internalisasi nilai dan diplomasi budaya;
- f) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan;

2. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2014 seperti tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2010-2014, Kemendikbud telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berikut adalah rencana kinerja tahunan Kemendikbud tahun 2013 yang dikelompokkan ke dalam sepuluh program.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Meningkatnya APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemendikbud	61%
Anak Lulus SMP tidak Melanjutkan, Putus dan/atau Lulus Sekolah Menengah tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	17%
Meningkatnya Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi A dan B	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B	9%
Menurunnya penduduk Tuna Aksara Usia Dewasa	Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa	4,03%
Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah mengarustamaan Gender bidang pendidikan	Persentase Kab/Kota yang telah menerapkan pengarustamaan gender bidang pendidikan	61%

Program Pendidikan Dasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A	APM SD/ SDLB/Paket A	85,80%
Menurunnya peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,9%
Meningkatnya lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan	96%
Meningkatnya SD/SDLB yang berakreditasi	Persentase SD/SDLB yang berakreditasi	75%
Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Tingkat Pendidikan Dasar	Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar	185
Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B	APK SMP/SMPLB/Paket B	77,36%
Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B	APM SMP/SMPLB/Paket B	57,66%
Menurunnya Peserta Didik SMP/SMPLB yang Putus Sekolah	Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	1,2%
Meningkatnya Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	Persentase lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah	92%
Meningkatnya SMP/SMPLB yang memperoleh Berakreditasi	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi	58,5%
Meningkatnya Guru SD/SDLB dalam Jabatan yang Berkualifikasi Akademik S1/D4	Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4	55%
Terpenuhinya rasio Guru Terhadap Siswa SD	Rasio guru terhadap siswa SD	1:29
Meningkatnya Guru SMP/SMLB dalam Jabatan yang Berkualifikasi Akademik S1/D4	Persentase guru SMP/SMLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4	85%
Terpenuhinya rasio Guru terhadap Siswa SMP	Rasio guru terhadap siswa SMP	1:33
Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menerima Tunjangan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100

Program Pendidikan Menengah		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Meningkatnya APK Nasional SMA, SMK, SMLB, MA dan Paket C	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA Paket C	79,5%
	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/ Paket C	72%
Meningkatnya Persentase SMA/SMK/SMLB dan Paket C yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi Minimal B	Persentase SMA, SMK, SMLB DAN PAKET C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	57%
Meningkatnya Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP	Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP	70%

Program Pendidikan Tinggi		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Terwujudnya pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan	1 Persentase prodi yang terakreditasi	100%
	2 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	57,03%
	3 Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	8
	4 Persentase Dosen Berkualifikasi S2	65,5%
	5 Persentase Dosen Berkualifikasi S3	12,5%
	6 Persentase Dosen Bersertifikat	62,5%
	7 Persentase Dosen dengan Publikasi Nasional	5,5%
	8 Persentase Dosen dengan Publikasi Internasional	0,7%
Kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi	1 APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	29,10%
	2 APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	9%
	3 Ratio Kesetaraan Gender PT	103,2%
	4 Ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1	27%
	5 Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	18%
Terwujudnya perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel	1 Jumlah PK BLU/BLU (BHP)	35
	2 Jumlah PT beropini WTP dari KAP	26
Interaksi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan	Jumlah HKI yang Dihasilkan	130

Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Tersedianya guru yang profesional dan berkompeten	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	66,4%
	2. Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	47%
Meningkatnya mutu satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan	50%

Program Penelitian dan Pengembangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Meningkatnya kualitas kurikulum, sistem pembelajaran dan Perbukuan	Persentase penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan	100%
Meningkatnya Hasil penelitian untuk perumusan kebijakan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%
Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan	Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan	100%
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan yang Bermanfaat untuk Merumuskan Bahan Kebijakan dan Masyarakat Luas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%
Meningkatnya program/satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi	Persentase program/satuan pendidikan PNF, sekolah/madrasah, prodi dan institusi PT, LPTK yang di akreditasi	100%
	Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan	100%

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Terlindungnya bahasa daerah dari kepunahan	Jumlah Bahasa Daerah di Indonesia Teridentifikasi	619
Meningkatkan kemahiran berbahasa Indoensia	1 jumlah Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional	13,179
	2 Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) Bahasa Indonesia	7
Meningkatkan ketertiban penggunaan bahasa di ruang publik	Jumlah Provinsi Tertib dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	20

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Terwujudnya Opini Audit BPK RI atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1. Persentase satker tertib pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	95%
	2. Laporan keuangan unit-unit utama terintegrasi/terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel di lingkungan Kemendikbud	Skor LAKIP Kementerian	78
Realisasi Penyerapan Anggaran 100% setiap Tahunnya	1. Persentase anggaran yang tidak diblokir	98%
	2. Persentase realisasi anggaran Kementerian	97%

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Mengawal tercapainya Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	Persentase penyelesaian temuan audit	78,8%
Mengawal Implementasi Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1. Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta	9%
	2. Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja	100%
Meningkatkan Sinergitas antar aparat pengawasan pemerintah	Persentase satker di lingkungan Kemendikbud memiliki SPI	100%

Program Pelestarian Budaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
Terlestarikannya budaya Indonesia	1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	8470
	2. Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi	4,000,000
	3. Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan	20
	4. Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya	15.000.000

B. PERJANJIAN KINERJA

Kemendikbud menyusun perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK). PK tahun 2013 yang disusun mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2010--2014 dan RKT tahun 2013 dan anggaran yang disediakan. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis Kemendikbud yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Tingkat pencapaian penetapan kinerja tersebut diukur tingkat ketercapaiannya pada akhir periode. **Dokumen penetapan kinerja Kemendikbud tahun 2013 tercantum dalam lampiran laporan ini.**

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kemendikbud menetapkan sepuluh program yang akan dilaksanakan, masing-masing program dilaksanakan oleh unit kerja eselon I. Dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2013 Kemendikbud dialokasikan total pagu anggaran sebesar Rp 82.124.617.244.000.



Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ajang pertemuan tahunan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan



Penandatanganan Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas antara Mendikbud dengan Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENDIKBUD

Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2013, Kemendikbud berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2013. Selain menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran strategis Kementerian, dalam bab ini juga disajikan informasi kinerja bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya yang telah dicapai Kemendikbud selama tahun 2013.

A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kemendikbud menetapkan sepuluh program pembangunan pendidikan dan kebudayaan seperti tercantum dalam dokumen rencana strategis. Pengelompokan program pembangunan pendidikan disusun berdasarkan jenjang pendidikan, program pengembangan bahasa, pelestarian budaya dan dukungan manajemen. Program dukungan manajemen diperlukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan program-program yang telah akan dilaksanakan tersebut. Kesepuluh program Kemendikbud tersebut meliputi:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
2. Program Pendidikan Dasar;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Tinggi;

5. Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Program Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur;
10. Program Pelestarian Budaya.

Kemendikbud berkewajiban untuk merealisasikan setiap target kinerja dalam sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian target kinerja merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap program. Dengan tercapainya target kinerja tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi bagi tercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Kemendikbud selama tahun 2013 yang dikelompokkan di sepuluh program Kemendikbud.

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, dan INFORMAL

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas khususnya pada pendidikan usia dini, nonformal dan informal. Pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Keberhasilan program ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) Indonesia, *Education for All Global Monitoring Report (EFA GMR)*, dan EDI (*Education for All Development Index*)

Sebagai salah satu program Kemendikbud, program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal ini dilaksanakan untuk mendukung dua tujuan strategis, yaitu:

- a. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);
- b. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis dalam program PAUDNI, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Meningkatnya APK PAUD Kemendikbud

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian IKU “Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya APK PAUD Kemendikbud	APK PAUD Kemendikbud	37,81%	37,83%	100,05	61%	68.10%	111.64

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian “APK PAUD Kemdikbud” dapat direalisasikan sebesar 68,10% dari target tahun 2013 sebesar 61%, dengan persentase kinerja 111,64%. Dibandingkan tahun 2012 persentase kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 12,57%.

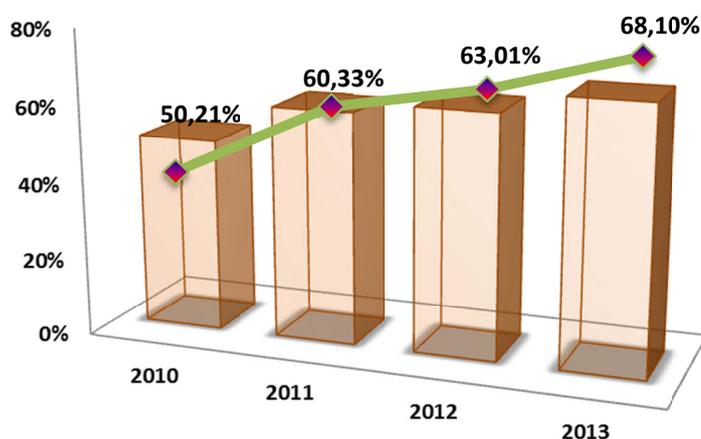
Keberhasilan melebihi target tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mengangkat bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kab/kota guna mensosialisasikan program PAUD, intervensi program seperti pemberian BOP PAUD dan program satu desa satu PAUD serta adanya perubahan



cara penghitungan APK PAUD, yang semula menghitung pembagiannya berdasarkan anak usia 0-6 tahun menjadi anak usia 3-6 tahun.

Perealisasi dari kedua komponen pendukung pencapaian target tersebut, dijelaskan bahwa 2013 dari target 45.000 lembaga untuk BOP terealisasi sebanyak 48.575 lembaga, dengan persentase capaian kinerja 107.9%, sedangkan program satu desa satu PAUD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2012 jumlah desa yang belum ada PAUD sebanyak 26.181 desa sedangkan pada tahun 2013 menjadi 23.727. Dengan demikian ada penambahan 2.454 desa.

Berikut grafik tren peningkatan angka partisipasi kasar anak usia dini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



Meskipun target tercapai, namun masih ditemukan sejumlah kendala atau hambatan antara lain dalam hal penurunan jumlah anggaran yang cukup signifikan dua tahun terakhir. Untuk itu beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan di masa datang adalah:

- 1) Masih disusunnya SPM (Standar Pelayanan Minimal) PAUD sehingga dapat mengikat daerah untuk lebih fokus dalam pengembangan PAUD di daerahnya, dengan memasukan PAUD dalam Renstrada;
- 2) Memperbanyak pelatihan di tingkat daerah dengan adanya DIKLAT berjenjang.
- 3) Pada tahun 2013 telah dimulai menyusun standar sarana dan prasarana untuk PAUD, terutama untuk alat permainan edukatif (APE).

b. Anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian IKU "Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan ". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

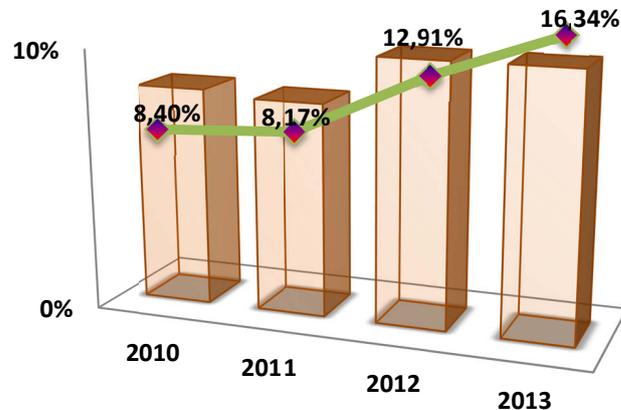
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan/ atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	15%	4,74%	31,6	17%	16.34%	96.12

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan" yang ditargetkan sebesar 17% atau sebanyak 255.000 orang dari 1,5 juta orang sasaran, hingga akhir Desember 2013, terealisasi sebesar 16,34% atau sebanyak 245.100 orang, dengan persentase kinerja 96,12%. Jumlah 245.100 orang merupakan kumulatif capaian tahun 2013 sebanyak 51.465 orang ditambah capaian tahun 2012 sebanyak 193.635 orang. Dibanding dengan tahun 2012 persentase kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan 10,03%.

Perealisasi target tahun 2013 tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program pemberian BOP pendidikan kecakapan hidup (PKH) sebanyak 29.470 orang dari target 29.000 orang, pemberian BOP pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) sebanyak 11.120 orang dari target 11.000 orang, dan pemberian BOP desa vokasi sebanyak 10.875 orang dari target 11.000 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Program	Rencana	Realisasi	%
1.	PKH	29.000 org	29.470 org	101.62
2.	PKM	11.000 org	11.120 org	101,09
3.	Desa Vokasi	11.000 org	10.875 org	98.86
	Jumlah	51.000 org	51.465 org	100.91

Berikut grafik tren penurunan anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus sekolah atau lulusan sekolah menengah tidak melanjutkan yang mendapatkan layanan pendidikan keterampilan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



Ketidaktercapaian target sasaran ini dikarenakan dukungan anggaran dari APBN yang disediakan untuk penyelenggaraan program hanya mampu melayani 51.000 orang dari 51.900 orang yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun berdasarkan sasaran kinerja tahunan, dari 51.000 orang tersebut dapat tercapai sebanyak 51.465 orang, melebihi penetapan kinerja sebagaimana ditetapkan.



Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah berusaha mengantisipasi masalah ini dengan mengusulkan untuk merevisi target sasaran renstra, dengan

menyesuaikan jumlah target sasaran sesuai dengan anggaran yang tersedia dan memperkecil *unit cost* untuk penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, dan Program Desa Vokasi agar sasaran yang dilayani mendekati jumlah yang ditargetkan, namun mengingat keterbatasan dukungan anggaran, target rencana strategis yang telah ditetapkan tetap tidak tercapai.

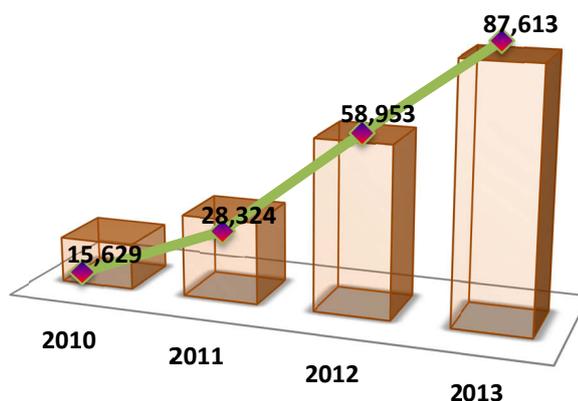
c. meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian IKU "Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B ". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B	10%	8,64%	8,64	9%	11.75%	130.56

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B" yang ditargetkan sebesar 9% atau 616 lembaga, hingga akhir Desember 2013, terealisasi sebesar 11,75% atau 633 lembaga, dengan persentase kinerja sebesar 130.56%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2012, capaian kinerja tahun 2013 meningkat sebesar 44,16%.

Berikut tren kenaikan jumlah peserta didik kursus dan pelatihan memperoleh sertifikasi kompetensi selama empat tahun terakhir.



Keberhasilan IKU ini diperoleh Ditjen PAUDNI melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dengan mendorong lembaga kursus dan

pelatihan yang berkinerja C dan D untuk meningkatkan mutu manajemen penyelenggaraan lembaga melalui program revitalisasi sarana kursus dan pelatihan serta pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP), sehingga menjadi lembaga yang berkinerja A dan B. Selain intervensi program di atas, keberhasilan IKU ini diperoleh dari sinergitas dengan 8 UPT (P2PAUDNI dan BPPAUDNI) yang juga ikut mendorong lembaga yang berkinerja C dan D untuk selalu meningkatkan kinerja, melalui kegiatan pemetaan dan pembinaan mutu manajemen lembaga.

Berdasarkan tren capaian tersebut di atas, terlihat setiap tahunnya meningkat, namun target rencana strategis yang telah ditetapkan tetap belum tercapai.

d. Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian dua IKU Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa. Adapun tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa	Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa	4,23%	4,21%	100,47	4,03%	4,03%	100

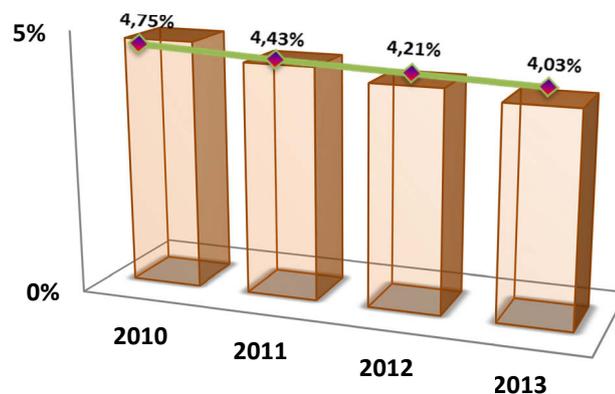
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa" pada tahun 2013 telah berhasil dicapai, hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2012 Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah mampu menurunkan angka penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun menjadi 4,21% melebihi target yang ditetapkan 4,23% dan pada tahun 2013 juga berhasil menurunkan kembali menjadi 4,03% sesuai dengan target yang ditetapkan 4,03% dengan persentase kinerja 100%.

Penurunan angka tuna aksara tersebut merupakan kumulasi capaian tahun 2012, di mana jumlah tuna aksara usia 15-59 tahun adalah sebesar 4,21% atau sebanyak 6.401.522 orang, kemudian pada tahun 2013 target yang dibelajarkan sebanyak 273.700

orang, sehingga jumlah penduduk tuna aksara menurun dari 6.401.522 orang tahun 2012 menjadi 6.127.822 orang atau 4,03% tahun 2013.

Capaian angka penurunan tuna aksara sebanyak 273.700 orang diperoleh melalui dukungan APBN dan APBD sebagai berikut: 1) APBN sebanyak 198.790 orang yaitu, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membelajarkan sebanyak 188.320 orang (termasuk 55.000 KD Layanan Khusus) dan Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal membelajarkan sebanyak 10.470 orang di 18 kabupaten; 2) APBD I di provinsi sebanyak 66.890 orang, yaitu: Jawa Barat 25.000 orang, Jawa Timur 13.000, Bali 2.500 orang, Nusa Tenggara Barat 10.000 orang, Sulawesi Selatan 12.390 orang, Sulawesi Barat 4.000 orang; dan 3) APBD II sebanyak 8.020 orang, yaitu: di Kab. Paliwali Mandar 4.000 orang, Kab. Sampang 2.000 orang, Kab. Situbondo 1.020 orang, Kota Serang 250 orang, Kab. Serang 60 orang, Kab. Lebak 690 orang).

Berikut grafik tren penurunan penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan:

1) Keaksaraan Dasar (KD)

Suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan penduduk tuna aksara menjadi melek aksara sehingga dapat membaca-menulis-berhitung secara sederhana.

2) Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Hasil penuntasan tuna aksara melalui keaksaraan dasar ditindaklanjuti dengan upaya pemeliharaan keberaksaraan melalui KUM. Prinsip dari pembelajaran KUM adalah meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan melatih berbagai keterampilan

bermatapencarian. Pada tahun 2013 dengan dana APBN telah dibelajarkan melalui KUM sebanyak 141.020 orang. Sehingga sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 telah dibelajarkan melalui KUM sebanyak 1.476.996 orang atau 17,76% dari 8.318.605 pemegang SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara). Ini artinya bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah mampu mencapai target menurunkan persentase penduduk usia 15-59 tahun pemegang SUKMA mengikuti KUM 17,76% dari 17,50%.

3) Keaksaraan Dasar Layanan Khusus (KD-LK)

Keaksaraan Dasar Layanan Khusus pada prinsipnya sama dengan Keaksaraan Dasar poin 1 di atas, namun memiliki kekhususan untuk masyarakat 3T (Terluar, Terpencil dan Tertinggal)



Peserta program pendidikan keaksaraan sedang mengikuti pembelajaran

dan daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu seperti Papua dan NTT. Pada tahun 2013 KD-LK telah membelajarkan 55.000 orang dari target 55.000 orang atau kinerja mencapai 100%.

4) KUM Layanan Khusus

Keaksaraan Usaha Mandiri Layanan Khusus (KUM-LK) pada prinsipnya sama dengan Keaksaraan Usaha Mandiri poin 2 di atas, namun memiliki kekhususan untuk masyarakat 3T (Terluar, Terpencil dan Tertinggal) dan daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencarian yang dapat meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik secara individu maupun kelompok. Pada tahun 2013 KUM-LK telah membelajarkan 3.000 orang dari target 3.000 orang atau kinerja mencapai 100%.

5) Pendidikan Karakter Satuan PNF

Pendidikan karakter melalui satuan PNF merupakan pendidikan karakter yang diselenggarakan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat dengan mengenalkan 8 nilai dari 18 nilai pendidikan karakter. kedelapan nilai tersebut adalah: (1) religius, (2) toleransi, (3) tanggung jawab dan disiplin, (4) kreatif, (5) kerja keras, (6) jujur dan adil, (7) Bhineka Tunggal Ika, dan (8) Cinta Tanah Air. Pendidikan karakter ini diharapkan mampu menyadarkan para warga belajar untuk selalu belajar dan belajar khususnya bagi warga belajar pendidikan keaksaraan dasar. Dari target 60 lembaga tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 60 lembaga atau capaian kinerja 100%.

6) Peningkatan Budaya Tulis melalui koran Ibu, koran anak, dan cerita rakyat

Peningkatan Budaya Tulis melalui koran Ibu, koran anak, dan cerita rakyat merupakan afirmasi pelatihan jurnalis kepada peserta didik perempuan (koran ibu) dan anak-anak (koran anak) dalam rangka memberikan penguatan keberaksaraan sekaligus sebagai media informasi, komunikasi, dan pembelajaran teknologi. Program ini sebagai upaya untuk mencegah tuna aksara kembali.

7) Kecakapan Hidup Perempuan

Kecakapan Hidup Perempuan merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar kecakapan sosial, personal, akademik, dan keterampilan kepada perempuan dewasa yang berkeaksaraan rendah.

8) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Taman Bacaan Masyarakat merupakan sarana bagi masyarakat untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kemampuan keberaksaraan warga belajar keaksaraan sebagai upaya untuk mencegah tuna aksara kembali. Pada tahun 2013 program ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 59% dari target 59%.

Selain itu, untuk mendukung ketercapaian sasaran juga melaksanakan komponen walaupun tidak langsung menurunkan angka tuna aksara tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap penurunan tingkat buta aksara, yaitu: 1) Orientasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan, 2) Hari Aksara Internasional, 3) peningkatan kapasitas tutor keaksaraan, dan (4) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan.

Meskipun target IKU yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam usaha menurunkan penduduk tuna aksara, masih ditemui beberapa hambatan dan kendala, di antaranya adalah lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan kesulitan membentuk kelompok belajar pendidikan keaksaraan dengan jumlah warga belajar sepuluh orang karena faktor kondisi geografis dan jarak tempat tinggal yang berjauhan.

Langkah antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 tetap tercapai adalah dengan mengelompokkan sasaran yang akan digarap tidak harus dengan jumlah sepuluh orang terutama afirmasi khusus kepada daerah-daerah 3T dan daerah prioritas lainnya.

e. Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang telah Mengarus-utamakan Gender Bidang Pendidikan

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU "Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah mengarusutamakan Gender bidang pendidikan	Persentase Kab/Kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	54%	57.34%	117,7	61%	64.78%	106,2

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan" telah berhasil dicapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah mampu mendorong kabupaten/kota untuk menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan mencapai angka 57,34% atau 285 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sedangkan target yang ditetapkan tahun 2013 sebesar 61.00%, telah tercapai 64,78% atau 322 kab/kota dari 497

kab/kota. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dilakukan melalui pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota kepada kabupaten/kota yang belum menerapkan PUG bidang pendidikan, yang berjumlah 37 kabupaten/kota, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan 100%. Atas pelaksanaan kegiatan ini, Kemdikbud melalui Ditjen PAUDNI mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden Republik Indonesia mulai tahun 2010 hingga 2013.

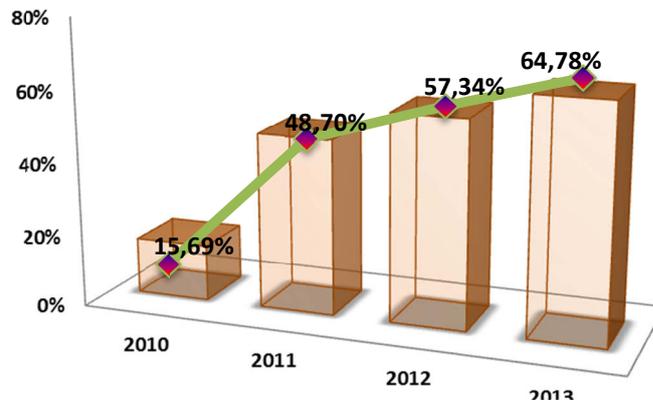
Keberhasilan pencapaian target IKU ini diperoleh melalui:

- 1) Pemberian bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan diprioritaskan kepada kabupaten yang belum memiliki Pokja PUG Bidang Pendidikan;
- 2) Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi yang menerima bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi diberi kewajiban untuk membentuk dan/atau membina paling sedikit 2 (dua) Pokja PUG Bidang Kab/Kota di wilayahnya; dan
- 3) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi maupun Kab/kota.

Upaya pendukung lainnya yang dilakukan adalah:

- 1) Pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi kepada 23 Provinsi,
- 2) Pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Pusat Studi Gender/Wanita kepada 5 perguruan tinggi,
- 3) Bantuan pendidikan keluarga berwawasan gender kepada 90 lembaga.
- 4) Komponen pendukung lain melalui kegiatan-kegiatan: (a) orientasi lembaga penyelenggara pendidikan keluarga berwawasan gender, (b) Pertemuan Koordinasi PUG Bidang Pendidikan Lintas Sektor, (c) Pendampingan/bimbingan teknis PUG bidang pendidikan, (d) Penggadaan Bahan Sosialisasi PUG, dan (e) Semiloka Peningkatan Kapasitas dan Mutu Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan.

Berikut tren grafik persentase kab/Kota yang telah menerapkan pengarus-utamaan gender bidang pendidikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Program pendidikan dasar diarahkan untuk mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan dasar yang semakin luas tanpa adanya diskriminasi serta terus menerus melakukan peningkatan kualitas layanan pendidikan tingkat dasar.



Mendikbud berkunjung ke salah satu sekolah dasar untuk memastikan apakah sudah mendapatkan layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan

Program pendidikan dasar yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kemendikbud yang kedua yaitu

terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pendidikan dasar. Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja.

a. Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja "APM SD/SDLB/Paket A". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A	APM SD/SDLB/Paket A	83,29%	85,77%	102,97	85,80%	86,03%	100,2

Realisasi APM SD/SDLB/Paket A mencapai 86,03% melampaui target tahun 2013 yang telah ditetapkan yaitu 85.80%. Persentase capaian kinerja IKU ini adalah 100,2%. Berdasarkan data BPS tahun 2012 jumlah anak usia 7-12 tahun 26.040.407 sedangkan anak yang sekolah di SD/SDLB berjumlah 22.402.327 siswa (data Dapodik tahun 2013). Untuk tahun 2013 APM SD/SDLB/MI/Paket A telah mencapai 98%.

Ketercapaian target indikator kinerja ini didukung oleh capaian keluaran yang berupa penambahan ruang kelas baru SD/SDLB sebanyak 2.347 ruang, retrieval siswa SD di 98 sekolah, Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 11.832.532 siswa,

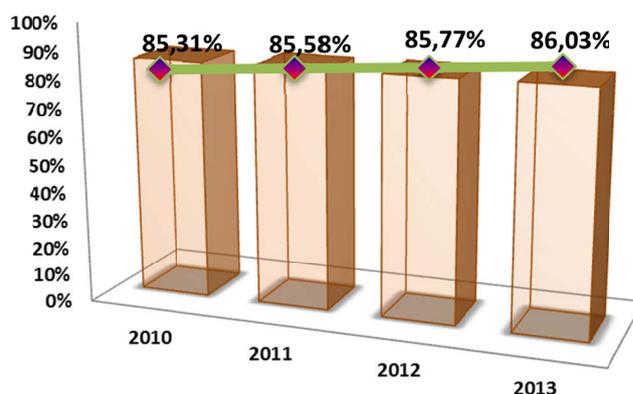


rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 8.146 ruang kelas dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah. Dengan mengoptimalkan berfungsinya RKB yang dibangun maka

daya tampung SD/SDLB bertambah sekitar 70.410 siswa. Dengan berjalannya program tersebut akan memperkuat pencapaian target tersebut sehingga peningkatan APM menjadi signifikan.

Namun demikian di beberapa kabupaten/kota masih menyisakan berbagai kendala dalam pencapaian sasaran strategis yang diantaranya disebabkan oleh faktor sosial dan budaya yang melekat di masyarakat, seperti adanya beberapa anak yang berusia 7-12 tahun namun tidak mau masuk sekolah dengan alasan bekerja membantu bekerja orang tua dengan alasan ekonomi terutama di daerah pesisir dan pemukiman nelayan, bahkan di kota besar.

Berikut tren peningkatan angka partisipasi murni SD/SDLB/Paket A dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan APM SD/SDLB/Paket A masih terkendala oleh adanya beberapa kabupaten dengan capaian APM di bawah 75% sebanyak 21 kabupaten. Karakteristik wilayah dengan APM rendah tersebut adalah daerah perbatasan antar negara, daerah kepulauan dan daerah terpencil;
- 2) Faktor siswa SD yang berada di luar lingkaran umur 7-12 tahun cukup tinggi. Terutama pada penerimaan siswa baru di kalangan SD Swasta. Pada umumnya sekolah swasta tidak menolak calon siswa yang umurnya belum mencapai 7 tahun. Jumlah siswa SD/SDLB usia 7-12 tahun sebanyak 22.376.462 selebihnya sekitar 4.459.000 siswa (16,6%) adalah di luar usia tersebut. Sementara itu pada daerah 3T, anak

berkebutuhan khusus, dan SDLB terdapat siswa yang usianya di atas 12 tahun. Hal ini memberikan kontribusi negatif terhadap pencapaian APM SD/SDLB.

Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Penyediaan ruang kelas baru sebagai program prioritas;
- 2) Meningkatkan intervensi untuk kabupaten yang tingkat capaiannya masih di bawah 75% melalui upaya peningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan antara lain ruang kelas baru dan pengembangan sekolah inklusi;
- 3) Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 4) Mendorong PEMDA untuk pemenuhan SPM dikdas sebagai program prioritas.

b. Menurunnya peserta didik SD/SDLB putus sekolah.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Menurunnya peserta didik SD/SDLB Putus Sekolah	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	1,1%	0,33%	333,33	0,9%	0,47%	191,5

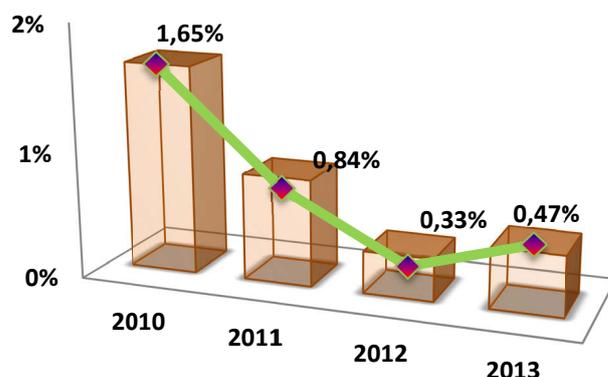
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah" pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaiannya melampaui target. Pencapaian indikator ini adalah 0,47% dari target yang ditetapkan sebesar 0,9%, dengan persentase capaian sebesar 191,5%. Capaian kinerja ini didukung oleh realisasi output siswa SD menerima bantuan paket belajar dan SD menyelenggarakan program retrieval dan remedial.

Siswa SD putus sekolah tahun 2012/2013 sejumlah 125.891 atau 0,47%. Pelaksanaan program retrieval remedial kepada 1.750 siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa Siswa Miskin. Program-program tersebut bertujuan agar peserta didik yang putus sekolah dapat kembali bersekolah.

Masih adanya peserta didik SD/SDLB putus sekolah karena diakibatkan adanya faktor sosial dan budaya di masyarakat, seperti adanya beberapa siswa SD yang tidak

mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua.

Berikut grafik tren persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



c. Meningkatkan lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja "Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

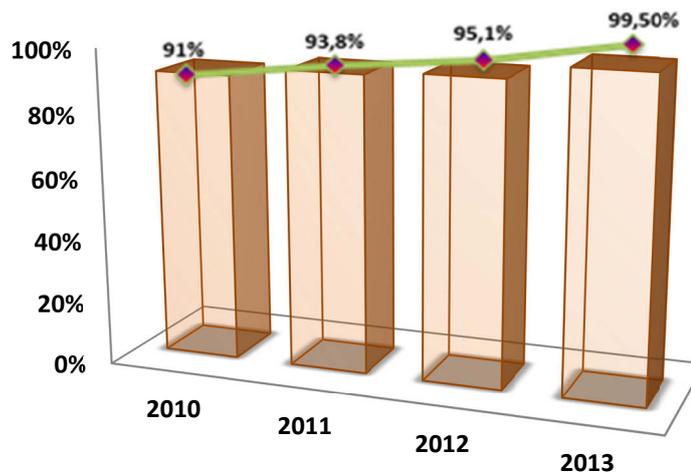
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan	Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan	94,2%	95,10%	101	96%	99,5%	103,65

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan" pada tahun 2013 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 96% telah dapat terealisasi sebesar 99.5% dengan persentase capaian sebesar 103.65%. Jumlah lulusan sekolah dasar sebesar 4.090.219 siswa dengan tingkat kelulusan 99,29%. Sementara itu jumlah siswa yang tertampung di kelas I SMP sebanyak 3.345.075 siswa. Dengan demikian sebanyak 745.144 siswa tidak tertampung di SMP. Hal ini disebabkan antara lain oleh ketersediaan ruang kelas baru SMP tahun 2013 sebanyak 1.540 ruang dengan daya tampung sekitar 55.440 siswa baru.

Selain pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas untuk

menampung lulusan SD/SDLB, pada tahun 2014 Kebijakan lain yang dijalankan pemerintah dalam mengapai wajib belajar sembilan tahun adalah sekolah menengah pertama negeri dan sederajat tidak boleh menyelenggarakan tes seleksi untuk menerima lulusan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Syarat penerimaan murid di SMP dan MTs berdasarkan pada hasil ujian sekolah dan nilai rapor, pertimbangan kewilayahan.

Berikut grafik tren persentase peserta didik SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



d. Meningkatnya SD/SDLB yang berakreditasi.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas dilihat melalui IKU “persentase SD/SDLB berakreditasi”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya SD/SDLB yang berakreditasi	Persentase SD/SDLB yang berakreditasi	64%	64,5%	101	75%	73,83%	98,44

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “persentase SD/SDLB berakreditasi” ketercapaian IKU ini pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar 75% SD/SDLB yang berakreditasi baru terealisasi sebesar 73,83%, dengan persentase capaian sebesar 98,44. Dari sebanyak 148.176 sekolah yang ditargetkan hanya sebanyak 109.399 sekolah yang memperoleh akreditasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis “meningkatnya SD/SDLB yang berakreditasi” di atas diantaranya adalah:

- 1) Belum terpenuhi sarana prasarana di sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 2) Belum terpenuhinya ketenagaan yang sesuai persyaratan, dan
- 3) Belum terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sekolah SD/SDLB memperoleh akreditasi, langkah yang dilakukan ke depan dalam meningkatkan sekolah SD/SDLB/ adalah dengan terus memberikan bantuan maupun pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang



belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan agar dapat memenuhi delapan standar pendidikan tersebut sebagai syarat memperoleh akreditasi.

e. Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas dilihat melalui IKU “Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar	Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar	178	203	114,04	185	61	32,97

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “nilai total tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar” ketercapaian IKU ini pada tahun 2013 mengalami penurunan. Dari sebanyak 185 medali yang ditargetkan untuk diperoleh, baru sebanyak 61 medali yang diperoleh, dengan persentase capaian sebesar 32,97%.

Turunnya perolehan medali dari kompetensi internasional pada tingkat pendidikan dasar dikarenakan jumlah penyelenggaraan olimpiade tingkat internasional berkurang.

Adapun kompetisi yang diikuti selama tahun 2013 sebanyak 10 even tingkat internasional maupun nasional. Jenis lomba yang dikompetisikan dan difestivalkan meliputi bidang sains, olahraga dan seni. Prestasi yang dicapai digambarkan dalam peroleh medali, sebagai berikut:

Berikut tabel rincian peroleh medali tingkat nasional tingkat sekolah dasar.

No	Jenis Lomba	Medali			Total	Nilai Tertimbang
		Emas	Perak	Perunggu		
1.	OSN	20	40	60	120	200
2.	O2SN	30	30	39	99	189
3.	FLS2N	13	8	8	29	63
4.	CIPTA SENI	4	4	4	12	24
5.	LPIR	9	15	21	45	78
Total Jenis Medali		76	97	132	305	554

Berikut tabel rincian peroleh medali tingkat nasional tingkat sekolah menengah pertama.

No	Jenis Lomba	Medali			Total	Nilai Tertimbang
		Emas	Perak	Perunggu		
1.	IJSO	2	2	6	10	16
2.	IMO	0	2	3	5	7
Total Jenis Medali		2	2	9	15	23

Sementara itu untuk lomba di jenjang SMP total nilai tertimbang adalah 554 dari target yang sebanyak 178. Adapun kompetisi yang diikuti selama tahun 2013 sebanyak 7 even tingkat internasional maupun nasional. Berbagai jenis lomba dan prestasi yang diperoleh digambarkan dalam peroleh medali, sebagai berikut:

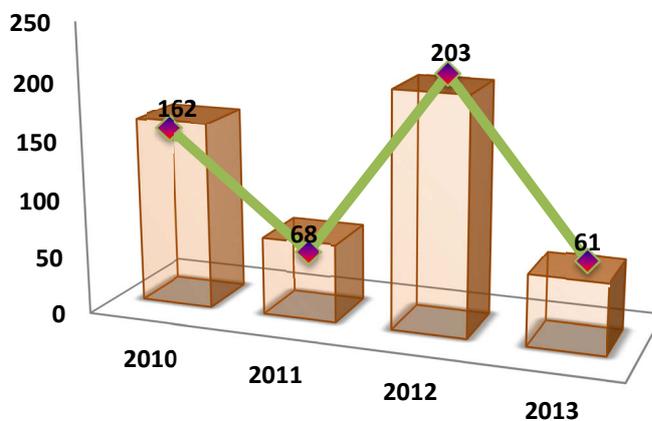
Berikut tabel rincian peroleh medali dari kompetensi internasional tingkat sekolah menengah pertama.

No	Jenis Lomba	Medali			Total	Nilai Tertimbang
		Emas	Perak	Perunggu		
1.	IJSO	2	2	6	10 Medali	16
2.	IMO	0	2	3	5 Medali	7
Total Jenis Medali		2	2	9	15 Medali	23

Berikut tabel rincian peroleh medali dari kompetensi internasional tingkat sekolah dasar.

No	Jenis Lomba	Medali			Total	Nilai Tertimbang
		Emas	Perak	Perunggu		
1.	Bulgari international Mathematics Competition					
	A. Individu	2	5	3	10 Medali	19
	B. Team	1	1	1	3 Medali	6
	C. Group	1	2	0	3 Medali	7
2.	Malaysia Mathematics Competition For Primary School	0	2	4	6 Medali	8
3.	Singapore International Mathematics Contest	2	6	3	11 Medali	21
Total Jenis Medali		6	16	11	33 Medali	61

Berikut grafik perolehan nilai total tertimbang medali dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.



f. Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui IKU "APK SMP/SMPLB/Paket B". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B	APK SMP/SMPLB/PAKET B	75,69%	76,47%	101,03	77,36%	77,58%	101

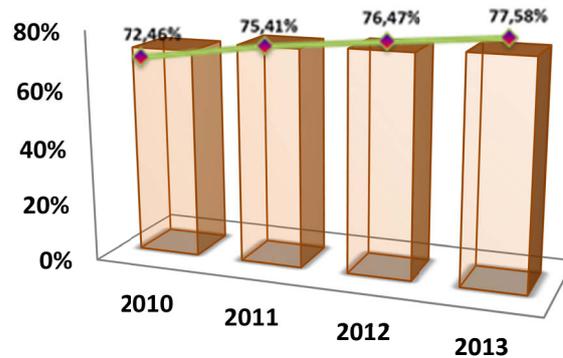
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "APK SMP/SMPLB/Paket B" pada tahun 2013 melampaui target sebesar 0,23% dengan capaian kinerja 101%. Dimana target yang ditetapkan sebesar 77,36% telah terealisasi sebesar 77,58%. Sebagaimana tahun 2012, jika capaian APK tahun 2013 dihitung berdasarkan jumlah siswa SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan Salafiah maka akan diperoleh capaian APK sebesar 100,16%. Pada tahun 2012 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 99,47%.

Peningkatan APK ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah siswa paket B dan realisasi sejumlah output yang menunjang meningkatnya daya tampung siswa, antara lain pembangunan 190 USB SMP, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 1.124 ruang, rehabilitasi sebanyak 1.735 ruang, pembangunan RKB SMP sebanyak 1.124 ruang, bantuan siswa miskin kepada sebanyak 3.950.328 siswa, pemberian bantuan BOS kepada 9.643.957 siswa, pembangunan 150 SD-SMP Satu Atap dan penyelenggaraan beasiswa operasional SMP untuk 148.529 siswa serta pemberian subsidi penyelenggaraan Paket B sebanyak 172.559.



Unit Sekolah Baru SD dan SMP Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu, Malaysia

Berikut grafik tren peningkatan angka partisipasi kasar siswa SMP/SMPLB/MTs Paket B selama empat tahun terakhir.



g. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B

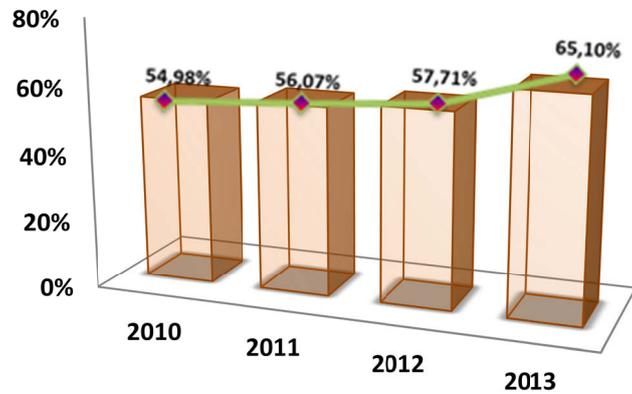
Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui IKU "APM SMP/SMPLB/Paket B". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B	APM SMP/SMPLB/PAKET B	57,13%	57,71%	101,02	57,66%	65,10%	112,9

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "APM SMP/SMPLB/Paket B" pada tahun 2013 melampaui target yaitu sebesar 65,10%. Namun sebagaimana capaian tahun 2012 jika APK tersebut dihitung termasuk MTs dan Salafiah maka capaian tahun 2013 adalah 78,43%. Pada tahun 2012 APK APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 77,71%.

Untuk memastikan bahwa indikator kinerja ini tercapai telah dilakukan intervensi yang dilakukan dalam meningkatkan APK, antara lain melalui pemberian bantuan siswa miskin sebanyak 4.214.880 siswa, bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 9.643.957 siswa, pembangunan USB 190 unit, penambahan ruang kelas baru 1.124 ruang, pembangunan SD-SMP satu atap sebanyak 150 sekolah, pembangunan SMP berbasis pondok pesantren sebanyak 182 sekolah, pemberian beasiswa bakat dan prestasi kepada sebanyak 30.000 siswa.

Berikut grafik tren peningkatan angka partisipasi murni siswa SMP/SMPLB/MTs Paket B selama empat tahun terakhir.



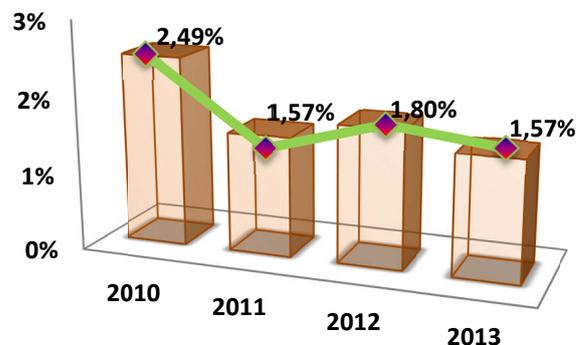
h. Menurunnya peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui IKU "persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Menurunnya peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah	Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	1,4%	0,4%	285,7	1,2%	1,57%	69,17

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah" pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 1,2% baru dapat tercapai sebesar 1,23%, dengan persentase capaian sebesar 69,17%. Penurunan tersebut didukung oleh antara lain : adanya peningkatan sasaran Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP sebanyak 4.214.880 siswa, pemberian beasiswa SMP Terbuka sebanyak 148.529 siswa.

Berikut tren penurunan siswa SMP/SMPLB yang putus sekolah selama empat tahun terakhir.



i. Meningkatnya lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU "Persentase lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

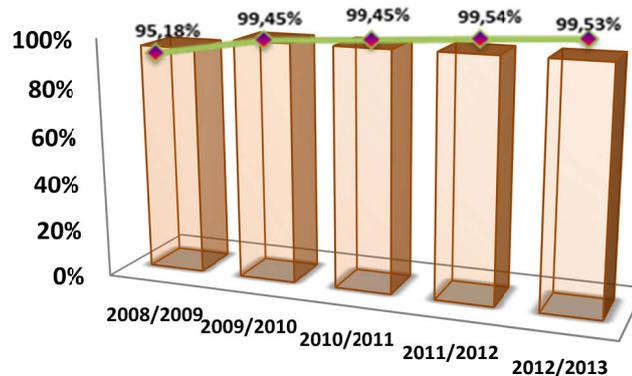
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah	Persentase lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah	90%	97,93%	109	92%	93,17	101,4%

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Pada tingkat nasional angka kelulusan pada tahun 2011/2012 untuk SMP sebesar 99,5%. Perkembangan kelulusan peserta UN dari tahun 2007/2008 s.d. 2011/2012 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

No	Tahun Ajaran	Peserta UN	Kelulusan Peserta	
			Jumlah	(%)
1.	2008/2009	2.661.057	2.532.791	95.18
2.	2009/2010	2.801.320	2.785.873	99.45
3.	2010/2011	3.661.108	3.641.209	99.46
4.	2011/2012	2,941.560	2,928.149	99,54
5.	2012/2013	2.855.435	2.842.087	99,53

Persentase kelulusan peserta didik SMP 2008/2009 yaitu 95.18%. Kelulusan siswa ini meningkat kembali di tahun 2009/2010 dengan persentase kelulusan sebesar 99.45%

(naik 4.27%). Pada tahun 2010/2011 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,01% menjadi 99,46%. Dari 3.661.108 siswa SMP yang mengikuti UN tahun 2010/2011, sebanyak 3.641.209 siswa lulus, sedangkan 19.899 siswa tidak lulus UN. Mulai tahun 2010/2011, kelulusan tidak diperhitungkan hanya dari nilai UN saja, tetapi juga memperhitungkan nilai Ujian Sekolah (US). Sehingga apabila dilihat dari nilai akhirnya (memperhitungkan UN dan US) maka presentase kelulusan siswa adalah 99,46%, naik 0,01% dari tahun 2009/2010. Pada tahun 2011/2012 dan 2012/2013 angka kelulusan mencapai 99,54% dan 99,53%. Berikut grafik persentase kelulusan UN dari tahun ke tahun.



Indikator kelulusan sudah tercapai dari tahun 2012. Akan tetapi program-program pendukung indikator ini masih dirasa perlu untuk diprogramkan untuk menjaga mutu pendidikan, diantaranya program bimbingan teknis remedial bagi sekolah-sekolah yang mempunyai nilai ujian nasional rendah.

Angka melanjutkan dari SMP ke SMA atau SMK secara nasional pada tahun 2011/2012 sebesar 93.17%. Data rinci untuk setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel di bawah. Data tersebut menunjukkan masih ada 6.83% lulusan SMP yang belum melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK. Anak-anak tersebut perlu memperoleh dorongan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tabel tersebut juga menunjukkan ada 23 provinsi yang memiliki angka melanjutkan lebih tinggi dari angka nasional (93.17%) dengan angka tertinggi 162.01% di Provinsi Papua Barat dan terdapat 10 Provinsi yang mempunyai angka melanjutkan yang lebih rendah dari angka nasional, dengan angka terendah 77.68% di Provinsi Lampung.

Angka melanjutkan di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat yang lebih dari 100 persen terjadi karena ada lulusan SMP/MTs/ sederajat dari provinsi lain di sekitar provinsi-provinsi tersebut yang melanjutkan ke SMA atau SMK di wilayahnya. Kasus yang sama juga dapat terjadi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, sehingga angka melanjutkan di suatu ibukota provinsi pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya.

Rincian angka melanjutkan ke SMA per provinsi tahun 2011/2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Provinsi	Jumlah Lulusan SMP Tahun 2010/2011	Siswa Baru Kelas X Tahun 2011/2012	Angka Melanjutkan
1	DKI Jakarta	125.416	133.192	106,20
2	Jawa Barat	515.753	463.686	89,90
3	Banten	127.840	118.473	92,67
4	Jawa Tengah	435.128	344.652	79,21
5	DI Yogyakarta	43.377	45.853	105,71
6	Jawa Timur	411.036	400.153	97,35
7	Aceh	71.385	70.893	99,31
8	Sumatera Utara	228.999	232.688	101,61
9	Sumatera Barat	75.340	75.520	100,24
10	R i a u	65.134	66.847	102,63
11	Kepulauan Riau	18.988	17.899	94,26
12	J a m b i	38.965	37.440	96,09
13	Sumatera Selatan	109.819	95.649	87,10
14	Bangka Belitung	14.751	14.117	95,70
15	Bengkulu	26.626	23.582	88,57
16	Lampung	105.487	81.942	77,68
17	Kalimantan Barat	64.738	51.663	79,80
18	Kalimantan Tengah	27.663	25.848	93,44
19	Kalimantan Selatan	33.018	32.655	98,90
20	Kalimantan Timur	49.200	51.257	104,18
21	Sulawesi Utara	37.947	36.454	96,07
22	Gorontalo	14.804	14.505	97,98
23	Sulawesi Tengah	31.258	33.007	105,60
24	Sulawesi Selatan	114.687	119.067	103,82
25	Sulawesi Barat	17.611	16.893	95,92
26	Sulawesi Tenggara	38.711	39.762	102,71
27	Maluku	29.965	28.057	93,63
28	Maluku Utara	15.519	18.161	117,02
29	B a l i	60.821	54.021	88,82
30	Nusa Tenggara Barat	55.809	53.937	96,65
31	Nusa Tenggara Timur	73.097	66.693	91,24
32	Papua	30.931	26.446	85,50
33	Papua Barat	9.499	15.389	162,01
	Indonesia	3.119.322	2.906.401	93,17

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kemdikbud, 2011/2012

Agar lebih mendapatkan gambaran terhadap kondisi angka melanjutkan sekolah di Indonesia, grafik berikut di bawah ini menampilkan perkembangan angka putus sekolah dari tahun 2009/2010 s.d. 2012/2013.



Angka melanjutkan dari SMP ke SMA atau SMK terkait dengan faktor: (a) apakah lulusan SMP/MTs dan orang tua mereka merasa pendidikan di SMA atau SMK penting dan memberi arti bagi kehidupan mereka, (b) apakah di sekitar tempat tinggal mereka terdapat SMA atau SMK yang dapat dijangkau, (c) apakah mereka tidak kesulitan mendapatkan biaya sekolah, dan (d) apakah mereka tidak terkendala oleh faktor sosial-budaya setempat untuk melanjutkan ke SMA atau SMK. Upaya peningkatkan angka melanjutkan ke SMA atau SMK antara lain harus memperhatikan empat faktor tersebut.

j. Meningkatkan SMP/SMPLB yang memperoleh akreditasi

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU "Persentase SMP/SMPLB berakreditasi". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya SMP/SMPLB yang memperoleh akreditasi	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi	54,1%	55,81%	103	58,5%	58,54%	100

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase SMP/SMPLB berakreditasi" pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 58,5%, telah terealisasi sebesar 58,54%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Pada tahun 2013 jumlah SMP sebanyak

36.492 sekolah dan SMPLB sebanyak 700 sekolah. Sebanyak 17.460 sekolah telah berakreditasi.



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis “meningkatnya SMP/SMPLB yang berakreditasi” di atas diantaranya adalah:

- 1) Belum terpenuhi sarana prasarana di sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 2) Belum terpenuhinya ketenagaan yang sesuai persyaratan, dan
- 3) Belum terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sekolah SD/SDLB memperoleh akreditasi, langkah yang dilakukan ke depan dalam meningkatkan sekolah SMP/SMPLB adalah dengan terus memberikan bantuan maupun pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan agar dapat memenuhi delapan standar pendidikan tersebut sebagai syarat memperoleh akreditasi.

k. Meningkatnya guru SD/SDLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S-1/D-4.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU “Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya guru SD/SDLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S-1/D-4	Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4	58%	50%	86	55%	50%	90,9

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4" pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 55%, baru terealisasi sebesar 50%, dengan persentase capaian sebesar 90,9%.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program Sarjana atau Program Diploma Empat (S-1/D-IV). Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah bantuan dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV).

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru SD/SDLB bertujuan untuk memotivasi guru SD/SDLB untuk mempercepat penyelesaian studi sampai memperoleh ijazah S-1/D-IV, memfasilitasi upaya peningkatan kinerja guru SD/SDLB dalam proses pembelajaran, mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru, dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung guru SD/SDLB untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV.

Pelaksanaan penyaluran bantuan kualifikasi guru dilaksanakan dengan mekanisme pusat dengan menggunakan sistem pendataan online Dapodik. Pengusulan penerima, validasi dan verifikasi dilakukan dengan bantuan aplikasi tunjangan yang juga dilakukan dengan cara online. Mekanisme pencairan dana dilakukan 1 kali pada awal tahun anggaran.

Pada Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 104.339 guru yang mendapat bantuan kualifikasi ini dan telah disalurkan bantuan peningkatan kualifikasi guru kepada sebanyak 89.207 guru dengan besaran Rp. 3,5 Juta per orang dengan capaian target 85,50%.

I. Terpenuhinya rasio guru terhadap siswa SD.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU “rasio guru terhadap siswa SD”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terpenuhinya rasio guru terhadap siswa SD	Rasio guru terhadap siswa SD	1:30	1:17	103	1:29	1:20	110

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “rasio guru terhadap siswa SD” telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaiannya melebihi target. Dari rasio guru terhadap siswa SD yang ditetapkan sebesar 1:29, telah terealisasi sebesar 1:20 dengan persentase capaian sebesar 110%.

Rasio guru terhadap siswa sebenarnya telah ideal, Namun demikian karena distribusi jumlah guru tidak merata antar daerah sehingga di beberapa daerah masih mengalami kekurangan guru, sementara di tempat lain mengalami kelebihan jumlah guru.

Berdasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa rasio guru SD terhadap siswa minimal 1:32. Untuk itu Pemerintah terus berupaya agar jumlah SD yang memenuhi rasio tersebut dapat tercapai. Beberapa program yang dilakukan antara lain memberikan tunjangan khusus, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, bantuan untuk guru bantu. Pada tahun 2013 persentase SD yang telah mempunyai rasio guru terhadap siswa SD sesuai SPM telah mencapai 44%, ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 11%. Capaian kinerja IKU ini mencapai 400% dari target yang ditetapkan.

m. Meningkatnya guru SMP/SMPLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S-1/D-4.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU “Persentase guru SMP/SMPLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya guru SMP/SMPLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S-1/D-4	Persentase guru SMP/SMPLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4	87%	80%	92	85%	80	94.11

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Persentase guru SMP/SMPLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4" pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 85%, baru terealisasi sebesar 80%, dengan persentase capaian sebesar 94,11%.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program Sarjana atau program Diploma Empat (S-1/D-IV). Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah bantuan dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV).

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru SMP/SMPLB bertujuan untuk memotivasi guru SMP/SMPLB untuk mempercepat penyelesaian studi sampai memperoleh ijazah S-1/D-IV, memfasilitasi upaya peningkatan kinerja guru SMP/SMPLB dalam proses pembelajaran, mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru, dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung guru SMP/SMPLB untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV.

Pelaksanaan penyaluran bantuan kualifikasi guru dilaksanakan dengan mekanisme pusat dengan menggunakan sistem pendataan online Dapodik. Pengusulan penerima, validasi dan verifikasi dilakukan dengan bantuan aplikasi tunjangan yang juga dilakukan dengan cara online. Mekanisme pencairan dana dilakukan 1 kali pada awal tahun anggaran. Tahun 2013 telah disalurkan bantuan peningkatan kualifikasi guru kepada sebanyak 89.207 guru dengan capaian target 100%.

n. Terpenuhinya rasio guru terhadap siswa SMP.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU "rasio guru terhadap siswa SMP". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terpenuhinya rasio guru terhadap siswa SMP	Rasio guru terhadap siswa SMP	1:34	1:18	106	1:33	1:32	100.2

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "rasio guru terhadap siswa SMP" pada tahun 2013 indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari rasio guru terhadap siswa SMP sebesar 1:33 telah teralisasi sebesar 1:32, dengan persentase capaian sebesar 100.2%.

Berdasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa rasio guru SD terhadap siswa minimal 1:36. Dalam renstra tahun 2010–2014 telah ditetapkan bahwa persentase SMP yang memiliki rasio Guru terhadap siswa sesuai dengan SPM adalah sebesar 11%. Realisasi kinerja rasio guru terhadap siswa SMP sesuai SPM pada tahun 2013 mencapai 39% dari target sebesar 11%. Capaian kinerja IKU ini mencapai 354%. Peningkatan ini di dorong oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi ruang kelas dalam skala besar.

o. Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan menerima tunjangan.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU "persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan menerima tunjangan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%	100%	100	100%	100%	100

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan" pada tahun 2013 pencapaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru dilaksanakan melalui dana yang disalurkan melalui dana pusat direktorat Pembinaan PTK Dikdas, yang pencairannya dilaksanakan secara triwulan. Pada tahun 2013 bantuan peningkatan kualifikasi guru

telah disalurkan kepada sebanyak 74.804 guru dengan capaian target 85,16 %. PTK dikdas yang mendapatkan tunjangan profesi ditargetkan sebanyak 87,836 orang guru menerimanya. Realisasi jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi sebanyak 74.804 orang guru terbayar hingga triwulan 4. Sisanya sebanyak 13.032 orang tidak dapat disalurkan karena merupakan guru tidak tetap (3.310 orang), tidak memenuhi 24 jam (6.180 orang) dan sudah pensiun (3.542 orang).

Pelaksanaan penyaluran tunjangan fungsional non PNS dilaksanakan melalui dana pusat pada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, dengan mekanisme pencairan tunjangan dilakukan per semester. Pada tahun 2013 tunjangan fungsional non PNS telah direalisasikan dengan sasaran sebanyak 196.529 guru dengan capaian target 100%.

Pelaksanaan penyaluran tunjangan khusus dilaksanakan melalui dana pusat pada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, dengan mekanisme pencairan tunjangan secara triwulan. Pada tahun 2013 penyaluran tunjangan khusus telah direalisasikan kepada sebanyak 50.038 guru dengan capaian target 100%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis di atas antara lain; sebagian calon penerima bantuan peningkatan kualifikasi guru sudah diajukan di APBD provinsi tahun 2013, calon penerima bantuan telah dimutasikan ke jenjang non dikdas dan sebagian drop out dari kampus.

Beberapa hambatan dalam penyaluran tunjangan profesi guru adalah adanya guru yang mutasi ke instansi lain, pindah jenjang, pindah ke struktural, pensiun dan meninggal dunia sehingga tunjangan tidak dapat dibayarkan satu tahun penuh. Sesuai PP 74/2009 Guru Tidak Tetap (GTT) tidak dapat menerima tunjangan profesi walaupun mereka sudah disertifikasi karena jam mengajar guru calon penerima tunjangan <24 jam perminggu, dan Kabupaten kekurangan waktu untuk verifikasi dan validasi data.

Penyaluran tunjangan fungsional non PNS menghadapi kendala berupa: jumlah SK penerima lebih sedikit dari pada sasaran, tidak cukup waktu untuk realokasi; jam mengajar guru calon penerima tunjangan <24 jam perminggu; nama penerima dalam SK tetapi tidak berhak menerima tunjangan karena sudah berstatus PNS; guru sudah mendapat tunjangan profesi; dan guru yang pensiun dan meninggal dunia.

Sedangkan kendala penerima tunjangan khusus terkendala oleh: guru dipindahkan dari daerah khusus ke daerah non khusus; beberapa kab/kota yang tidak menerbitkan SK Bupati tentang daerah khusus; guru yang pensiun dan meninggal dunia; dan sekolah tempat mengajar di tutup.

Untuk pembayaran insentif guru TKI Malaysia, masih terdapat sisa dana belanja bansos dan sisa biaya perjalanan pemberangkatan dan pemulangan guru TKI yang diperpanjang kontraknya.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah yang telah Direktorat P2TK Dikdas agar target kinerja dapat tercapai adalah:

- a. Melakukan koordinasi pada awal tahun dengan 33 dinas pendidikan provinsi untuk menjaring, meng-update dan memvalidasi data calon penerima 4 tunjangan.
- b. Memperbaiki dan menyesuaikan pedoman penyaluran 4 tunjangan tahun anggaran 2013 agar mekanisme pelaksanaan penyaluran tunjangan menjadi lebih baik.
- c. Mengadakan sosialisasi kebijakan dan pedoman penyaluran 4 tunjangan tahun anggaran 2013.
- d. Mengadakan sosialisasi dan bimtek (TOT) penggunaan Aplikasi online DAPODIK kepada dinas pendidikan Kab/Kota.
- e. Berkoordinasi dengan dinas Kab/Kota agar mendorong dan memantau sekolah untuk segera meng-entry dan mengupdate data penerima 4 tunjangan melalui Aplikasi online DAPODIK.

3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Program pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan akses ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah dan terus meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan menengah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Program pendidikan menengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud, program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis

ketiga yaitu Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pendidikan menengah, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

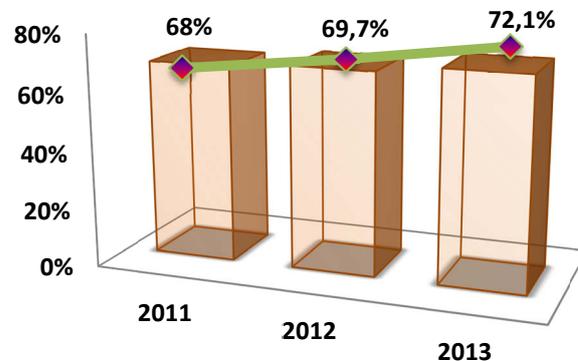
a. Meningkatnya APK SMA,SMK,SMLB dan Paket C

Tujuan utama yang diharapkan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya APK SMA,SMK,SMLB dan Paket C adalah meningkatnya akses pendidikan menengah. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dilihat melalui IKU "APK SMA/SMK/SMLB/Paket C". Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya APK nasional SMA,SMK,SMLB,MA dan Paket C	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA	76.4%	78.20%	98.99%	79.5%	81.26%	102.2
	Paket C	68.5%	69.7%	101.8%	72%	72.1%	101.1
	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C						

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 79.5% dapat terealisasi sebesar 81.26%, persentase capaian kinerja indikator sebesar 102.2%. Bila dibandingkan data tahun 2012 dengan target 76.4% dan realisasi sebesar 78.2%, persentase capaian indikator sebesar 102.4%. Sedangkan capaian IKU APK SMA/SMK/SMLB/Paket C pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 72% dan terealisasi sebesar 72.1%, persentase capaian kinerja indikator sebesar 101.1% atau tercapai sebesar 0.1% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan data tahun 2012 dengan target 68.5% dan realisasi sebesar 69.7%, persentase capaian indikator sebesar 101.8%, maka tahun 2013 terjadi penurunan capaian sebesar 0.7%.

Berikut grafik tren peningkatan APK nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C selama tiga tahun terakhir.



Dari tabel di atas capaian sasaran strategis meningkatnya APK SMA/SMK/SMLB/Paket C selama kurun waktu tiga tahun mengalami kenaikan, terutama pada tahun 2013 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari 69.7% ke angka 72.1%. Kenaikan APK dikarenakan banyaknya program-program strategis yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal pendidikan Menengah diantaranya:

1. Peluncuran Program Pendidikan Menengah Universal pada bulan 25 Juni 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatkan APK Sekolah Menengah pada tahun 2020 sekurang-kurangnya mencapai 97% dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
2. Direktorat Jenderal pendidikan Menengah di tahun 2013 untuk pemenuhan akses telah membangun Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 89 SMA, 134 SMK, dan 20 SMALB, dan menambah Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) mengalokasikan 2.699 ruang SMA, 3.376 ruang SMK serta 120 ruang SMALB;
3. Membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah melalui dana BOS SM, dan pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah telah mengalokasikan kepada 4.085.600 siswa SMA, 4.157.682 siswa SMK, dan 7.130 siswa PKLK dengan besaran satu juta persiswa;

4. Memberikan Bantuan BSM bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan siswa SM dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan menengah, mencegah siswa miskin sekolah menengah dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan, memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin sekolah menengah untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah melalui Direktorat Teknis memberikan subsidi BSM kepada 1.309.932 siswa miskin SMA, 1.742.031 siswa miskin SMK, dan 7.130 Siswa miskin SMLB;
5. Serta memberikan subsidi bantuan kepada daerah yang mengalami musibah dan bencana Alam, daerah 3T dan percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Upaya yang harus dilakukan agar APK SMA/SMK/SMLB/Paket C agar semakin meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang telah di rencanakan dalam PMU diantaranya: dengan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung serta memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda.

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan Menengah adalah:

1. Penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan membangun unit sekolah baru di wilayah 3T (terpencil, tertinggal dan terluar), di wilayah yang masih kekurangan SMA dan SMK, membangun ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah yang jumlah rombengnya melebihi jumlah ruang kelas, merehabilitasi ruang kelas yang rusak;
2. Memberikan bantuan biaya subsidi pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM) sebesar satu juta pertahun kepada seluruh siswa pendidikan menengah dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar satu juta pertahun, memberikan bantuan subsidi kepada anak-anak berkebutuhan khusus tingkat pendidikan menengah, serta memberikan subsidi bantuan kepada daerah yang mengalami musibah dan bencana Alam;

3. Pembangunan sekolah berasrama untuk memberikan layanan kepada peserta didikpeserta didik yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan sulit untuk memperoleh akses pendidikan;
4. Memperkuat lembaga-lembaga pendidikan swasta untuk berperan dalam memberikan layanan pendidikan masyarakat;
5. Mendorong partisipasi dan peran serta pemerintah provinsi dan kab/kota serta masyarakat untuk menyediakan akses;
6. Melakukan berbagai upaya pencitraan program Pendidikan Menengah Universal secara lebih intensif melalui media televisi, internet, radio, Koran dan lain-lain, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat baik melalui media elektronik dan cetak guna menarik minat siswa lulusan SMP untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Menengah; dan
7. Menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah antara sekolah yang belum maju dengan sekolah lebih maju (dalam dan luar negeri).

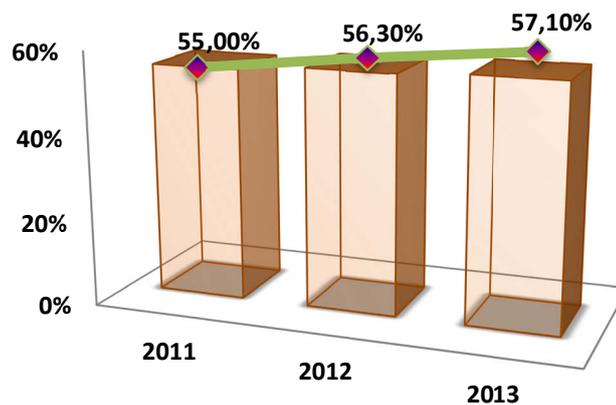
b. Meningkatnya Persentase SMA/SMK/SMLB dan Paket C yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan akreditasi minimal B

Tujuan utama yang diharapkan dalam upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya Persentase SMA/SMK/SMLB dan Paket C yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan akreditasi minimal B adalah meningkatnya kualitas pendidikan jangka menengah. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dilihat melalui IKU "persentase SMA,SMK, SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)". Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Persentase SMA,SMK,SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan akreditasi minimal B	Persentase SMA,SMK,SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	56%	56.3%	101	57%	57.1%	100.18

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 58% pada tahun 2014 dengan target 57%. Tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 56% dan realisasi sebesar 56.3%, persentase capaian indikator sebesar 100.5%. sedangkan pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 57.1%, persentase capaian kinerja indikator sebesar 100.18% atau mengalami kenaikan sebesar 0.18% dari target yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012 di tahun 2013 ini terjadi penurunan capaian 0.32%.

Berikut grafik tren IKU Persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 58% pada tahun 2014 dengan target 57% selama kurun waktu tiga tahun:



Dari grafik di atas bisa dilihat pada tahun 2013 ini tren capaian IKU Meningkatkan persentase SMA/SMK/SMLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi minimal B mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatkan persentase SMA/SMK/SMLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi minimal B semakin meningkat dari tahun ke tahun didukung adanya kebijakan strategis seperti:

1. menyediakan dan memelihara fasilitas penunjang mutu, seperti perpustakaan, laboratorium komputer dan multimedia, laboratorium IPA, dan laboratorium bahasa;
2. mendorong perluasan inovasi pembelajaran untuk mewujudkan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, efisien, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik;

3. meningkatkan kualitas ruang lingkup standar isi pendidikan menengah yang meliputi;
 - (a) Perbaikan standar isi yang meliputi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
 - (b) peningkatan standar proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan pelaksanaan kurikulum 2013;
 - (c) peningkatan kualitas standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - (d) peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, peningkatan kualifikasi S1 dan S2 serta pendidikan dalam jabatan;
 - (e) pemenuhan standart sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - (f) peningkatan standar pengelolaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan,
 - (g) perbaikan standar pembiayaan yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun,
 - (h) meningkatkan kualitas penilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
4. pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
5. meningkatkan minat keilmuan, penelitian, dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan olimpade, lomba penelitian ilmiah, liga olahraga dan seni, dan lomba lainnya;
6. mendorong kemampuan penguasaan bahasa asing peserta didik;
7. pengembangan pemanfaatan potensi lingkungan dan keunggulan lokal bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah berbasis kelautan;

8. menjalin kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri untuk pendidikan lanjutan setelah pendidikan menengah;
9. menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk praktek magang dan menampung lulusan SMK;
10. Mengembangkan program-program kemitraan dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta yang relevan dalam upaya meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan menengah;

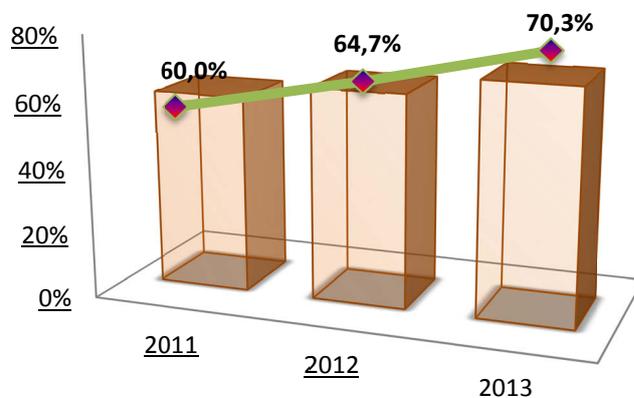
c. Meningkatnya Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP

Tujuan yang diharapkan dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatkan ketersediaan guru yang berkualitas pada jenjang pendidikan menengah. Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dilihat melalui IKU "persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP". Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP	Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang telah memenuhi SNP	65%	64.7%	99.5%	70%	70.3%	100.4%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase PTK SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang memenuhi SNP mencapai 75% tahun 2014, pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 65% dan realisasi capaian sebesar 64.7%, persentase capaian indikator sebesar 99.5%, sedangkan pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 70% dan realisasi capaian sebesar 70.3 %, persentase capaian indikator sebesar 100.4% atau naik 0.3 % dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012 di tahun 2013 ini terjadi kenaikan capaian 0.9 %.

Berikut grafik tren kenaikan Persentase PTK SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang memenuhi SNP selama kurun waktu tiga tahun:



Dari grafik di atas bisa dilihat pada tahun 2013 ini tren capaian IKU Persentase PTK SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang memenuhi SNP mengalami peningkatan. Keberhasilan dari IKU ini karena banyaknya program-program yang telah dicanangkan Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk memenuhi PTK yang SNP seperti :

1. pemberian tunjangan Sertifikasi PNS kepada 182.272 guru;
2. pemberian tunjangan sertifikasi Non PNS kepada 47.234 guru;
3. pemberian tunjangan fungsional bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikasi sebesar 43.624 guru;
4. pemberian subsidi kepada guru-guru yang melanjutkan jenjang pendidikan ke s1/D4 sebanyak 2.284 guru;
5. pemerataan distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai standar pelayanan minimal dengan pemberian tunjangan khusus bagi guru 3T (terpencil, terluar, tertinggal) sebesar 6.907 guru;
6. bimbingan teknis kepada PTK dikmen jenjang SMA, SMK dan PKLK kepada 1.180 PTK;
7. Pemerataan Mutu PTK jenjang SMA, SMK dan PKLK kepada 4.683 guru;
8. pemberian subsidi kepada pengawas-pengawas sekolah jenjang pendidikan menengah berkualifikasi S2 yang saat ini sudah sekitar 1.237 pengawas.

Guna untuk meningkatkan ketercapaian IKU Persentase PTK SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang memenuhi SNP dari tahun ketahun perlu adanya kebijakan program PTK diantaranya:

1. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas;
2. pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas;
3. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas;
4. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas;
5. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas;
6. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas;

4. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Program pendidikan tinggi dilaksanakan sebagai upaya dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun gender, dengan tetap meningkatkan mutu sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Program pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendukung tujuan strategis yang keempat, yaitu Tersedia dan

terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pendidikan tinggi, dimana ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utamanya.

a. Ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan, perealisasiannya didukung oleh 8 (delapan) IKU dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut :

1. Persentase prodi yang terakreditasi;
2. Persentase prodi PT berakreditasi minimal B;
3. Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia;
4. Persentase dosen yang berkualifikasi S2;
5. Persentase dosen yang berkualifikasi S3;
6. Persentase dosen bersertifikat;
7. Jumlah dosen dengan publikasi nasional;
8. Jumlah dosen dengan publikasi internasional.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan	Persentase prodi yang terakreditasi	69%	68,74%	99,63	100%	88%	88
	Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	51%	52,67%	103,27	57,03%	49,3%	86
	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	6	3	50	8	2	25
	Persentase Dosen Berkualifikasi S2	75%	66%	88	65,5%	60,67%	92,62
	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	15,5%	10,03%	64,7	12,5%	11,8%	94,4
	Persentase Dosen Bersertifikat	50%	39,3%	78,6	62,5%	72,28%	115,09
	Persentase Dosen dengan Publikasi Nasional	5,4%	6,38%	118,15	5,5%	10,5%	190,9
	Persentase Dosen dengan Publikasi Internasional	0,6%	0,68%	113,33	0,7%	2,1%	300

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan:

1. IKU “Persentase prodi terakreditasi”

Pencapaian pada tahun 2013 mencapai 88% dari target 100% (88%), ketidaktercapaian perealisasi target tersebut disebabkan oleh masih banyaknya prodi di perguruan tinggi belum mengusulkan borang walaupun surat edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013, tanggal 1 Maret 2013 menyatakan bahwa setelah 6 bulan sejak terbitnya surat edaran tersebut jika tidak mengajukan akreditasi, maka prodi tersebut akan dicabut izin penyelenggaraannya.

Jika dibandingkan pada tahun 2012 mencapai 68,74% dari target 69% (99,63%) memang yang nampak adalah terjadi penurunan capaian. Namun sebenarnya terdapat peningkatan jumlah prodi terakreditasi yang cukup signifikan, yakni dari 11.529 prodi pada tahun 2012 menjadi 15.100 prodi pada tahun 2013.

Tabel Perkembangan Jumlah Prodi Terakreditasi

Indikator	Jumlah Prodi			
	2012	%	2013	%
Prodi Akreditasi A, B, C	11.529	68,74	15100	88
Total Prodi	16.771	-	17160	-

Keberhasilan pencapaian program studi yang terakreditasi didukung melalui beberapa program dan kegiatan seperti:

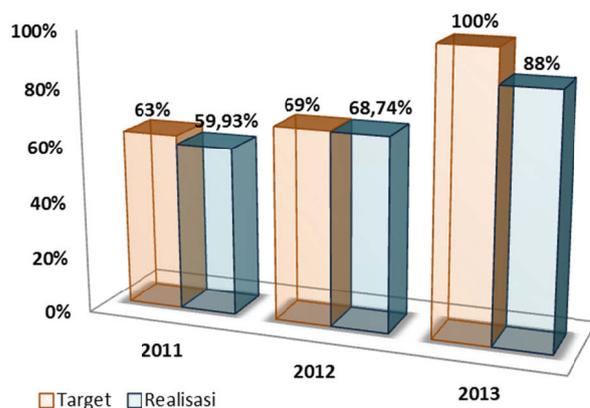
- 1) Sosialisasi UU No,12 tahun 2012 dan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/201
- 2) TOT dan workshop tentang sistem penjaminan mutu
- 3) Nurtering bagi PT yang memiliki prodi terakreditasi C maksimal 80%
- 4) Bimbingan untuk Prodi yang gagal akreditasi pada tahun 2012
- 5) Sosialisasi pentingnya penjaminan mutu PT bagi PTS/akademi komunitas baru.

Hambatan dan permasalahan lain yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Sistem pendataan yang tidak sinkron antara BAN-PT dan PDPT.
- 2) Faktor internal Perguruan Tinggi terkait perangkat dan fasilitas mutu perguruan tinggi.

- 3) PT tidak taat azas.
- 4) Budaya mutu bagi PT yang hanya diperhatikan pada saat pengajuan akreditasi/penyusunan barang.
- 5) Permen SNPT yang belum final menyebabkan acuan standar yang bervariasi di tingkat perguruan tinggi berdasarkan standar masing-masing.

Berikut grafik tren peningkatan prodi yang mendapatkan akreditasi selama tiga tahun terakhir



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Sinkronisasi data di BAN-PT dan PDPT sehingga data akreditasi dapat dipantau terus menerus.
2. TOT dan workshop mengenai sistem penjaminan mutu terpadu di Perguruan Tinggi.
3. Peningkatan kapasitas kinerja Lembaga Akreditasi.
4. Penutupan Prodi bagi yang tidak taat azas.
5. Pembukaan Prodi baru agar lebih selektif.

2. IKU “Persentase prodi PT berakreditasi minimal B”

Pencapaian pada tahun 2013 mencapai 49,3% dari target 57,03% (86%), ketidaktercapaian perealisasi target tersebut disebabkan oleh:

- 1) Faktor internal perguruan tinggi terkait penyediaan sarana dan prasarana serta sistem pembelajaran di PT.
- 2) Lemahnya sistem penjaminan mutu di PT.
- 3) Kurangnya pemahaman pentingnya peningkatan mutu.

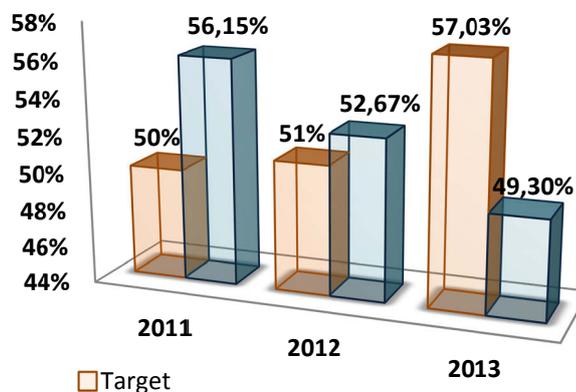
Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2012 mencapai 52,67% dari target 51% (103,27%) terjadi penurunan.

Meskipun demikian jumlah prodi terakreditasi minimal B sebenarnya tetap meningkat, yakni: dari 6.072 prodi pada tahun 2012 menjadi 6.373 prodi pada tahun 2013. Demikian pula terjadi peningkatan jumlah prodi berperingkat C yang diakreditasi oleh BAN-PT. Kecenderungan ini disebabkan oleh terbitnya UU No. 12 tahun 2012 dan implementasi surat edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013.

Tabel Perkembangan jumlah prodi terakreditasi minimal B

Indikator	Jumlah Prodi			
	2012	%	2013	%
Prodi Akreditasi A, B	6.072	52,67	6.373	49,3
Prodi Akreditasi A, B,C	11.529	-	12.927	-

Berikut grafik tren perkembangan prodi PT yang mendapatkan akreditasi minimal B selama tiga tahun terakhir.



Pada sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung melalui beberapa program dan kegiatan seperti:

- 1) Sosialisasi UU No,12 tahun 2012 dan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013.
- 2) TOT dan workshop tentang sistem penjaminan mutu.
- 3) Pemberian hibah bagi prodi terakreditasi C dan segera akan melakukan reakreditasi.
- 4) Nurtering bagi PT yang memiliki prodi terakreditasi C maksimal 80%.
- 5) Bimbingan teknis kepada prodi yang akan melakukan reakreditasi.

Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

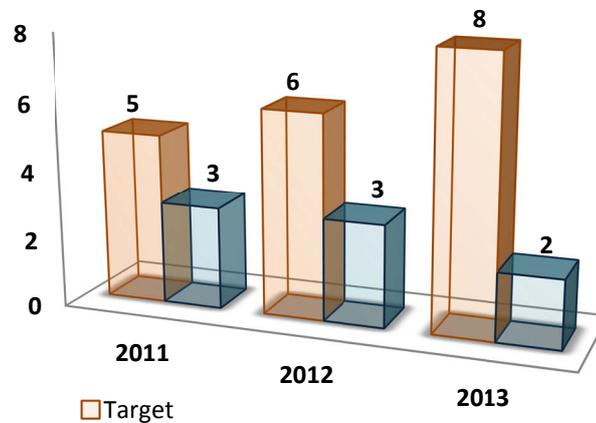
- 1) TOT dan workshop sitem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.
- 2) Pemberian bantuan hibah SPMI.
- 3) Pemberian hibah bagi prodi terakreditasi C dan segera akan melakukan reakreditasi.
- 4) Nurtering bagi PT yang memiliki prodi terakreditasi C maksimal 80%.
- 5) Bimbingan teknis kepada prodi yang akan melakukan reakreditasi.
- 6) Sosialisasi "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi".

3. IKU "Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia"

Berdasarkan QS World Ranking pencapaian pada tahun 2013 sebanyak 2 perguruan tinggi (Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung) dari target 8 perguruan tinggi (25%). Ketidaktercapaian perealisasi target tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengalokasian dana hibah WCU (World Class University) bagi perguruan tinggi yang masuk 500 besar mulai tahun 2011.

Jika dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 3 perguruan tinggi dari target 6 perguruan tinggi (50%) terjadi penurunan.

Berikut grafik tren perguruan tinggi yang masuk top 500 dunia selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain dengan mengalokasikan kembali dana hibah WCU bagi perguruan tinggi agar lebih banyak perguruan tinggi yang bisa masuk 500 besar dunia.

4. IKU “ Persentase dosen yang berkualifikasi minimal S2”

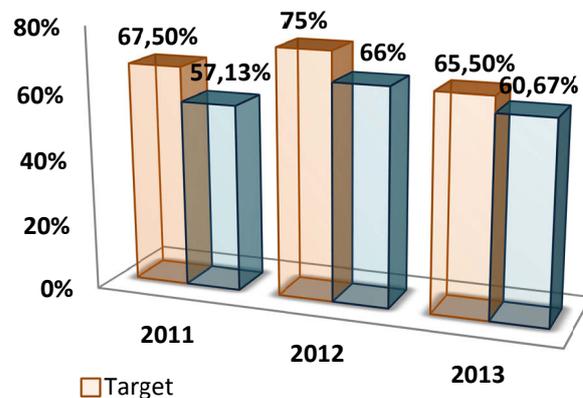
Capaian untuk dosen berkualifikasi minimal S2 pada tahun 2013 adalah sebesar 60,67% dari target 65,5% (92,62%), ketidaktercapaian perealisasi target tersebut disebabkan oleh:

- a. Adanya indikasi bahwa dosen lebih memilih mendapatkan sertifikasi dosen dari pada mendapatkan beasiswa
- b. Pengetatan sistem seleksi beasiswa terutama terkait dengan status dosen tetap dan linieritas latar belakang program studi.
- c. Adanya dari kebijakan penertiban dan penataan kembali sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan Ditjen Dikti, yaitu berupa validasi ulang dosen tetap PTN dan PTS.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2012 mencapai 66% dari target 75% (88%) terjadi peningkatan.

Pencapaian target kinerja tersebut didukung melalui kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan pascasarjana dalam dan luar negeri.

Berikut grafik trend peningkatan dosen yang berkualifikasi S2 selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Penerapan beasiswa at cost sesuai dengan biaya riil penyelenggaraan pendidikan di program pascasarjana terkait, sehingga tidak ada lagi pungutan biaya di luar beasiswa dari Ditjen Dikti
- 2) Menaikkan biaya hidup penerima beasiswa sehingga dosen tidak memilih mengikuti sertifikasi dahulu dari pada mengikuti studi lanjut.

5. IKU " Persentase dosen yang berkualifikasi minimal S3 "

Capaian untuk dosen berkualifikasi minimal S3 pada tahun 2013 adalah sebesar 11,8% atau 17.763 dosen dari target 12,5% (94,4%), ketidaktercapaian perealisasi target tersebut disebabkan oleh:

- a. Adanya indikasi bahwa dosen lebih memilih mendapatkan sertifikasi dosen dari pada mendapatkan beasiswa
- b. Adanya dari kebijakan penertiban dan penataan kembali sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan Ditjen Dikti, yaitu berupa validasi ulang dosen tetap PTN dan PTS

- c. Pengetatan sistem seleksi beasiswa terutama terkait dengan status dosen tetap dan linieritas latar belakang program studi
- d. Khusus pelamar beasiswa S3 Luar Negeri, umumnya menemui hambatan sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan Bahasa Inggris para kandidat yang masih kurang dari standar persyaratan untuk dapat diterima di perguruan tinggi di luar negeri;
 - 2) Para kandidat masih banyak yang belum dapat membuat proposal studi yang baik;
 - 3) Terlalu mepetnya waktu penyelenggaraan penyeleksian dengan rencana studi karyasiswa;
 - 4) Lamanya proses pembuatan SP Setneg;
 - 5) Para kandidat sulit mencari bahan/topik penelitian yang sedang trend di luar negeri;
 - 6) Para kandidat mengalami kesulitan dalam mendapatkan calon pembimbing yang sesuai dengan bidangnya.

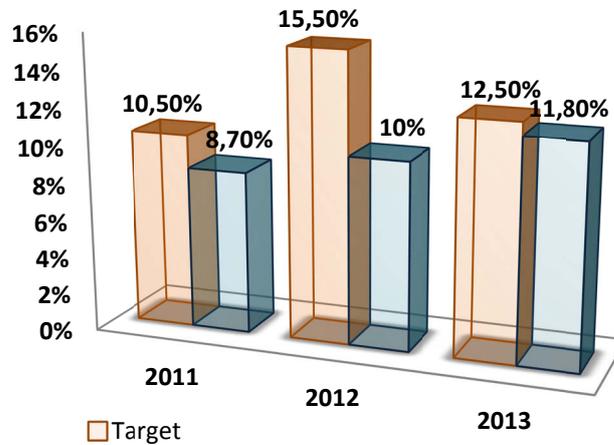
Hal tersebut di atas berdampak pada:

- 1) Para kandidat banyak yang tidak lolos dalam tahap pemberkasan dan wawancara;
- 2) Para kandidat banyak yang memundurkan keberangkatan untuk studi di luar negeri (tidak sesuai rencana awal);
- 3) Kandidat ada yang pindah perguruan tinggi tujuan karena terancam gagal studi

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2012 mencapai 10.03% atau 17.542 dosen dari target 15,5% (64,7%) terjadi peningkatan.

Pencapaian target kinerja tersebut didukung melalui kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan pascasarjana dalam dan luar negeri.

Berikut grafik tren peningkatan dosen yang berkualifikasi S3 selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Penerapan beasiswa at cost sesuai dengan biaya riil penyelenggaraan pendidikan di program pascasarjana terkait, sehingga tidak ada lagi pungutan biaya di luar beasiswa dari Ditjen Dikti
- b. Menaikkan biaya hidup penerima beasiswa sehingga dosen tidak memilih mengikuti sertifikasi dahulu dari pada mengikuti studi lanjut
- c. Mengadakan kursus bahasa asing bagi para dosen dan calon dosen di lingkungan Kemdikbud;
- d. Menyenggarakan program bridging ke beberapa Universitas di Luar Negeri yang sudah ada MoU dengan Dikti;
- e. Membuat sistem terintegrasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN)

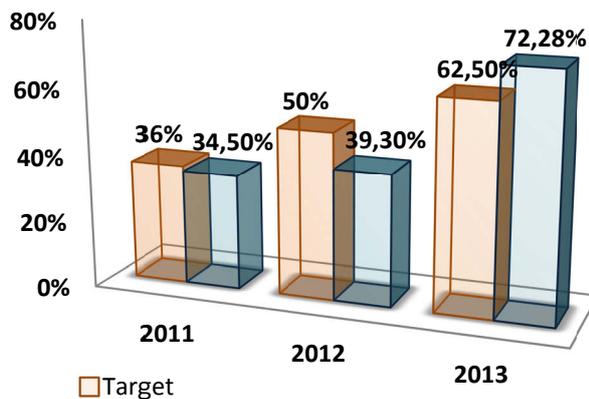
6. IKU "Persentase dosen bersertifikat"

Pencapaian Persentase dosen bersertifikat pada tahun 2013 adalah sebesar 72,28% dari target 62,5% (115,09%). Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2012 mencapai 39,3% atau 28.793 dosen dari target 50% (78,6%) terjadi peningkatan.

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- terbatasnya data dosen yang eligible;
- terdapat dosen yang sedang mengikuti program studi lanjut;
- terhapusnya eligibilitas dosen yang mengalami perubahan NIDN menjadi NUPN;
- terhambatnya eligibilitas dosen dari perguruan tinggi yang sedang mengikuti pembinaan karena memiliki dosen berstatus ganda;
- terhambatnya eligibilitas dosen dari perguruan tinggi yang memiliki persentase pelaporan data pada PDPT < 90%.

Berikut grafik tren peningkatan dosen yang mempunyai sertifikat selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain dengan segera melakukan pemutakhiran data dosen pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan pembinaan kepada perguruan tinggi yang bermasalah.

7. IKU “ Jumlah dosen dengan publikasi nasional”

Pencapaian publikasi nasional pada tahun 2013 adalah sebanyak 16.482 dosen atau 10,5% dari target 5,5% (190,9%). Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2012 sebanyak 11.850 dosen atau 6,38% dari target 5,4% (118,15%) terjadi peningkatan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung Peningkatan Publikasi Nasional antara lain :

a. Hibah Pendampingan Buku Ajar (Belum Terbit)

Pada tingkat capaian tahun 2012 telah dihasilkan sebanyak 78 buku yang siap terbit, sedangkan pada tahun 2013 telah dicapai 98 buku sehingga mengalami peningkatan sebanyak 20 buku.

b. Insentif Buku Ajar

Pada tingkat capaian tahun 2012 telah dihasilkan sebanyak 78 buku yang sudah terbit yang diberikan insentif dalam rangka memotivasi penulis untuk tetap terus menulis buku ajar, sedangkan pada tahun 2013 telah dicapai sebanyak 85 buku yang diberi insentif, mengalami peningkatan sebanyak 7 buku.

c. Jurnal yang memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional

Untuk memberikan peningkatan kualitas dari kelembagaan penerbitan jurnal telah diberikan hibah pendanaan untuk memberikan dorongan kepada pengelola jurnal dalam melakukan pembenahan diri guna meningkatkan kualitas penerbitan jurnal yang bersangkutan. Pada tahun 2012 telah diberikan hibah sebanyak 37 Pengelola Jurnal meningkat menjadi 45 pengelola jurnal pada tahun 2013. Dengan demikian mengalami peningkatan sebanyak 8 Pengelola Jurnal.

d. Akreditasi Jurnal Ilmiah

Untuk menjaga konsistensi dari kualitas Jurnal (Terbitan Berkala Ilmiah), maka setiap tahun dilakukan Akreditasi Jurnal Ilmiah sebanyak 2 periode. Pada tahun 2011 terakreditasi sebanyak 45 jurnal, tahun 2012 terakreditasi sebanyak 44 Jurnal, dan pada tahun 2013 telah terakreditasi sebanyak 55 Jurnal. Dengan demikian keseluruhan jurnal yang statusnya masih terakreditasi sebanyak 144 jurnal. Sesuai

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.49/DIKTI/Kep/2011 masa berlaku akreditasi menjadi 5 tahun.

e. Workshop Manajemen Jurnal

Dilaksanakan bagi pengelola jurnal yang akan melakukan akreditasi maupun re-akreditasi, dilakukan workshop sebelum pengelola jurnal yang bersangkutan melanjutkan jurnalnya untuk di akreditasi. Kegiatan ini diperlukan sebagai sarana evaluasi diri melanjutkan diakreditasi atau mundur, dengan adanya evaluasi diri ini setidaknya pengelola jurnal dapat memprediksi apakah jurnal yang akan diakreditasi dapat lolos atau tidak. Berdasarkan data yang ada maka pada tahun 2012 telah diikuti sebanyak 85 pengelola jurnal dan pada tahun 2013 diikuti sebanyak 97 pengelola jurnal sehingga di tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 12 pengelola jurnal.

f. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah dan jauh sebelumnya Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi serta kewajiban Publikasi Ilmiah pada PORTAL Garuda.

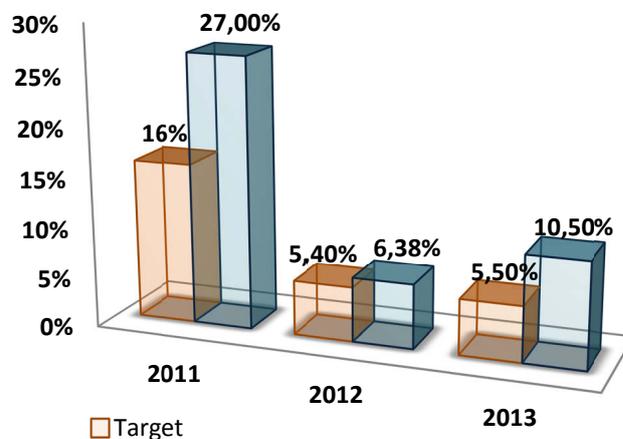
Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung beberapa kegiatan seperti:

- a) Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional
- b) Program Insentif Penulisan Buku Ajar
- c) Hibah Penulisan Buku Ajar (Layak Terbit)
- d) Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
- e) Workshop Manajemen Jurnal
- f) TOT Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Perguruan Tinggi
- g) Bantuan Pembinaan Jurnal Tata Kelola Nasional
- h) Bantuan Simposium Nasional Himpunan Profesi.

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Perencanaan awal yang belum tersusun dengan baik.
- 2) Sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (IT) yang belum memadai.
- 3) Proses pembukaan blokir DIPA yang cukup memakan waktu lama, sehingga program baru dapat diinformasikan pada bulan mei.
- 4) Setelah adanya efisiensi anggaran perjalanan dihilangkan, pada umumnya peserta kegiatan yang bentuknya berupa pelatihan, menghendaki adanya penggantian biaya perjalanan, mengingat perguruan tinggi asal tidak menyediakan dana transportasi, hal ini berakibat merosotnya jumlah pengusul peserta pelatihan.
- 5) Rendahnya mutu hasil penulisan buku ajar, sehingga penulis yang mendapat insentif penulisan buku ajar (buku terbit) dan penulis yang mendapat dana hibah penulisan kurang mencapai sasaran yang ditetapkan tiap tahunnya.
- 6) Pada kegiatan workshop Manajemen Jurnal, minat peserta kurang berkorelasi dengan peningkatan mutu jurnal yang dikelolanya, mengingat pengelola jurnal umumnya ada penggantian tiap tiga tahun sekali, dan tidak adanya pembinaan intern jurnal perguruan tinggi.
- 7) Jumlah waktu penerimaan usulan calon peserta pelatihan kurang, sehingga target menjadi kurang optimal.

Berikut grafik tren peningkatan dosen dengan publikasi nasional selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan melakukan pengkajian terhadap program kegiatan yang masih dipandang relevan, penjadwalan, serta pengalokasian pendanaan.
- 2) Melakukan reposisi program kegiatan yang memiliki SDM IT yang memadai pada Subdit yang relevan.
- 3) Pelaksanaan pelatihan penulisan artikel ilmiah dilaksanakan di wilayah dengan jumlah pengusul terbanyak, sehingga tidak memberatkan biaya transportasi bagi peserta.
- 4) Dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah, pelatihan akan lebih efektif apabila melibatkan pihak perguruan tinggi untuk menghimpun penulis artikel ilmiah yang sudah mempunyai artikel hasil penelitian yang pendanaannya dari Dirjen Dikti.
- 5) Disamping pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, perlu juga adanya program pelatihan penulisan buku ajar.
- 6) Perlu adanya pembinaan intern pengelola jurnal, dan peningkatan pengetahuan pengelolaan jurnal melalui bantuan pembinaan jurnal tata kelola atau pelatihan pengelolaan jurnal.
- 7) Memberikan bantuan dana baik berupa dana stimulus maupun pemberian dana hibah bersaing untuk meningkatkan mutu pengelolaan, manajemen pembinaan sehingga publikasi tersebut unggul dan terakreditasi dalam bidangnya
- 8) Memberikan kemudahan fasilitas mengakses pustaka digital secara gratis
- 9) Mengembangkan On-line Jurnal System secara mandiri di masing-masing perguruan tinggi
- 10) Memberikan bantuan kepada himpunan profesi dalam melakukan symposium profesi nasional untuk mendorong dan meningkatkan wadah pertemuan himpunan profesi secara regular, dan berkesinambungan

- 11) Melaksanakan kegiatan ekspose hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta program kreativitas mahasiswa secara nasional kepada masyarakat, sebagai ajang pertemuan dan menggelar hasil karya penelitian kepada masyarakat luas, stake-holder (dunia industry nasional)
- 12) Memberikan insentif bagi dosen yang menulis buku ajar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi baik yang sudah terbit maupun pendampingan bagi yang akan menerbitkan buku ajar tersebut.

8. IKU "Jumlah dosen dengan publikasi internasional"

Pencapaian publikasi internasional pada tahun 2013 adalah sebanyak 3.438 dosen atau 2,10% dari target 0,7% (300%). Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2012 sebanyak 1.110 dosen atau 0,68% dari target 0,6% (113,33%) terjadi peningkatan.

Peningkatan publikasi ilmiah hasil penelitian yang berupa artikel yang terbit di jurnal internasional maupun artikel yang dipresentasikan pada forum internasional mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari banyaknya animo dosen yang mengajukan proposal insentif jurnal yang diterbitkan pada jurnal internasional dan jumlah dosen/peneliti yang mengajukan program bantuan presentasi artikel ilmiah hasil penelitian di luar negeri.

Keberhasilan program maupun kegiatan publikasi internasional ini tentu saja tidak terlepas dari regulasi maupun kebijakan wajib unggah karya ilmiah bagi lulusan S1, S2, dan S3, serta dukungan pemerintah dalam hal pemberian insentif/penghargaan bagi penulis artikel maupun jurnal yang telah mampu dipublikasikan secara internasional. Berdasarkan capaian tahun 2013 sebanyak 9 jurnal nasional yang sudah terdaftar di database Scopus atau Thomson, dan tersedia metadata minimal 1 tahun terakhir, 13 jurnal nasional yang sudah terindeks di DOAJ, berbahasa Inggris dan berpotensi terindeks Scopus dan Thomson. Sementara pada DOAJ sudah tercatat sebanyak 106 jurnal yang terdaftar.

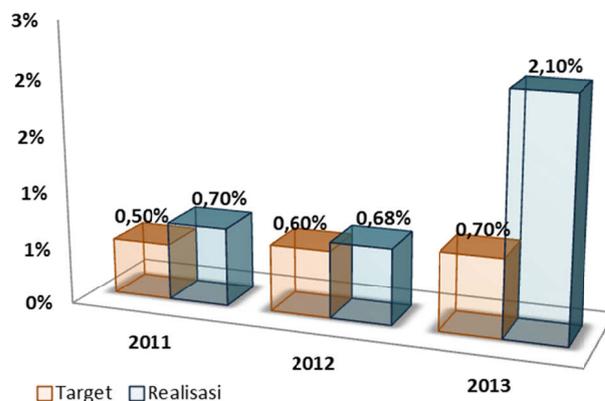
Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung beberapa kegiatan seperti:

1. Bantuan Seminar Luar Negeri (presentasi artikel ilmiah hasil penelitian)
2. Pemberian insentif artikel yang terbit pada jurnal internasional.
3. Bantuan pelaksanaan konferensi ilmiah internasional
4. Workshop internasionalisasi jurnal domestik terakreditasi.
5. Langganan e-journal bagi perguruan tinggi.
6. Sosialisasi pemanfaatan e-journal
7. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional.
8. Insentif jurnal terindeks internasional.
9. Pelatihan Pengelolaan Jurnal dengan OJS (open journal system).

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Rendahnya mutu hasil penulisan artikel ilmiah yang terbit pada jurnal internasional, sehingga penulis yang mendapat insentif artikel pada jurnal internasional kurang mencapai sasaran yang ditetapkan tiap tahunnya.
2. Kurangnya kemampuan pengelola jurnal dan tidak adanya dukungan anggaran dari perguruan tinggi, sehingga jurnal yang diterbitkan pada umumnya masih konvensional (dalam bentuk cetak) sehingga penyebarannya terbatas/regional.
3. Penguasaan, dan kemampuan menulis kedalam bahasa Internasional (bahasa Inggris) masih lemah oleh para peneliti, yang pada umumnya Jurnal Internasional menggunakan bahasa Inggris
4. Mahalnya biaya seminar internasional di luar negeri bagi dosen/peneliti Indonesia
5. Masih sedikitnya desiminasi hasil penelitian/artikel ilmiah melalui jurnal internasional

Berikut grafik tren peningkatan dosen dengan publikasi internasional selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah, pelatihan akan lebih efektif apabila melibatkan pihak perguruan tinggi terutama program pascasarjana untuk menghimpun penulis artikel ilmiah yang sudah mempunyai artikel hasil penelitian yang pendanaannya dari Dirjen Dikti.
2. Perlu adanya pembinaan intern pengelola jurnal, dan peningkatan pengetahuan pengelolaan jurnal melalui bantuan pembinaan jurnal tata kelola atau pelatihan pengelolaan jurnal melalui system OJS.
3. Pemberian insentif bagi jurnal yang sudah terindeks internasional.

b. Kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi, perealisasiannya didukung oleh 5 (lima) IKU dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

1. APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *);
2. APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun);
3. Ratio Kesetaraan Gender PT;
4. Ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1;
5. Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Keseimbangan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi	1. APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	26,75%	30,2%	112,93	29,10%	29,87%	102,64
	2. APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	7%	7,3%	104,2	9%	7,00%	77,77
	3. Ratio Keseimbangan Gender PT	104,6%	106,8%	102,1	103,2%	109,6%	106,2
	4. Ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1	24%	17,44%	72,66	27%	16,6%	61,48
	5. Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	20%	10,25%	51,20	18%	11,30%	62,77

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. IKU "APK PT dan PTA Usia 19-23 thn*)"

Pencapaian pada tahun 2013 adalah sebesar 29,87% dari target 29,1% (102,64%), sedangkan pencapaian pada tahun 2012 sebesar 30,2% dari target 26,75% (112,93). Jika dibandingkan antara tahun 2013 dengan tahun 2012 APK perguruan tinggi seakan-akan terjadi penurunan, padahal yang terjadi adalah kenaikan. Ini terjadi karena pada tahun 2012 terjadi keterlambatan dalam penentuan usia penduduk 19-23 tahun yang digunakan sebagai pembagi dengan jumlah mahasiswa Diploma dan S1. Seharusnya pada tahun 2012 menggunakan jumlah penduduk 19-23 tahun 21.185.300 orang, bukan angka 19.858.146 orang, sehingga APK tahun 2012 adalah 28,57%.

Angka Partisipasi Kasar ini dihasilkan dari jumlah mahasiswa yaitu sebanyak 6.228.517 jiwa berdasarkan jumlah usia penduduk 19-23 sebesar 21.055.900 jiwa. Kenaikan ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah program studi baru dan juga perguruan tinggi baru baik atas inisiatif masyarakat maupun program-program mandat dari pemerintah.

Keberhasilan pencapaian target peningkatan APK PT dan PTA usia 19-23 tersebut didukung melalui beberapa program dan kegiatan seperti:

1. Pembukaan perguruan tinggi baru
2. Pengerian Perguruan Tinggi Swasta
3. Pembukaan program studi baru
4. Pemberian mandat program studi baru
5. Pembukaan Akademi Komunitas yang beberapa mahasiswanya dititipkan ke Politeknik negeri.

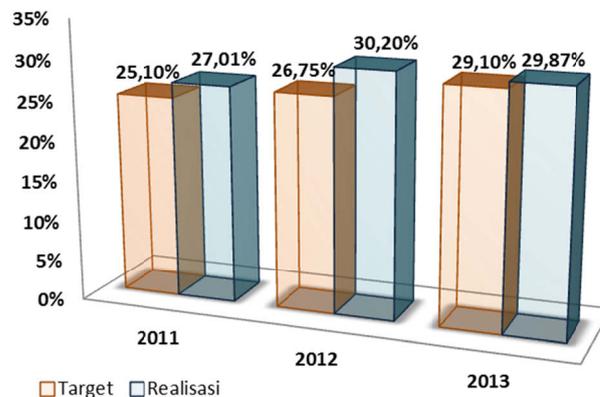
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013

KOMPONEN	2013		
	L	P	TOTAL
Penduduk Usia 19-23	10.704.800	10.351.100	21.055.900
PTN	708.533	956.525	1.665.058
PTS	1.933.304	1.928.550	3.861.854
PTK	63.302	81.103	144.405
Jumlah Mahasiswa	2.705.139	2.966.178	6.288.517
APK (%)	25,27	28,66	29,87

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Belum maksimalnya pelaporan data dari perguruan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
2. Pemerataan pembangunan yang kurang maksimal pada Indonesia Bagian Timur.

Berikut grafik tren peningkatan APK PT dan PTA usia 19-23 tahun selama tiga tahun terakhir.



Tabel APK PT dan PTA usia 19-23 thn*)

KOMPONEN	TAHUN		
	2011	2012	2013
Penduduk Usia 19-23	19.858.146	19.858.146	21.055.900
PTN	1.721.201	1.649.232	1.665.058
PTS	2.937.726	3.645.798	3.861.854
PTK	101.351	103.072	144.405
PTAI	576.462	576.462	617.200
PTA (non Islam)	27.157	27.157	36.646
Jumlah Mahasiswa	5.363.897	6.001.721	6.288.517
APK (%)	27,01	30,2	29,87

Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Pembukaan Akademi Komunitas baik itu negeri maupun swasta
2. Memecah Kopertis wilayah 12 menjadi Kopertis Wilayah 12 yang menangani wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta Kopertis 14 yang akan menangani wilayah Papua dan Papua Barat

2. IKU "APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)"

Pencapaian pada tahun 2013 hanya 7% dari target 9% (77,77%), sedangkan pada tahun 2012 capaiannya adalah 7,30% dari target 7% (104,2%). Dari data ini seakan-akan terjadi penurunan APK Prodi sains natural dan teknologi, padahal yang terjadi adalah kenaikan APK 0,1% (dari 6,9% menjadi 7,00%) jika pada tahun 2012 menggunakan jumlah penduduk 19-23 tahun 21.185.300 orang. Namun demikian dari sisi target tidak terpenuhi, hal ini terjadi karena saat ini banyak calon mahasiswa memilih masuk pada program studi *soft science* (ilmu sosial) dibanding dengan program studi *hard science* (ilmu eksakta).

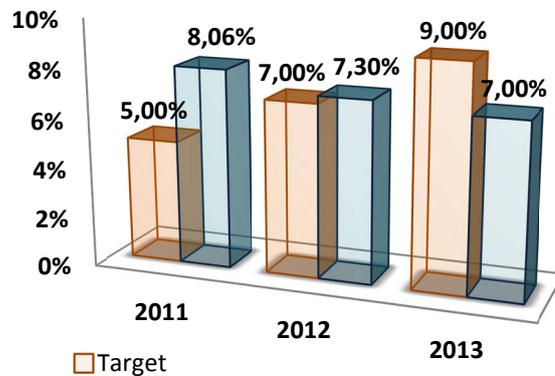
Dari sisi penyelenggara, investasi penyelenggaraan program studi eksakta lebih mahal dibandingkan dengan program studi sosial, sehingga banyak perguruan tinggi yang memilih menyelenggarakan program studi sosial. Hal ini bermuara turunya jumlah mahasiswa pada bidang sains natural dan teknologi.

Langkah yang perlu ditempuh adalah memberikan insentif atau afirmasi bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan sains natural dan teknologi baik dari sisi pendanaan maupun manajemen pengelolaan.

Tabel APK Prodi Sains Natural dan Teknologi

KOMPONEN	JUMLAH MAHASISWA		
	PTN	PTS	TOTAL
PENDUDUK USIA 19-23			21.055.900
PRODI SAINS NATURAL	274.592	423.031	697.623
PRODI TEKNOLOGI	234.265	542.034	776.299
TOTAL MAHASISWA	508.857	965.065	1.473.922
APK (%) PRODI SAINS DAN TEKNOLOGI			7,00

Berikut grafik tren peningkatan APK prodi Sains natural dan teknologi selama tiga tahun terakhir.



3. IKU "Ratio Kesetaraan Gender PT"

Pencapaian pada tahun 2013 yaitu sebesar 109,6% dari target 103,2% (106,2%), sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2012 yaitu sebesar 106,8% dari target 104,6% (102,1%) seakan-akan terjadi peningkatan, dalam arti jumlah partisipasi mahasiswa perempuan lebih tinggi.

Program studi yang memiliki kontribusi terbesar untuk kinerja ini berasal dari program studi kependidikan dan kesehatan, sejalan dengan program peningkatan kualifikasi guru dimana guru lebih banyak diminati perempuan serta program studi keperawatan dan kebidanan.

Rasio Kesetaraan Gender

KOMPONEN	2013		
	L	P	TOTAL
PTN	708.533	956.525	1.665.058
PTS	1.933.304	1.928.550	3.861.854
PTK	63.302	81.103	144.405
Jumlah Mahasiswa	2.705.139	2.966.178	6.288.517
RASIO KESETARAAN GENDER			109,6

Berikut grafik tren peningkatan Ratio Kesetaraan Gender PT selama tiga tahun terakhir



4. IKU "Ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1"

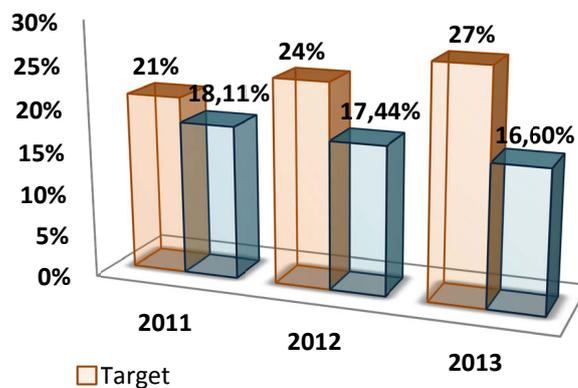
Pencapaian pada tahun 2013 adalah sebesar 16,6% dari target 27% (61,48%), ketidaktercapaian perealisasi target tersebut disebabkan oleh masih belum banyaknya program studi vokasi dibandingkan dengan program studi sarjana.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2012 yaitu sebesar 17,44% dari target 24% (72,66%) terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini proporsi program studi sarjana masih lebih dominan dibandingkan dengan program studi vokasi.

Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi Dan S1

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MAHASISWA		
	PTN	PTS	TOTAL
VOKASI	205.842	711.201	917.043
S1	1.459.216	3.150.653	4.609.869
TOTAL	1.665.058	3.861.854	5.526.912
RASIO VOKASI			16,6

Berikut grafik tren peningkatan Ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1 selama tiga tahun terakhir



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Pendirian dan pengembangan Akademi Komunitas
2. Pendirian politeknik baru
3. Penguatan pendidikan vokasi.

5. IKU “Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan”

Pencapaian pada tahun 2013 adalah sebesar 11,30% (598.539 mahasiswa) dari target 18% (62,77%), ketidaktercapaian perealisasi target tersebut disebabkan oleh :

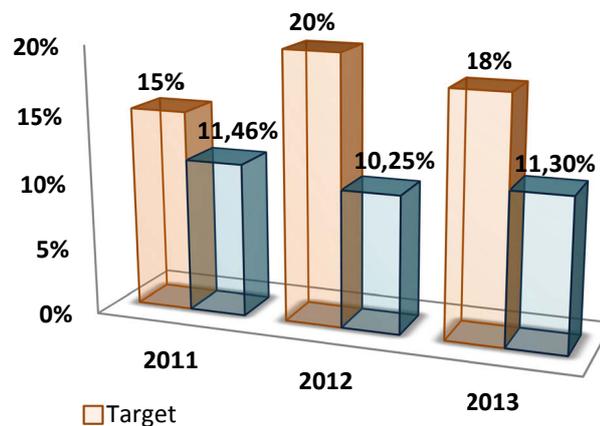
1. Keterlambatan penetapan mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan oleh perguruan tinggi negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis);
2. Ketidakakuratan penyampaian data dan informasi rekening para mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sehingga mengakibatkan retur SP2D.

Namun jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2012 yang besarnya 10,25% (542.647 mahasiswa) dari target 20% (51,20%) terjadi peningkatan.

Pada sisi lain, keberhasilan pencapaian target peningkatan mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan tersebut pada dasarnya didukung melalui beberapa program dan kegiatan seperti:

- a. Bidikmisi;
- b. Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa dan BBP PPA);
- c. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik);
- d. Beasiswa Prestasi (Beasiswa peraih medali pada Olimpiade Sains Internasional (OSI) dan Beasiswa peraih medali pada kompetisi mahasiswa tingkat nasional bidang Ko dan Ekstra Kurikuler);
- e. Beasiswa *Corporate Social Responsibility*(CSR).

Berikut grafik tren peningkatan Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan selama tiga tahun terakhir



Langkah-langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain dengan ekstensifikasi penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka penyaluran dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

c. Terwujudnya perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel, perealisasiannya didukung oleh 2 (dua) IKU dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut :

1. Jumlah PK BLU/BLU (BHP);
2. Jumlah PT beropini WTP dari KAP.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel	Jumlah PK BLU/BLU (BHP)	35	33	94,3	35	33	94,3%
	Jumlah PT beropini WTP dari KAP	22	18	81,8	26	-	0%

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

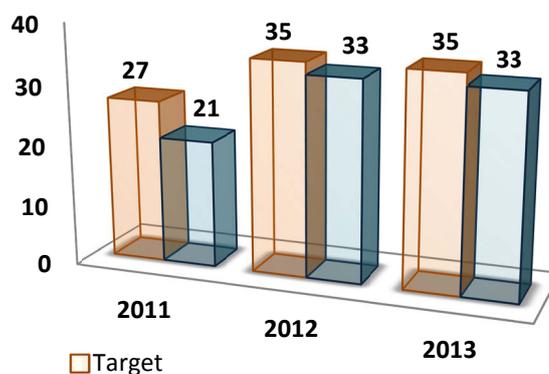
1. IKU "Jumlah PK BLU/BLU (BHP)"

Pencapaian jumlah PK BLU/BLU (BHP) pada tahun 2013 adalah sebanyak 33 satker dari target 35 Satker (94,3%). Perealisasian target IKU tersebut di atas sama dengan pada tahun 2012.

Jumlah Perguruan Tinggi Negeri Pengelola Keuangan-Badan Layanan Umum di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi per 31 Desember 2013 sebanyak 33 Satuan Kerja. Dari 33 Satuan Kerja PT PK BLU tersebut, 26 Satuan Kerja merupakan PT PK-BLU yang mendapatkan penetapan dari Kementerian Keuangan untuk mengelola PNBP 100% penuh dan 7 Satuan Kerja merupakan PT PK BLU Eks-BHMN.

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya Kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait dengan penundaan perubahan status PTN yang merupakan satuan kerja PNBP (non BLU) menjadi satuan kerja PTN PK-BLU.

Berikut grafik tren peningkatan perguruan tinggi berpredikat PK BLU/BLU (BHP) selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain dengan berkoordinasi dengan pihak satuan kerja terkait pengajuan perubahan status menjadi satuan kerja PTN PK-BLU

2. **IKU “Jumlah PT beropini WTP dari KAP”**

Pencapaian jumlah PT beropini WTP dari KAP pada tahun 2013 adalah sebesar 0 % (realisasi menunggu hasil audit dari Kantor Akuntan Publik) dari target 26 satker. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2012 sebanyak 18 satker dari target 22 satker (81,8%) terjadi peningkatan.

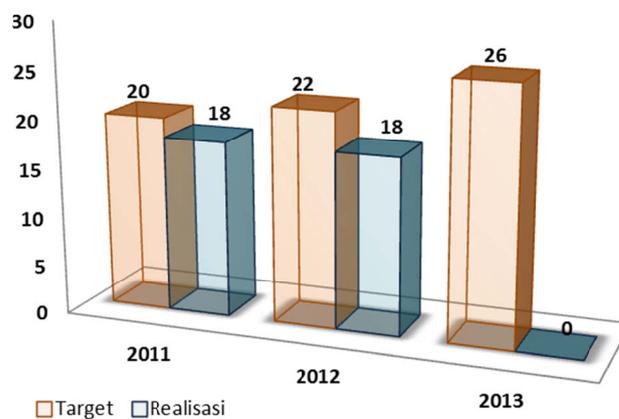
Dalam upaya mendorong perbaikan laporan keuangan dan percepatan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PT PK BLU) di lingkungan Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Mendorong PT PK BLU untuk menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan dengan melakukan ujicoba penerapan aplikasi yang dibuat oleh Ditjen Pendidikan Tinggi pada 12 (dua belas) Satuan Kerja BLU yang belum mempunyai aplikasi.
2. Melakukan review dan monitoring atas Aplikasi Sistem Akuntansi BLU dan Aplikasi Piutang di beberapa PT PK BLU yang telah mempunyai aplikasi.
3. Melakukan rekonsiliasi pencatatan aset tetap antara SAK dengan SIMAK BMN baik Satuan Kerja dengan pola BLU maupun Non-BLU (Satuan Kerja dengan pola PNBP).
4. Memfasilitasi Satuan Kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan berkoordinasi dengan Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Keuangan sehingga ditertibkan adanya Pedoman Pengelolaan PNBP, Pengelolaan Piutang, Pengelolaan Hibah serta Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan oleh Kementerian.

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Pada bulan Januari hingga Februari 2014 setiap Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) sedang menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun Laporan Keuangan konsolidasian sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga pelaksanaan audit untuk Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum, bahwa Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 31 Mei Tahun Anggaran berikutnya.
2. Keterlambatan Satuan Kerja dalam mengesahkan baik pendapatan maupun belanja BLU nya menyebabkan keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan tepat waktu.
3. Proses lelang atas pengadaan Jasa audit Kantor Akuntansi Publik terlambat dilaksanakan disebabkan terlambatnya pengesahan DIPA.
4. Belum sempurnanya Aplikasi Sistem Akuntansi BLU yang dibuat baik oleh Satker maupun Ditjen Dikti mengakibatkan penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara manual sehingga membutuhkan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyusunannya.

Berikut grafik tren peningkatan perguruan tinggi yang mendapatkan berpredikat WTP dari KAP selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Menyempurnakan Aplikasi Sistem Akuntansi yang telah dibuat baik oleh Satker maupun Ditjen Pendidikan Tinggi.
2. Mendorong dan melakukan pembinaan bagi Satuan Kerja yang belum membuat aplikasi baik Sistem Akuntansi maupun aplikasi piutang.
3. Menyempurnakan pedoman yang sudah disusun seiring dengan adanya perubahan-perubahan aturan pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan.

d. Interaksi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan, perealisasiannya didukung oleh 1(satu) IKU dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Interaksi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan	Jumlah HKI yang Dihasilkan	110	212	192,72	130	152	116,92

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja jumlah hak kekayaan intelektual yang dihasilkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 152 paten dari target 130 paten (116,92%). Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung melalui beberapa program dan kegiatan seperti:

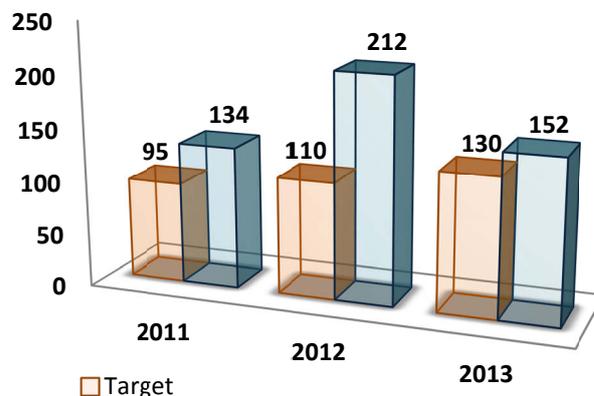
1. Unggulan berpotensi HKI (uber HKI)
2. Bantuan pendaftaran dan percepatan perolehan paten
3. Pelatihan pemanfaatan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kreatifitas mahasiswa yang berpotensi paten.
4. Hearing paten (mediasi perbaikan substansi paten).
5. Workshop sentra HKI.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 sebanyak 212 paten dari target 110 paten (192,72%) terjadi penurunan

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Jumlah dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berpotensi paten masih belum optimal
2. Pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual di kalangan perguruan tinggi, khususnya dosen dan mahasiswa masih kurang .
3. Kekhawatiran para pemilik paten (Granteed Paten) khususnya, di kalangan perguruan tinggi dalam hal pembiayaan pemeliharaan paten yang dikenakan setiap tahun, terlebih paten tersebut belum dapat dikomersialisasikan.

Berikut grafik tren peningkatan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir.



Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Lebih banyak memberikan pemahaman kepada perguruan tinggi khususnya dosen, mahasiswa dan peneliti akan arti pentingnya Hak Kekayaan Intelektual
2. Mengupayakan perlu adanya mediasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal kebijakan pemberian keringan maupun dispensasi bahkan bila dimungkinkan untuk dilakukan pembebasan biaya

pemeliharaan Granteed paten bagi peneliti/dosen/mahasiswa yang belum dapat dikomersialisasikan.

3. Lebih menggiatkan kembali pertemuan-pertemuan antara inventor dengan dunia usaha maupun dunia industri sebagai pengguna hasil karya penelitian yang memiliki granteed paten agar lebih memberikan kesempatan para pemilik paten untuk dapat dikomersialisasikan.

5. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Program pengembangan SDM pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya manusia di bidang kebudayaan serta menjamin terlaksanakannya standar nasional pendidikan.

Program pengembangan SDM pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud. Program ini dilaksanakan untuk mendukung empat tujuan strategis Kemendikbud, yaitu

- a. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan;
- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan;
- c. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan;
- d. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utamanya.

a. Tersedianya guru yang profesional dan berkompeten

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dilihat melalui IKU Persentase Guru Bersertifikat Pendidik dan IKU Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional;

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersedianya guru yang profesional dan berkompeten	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	48,60%	59,32%	116,88	66.40%	84.94%	127.92
	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	34%	55,68%	163,76	47%	78,43%	166,87

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **IKU Persentase Guru Bersertifikat Pendidik.** Sertifikasi guru adalah program utama yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu peningkatan kualitas profesionalitas guru. Program ini merupakan kelanjutan tugas dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) yang telah dimulai sejak tahun 2007. Sejak Ditjen PMPTK menjadi Badan PSDMPK-PMP pada tahun 2011, sertifikasi guru melakukan upaya strategis dengan menetapkan peserta sertifikasi guru dalam jabatan secara *online*. Kebijakan ini dilakukan untuk menghilangkan berbagai upaya dan penyimpangan penetapan peserta sertifikasi.

Pada tahun 2013, Badan PSDMPK-PMP melaksanakan sertifikasi bagi 250.000 guru dalam jabatan, yang diawali dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG wajib diikuti oleh guru dalam jabatan baik PNS dan non PNS, dan dilakukan oleh Badan PSDMPK-PMP sebagai upaya untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru. Pelaksanaan UKG dimaksudkan untuk meningkatkan dan memastikan kesiapan guru dalam mengikuti pendidik dan mengetahui peta penguasaan guru terhadap kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan

pengembangan profesi guru. Hasil UKG difokuskan pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru yang masih harus mendapat perbaikan dan peningkatan.

UKG melibatkan berbagai instansi antara lain Badan PSDMPK-PMP, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. UKG telah diikuti oleh 616.079 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dari unsur jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pengawas dimana sejumlah 561.856 orang peserta melakukan UKG *online*, sedangkan sisanya melakukan UKG secara *offline*. UKG *online* berlangsung di 2.221 TUK yang tersebar di 450 Kabupaten/kota di 33 propinsi. Berikut adalah sebaran peserta yang mengikuti UKG *online* 2013 menurut provinsi.

Tabel Sebaran Peserta UKG Online 2013 Per Provinsi

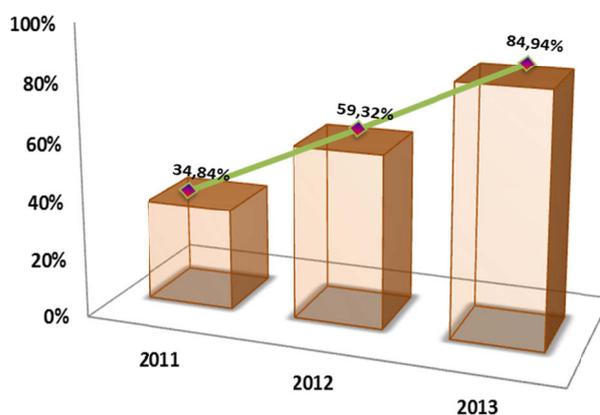
NO.	PROVINSI	JUMLAH	NO.	PROVINSI	JUMLAH
1.	Papua Barat	1.480	18.	DI Yogyakarta	10.020
2.	Sulawesi Barat	3.956	19.	Kalimantan Selatan	11.321
3.	Gorontalo	4.076	20.	Sulawesi Tengah	11.919
4.	Papua	4.582	21.	Banten	13.937
5.	Bangka Belitung	4.682	22.	Sumatera Barat	16.410
6.	Maluku Utara	5.053	23.	Kalimantan Barat	17.834
7.	Kepulauan Riau	5.072	24.	Lampung	18.651
8.	DKI Jakarta	7.159	25.	Nusa Tenggara Timur	20.136
9.	Maluku	7.246	26.	Sumatera Selatan	21.176
10.	Jambi	7.321	27.	Sulawesi Selatan	23.797
11.	Sulawesi Tenggara	7.710	28.	Aceh	23.909
12.	Sulawesi Utara	7.866	29.	Riau	25.025
13.	Bengkulu	7.947	30.	Sumatera Utara	34.581
14.	Kalimantan Tengah	8.539	31.	Jawa Barat	60.926
15.	Bali	9.041	32.	Jawa Timur	69.771
16.	Kalimantan Timur	9.682	33.	Jawa Tengah	71.021
17.	Nusa Tenggara Barat	10.019			
				TOTAL	561.856

Sebelum dan selama pelaksanaan UKG, terdapat beberapa tantangan, antara lain pada saat pemutakhiran data dilakukan, masih terdapat cukup banyak data yang belum valid. Sedangkan solusi yang dilakukan terhadap tantangan tersebut adalah memberikan penambahan waktu kepada petugas di kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data.

Kelulusan UKG menjadi syarat untuk bisa mengikuti sertifikasi 2013. Namun yang menjadi patokan tetap kuota sertifikasi yang sejumlah 250.000 guru. Setelah dilakukan seleksi 246.759 diantaranya telah mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun

anggaran 2013. Sampai dengan posisi tanggal 20 Januari 2014 jumlah guru yang telah terdata lulus dan bersertifikat adalah 227.969 orang. Hingga tahun 2013 total guru yang lulus sertifikasi mencapai 1.466.180 orang atau 84,94% dari total guru yang memenuhi syarat disertifikasi sesuai amanat UU No. 14 tahun 2005 sebesar 1.726.040 orang. Bila dibandingkan target IKU yang mencapai 66,4% maka capaian kinerja IKU *Persentase Guru Bersertifikat Pendidik* sampai dengan tahun 2013 adalah 127,92%.

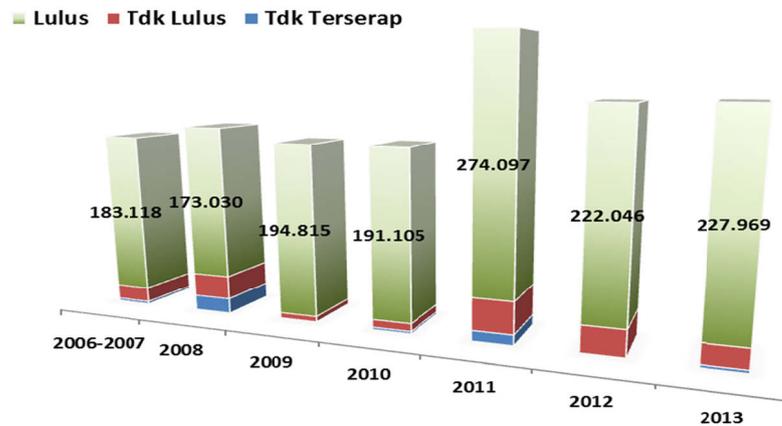
Berikut grafik tren kenaikan persentase guru bersertifikat pendidik selama tiga tahun terakhir.



Berikut tabel perkembangan daya serap kuota beserta jumlah guru yang telah disertifikasi dan lulus mulai tahun 2006/2007 sampai dengan 2013.

Tahun	Kuota	Terserap	Lulus
2006-2007	200,450	197,492	183,118
2008	200,000	182,609	173,030
2009	201,102	199,757	194,815
2010	200,000	197,312	191,105
2011	310,000	298,327	274,097
2012	251,551	250,807	222,046
2013	250,000	246,759	227,969
Total	1,613,103	1,573,063	1,466,180

Grafik Jumlah Guru yang Telah Disertifikasi dan Lulus Tahun 2006/2007 – 2013



Apabila diperhatikan tabel diatas masih terdapat kuota sejumlah 40.040 guru yang belum terserap. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan kuota yang tidak terserap tersebut. Diantaranya dengan penambahan waktu pendaftaran sertifikasi dan adanya pengalihan kuota ke wilayah lain. Selain itu juga masih tingginya tingkat ketidaklulusan sertifikasi yang mencapai lebih dari 5%. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kelulusan sertifikasi adalah dengan remedial ujian.



Foto bersama Mendikbud dan pejabat di lingkungan Kemendikbud dengan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tahun 2013

Di bawah ini merupakan tabel-tabel perkembangan jumlah guru yang telah disertifikasi dan lulus mulai tahun 2010 sampai dengan 2013 berdasarkan jenjang pendidikan per provinsi.

Tabel Jumlah Guru Lulus Sertifikasi per Jenjang Pendidikan per Provinsi Tahun 2010

NO	PROVINSI	PENGA WAS	SD	SLB	SMA	SMK	SMP	TK	GRAND TOTAL
1.	Bangka Belitung	9	463	1	58	56	115	--	702
2.	Bali	14	1.927	18	477	138	563	108	3.245
3.	Banten	11	3.013	22	496	354	631	118	4.645
4.	Bengkulu	143	903	16	163	80	297	24	1.626
5.	DI Yogyakarta	12	3.363	177	607	567	1.375	740	6.841
6.	DKI Jakarta	4	4.292	206	997	633	2.060	281	8.473
7.	Gorontalo	28	644	1	102	106	218	40	1.139
8.	Irian Jaya Barat	22	152	--	31	9	71	9	294
9.	Jambi	45	1.724	2	378	192	602	70	3.013
10.	Jawa Barat	45	18.317	236	3.770	2.098	5.838	692	30.996
11.	Jawa Tengah	17	15.843	136	2.636	2.469	5.868	780	27.749
12.	Jawa Timur	38	19.783	241	4.165	2.427	6.329	1.491	34.474
13.	Kalimantan Barat	46	1.382	8	297	137	375	22	2.267
14.	Kalimantan Selatan	15	2.225	26	409	231	939	112	3.957
15.	Kalimantan Tengah	32	489	5	127	41	195	47	936
16.	Kalimantan Timur	43	1.185	--	254	135	603	38	2.258
17.	Kepulauan Riau	20	538	3	157	75	266	10	1.069
18.	Lampung	45	3.806	14	694	105	1.229	130	6.425
19.	Maluku	25	633	10	316	83	516	25	1.608
20.	Maluku Utara	53	168	1	79	26	117	13	457
21.	Nanggroe Aceh Darussalam	44	1.514	5	455	124	767	109	3.018
22.	Nusa Tenggara Barat	71	1.109	17	278	118	426	88	2.107
23.	Nusa Tenggara Timur	172	975	6	213	85	519	16	1.986
24.	Papua	31	251	2	118	60	185	11	658
25.	Riau	52	2.020	16	435	150	733	32	3.438
26.	Sulawesi Barat	38	440	6	118	72	249	52	975
27.	Sulawesi Selatan	57	4.692	33	1.264	500	2.217	477	9.240
28.	Sulawesi Tengah	79	1.231	9	301	135	392	150	2.297
29.	Sulawesi Tenggara	96	1.587	13	394	158	627	168	3.043
30.	Sulawesi Utara	53	1.094	9	356	139	838	106	2.595
31.	Sumatera Barat	49	2.849	79	807	392	1.965	107	6.248
32.	Sumatera Selatan	79	3.124	33	988	266	1.785	68	6.343
33.	Sumatera Utara	441	3.371	20	847	401	1.844	59	6.983
Grand Total		1.929	105.107	1.371	22.787	12.964	40.754	6.193	191.105

Tabel Jumlah Guru Lulus Sertifikasi per Jenjang Pendidikan per Provinsi Tahun 2011

NO	PROVINSI	PENGAWAS	JENJANG PENDIDIKAN						GRAND TOTAL
			SD	SDLB/ SMPLB/ SMALB	SMA	SMK	SMP	TK	
1.	Bali	11	4.534	35	417	180	1.134	203	6.514
2.	Bangka Belitung	5	948		27	34	137	14	1.165
3.	Banten	10	6.076	43	429	348	968	352	8.226
4.	Bengkulu	50	1.990	16	225	118	428	87	2.914
5.	DI Yogyakarta		1.696	165	324	427	645	243	3.500
6.	DKI Jakarta	2	4.627	61	1.174	1023	2.431	504	9.822
7.	Gorontalo	10	557		10	6	172	74	829
8.	Jambi	21	3.227	14	408	220	852	89	4.831
9.	Jawa Barat	66	26.249	292	2.992	1580	6774	791	38.744
10.	Jawa Tengah	18	19.706	181	1.429	1818	5.736	1.457	30.345
11.	Jawa Timur		26.683	320	2.213	1936	8.137	3.070	42.359
12.	Kalimantan Barat	17	5.100	14	145	100	824	70	6.270
13.	Kalimantan Selatan	22	3.931	53	130	62	740	299	5.237
14.	Kalimantan Tengah	56	3.141	25	172	106	488	162	4.150
15.	Kalimantan Timur	22	3.772	22	456	251	1.105	157	5.785
16.	Kepulauan Riau	6	714	8	164	58	233	16	1.199
17.	Lampung	33	7.268	26	296	200	1.152	115	9.090
18.	Maluku	42	848	1	170	74	409	42	1.586
19.	Maluku Utara	51	840	7	129	59	224	57	1.367
20.	Nanggroe Aceh Darussalam	63	4.282	13	1.189	273	1.808	145	7.773
21.	Nusa Tenggara Barat	41	4.981	5	46	15	368	242	5.698
22.	Nusa Tenggara Timur	290	5.308	22	468	250	1.760	143	8.241
23.	Papua	56	951	13	242	102	447	33	1.844
24.	Papua Barat	5	432		114	58	255	4	868
25.	Riau	36	2.454	15	478	175	873	41	4.072
26.	Sulawesi Barat	17	682	6	34	16	166	54	975
27.	Sulawesi Selatan	47	6.741	67	927	399	2.432	480	11.093
28.	Sulawesi Tengah	52	2.123	3	128	82	403	146	2.937
29.	Sulawesi Tenggara	89	2.822	19	553	168	947	267	4.865
30.	Sulawesi Utara	31	2.172	18	230	151	866	185	3.653
31.	Sumatera Barat	48	5.718	51	906	453	1.767	158	9.101
32.	Sumatera Selatan	49	5.115	1	1.041	294	2.035	99	8.634
33.	Sumatera Utara	258	10.965	27	2.808	1.460	4.658	234	20.410
Grand Total		1.524	176.653	1.543	20.474	12.496	51.374	10.033	274.097

Tabel Jumlah Guru Lulus Sertifikasi per Jenjang Pendidikan per Provinsi Tahun 2012

NO	PROVINSI	PAUD/ TK/RA	PENGA WAS	SD/MI	SDLB/ SMPLB/ SMALB	SMA/ MA	SMK/ MAK	SMP/MTs	GRAND TOTAL
1.	Bali	672	7	2762	41	811	465	1.893	6.651
2.	Bangka Belitung	48	1	754	7	20	26	89	945
3.	Banten	646	5	3.974	97	672	657	1.505	7.556
4.	Bengkulu	115	3	1.068	18	298	171	572	2.245
5.	DKI Jakarta	192	9	584	13	36	1.013	2.155	8.792
6.	Gorontalo	136	11	2.125	24	87	33	175	1.042
7.	Jambi	2.334	7	22.849	770	1.625	40	527	2.950
8.	Jawa Barat	3.557	17	18.840	345	1.374	1.574	4.534	33.693
9.	Jawa Tengah	7.578	11	17.310	230	1.952	2.025	5.708	31.886
10.	Jawa Timur	701		1.125	124	185	2.341	8.110	37.532
11.	DI Yogyakarta	1.654		3.033	113	824	319	650	3.104
12.	Kalimantan Barat	140	6	2.523	16	93	63	618	3.459
13.	Kalimantan Selatan	367	3	1.391	18	60	45	308	2.192
14.	Kalimantan Tengah	247	10	2.239	15	185	93	539	3.328
15.	Kalimantan Timur	181	5	2.289	45	465	342	1.168	4.495
16.	Kepulauan Riau	53	3	593		241	132	366	1.388
17.	Lampung	402	7	3.920	35	287	228	969	5.848
18.	Maluku	38	10	507	1	128	43	282	1.009
19.	Maluku Utara	44	11	311	11	155	67	301	900
20.	Nanggroe Aceh Darussalam	169	6	1.370	9	1.141	413	1.618	4.726
21.	Nusa Tenggara Barat	282	23	2.773	38	338	258	1.201	4.913
22.	Nusa Tenggara Timur	105	38	1.035	18	235	124	671	2.226
23.	Papua	30	9	700	14	267	183	422	1.625
24.	Papua Barat	29	3	294	4	121	26	189	666
25.	Riau	153	16	3.030	31	586	249	1.393	5.458
26.	Sulawesi Barat	101	7	388	2	36	17	171	722
27.	Sulawesi Selatan	826	7	3.356	115	768	566	1.906	7.544
28.	Sulawesi Tengah	202	3	1.453	8	126	102	362	2.256
29.	Sulawesi Tenggara	172	10	682	40	294	116	446	1.760
30.	Sulawesi Utara	185	11	875	23	217	123	537	1.971
31.	Sumatera Barat	322	21	3.663	101	633	556	1.610	6.906
32.	Sumatera Selatan	140	1	2.283	19	852	293	1.361	4.949
33.	Sumatera Utara	344	67	9.594	14	1.691	1.220	4.510	17.440
Grand Total		22.165	348	119.693	2.359	16.803	13.923	46.866	222.157

Tabel Jumlah Guru yang Telah Mengikuti Sertifikasi per Jenjang Pendidikan per Provinsi Tahun 2013

NO	PROVINSI	PAUD/ TK/RA	PENGA WAS	SD/MI	SDLB/ SMPLB/ SMALB	SMA/ MA	SMK/ MAK	SMP/MTs	GRAND TOTAL
1.	Bali	650	--	1.498	10	176	182	334	2.850
2.	Bangka Belitung	81	--	1.576	15	40	43	139	1.894
3.	Banten	584	8	5.517	59	380	449	989	7.986
4.	Bengkulu	225	10	1.902	12	199	142	377	2.867
5.	DKI Jakarta	1.218	2	2.142	44	363	673	874	5.316
6.	Gorontalo	182	4	870	5	42	45	177	1.325
7.	Jambi	237	9	2.649	17	161	129	463	3.665
8.	Jawa Barat	4.010	37	20.771	452	1.523	2.534	4.811	34.138
9.	Jawa Tengah	6.637	16	16.888	250	1.424	2.927	5.203	33.345
10.	Jawa Timur	8.657	39	13.911	179	1.183	1.614	3.675	29.258
11.	DI Yogyakarta	1.266		966	65	71	214	296	2.878
12.	Kalimantan Barat	228	5	4.510	9	236	95	733	5.818
13.	Kalimantan Selatan	489	2	2.797	14	55	42	217	3.616
14.	Kalimantan Tengah	387	37	3.380	7	190	89	497	4.587
15.	Kalimantan Timur	507	13	2.978	20	158	178	461	4.315
16.	Kepulauan Riau	139	1	887	11	90	68	176	1.372
17.	Lampung	756	12	5.150	13	261	237	785	7.214
18.	Maluku	41	16	1.396	6	153	62	428	2.102
19.	Maluku Utara	84	21	1.174	13	121	50	294	1.757
20.	Nanggroe Aceh Darussalam	646	20	5.575	23	945	318	1.680	9.207
21.	Nusa Tenggara Barat	600	19	3.998	37	331	226	924	6.135
22.	Nusa Tenggara Timur	194	48	2.834	43	284	166	745	3.414
23.	Papua	87	11	1.172	1	157	125	327	1.880
24.	Papua Barat	37	6	575		97	40	160	915
25.	Riau	699	9	6.706	34	793	450	1.573	10.264
26.	Sulawesi Barat	114	7	1.346	5	56	70	181	1.779
27.	Sulawesi Selatan	1.955	24	7.532	126	564	436	1.499	12.136
28.	Sulawesi Tengah	381	16	2.522	16	97	82	312	3.426
29.	Sulawesi Tenggara	314	16	2.095	16	326	158	564	3.489
30.	Sulawesi Utara	347	7	2.533	18	213	189	620	3.927
31.	Sumatera Barat	891	17	3.837	123	220	209	805	6.102
32.	Sumatera Selatan	392	31	6.903	28	490	197	895	8.936
33.	Sumatera Utara	459	114	12.305	77	1.118	1.086	2.787	17.946
	Grand Total	33.494	577	150.895	1.748	12.517	13.525	34.003	246.759

Tabel Rekap Kelulusan Sertifikasi Guru Tahun 2013*

NO	PROVINSI	PAUD/ TK/RA	PENGA WAS	SD/MI	SDLB/ SMPLB/S MALB	SMA/ MA	SMK/M AK	SMP/MTs	GRAND TOTAL
1.	DKI Jakarta	1.210	2.063	819	354	639	41	2	5.128
2.	Jawa Barat	3.771	17.746	4.311	1.384	2.238	418	31	29.899
3.	Jawa Tengah	6.365	16.157	4.984	1.368	2.827	224	15	31.940
4.	DI Yogyakarta	1.234	871	278	67	203	58		2.711
5.	Jawa Timur	8.305	12.377	3.190	1.078	1.471	163	37	26.621
6.	Nanggroe Aceh Darussalam	612	5.304	1.593	896	298	22	19	8.744
7.	Sumatera Utara	442	12.008	2.628	1.077	1.036	67	107	17.365
8.	Sumatera Barat	861	3.739	739	211	202	115	16	5.883
9.	Riau	690	6.436	1.532	781	444	34	8	9.925
10.	Jambi	234	2.345	447	159	127	15	8	3.335
11.	Sumatera Selatan	327	5.894	749	418	164	25	27	7.604
12.	Lampung	725	4.165	705	253	222	13	10	6.093
13.	Kalimantan Barat	182	3.992	625	185	76	6	5	5.071
14.	Kalimantan Tengah	379	3.200	472	178	86	6	31	4.352
15.	Kalimantan Selatan	457	2.456	189	52	39	12	2	3.207
16.	Kalimantan Timur	505	2.856	434	149	168	12	11	4.135
17.	Sulawesi Utara	339	2.417	593	203	179	18	7	3.756
18.	Sulawesi Tengah	359	2.429	295	94	81	9	16	3.283
19.	Sulawesi Selatan	1.864	6.491	1.369	543	419	51	18	10.755
20.	Sulawesi Tenggara	307	1.932	524	313	152	12	13	3.253
21.	Maluku	41	1.353	389	144	62	3	12	2.004
22.	Bali	649	1.474	333	176	180	10		2.822
23.	Nusa Tenggara Barat	590	3.686	845	315	218	32	19	5.705
24.	Nusa Tenggara Timur	190	2.724	687	261	161	38	47	4.108
25.	Papua	86	1.166	327	156	122	1	11	1.869
26.	Bengkulu	214	1.660	355	195	130	12	10	2.576
27.	Maluku Utara	84	1.167	286	113	50	13	21	1.734
28.	Banten	575	5.091	915	361	424	53	8	7.427
29.	Bangka Belitung	78	1.403	126	38	39	15		1.699
30.	Gorontalo	182	845	172	39	41	4	3	1.286
31.	Kepulauan Riau	128	837	170	89	66	11	1	1.302
32.	Papua Barat	37	575	160	97	37	0	6	912
33.	Sulawesi Barat	93	1.082	166	52	66	2	4	1.465
Grand Total		9.855	123.415	21.190	7.171	4.827	913	525	227.969

*Sumber Data: Pusat Pengembangan Profesi Pendidik per 20 Januari 2014

2. **IKU Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional.**

Kebijakan Pemerintah melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 menyatakan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Selanjutnya, Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Salah satu fungsi Badan PSDMPK-PMP diamanatkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan agar kompetensi guru sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

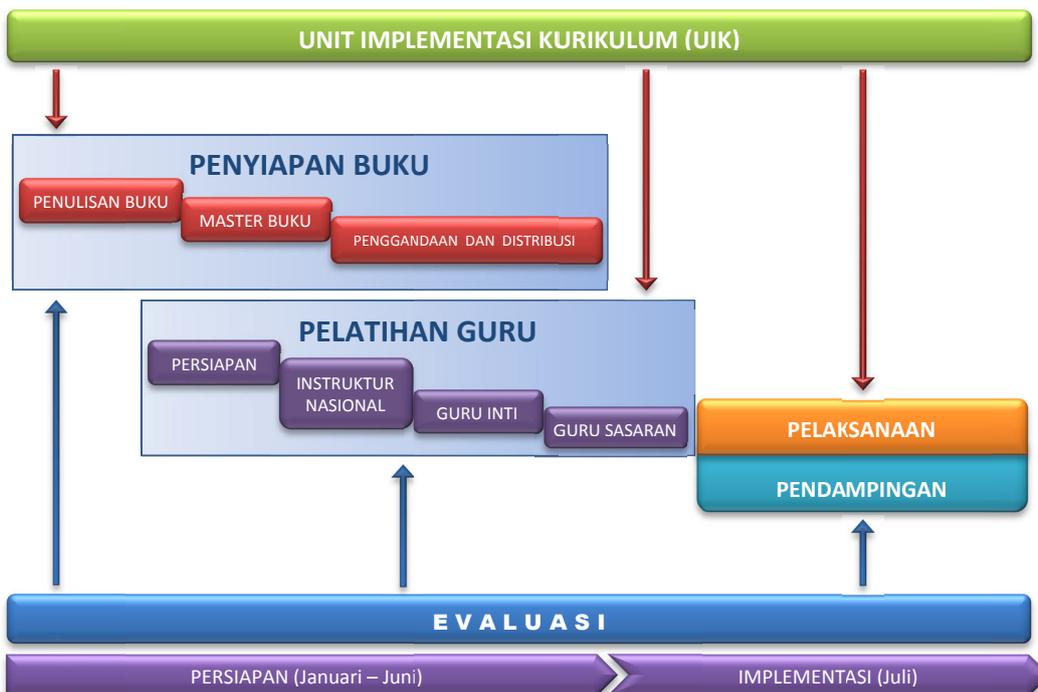
Berdasarkan hal di atas, Badan PSDMPK-PMP menetapkan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu program besarnya. PKB merupakan salah satu program badan PSDMPK-PMP yang diarahkan untuk memperkecil jarak antara kompetensi profesional, pedagogis, sosial dan kepribadian yang dimiliki guru dengan tuntutan peran guru sebagai jabatan profesi. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Selanjutnya, oleh karena pelaksanaan PKB perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan melibatkan semua pihak terkait, maka pelaksanaan PKB belum dapat dilaksanakan secara efektif pada tahun 2013. Untuk mengembangkan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, diperlukan pemetaan kompetensi PTK sebagai dasar (*baseline*) penetapan perbaikan dan peningkatan kompetensi guru.

Terkait IKU ini, Badan PSDMPK-PMP memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan kesempatan pengembangan profesionalisme

sekaligus peningkatan kompetensi. Secara teknis kegiatan-kegiatan penopang IKU ini dilaksanakan oleh PPPPTK, LPPKS dan LPMP.

Sejak tahun 2013, PKB dilaksanakan sejalan dengan implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan Kurikulum 2013 pada Badan PSDMPK-PMP meliputi persiapan kegiatan persiapan (penyiapan buku siswa dan buku guru, serta pelatihan guru), pelaksanaan pelatihan guru, evaluasi, dan pendampingan guru dalam implementasi digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar Rencana Implementasi Pelatihan Kurikulum 2013

Pelatihan bagi guru dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 ini diharapkan mampu mengubah pola pikir (*mindset*) guru dalam mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan baik dan benar, sesuai materi pelatihan yang terdiri dari rasional Kurikulum 2013, elemen perubahan kurikulum, standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), dan kompetensi dasar (KD), strategi implementasi Kurikulum 2013, isi Buku Guru, isi Buku Siswa, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), cara penilaian sesuai tuntutan Kurikulum 2013, cara melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013; dan skenario pelaksanaan pelatihan dan metodologi pelatihan Implementasi Kurikulum 2013.

Sedangkan instruktur nasional dan guru inti pada akhirnya diwajibkan memiliki kemampuan sebagai pelatih dalam pelatihan Implementasi Kurikulum 2013; dan memahami mekanisme pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013.

Pada tahap awal, Badan PSDMPK-PMP memberikan pelatihan kepada sejumlah 544 instruktur nasional sebagai Tim Pelaksana Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Pusat.

Tabel Sebaran Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 Instruktur Nasional

NO	JENJANG	JUMLAH	GURU									
			RENCANA					REALISASI				
			GURU	WI	DOSEN	LAINNYA	TOTAL	GURU	WI	DOSEN	LAINNYA	TOTAL
1	SD	2.598	72	36	36	-	144	51	25	28	-	104
2	SMP	1.436	108	54	54	-	216	86	135	56	1	278
3	SMA	1.270	36	18	18	-	72	32	32	17	8	89
4	SMK	1.021	40	20	20	-	80	33	24	12	4	73
	TOTAL	6.325	256	128	128	-	512	202	216	113	13	544

Selanjutnya, jumlah guru inti yang diberikan pelatihan Kurikulum 2013 adalah sejumlah 3.200 guru, terdiri dari 400 guru SMK, 358 guru SMA, 1.346 guru SMP, 1.094 guru SD. Instruktur nasional dan guru inti kemudian memberikan pelatihan kepada sejumlah 131.448 guru sasaran sebagai Pelaksana Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2013, Badan PSDMPK-PMP telah melakukan pelatihan kepada 1.986.902 dari target total jumlah guru 2.925.676 guru atau 67,91% atau naik sebesar 4,49% dari tahun 2012 yang mencapai 1.855.454 guru

Kegiatan	Real. s.d. 2012	%	Real. s.d. 2013	%	% Kenaikan
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik (Total 2.925.676)	1.855.454	63,42	1.986.902	67,91	4,49

Tabel Realisasi Jumlah Guru yang Telah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2013

No	Nama Satker	Realisasi Guru	Realisasi Dana*(Rp)
1	LPMP Lampung	9,243	18,780,625,000
2	LPMP DKI Jakarta	1,851	6,583,998,000
3	LPMP Sumatera Utara	3,118	10,515,045,800
4	LPMP Kalimantan Barat	2,143	4,798,260,300
5	LPMP Babel	1,222	3,271,160,660
6	LPMP Sumatera Barat	4,857	10,989,614,000
7	LPMP Kalimantan Tengah	1,770	9,778,679,150
8	LPMP Jambi	4,218	9,525,650,000
9	LPMP Papua Barat	935	8,018,580,000
10	LPMP Kalimantan Selatan	1,830	3,913,761,227
11	LPMP Sulawesi Selatan	4,650	10,466,134,000
12	LPMP Aceh	1,850	4,558,543,081
13	LPMP Bengkulu	823	2,560,415,200
14	LPMP Jawa Tengah	10,637	24,831,237,848
15	LPMP Kalimantan Timur	3,849	7,352,217,557
16	LPMP Papua	254	2,301,548,700
17	LPMP Maluku Utara	489	2,453,575,000
18	LPMP NTB	2,663	4,764,254,200
19	LPMP Sumatera Selatan	2,791	7,533,548,637
20	LPMP Riau	3,834	8,635,916,000
21	LPMP NTT	964	2,281,707,200
22	LPMP Bali	2,995	7,213,036,000
23	LPMP Maluku	672	3,082,186,000
24	LPMP Gorontalo	1,804	3,043,902,544
25	LPMP Jawa Barat	8,490	19,778,539,200
26	LPMP Jawa Timur	11,368	34,902,292,000
27	LPMP Sulawesi Utara	2,074	6,802,695,000
28	LPMP Sulawesi Tengah	1,109	2,490,716,000
29	LPMP Sulawesi Tenggara	1,283	2,714,887,500
30	LPMP Sulawesi Barat	991	3,002,276,700
31	LPMP Kep. Riau	435	1,867,561,000
32	LPMP Banten	4,640	9,715,261,650
33	LPMP DI Yogyakarta	2,425	6,073,273,000
34	PPPPTK Matematika	4,650	18,183,259,657
35	PPPPTK Pertanian	240	3,288,060,000
36	PPPPTK IPA	1,216	8,132,109,477
37	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	2,877	15,334,824,200
38	PPPPTK BMTI	466	3,911,465,825
39	LPPKS	511	3,401,392,000
40	PPPPTK PKN dan IPS Malang	3,034	10,559,801,570
41	PPPPTK TKPLB	2,322	6,922,132,770
42	PPPPTK BBL Medan	994	4,370,700,866
43	PPPPTK Bahasa	5,660	34,192,471,000
44	PPPPTK Penjas dan BK	2,511	13,423,725,750
45	PPPPTK Kesenian	1,381	7,852,723,244
46	PPPPTK BOE Malang	1,092	7,360,362,000
47	Pusbang Prodik	1,169	24,718,108,000
48	Pusbang Tendik	1,048	11,920,890,000
49	Sekretariat Badan*	---	1,495,700,000
TOTAL		131,448	439,668,824,513

*Termasuk dana pendampingan, sensus dan manajemen.

Selanjutnya, peningkatan kompetensi bagi kepala sekolah dan pengawas untuk tahun 2013 ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Pelatihan tentang Implementasi Kurikulum 2013. Tujuan pelatihan bagi kepala sekolah mempunyai tujuan umum yaitu mengubah *mindset* kepala sekolah agar dapat menerima perubahan kurikulum sebagai kebutuhan dan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola perubahan, bertindak sebagai pemimpin pembelajaran dan menciptakan budaya sekolah sehingga implementasi Kurikulum 2013 dapat terlaksana secara efektif dan efisien di sekolah. Sedangkan tujuan pelatihan Kurikulum 2013 pengawas sekolah adalah 1) Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial pada kurikulum 2013; 2) Menyusun rancangan supervisi pembelajaran yang bersifat klinis yang relevan dengan tuntutan kurikulum 2013; 3) Melaksanakan simulasi model supervisi pembelajaran klinis pada kurikulum 2013; 4) Mengaplikasikan evaluasi penilaian otentik dalam supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan dimiliki setelah para pengawas mengikuti pelatihan, yaitu mampu melakukan: 1) supervisi pembelajaran dalam Kurikulum 2013; 2) penilaian otentik untuk meningkatkan kreativitas; 3) *coaching* dengan menggunakan model GROW ME untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran; 4) penilaian autentik untuk meningkatkan kreatifitas; 5) berkomunikasi lisan dan tulis dengan runtut, benar, dan santun dalam menyampaikan ide, gagasan dan pendapat; dan 6) bersikap terbuka dan dapat menerima model supervisi pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

Selama tahun anggaran 2013, Badan PSDMPK-PMP telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 783 instruktur nasional kepala sekolah dan 514 instruktur nasional pengawas sekolah. Jumlah kepala sekolah dan pengawas yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 dalam rangka dan pengawas peningkatan keprofesian berkesinambungan secara berturut-turut berjumlah 7.609 dan 6.712. Sehingga jumlah realisasi kepala sekolah dan pengawas sekolah sampai dengan tahun 2013 yang telah dilatih oleh Badan PSDMPK-PMP secara berturut-turut adalah 61.021 atau 25,35% dari total jumlah kepala sekolah 240.676 dan 44.597 atau 142,03% dari total pengawas sekolah 31.399 (sumber data: Aplikasi Verval PADAMU Tahun 2013).

Tabel Realisasi Jumlah Kepala Sekolah yang Telah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2013

No	Nama Satker	Realisasi Kepala Sekolah	Realisasi Dana (Rp)
1	LPMP Lampung	82	458,040,000
2	LPMP DKI Jakarta	69	240,830,000
3	LPMP Sumatera Utara	101	711,211,500
4	LPMP Kalimantan Barat	35	98,118,600
5	LPMP Babel	36	136,082,800
6	LPMP Sumatera Barat	163	699,460,000
7	LPMP Kalimantan Tengah	24	185,190,000
8	LPMP Jambi	36	202,940,000
9	LPMP Papua Barat	30	281,280,000
10	LPMP Kalimantan Selatan	46	221,735,000
11	LPMP Sulawesi Selatan	257	569,145,000
12	LPMP Aceh	41	107,507,800
13	LPMP Bengkulu	33	62,439,000
14	LPMP Jawa Tengah	345	1,215,939,682
15	LPMP Kalimantan Timur	92	311,800,000
16	LPMP Papua	31	78,879,200
17	LPMP Maluku Utara	---	---
18	LPMP NTB	86	110,000,000
19	LPMP Sumatera Selatan	128	452,618,088
20	LPMP Riau	37	150,390,000
21	LPMP NTT	26	49,827,600
22	LPMP Bali	73	363,599,000
23	LPMP Maluku	---	---
24	LPMP Gorontalo	33	53,711,000
25	LPMP Jawa Barat	514	924,675,000
26	LPMP Jawa Timur	469	2,765,554,000
27	LPMP Sulawesi Utara	62	322,220,000
28	LPMP Sulawesi Tengah	25	105,740,000
29	LPMP Sulawesi Tenggara	54	142,028,500
30	LPMP Sulawesi Barat	46	143,742,000
31	LPMP Kep. Riau	22	135,807,000
32	LPMP Banten	77	406,705,000
33	LPMP DI Yogyakarta	123	290,280,000
34	PPPPTK Matematika	81	413,083,918
35	PPPPTK Pertanian	713	3,149,640,128
36	PPPPTK IPA	259	527,335,915
37	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	319	1,769,846,425
38	PPPPTK BMTI	363	2,390,215,971
39	LPPKS	531	2,887,337,310
40	PPPPTK PKN dan IPS Malang	532	2,431,863,362
41	PPPPTK TKPLB	270	2,193,906,150
42	PPPPTK BBL Medan	301	2,001,422,732
43	PPPPTK Bahasa	222	1,765,710,000
44	PPPPTK Penjas dan BK	323	1,737,369,900
45	PPPPTK Kesenian	49	402,863,500
46	PPPPTK BOE Malang	150	1,209,844,000
47	Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan	300	3,511,874,000
	TOTAL	7,609	38,389,809,081

Tabel Realisasi Jumlah Pengawas Sekolah yang Telah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2013

No	Nama Satker	Realisasi Pengawas Sekolah	Realisasi Dana (Rp)
1	LPMP Lampung		
2	LPMP DKI Jakarta	88	151,795,000
3	LPMP Papua Barat	32	
4	LPMP Banten	58	112.470.000
5	PPPPTK Matematika	145	733,046,795
6	PPPPTK Pertanian	906	6,569,952,550
7	PPPPTK IPA	870	5,524,216,150
8	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	579	2,675,214,270
9	PPPPTK BMTI	298	2,131,702,988
10	PPPPTK PKN dan IPS Malang	178	1,235,897,020
11	PPPPTK TKPLB	298	2,344,412,350
12	PPPPTK BBL Medan	626	5,292,601,350
13	PPPPTK Bahasa	351	3,102,858,000
14	PPPPTK Penjas dan BK	485	3,197,934,750
15	PPPPTK Kesenian	878	5,249,226,008
16	PPPPTK BOE Malang	920	7,124,061,000
	TOTAL	6.712	45,445,388,231

Berdasarkan penjelasan di atas, rata-rata presentase realisasi sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 78,12% sehingga kinerja IKU 9.3 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Badan PSDMPK-PMP sampai dengan tahun 2013 mencapai 166,21%.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas, antara lain:

1. Tidak terdistribusikannya undangan pelatihan secara maksimal dikarenakan waktu pelaksanaan dari satu pelatihan ke pelatihan berikutnya sangat dekat dan terkendalanya akses informasi karena posisi geografis, sarana dan parasana yang kurang mendukung;
2. Waktu pelaksanaan yang sempit dan terkesan terburu-buru berdampak pada pemahaman, percaya diri dan pada akhirnya mengakibatkan pelaksanaan menjadi kurang sesuai dengan standar sehingga sisi kualitas dan kuantitas instruktur nasional menjadi terbatas;

3. Terkendalanya aplikasi Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum (SEPIK) 2013.
4. Penambahan materi pelatihan mengakibatkan waktu pelatihan yang disediakan menjadi tidak sebandingnya sehingga alokasi waktu menjadi kurang memadai;
5. Padatnya kegiatan pengawas sekolah bersamaan dengan kegiatan lain (akreditasi, EDS, dan lain-lain);
6. Minimnya pendampingan terhadap guru dalam merancang bentuk penilaian dan pengelolaan nilai karena cukup banyaknya aspek yang harus dinilai (misalnya membuat rubrik penilaian); dan
7. Sulitnya mengubah mindset ke arah pendekatan *scientific*, cara mengimplementasikan strategi pembelajaran dan penilaian.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun berikutnya antara lain 1) waktu persiapan harus lebih diperhitungkan; 2) dilaksanakannya pendampingan yang lebih intensif terhadap kualitas narasumber dan instruktur nasional yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hasil pelatihan bagi guru sasaran dan kepala sekolah dan pengawas dalam implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran; 3) kebutuhan alokasi waktu pelaksanaan pelatihan dibandingkan jumlah materi yang diberikan perlu ditinjau ulang; 4) dilakukannya program berkesinambungan untuk lebih mensukseskan implementasi Kurikulum 2013 di masing-masing satuan pendidikan, antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sekolah binaan, dengan petugas gabungan antara penyelenggara pelatihan dan dinas pendidikan terkait; 5) diikutsertakannya para kepala seksi Kurikulum tingkat kota dan kabupaten agar pada pelaksanaan Kurikulum 2013 berikutnya muncul persepsi dan pemahaman yang sama; 6) dilakukannya penguatan/pemantapan terhadap pengembangan dokumen Kurikulum 2013; 7) tersedianya wadah untuk berbagi pengalaman di tingkat nasional dan daerah dalam hal pengembangan Kurikulum 2013; 8) disempurnakannya dokumen dan perangkat dari Pusat untuk selanjutnya dikomunikasikan ke daerah; dan 9)

dilaksanakannya pembekalan yang lebih intensif/berkelanjutan terhadap pengawas sekolah karena kesempatan ini sangat diharapkan pihak sekolah.

b. meningkatnya mutu satuan pendidikan;

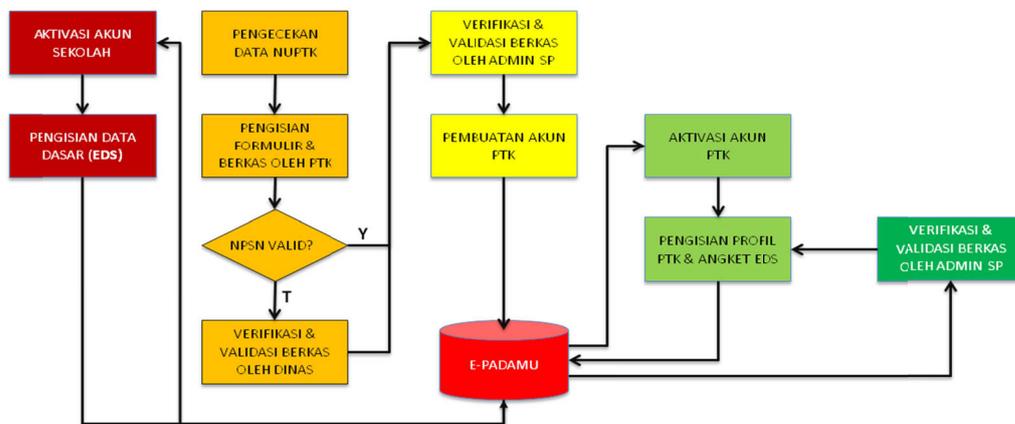
Guna melihat tingkat ketercapaian dua sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui IKU persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Memenuhi Standar Nasional Pendidikan	10%; (39.000)	38.339 sekolah	98,30	50%	92.82%	185.64

Sasaran strategis Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan pencapaiannya didukung oleh IKU *Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Memenuhi Standar Nasional Pendidikan*. Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pasal 20 menyatakan bahwa salah satu jenis kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah evaluasi dan pemetaan mutu satuan atau program pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemetaan mutu pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya dengan berbasis EDS. Pemetaan mutu berbasis EDS ini telah dilakukan sejak tahun 2010 dengan sasaran terbatas. Pada tahun 2013 pemetaan mutu pendidikan dengan mengikuti pola evaluasi diri sekolah (EDS) ini dilaksanakan dengan sasaran semua satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemetaan ini diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai acuan dalam melakukan evaluasi diri di tingkat sekolah serta sekaligus memetakan mutu pendidikan pada tingkat pusat maupun daerah.

Pelaksanaan pemetaan ini melibatkan banyak instansi yang terkait seperti Sekretariat BPSDMPK-PMP, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Sekolah. Besarnya jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran pemetaan mutu tahun 2013 dan banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mendorong Badan PSDMPK-PMP untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada. Salah satu bentuk

optimalisasi adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta mengintegrasikan proses pemetaan ini dengan proses pemutahiran NUPTK yang saat ini menjadi salah satu media yang sangat penting dalam menjamin memberikan identitas yang baku bagi para pendidik dan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diintegrasikan antara data yang ada dalam NUPTK dengan pelaksanaan EDS. Dengan demikian sangat diperlukan suatu panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dalam rangka mengintegrasikan verifikasi dan validasi/pemutahiran NUPTK dengan EDS.



Integrasi Pelaksanaan NUPTK dan EDS

Evaluasi diri sekolah (EDS) telah dilaksanakan sejak tahun 2010 oleh Badan PSDMPK-PMP. Program EDS dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan mendistribusikan instrumen kuisioner-kuisioner kepada responden di setiap sekolah. Hasil dari pengisian instrumen kuisioner kuisioner tersebut menjadi dasar dari proses analisa mutu pendidikan mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pelaksanaan EDS 2013 dilakukan dengan pendekatan transaksi *real time* berbasis internet dengan melibatkan 128.121 sekolah se-Indonesia dari mulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri dan swasta khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses pelaksanaan EDS *online* dilakukan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dengan asumsi semakin banyaknya jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki fasilitas TIK (komputer, laptop, dan

internet) serta semakin berkembangnya dan stabilnya jaringan komunikasi data di seluruh Indonesia.

Hal ini sejalan dengan disediakannya fasilitas internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) dan dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan menggunakan teknologi *online*. Cara ini meningkatkan sasaran pemetaan EDS jauh melebihi target IKU. Sampai terakhir penutupan pengisian EDS di akhir bulan September tercatat sejumlah 192.875 sekolah atau 74.28% telah melakukan pengisian instrument EDS secara lengkap dan telah dapat dianalisis. Jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah sekolah yang telah ditargetkan oleh Badan PSDMPK-PMP tahun 2013 sebesar 50% atau 51.948 sekolah dari jumlah sekolah secara nasional yang akan melakukan EDS, sehingga realisasi tahun 2013 mencapai 92.82% dan persentase capaian IKU sampai dengan tahun 2013 adalah 185.64%. Berikut capaian jumlah sekolah per jenjang pendidikan:

Tabel Perbandingan Realisasi EDS Tahun 2012 dan 2013
Dibandingkan Jumlah Sekolah per Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	2012	% Realisasi	2013	% Realisasi	% Kenaikan
1	SD	148.660	26.031	17,51	133.176	89,58	72,07
2	SMP	36.875	7.553	20,48	36.120	97,95	77,47
3	SMA	11.572	2.944	25,44	12.247	105,83	80,39
4	SMK	10.685	1.811	16,95	11.332	106,06	89,11
	TOTAL	207.792	38.933	18,45	192.875	92,82	74,37

Penjelasan tentang capaian kinerja per jenjang pendidikan untuk pelaksanaan pemetaan mutu satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut:

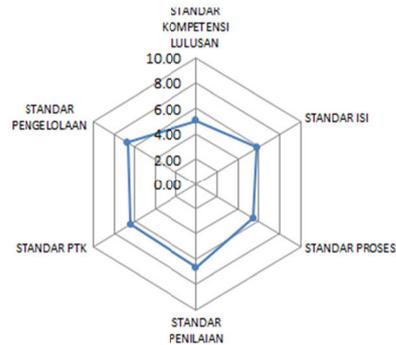
1. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Dari tabel 3.11 terkait data ketercapaian EDS tahun 2013 untuk jenjang sekolah dasar, dari keseluruhan SD sejumlah 148.660, yang mengikuti EDS mencapai 133.176 sekolah atau 89,58%. Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan EDS tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 72,07% dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 26.031 sekolah atau 17,51%.

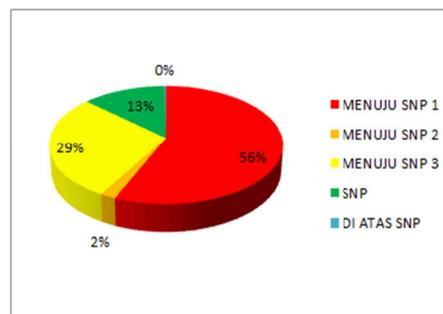
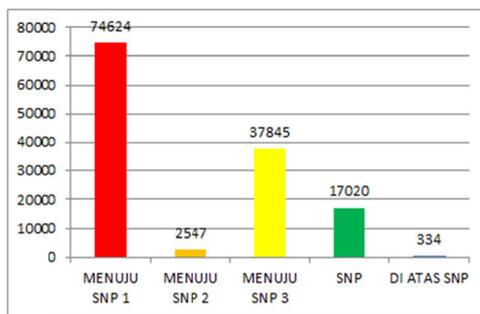
Data jenjang sekolah dasar yang telah melaksanakan EDS pada umumnya memenuhi SNP 1. Hal ini ditunjukkan dengan 56% sekolah yang ada, sedangkan yang menuju SNP 2 dan SNP 3 berturut-turut sebanyak 2% dan 29%. Penilaian EDS tahun 2013 juga dititikberatkan pada 6 SNP, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar PTK dan Standar pengelolaan. Secara nasional jumlah sekolah yang telah melampaui 6 SNP mencapai 2%, sedangkan yang sesuai dengan SNP mencapai 13%.

Gambar Capaian Pemenuhan SNP di Sekolah Dasar (SD) – Nasional

STANDAR	NILAI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	5.05
STANDAR ISI	5.81
STANDAR PROSES	5.49
STANDAR PENILAIAN	6.65
STANDAR PTK	6.44
STANDAR PENGELOLAAN	6.67
SNP	5,94



KELOMPOK CAPAIAN PEMENUHAN SNP



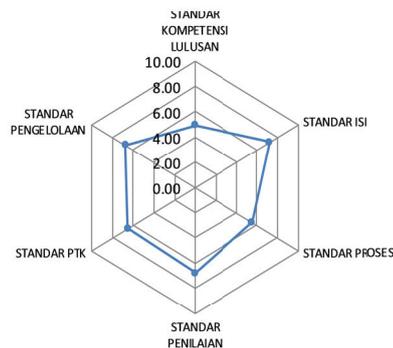
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Dari data yang dapat dianalisis pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 36.120 sekolah atau sekitar 97,95% dari keseluruhan sekolah yaitu 36.120. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 77,47% dibandingkan tahun 2012.

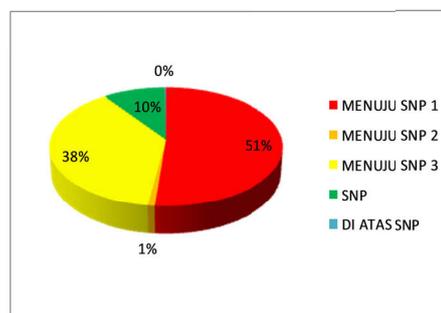
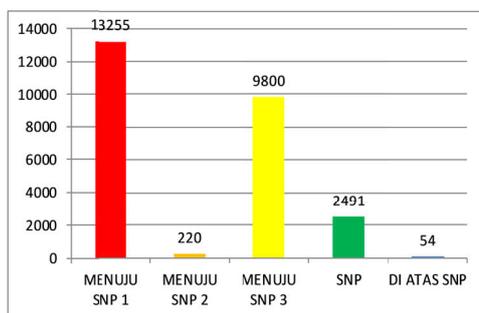
Dari data tersebut, 54 sekolah telah melampaui SNP 54 sekolah, yang sesuai dengan SNP 10%, sedangkan yang menuju SNP 3 sebanyak 38%. Jumlah presentase terbesar adalah menuju SNP 1 yaitu 51%, sedangkan yang menuju SNP 2 adalah 1%.

Gambar Capaian Pemenuhan SNP di Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Nasional

STANDAR	NILAI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4.95
STANDAR ISI	7.21
STANDAR PROSES	5.50
STANDAR PENILAIAN	6.76
STANDAR PTK	6.49
STANDAR PENGELOLAAN	6.75
SNP	6.22



KELOMPOK CAPAIAN PEMENUHAN SNP

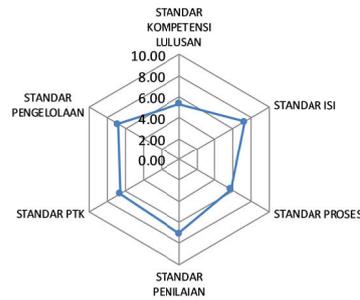


3. Jenjang Sekolah Menengah Atas

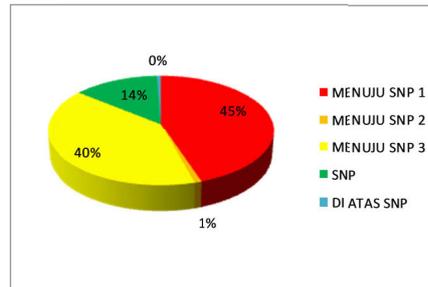
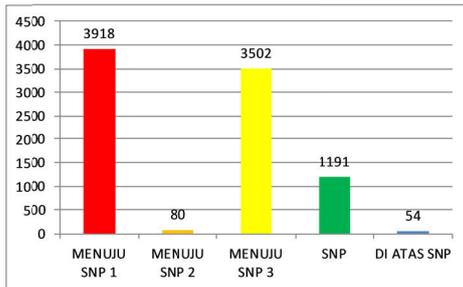
Pada jenjang sekolah menengah atas yang telah mengikuti EDS pada tahun 2013 adalah sebanyak 12.247 dari 11.572 sekolah atau 105,83% sehingga terjadi peningkatan 80,39% dari tahun sebelumnya. Persentase capaian lebih dari seratus persen dikarenakan munculnya sekolah menengah atas baru sejalan dengan dicanangkannya Kebijakan Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) oleh Kemdikbud. Namun pada tahun 2013 yang mengikuti EDS secara *online* ini, lebih dari setengah sekolah atau 45% masih dalam tahap pemenuhan menuju SNP 1, yang menuju dalam SNP 3 sebanyak 40%, sedangkan yang sesuai dengan SNP mencapai 14%. Untuk sekolah yang telah melampaui SNP hanya sebanyak 54 sekolah.

Gambar Capaian Pemenuhan SNP di Sekolah Menengah Atas (SMA) – Nasional

STANDAR	NILAI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	5.34
STANDAR ISI	7.25
STANDAR PROSES	5.71
STANDAR PENILAIAN	7.05
STANDAR PTK	6.60
STANDAR PENGELOLAAN	6.85
SNP	6.41



KELOMPOK CAPAIAN PEMENUHAN SNP



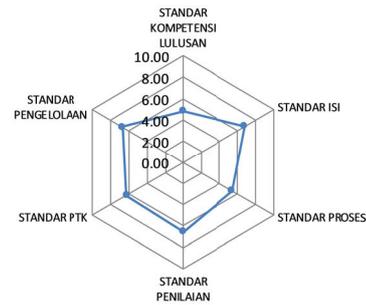
4. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan

Pada sekolah menengah kejuruan yang telah mengikuti EDS adalah sebanyak 11.332 sekolah atau 106,06% dari total 10.685. Dalam hal ini, jumlah sekolah menengah kejuruan yang telah mengikuti EDS meningkat 89,11% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.811 sekolah atau 16,95%. Hal tersebut dikarenakan munculnya sekolah menengah atas baru sejalan dengan dicanangkannya Kebijakan Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) oleh Kemdikbud.

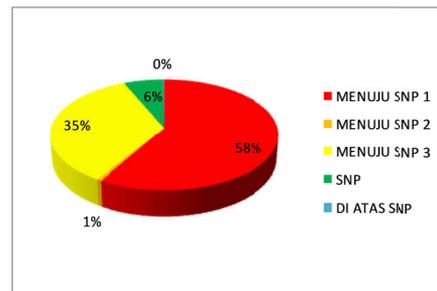
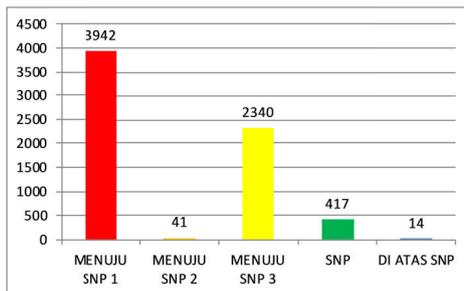
Namun lebih dari setengah jumlah sekolah yang mengikuti EDS secara *online* pada tahun 2013 ini atau 58% masih dalam tahap pemenuhan menuju SNP 1, 35% menuju SNP 3, sedangkan 6% lagi sesuai dengan SNP. Jumlah sekolah menengah kejuruan yang telah melampaui SNP hanya sebanyak 14 sekolah.

Gambar Capaian Pemenuhan SNP di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) – Nasional

STANDAR	NILAI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4.86
STANDAR ISI	6.82
STANDAR PROSES	5.42
STANDAR PENILAIAN	6.56
STANDAR PTK	6.29
STANDAR PENGELOLAAN	6.74
SNP	6.05



KELOMPOK CAPAIAN PEMENUHAN SNP



6. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)

Program penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung lima sasaran strategis, antara lain:

- Meningkatnya Kualitas Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan;
- Meningkatnya Hasil Penelitian untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan;
- Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan kebudayaan yang bermanfaat untuk merumuskan bahan kebijakan dan masyarakat luas;
- Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program penelitian dan pengembangan, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utamanya.

a. Meningkatnya Kualitas Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan perbukuan

Ketercapaian sasaran strategis di atas perealisasiannya didukung oleh satu IKU Persentase Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan	Persentase penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan	80%	88,42%	110,53	100%	90,81%	90,81

Pada tahun 2013 meningkatnya kualitas kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan, difokuskan pada penyiapan bahan kurikulum dan perbukuan yang meliputi: penyusunan kurikulum 2013 untuk mata pelajaran wajib pendidikan dasar dan menengah dan mata pelajaran peminatan di SMA dan di SMK (peminatan dasar keahlian) dan penyusunan buku teks pelajaran untuk siswa dan buku guru untuk mata pelajaran wajib, serta penilaian buku teks pelajaran untuk siswa dan buku guru mata pelajaran peminatan di SMA dan SMK, serta pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Sekolah Sasaran pada 64 SD, 44 SMP, 44 SMA, dan 28 SMK di 33 Propinsi.

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan capaian kinerjanya belum sesuai target yang direncanakan dalam renstra 100%, dan hanya terealisasi sebesar 90,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar 88,42%, maka dengan realisasi tahun 2013 (90,81%) berarti ada peningkatan sebesar 2,39%. Hal ini dikarenakan adanya percepatan pencapaian dan prioritas target serta peningkatan sasaran 2013, yang difokuskan pada percepatan untuk pengembangan dan penetapan kebijakan kurikulum 2013, pengembangan dan penetapan buku teks pelajaran untuk siswa dan buku guru, serta penilaian buku teks pelajaran untuk mata pelajaran peminatan.

Ketercapaian dari IKU tersebut didukung oleh 5 IKK sebagai berikut:

- 1) Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Kurikulum, Pembelajaran dan Perbukuan
- 2) Jumlah Model Kurikulum dan Perbukuan

- 3) Jumlah Paket Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan
- 4) Persentase Efektifitas Pengembangandan Penerapan Kurikulum/Perbukuan melalui Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian;
- 5) Jumlah Paket Kegiatan Peningkatan Sistem Manajemen Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan, antara lain :

- 1) Belum terlaksananya kegiatan pembelian atau pengalihan hak cipta buku teks pelajaran peminatan untuk kurikulum 2013 akibat belum selesainya proses penilaian buku;
- 2) Belum maksimalnya realisasi kegiatan pencetakan buku teks untuk *bufferstock* yang ditekankan pada pencetakan buku teks pelajaran kurikulum 2013 sebesar 76.000 eksemplar untuk 76 judul buku guru dan buku siswa untuk satuan pendidikan dengan kriteria khusus, yaitu sekolah sasaran kurikulum, berbagai pihak tingkat pusat dan daerah yang berkepentingan dengan implementasi kurikulum baru;
- 3) Belum terlaksananya kegiatan pengembangan bahan kebijakan tentang sistem pengembangan buku murah dan berkualitas akibat telah adanya penetapan kebijakan buku murah, yaitu penyusunan buku teks pelajaran untuk siswa dan buku guru oleh pemerintah untuk mata pelajaran kelompok A dan B (mata pelajaran wajib) dan pemberian kesempatan kepada penulis/penerbit untuk menyusun buku teks peminatan (kelompok C) di SMA/SMK, serta penyusunan HET (harga eceran tertinggi) untuk keseluruhan buku teks baik yang diterbitkan oleh penerbit maupun oleh pemerintah;
- 4) Pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain : penyusunan model buku teks pelajaran membutuhkan beberapa prasyarat kegiatan lainnya seperti kegiatan mengkaji, menelaah, mengembangkan, menyusun dan menetapkan perangkat kurikulum 2013 yang masih berlangsung dan berkembang, sehingga penyusunan model buku teks dan pelaksanaan sekolah rintisan kurikulum menjadi terlambat.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih baik dimasa depan adalah :

- 1) Melakukan percepatan pelaksanaan penilaian buku teks untuk mata pelajaran peminatan agar dapat dan cukup waktu untuk dilaksanakan kegiatan pembelian atau pengalihan hak cipta buku teks pelajaran peminatan untuk kurikulum 2013;
- 2) Melakukan prediksi secara akurat berbasis data untuk menetapkan alokasi volume dan jumlah anggaran kegiatan pencetakan buku teks untuk *bufferstock* dengan substansi buku pendidikan untuk kurikulum 2013 dan ditekankan pada kriteria khusus, yaitu sekolah sasaran kurikulum, berbagai pihak tingkat pusat dan daerah yang berkepentingan dengan implementasi kurikulum baru;
- 3) Menempatkan kegiatan dalam mendukung penyediaan buku yang murah dan berkualitas dengan melaksanakan kegiatan pengembangan bahan kebijakan tentang sistem pengembangan buku murah dan berkualitas sebagai kegiatan prioritas dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan;
- 4) Menempatkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prasyarat seperti kegiatan mengkaji, menelaah, mengembangkan, menyusun dan menetapkan perangkat kurikulum 2013 diprioritaskan dan dipercepat agar beberapa kegiatan penyusunan model buku teks pelajaran dan pelaksanaan sekolah rintisan kurikulum berjalan efektif, tidak terganggu dan tidak tertunda. Melakukan kontrol secara ketat waktu kritis dan diprioritaskan beberapa kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan lainnya untuk penyelesaiannya baik dari sumber daya, sumber dana, maupun faktor pendukung lainnya agar subkegiatan lainnya punya cukup waktu dan sumber daya untuk diselesaikan dalam mencapai target kinerja;
- 5) Melakukan persiapan dan pengelolaan waktu secara efektif untuk mencapai sasaran dan target kinerja secara maksimal dan berkualitas;
- 6) Mengoptimalkan koordinasi dan sistem perencanaan kebijakan yang cepat dan efektif di tingkat internal dan dengan eksternal (mitra kerja) sehingga mempermudah dan fleksibel dalam melakukan revisi target kinerja sesuai kebijakan pendidikan terutama

kurikulum dan perbukuan yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat;

- 7) Meningkatkan kemampuan profesional pegawai/SDM dan mitra kerja melalui diklat maupun workshop sejenis secara efektif, efisien, dan berkualitas dalam mencapai target kinerja.

b. Meningkatnya Hasil Penelitian untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan

Ketercapaian sasaran strategis di atas perealisasiannya didukung oleh satu IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Hasil penelitian untuk perumusan kebijakan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%	118,19%	118,19	100%	98,97%	98,97

Pada tahun 2013 meningkatnya hasil penelitian untuk perumusan kebijakan pendidikan dengan merujuk pada tiga tema kebijakan yang terdiri dari peningkatan akses, mutu, relevansi pendidikan. Di samping tiga tema kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan melakukan kegiatan lintas tema. Kegiatan yang dimaksud adalah Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu fungsi Pusat Penelitian Kebijakan adalah pengembangan jaringan penelitian. Untuk merealisasikan tugas ini maka pada tahun 2013 pengembangan jaringan penelitian menjadi salah satu agenda program Pusat Penelitian Kebijakan.

Adapun dari masing-masing arah pelaksanaan program adalah sebagai berikut.

1) Peningkatan Akses

Rekomendasi pemerataan diarahkan untuk meningkatkan APK SD/MI dan APM mencapai target sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemberlakuan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2006 merupakan instrumen

kebijakan untuk menjamin ketercapaian target Wajar Dikdas 9 Tahun. Secara lebih rinci kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan pendidikan daerah perbatasan: menyusun rekomendasi pemerataan dengan mempertimbangan faktor keterisoliran geografis dan modalitas pelayanan;
- b) Penyediaan prasarana pendidikan dasar: menyusun rekomendasi tentang distribusi prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan *efficacy* ketersediaan prasarana pendidikan bagi peningkatan daya tampung;
- c) Pendanaan pemerataan pendidikan: menyusun rekomendasi distribusi dan pemanfaatan dana pendidikan untuk mendorong partisipasi siswa pada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan *equity* dan tingkat status sosial ekonomi daerah.

2) Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu diarahkan pada pencapaian prestasi belajar siswa yang didasarkan skor UN berdasarkan tingkat profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta ketersediaan dan pemanfaatannya pada tingkat satuan pendidikan. Secara rinci kajian meliputi:

- a) Profesionalisme guru diarahkan untuk mengidentifikasi karakteristik profesionalisme yang terdiri kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi profesi untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
- b) Penyediaan dan pemanfaatan sarana pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- c) Manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan
- d) Pendanaan peningkatan mutu yang berdasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

3) Peningkatan Relevansi

Peningkatan relevansi terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu program pendidikan pada SMK dan pendidikan tinggi. Selanjutnya diarahkan pada strategi penyediaan lulusan yang sudah siap pelatihan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Rekomendasi peningkatan relevansi juga diarahkan pada sistem kerjasama antara satuan pendidikan (SMK dan Dikti) dengan dunia usaha dan industri.

4) Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan penelitian ini secara spesifik diarahkan pada kesiapan kelembagaan PAUD baik ditinjau dari ketersediaan sarana, kompetensi guru, dan program-program pendidikan yang dijadikan acuan penyelenggaraan.

5) Pengembangan Jaringan Penelitian

Pengembangan jaringan penelitian merupakan dukungan kelembagaan untuk memberdayakan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan penelitian sehingga hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitjak lebih representatif dan menyeluruh hasilnya.

Berdasarkan data kinerja kegiatan diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan, capaian kinerjanya belum sesuai target yang direncanakan dalam renstra 100% hanya terealisasi sebesar 98,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 118,19%, realisasi tahun 2013 (98,97%) berarti menurun sebesar 19,22%. Dari sisi tugas dan fungsinya sebenarnya Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) sudah berhasil menyelesaikan kegiatan inti (*core bussiness*) yang direncanakan. Penurunan sebesar 19,22% dikarenakan adanya beberapa output pendukung yang belum berhasil mencapai target yang direncanakan dalam Renstra dan RKAKL.

Ketercapaian dari IKU tersebut didukung oleh 8 IKK sebagai berikut:

- 1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan PAUD berbasis Penelitian dan Pengembangan
- 2) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Dasar berbasis Penelitian dan Pengembangan
- 3) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah berbasis Penelitian dan Pengembangan
- 4) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Tinggi berbasis Penelitian dan Pengembangan
- 5) Jumlah Rekomendasi Kebijakan tentang Manajemen Pendidikan
- 6) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nonformal dan Informal berbasis Penelitian dan Pengembangan
- 7) Persentase Jaringan Penelitian dan Pembinaan
- 8) Persentase Penyebaran Informasi Hasil Penelitian

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan, antara lain :

- 1) Terbatasnya jumlah SDM Peneliti yang ada;
- 2) Penelitian yang dilakukan selama ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan penelitian dan penganggaran yang sudah direncanakan terlebih dahulu, sehingga penelitian masih bersifat parsial, masih memerlukan pertimbangan-timbangan lain, disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian. Dengan demikian rekomendasi yang disampaikan belum semua sesuai dengan problem yang akan dipecahkan, dan belum semua digunakan sebagai bahan kebijakan karena tidak tepat waktu dan tepat sasaran ketika ada permasalahan lain yang mendesak untuk dicarikan solusinya;
- 3) Penerbitan Jurnal Penelitian sering terhambat oleh kesulitan memperoleh artikel karena tidak adanya kesiapan dan waktu yang cukup bagi penulis artikel dan terbatasnya petugas editor yang memiliki komitmen dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih baik dimasa depan adalah :

- 1) Perlu dibuat daftar kebutuhan tenaga (SDM) dengan cermat dan mempertimbangkan kompetensinya serta membuat program peningkatan kemampuan bagi para staf peneliti dengan terencana;
- 2) Dalam menyusun topik penelitian melibatkan Unit Utama (*stakeholder*) di lingkungan Kemdikbud untuk mengajukan permasalahan kebijakan yang merupakan prioritas untuk dikaji atau dianalisis melalui kegiatan Penelitian guna memperoleh rekomendasi sebagai bahan masukan untuk menentukan Kebijakan. Untuk itu perlu disiapkan 2 (dua) strategi atau cara penelitian yang akan dilakukan, yaitu: Pertama, melakukan Penelitian atas Topik-topik yang merupakan Prioritas dari Unit Utama di lingkungan Kemdikbud dan Topik-topik penelitian sesuai Renstra atau *Road Map* Kemdikbud, khususnya Puslitjak Balitbang, yang telah diagendakan. Kedua,

Melakukan Kajian, Analisis atau Penelitian Cepat (*Rapid Research*) atas permasalahan atau Isu-isu Aktual dan strategis yang harus dicarikan Solusi atau jalan keluar secepatnya;

- 3) Menginformasikan kepada khalayak agar berpartisipasi untuk mengirimkan artikel dengan memperhatikan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku dan memilih/menetapkan Mitra bestari yang handal dan berdedikasi tinggi.

c. Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan

Ketercapaian sasaran strategis di atas perealisasiannya didukung oleh satu IKU Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan	Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan	100%	100%	100	100%	70,47%	70,47

Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan yang ditandai dengan keberhasilan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan melalui Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan.

Pengembangan soal akademik dan non akademik meliputi: Penyediaan butir-butir soal yang terkalibrasi untuk masukan ujian nasional dalam rangka meningkatkan standar dan disparitas mutu pendidikan.

Model penilaian yang dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai bahan masukan bagi kementerian dalam menetapkan kebijakan sistem penilaian.

Analisis hasil penilaian pendidikan melalui survey yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional yang selanjutnya dijadikan informasi perbandingan mutu

pendidikan di tingkat nasional maupun internasional dan menjadi bahan kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan, capaian kerjanya belum sesuai dengan target yang direncanakan dalam renstra sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 70,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 100%, realisasi tahun 2013 (70,47%) yang berarti menurun sebesar 29,53 %. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan berkelanjutan (*continuous*) yaitu kegiatan awal belum dilaksanakan maka kegiatan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, antara lain kegiatan model aplikasi pemindaian untuk sistem pendataan rapor seharusnya dilaksanakan sebelum Ujian Nasional. Karena pengadaan server sebagai pendukung pendataan belum dapat dilaksanakan, sehingga pendataan memakai aplikasi tahun sebelumnya dengan sedikit perbaikan.

Ketercapaian dari IKU tersebut diatas perrealisasiannya didukung oleh 6 IKK sebagai berikut:

- 1) Jumlah Soal/Kaset Penilaian Akademik untuk Peserta Didik dan PTK
- 2) Jumlah Soal Penilaian Non Akademik untuk Peserta Didik dan PTK
- 3) Jumlah Analisis Hasil Penilaian Pendidikan dan Survey Tingkat Nasional dan Internasional
- 4) Jumlah PTK yang Terlibat Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Penilaian Pendidikan
- 5) Jumlah Model Penilaian Pendidikan
- 6) Jumlah Informasi Hasil Penilaian Pendidikan yang Disebarkan dan Layanan Manajemen

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan, antara lain :

- 1) Adanya beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan berkelanjutan (*continuous*) yaitu kegiatan awal belum dilaksanakan maka kegiatan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, antara lain kegiatan model aplikasi pemindaian untuk sistem pendataan rapor seharusnya dilaksanakan sebelum Ujian Nasional. Karena pengadaan server sebagai pendukung pendataan belum dapat dilaksanakan, sehingga pendataan memakai aplikasi tahun sebelumnya dengan sedikit perbaikan.
- 2) Perbedaan periode tahun anggaran (keuangan) dengan tahun akademik. Beberapa kegiatan di Puspendik memiliki karakteristik yang sangat tergantung pada peserta didik. Perbedaan periode tahun anggaran (Januari-Desember) dengan tahun akademik (Juli-Juni) dapat mengakibatkan beberapa langkah kegiatan tidak dapat direalisasikan, khususnya ketika terjadi keterlambatan pencairan dana, antara lain langkah ujicoba atau pengumpulan data pada beberapa kegiatan yang direncanakan dengan sampel peserta didik pada akhir semester genap (Mei-Juni) tidak dapat dilakukan ketika anggaran baru dimulai awal Juli. Hal ini dapat berakibat pada realisasi langkah kegiatan selanjutnya.
- 3) Ketidaksesuaian antara target RKAKL dengan target renstra tahun berjalan. Pada RKAKL Puspendik 2013 ada beberapa output yang targetnya lebih rendah dari target renstra. Dengan demikian, meskipun realisasi telah memenuhi target RKAKL/DIPA, hal ini belum mampu memenuhi target output renstra.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih baik dimasa depan adalah :

- 1) Penyusunan langkah dan jadwal kegiatan harus lebih terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
- 2) Tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat dilakukan percepatan pencairan anggaran.
- 3) Penetapan target untuk Renstra ke depan agar menggunakan baseline data tahun sebelumnya, sehingga terdapat sinkronisasi antara target Renstra dan target DIPA

d. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan yang Bermanfaat untuk Merumuskan Bahan Kebijakan dan Masyarakat.

Ketercapaian sasaran strategis di atas perealisasiannya didukung oleh satu IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan yang Bermanfaat untuk Merumuskan Bahan Kebijakan dan Masyarakat Luas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%	90%	90	100%	72,22%	72,22

Pada tahun 2013 meningkatnya kualitas dan kuantitas Penelitian dan pengembangan kebudayaan yang bermanfaat untuk merumuskan bahan kebijakan dan masyarakat luas ditandai dengan ketercapaian sebagian besar rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan khususnya terkait empat tema kebijakan yaitu: penguatan karakter bangsa, apresiasi kreatifitas seni dan keragaman budaya, internalisasi nilai budaya, dan pelestarian warisan budaya.

Penguatan karakter diarahkan pada penanaman sikap dan perilaku peserta didik melalui pemanfaatan nilai-nilai budaya pada jenis-jenis kearifan lokal yang dimiliki di setiap daerah. Peningkatan apresiasi kreatifitas seni dan keragaman budaya diupayakan melalui pemanfaatan kesenian tradisional, apresiasi sastra, lomba penulisan esai budaya, dan strategi pengembangan film independen.

Internalisasi nilai-nilai budaya dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya budaya lokal oleh satuan pendidikan. Pelestarian warisan budaya diupayakan melalui penelitian dan pendokumentasian warisan budaya untuk diusulkan dalam pencatatan warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang direncanakan dalam renstra sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 72,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 90%, realisasi tahun 2013 (72,22%) yang berarti menurun sebesar 17,78%. Hal ini terjadi

karena pelaksanaan output kegiatan baru mulai pada akhir bulan Juni 2013 sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana. Disamping itu jumlah SDM fungsional peneliti sangat terbatas, dan adanya perubahan kebijakan penganggaran dari belanja bantuan sosial menjadi belanja barang sehingga kegiatan Implementasi kerjasama dengan Pusat Kajian Kebudayaan di 7 (tujuh) PTN tidak dapat dilaksanakan.

Ketercapaian dari IKU tersebut diatas perealisasiannya didukung oleh 4 IKK sebagai berikut:

- 1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian Kebudayaan
- 2) Jumlah Dokumen Program dan Kerjasama Kebudayaan
- 3) Jumlah Dokumen Hasil Dokumentasi dan Publikasi Kebudayaan
- 4) Jumlah Dokumen Pengelolaan Manajemen Kebudayaan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan diantaranya adalah:

- a. Terbatasnya ketersediaan jumlah SDM yang dibutuhkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.
- b. Terbatasnya peneliti dari instansi lain yang dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian di Puslitbangbud, karena kesulitan mengatur jadwal kegiatan yang harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan karena keberadaan Puslitbangbud yang baru bergabung dengan Balitbang Kemdikbud pada tahun 2012.
- d. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan (baru dapat dilaksanakan akhir bulan Juni 2013), sedangkan penelitian membutuhkan tahapan kegiatan dan waktu yang cukup lama.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dimasa depan adalah :

- a. Perlunya penambahan SDM yang relevan dan pemberdayaan secara maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi Puslitbangbud

- b. Melakukan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan antara lain perguruan tinggi, dan lembaga penelitian swasta dengan melibatkan dalam tim untuk membantu mengurangi kekurangan tenaga.
- c. Mempercepat penyediaan sarana prasarana untuk Puslitbangbud
- d. Mempercepat pelaksanaan kegiatan Menyusun jadwal dan melaksanakan program dan kegiatan secara paralel

b. Meningkatnya program/satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi.

Ketercapaian sasaran strategis di atas perealisasiannya didukung oleh dua IKU berikut ini :

- a. Persentase Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah, Prodi Dan Institusi PT, LPTK yang di Akreditasi;
- b. Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya program/satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi	Persentase Program/ Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/ Madrasah, Prodi dan Institusi PT, LPTK yang di Akreditasi	100%	100%	100	100%	85,04%	85,04
	Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan	100%	100%	100	100%	97,59%	97,59

Pada tahun 2013, meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi ditandai dengan keberhasilan Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah, Prodi dan Institusi PT, LPTK di Akreditasi. Akreditasi telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pelaksanaan akreditasi di seluruh Indonesia.

Disamping itu peningkatan standar nasional mutu pendidikan ditandai dengan keberhasilan penyelenggaraan Ujian Nasional, meskipun pelaksanaan UN tingkat SMA tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan serentak. Pelaksanaan UN di 11 provinsi di kawasan Indonesia bagian tengah terpaksa mundur, pergeseran jadwal tersebut murni karena masalah teknis yang terjadi saat percetakan naskah soal.

Berdasarkan data Kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah, Prodi dan Institusi PT, LPTK yang di Akreditasi capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang direncanakan dalam renstra sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 85,04%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 100%, realisasi tahun 2013 (85,04%) yang berarti menurun sebesar 14,96%.

Dan IKU Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan, capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang direncanakan dalam renstra sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 97,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 100%, realisasi tahun 2013 (97,59%) yang berarti menurun sebesar 2,41%.

Hal ini terjadi karena adanya PMK Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka terjadi perubahan mekanisme pembayaran pada DIPA Balitbang, khususnya kegiatan UN dan akreditasi S/M. Perubahan belanja bantuan sosial menjadi belanja barang ini menjadi kendala bagi kegiatan UN dan akreditasi S/M dalam menyelesaikan pertanggungjawaban.

Ketercapaian dari IKU Persentase Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah, Prodi dan Institusi PT, LPTK yang di Akreditasi perealisasiannya didukung oleh 8 IKK sebagai berikut:

1) Jumlah Pengembangan Akreditasi S/M

Capaian Sekolah/Madrasah diakreditasi tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Capaian Sekolah/Madrasah Diakreditasi Tahun 2013

NO	SATUAN PENDIDIKAN	TARGET AWAL	REALISASI
1	SD/MI	11.624	4.003
2	SMP/MTs	6.383	2.848
3	SMA/MA	2.614	1.239
4	SMK	1.112	1.489
5	SLB	272	182
JUMLAH		22.005	10.220

Capaian Sekolah/Madrasah Diakreditasi Per Peringkat Tahun 2013

NO	SATUAN PENDIDIKAN	PERINGKAT					JUMLAH
		A	B	C	TT	Belum Ditetapkan	
1	SD/MI	731	2.421	792	59	459	4.462
2	SMP/MTs	614	1.351	555	55	273	2.848
3	SMA/MA	491	446	188	40	74	1.239
4	SMK/MAK	591	655	132	38	73	1.489
5	SLB	69	78	14	6	15	182
	JUMLAH	2.496	4.951	1.681	198	894	10.220

2) Persentase Pengembangan Manajemen Akreditasi S/M

3) Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi

Capaian program studi dan institusi perguruan tinggi diakreditasi tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Capaian Prodi Perguruan Tinggi Diakreditasi Tahun 2013

NO	STATUS PERGURUAN TINGGI	JENJANG			JUMLAH
		D3	S1	Pasca Sarjana	
1	NEGERI	98	366	143	607
2	SWASTA	368	1.593	114	2.075
3	KEAGAMAAN	1	449	26	476
4	KEDINASAN	33	9	0	42
	JUMLAH	500	2.417	283	3.200

Capaian Institusi Perguruan Tinggi Diakreditasi Tahun 2013

NO	STATUS PERGURUAN TINGGI	JENJANG					JUMLAH
		UNIV.	INST.	S.T	AKA	POLI	
1	NEGERI	10	2	0	0	2	14
2	SWASTA	10	0	3	0	0	13
3	KEAGAMAAN	2	1	0	0	0	3
4	KEDINASAN	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	22	3	3	0	2	30

4) Persentase Pengembangan Manajemen Akreditasi PT

5) Persentase Pengembangan Akreditasi LPTK

6) Jumlah Program/Satuan PNF Diakreditasi

Capaian Program/Satuan PNF diakreditasi tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Capaian Program/Satuan PNF Diakreditasi Tahun 2013

NO	PROGRAM	TARGET RENSTRA 2013	TARGET RKAKL 2013	REALISASI 2013
1	PAUD	1.000 program/ Satuan PNF	900 program/ Satuan PNF	474 Prog/Satuan
2	Paket A			2 Program
3	Paket B			18 Program
4	Paket C			34 Program
5	LKP			357 Prog/Satuan
6	PKBM			15 Satuan
JUMLAH		1.000 Program/Satuan PNF	900 Program/Satuan PNF	900 Program/Satuan PNF

- 7) Jumlah Pengembangan Akreditasi PNF
- 8) Jumlah Pengembangan Manajemen Akreditasi PNF

Dan IKU Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan perealisasiannya didukung oleh 2 IKK sebagai berikut:

- 1) Jumlah SNP Dikembangkan dan Disempurnakan
- 2) Jumlah Peserta Didik yang Dinilai Kompetensinya Sesuai SNP

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 terdapat perbedaan mendasar, tahun 2012 terdiri atas 5 jenis soal, sedangkan tahun 2013 ini terdiri atas 20 jenis soal. Semua siswa dalam satu ruangan akan mendapatkan jenis soal yang berbeda-beda dengan bobot kesulitan masing-masing tetap sama.

Soal tiap siswa di satu kelas berbeda supaya lebih terukur kerahasiaannya, terjaga, dan mencegah kebocoran. Setiap jenis soal akan ada *barcode* sebagai tanda keaslian dan keabsahan soal tersebut sehingga tidak mudah dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap siswa diharuskan mencantumkan seri soal di lembar jawab komputer (LJK).

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah, Prodi dan Institusi PT, LPTK yang di Akreditasi, sebagai berikut :

a. BAN S/M, capaian kerjanya belum sesuai dengan target tahunan yang direncanakan, kendala yang dihadapi antara lain :

- Badan Akreditasi Nasional S/M (BAN S/M) belum siap dengan perubahan mekanisme anggaran, perubahan pembiayaan akreditasi sekolah/ madrasah yang semula termasuk pada belanja bantuan sosial (bansos) menjadi belanja barang, sehingga dana untuk akreditasi sekolah/madrasah baru dapat direalisasikan menjelang akhir tahun anggaran, hal tersebut mengakibatkan pada tahun 2013 rencana akreditasi di sebagian besar sekolah/madrasah tidak dapat terlaksana
- Anggaran BAN-S/M untuk akreditasi sekolah/madrasah setiap tahunnya menunjukkan grafik yang menurun, sehingga menyebabkan masih banyak sekolah/madrasah yang masih belum diakreditasi terutama yang berada di daerah pedalaman atau terluar karena membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjangkau daerah tersebut.

Melihat permasalahan yang dihadapi BAN S/M di atas beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dimasa depan adalah:

- Menyiapkan pedoman mekanisme pembayaran dengan peraturan yang baru yaitu mekanisme penganggaran dengan pembiayaan belanja barang.
- Mengusahakan keberlangsungan dukungan dana dari APBD

b. BAN PT, capaian kerjanya belum sepenuhnya sesuai dengan target tahunan yang direncanakan, masih ada sedikit kendala yang dihadapi yaitu Rekomendasi Strategi Aliansi tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaannya didasarkan pada undangan dari pihak Asosiasi Badan Akreditasi Internasional mengingat BAN PT hanya sebagai anggota asosiasi.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dimasa depan adalah : menyusun jadwal dan rencana kegiatan untuk tahun 2014, mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait Program/kegiatan BAN-PT.

c. BAN PNF, capaian kerjanya sudah sesuai dengan target tahunan yang direncanakan, namun demikian masih ada sedikit kendala yang dihadapi yaitu

- Anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk mengakreditasi 900 progra/satuan PNF
- Lembaga PNF yang mengajukan permohonan akreditasi belum maksimal, hal ini dikarenakan belum semua lembaga PNF mengerti pentingnya akreditasi.
- Belum terjadi sinergi antara BAN PNF dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagai institusi pembina dari program/satuan PNF.
- Dukungan dan peran serta dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota sebagai pembina yang langsung kepada program/satuan PNF belum maksimal dalam hal memotivasi program/satuan PNF untuk menyelenggarakan atau melaksanakan proses pembelajaran yang dituntut oleh standar nasional pendidikan dan pelaksanaan akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan khususnya pendidikan nonformal.

Melihat permasalahan yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan dimasa depan adalah :

- Meningkatkan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pengelola lembaga PNF ada di propinsi, kabupaten/kota mengenai penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi PNF sesuai dengan amanat UU RI No 20 Tahun 2003 dan PP RI No. 19 Tahun 2005.
- Meningkatkan koordinasi untuk bersinergi antara BAN PNF dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan nonformal.

- Meningkatkan dukungan dan peran serta dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dalam pembinaan program/satuan PNF yang bermutu berdayaguna dan berdayasaing dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Penghitungan target renstra untuk IKK Peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai SNP setiap tahunnya diperkirakan naik 3% ternyata target tersebut tidak tercapai;
- 2) Keterlambatan percetakan naskah soal yang berdampak UN tingkat SMA tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan serentak. Pelaksanaan UN di 11 provinsi di kawasan Indonesia bagian tengah (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur) terpaksa mundur.

Hasil pemeriksaan tim audit dari BPK ditemukan data dan fakta penyebab permasalahan dalam penyelenggaraan UN 2013, yaitu :

- 1) Keterlambatan DIPA Kemdikbud dibuka oleh Kemenkeu
- 2) Kelemahan manajerial di Kemdikbud
- 3) Kelemahan manajerial di percetakan
- 4) Kurang baiknya pengawasan di percetakan

Melihat permasalahan yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan dimasa depan adalah :

- a. Penghitungan peserta didik yang akan mengikuti UN berdasarkan data yang valid
- b. Percetakan naskah soal UN tahun yang akan datang agar dikembalikan kepada Provinsi.

7. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Program pengembangan dan pembinaan bahasa merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia khususnya bahasa dan sastra Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis

keenam yaitu terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pengembangan dan pembinaan bahasa, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Terlindunginya bahasa daerah dari kepunahan.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU "Jumlah bahasa daerah di Indonesia teridentifikasi". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlindunginya bahasa daerah dari kepunahan	Persentase bahasa daerah di Indonesia teridentifikasi	597 (80%)	584 (78,29%)	97,9	619 (83%)	614 (82,34%)	99,16

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU "Jumlah bahasa daerah di Indonesia teridentifikasi" dengan target sebesar 619 bahasa (83% dengan asumsi n=746 bahasa) tidak terealisasi sesuai dengan rencana tetapi hanya terealisasi sebesar 614 bahasa (82,34%) dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,16%. Realisasi ini merupakan akumulasi dari target-target tahun sebelumnya. Dengan demikian, sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 bahasa daerah yang telah berhasil diidentifikasi adalah sebanyak 614 bahasa atau terdapat penambahan sebanyak 30 bahasa daerah dari realisasi pada tahun 2012 (584 bahasa).

Upaya pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai mana tertuang pada tabel di atas dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, yang diwujudkan dalam bentuk pemetaan bahasa daerah di Indonesia. Pada tahun anggaran 2013 pemetaan bahasa daerah difokuskan ke wilayah timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Berikut rincian bahasa daerah yang berhasil dipetakan selama tahun 2013.

No	Nama Bahasa	Daerah Asal
1	Bahasa Kwinsu	Kampung Ansudu, Distrik Sungai Biri, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
2	Bahasa Segar	Kampung Segar, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
3	Bahasa Bora-Bora	Kampung Bora-Bora, Distrik Ismari, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
4	Bahasa Kwari	Kampung Epawa, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
5	Bahasa Boi	Kampung Nadofoai, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
6	Bahasa Marita	Kampung Wobari, Distrik Risey Sayati, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua
7	Bahasa Mandobo Bawah	Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
8	Bahasa Bipin	Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
9	Bahasa Amungme	Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
10	Bahasa Iraputu	Provinsi Papua Barat.
11	Bahasa Kalamang	Provinsi Papua Barat.
12	Bahasa Arguni	Provinsi Papua Barat.
13	Bahasa Blue Klesi	Kampung Klaisu, Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
14	Bahasa Kapauri	Kampung Hulu Atas, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
15	Bahasa Kosare (Kosareh, Kosale)	Kampung Muara Nawa, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
16	Bahasa Yamas	Kampung Yamas, Distrik Joerat, Kab. Asmat, Provinsi Papua.
17	Bahasa Tomor	Kampung Tomor, Distrik Surusuru, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
18	Bahasa Pupis	Kampung Pupis, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
19	Bahasa Mare	Kampung Kombif, Distrik Mare Raya, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.
20	Bahasa Soon	Kampung Soon, Distrik Sujak, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat
22	Bahasa Mor	Kampung Metimber, Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat.
23	Bahasa Gii (Abun), Barat	Kampung Werur, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua
24	Bahasa Fkour	Kampung Pasir Putih, Distrik Fkour, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
25	Bahasa Maisomara	Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.
26	Bahasa Bku (Bgu, Bonggo, Armopa)	Kampung Kiren, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua.
27	Bahasa Sumuri	Kampung Agoda, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
28	Bahasa Salkma	Kampung Klomit, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.
29	Bahasa Palamul	Kampung Sailolof, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Papua Barat.
30	Bahasa Waliam	Kampung Waliam, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Papua Barat.
31	Bahasa Kambran	Kampung Fuog, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Berdasarkan data tersebut, telah terkumpul 30 bahasa daerah yang sudah diidentifikasi dari target 35 bahasa daerah. Hambatan dan permasalahan ketidaktercapaian target tersebut karena pada pelaksanaan pengambilan data tahap III (bulan November) yang semula ditargetkan 11 daerah pengamatan hanya dapat dilakukan di 6 daerah pengamatan karena kondisi keamanan di Papua tidak memungkinkan untuk menyelesaikan target.

Melihat hambatan dan permasalahan yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih baik di masa depan adalah sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan pengambilan data dilakukan di awal tahun sehingga jika terjadi kondisi lapangan yang tidak diharapkan masih dapat segera menjadwalkan ulang pengambilan data yang terlewat.
2. Penjadwalan kegiatan pengambilan data perlu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat sehingga dapat diprediksi kondisi keamanan saat pengambilan data.

Berikut grafik tren kenaikan bahasa daerah yang terpetakan di Indonesia dari tahun 2011—2013.



b. meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui dua IKU berikut ini:

1. Jumlah guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional”;
2. Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) bahasa Indonesia

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia	jumlah guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional	10% (8.786)	10,03% (8.809)	100,7	13,179	11.778	89,4
	Jumlah TUK (tempat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia)	1	1	100	7	5	71,4%

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. **IKU “jumlah guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional”,** pada tahun 2013 berhasil terealisasi sebanyak 11.778 guru dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 13.179 sehingga persentase capaian kerjanya adalah sebesar 89,4%. Realisasi ini merupakan akumulasi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini yaitu pelaksanaan tes uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) bagi guru bahasa Indonesia. Pada tahun 2013 Pelaksanaan tes UKBI dilaksanakan di 16 provinsi. Berikut rincian pelaksanaan tes UKBI.

No.	Pelaksanaan UKBI	Jumlah peserta
1	Guru SMK	4
2	Guru BI	2
3	Guru BI SLTA Kota Negara, Bali	37
4	Guru BI se-Kota Cilegon	39
5	Guru BI SLTA Aceh Besar	52
6	Guru BI SMK Ambon	55
7	Guru BI se-Kota Serang	59
8	Guru BI Kota Banda Aceh	56
9	Guru BI Maluku Tengah	60
10	Guru BI SMP di Singaraja, Bali	43
11	Guru BI SMA Muntok	36
12	Guru BI SMP dan SMA Toboali	43
13	Guru BI SMP di Badung	43
14	Guru BI SMP di Tabanan	48
15	Guru BI SMA sederajat Denpasar	57
16	Guru BI Pontianak, Kalbar	50
17	Guru BI SMA sederajat, Sigi, Sulteng	55
18	Guru BI se-Kota Balikpapan	47
19	Guru BI SMA sederajat, Kuta Selatan, Kab. Badung	60
20	Guru BI SMA sederajat, Donggala, Sulteng	56
21	Guru BI Kab Kubu Raya, Kalbar	53
22	Guru BI Kabupaten Penajam Paser Utara	51
23	Guru BI se Kab. Pelalawan, Riau	58
24	Guru BI SMA Kota Batam, Kepri	57
25	Guru BI SMA se-Kab Limboto, Gorontalo	59
26	Guru BI di Serdang Bedagei, Sumut	56
27	Guru BI SMP Kota Batam, Kepri	44
28	Guru BI se Kab. Kampar (Bangkinang), Riau	57
29	Guru BI se Kab. Kabila, Gorontalo	59
30	Guru BI se Kab. Stabat, Sumut	42
31	Guru BI SMP SMA	77
32	Guru SD se-Kota Gorontalo	99
33	Guru SMP dan SMA sederajat se Kab Merauke	38
34	Guru-Guru BI se-Cilodong	23
35	Guru BI SMA/SMK Kab Konawe Utara, Waggudu	54
36	Guru BI SMA Kota Lubuk Linggau	65
37	Guru BI SMA Kab Bengkulu Tengah	53
38	Guru BI SMA Kab. Lombok Barat	61
39	Guru BI SMA Kab. Manokwari	39
40	Guru BI se Kab. Sumba Barat, NTT	64
41	Guru BI SMA Kab. Lombok Tengah, NTB	65
42	Guru BI se Kab. Sumba Barat Daya, NTT	53
43	Guru BI SMA/SMK Kab. Bombana	64

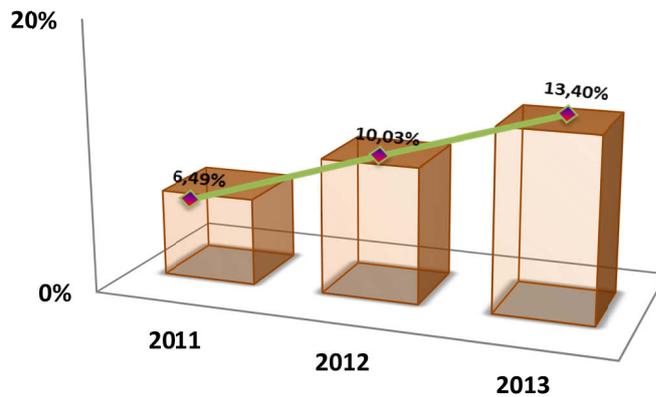
No.	Pelaksanaan UKBI	Jumlah peserta
44	Guru BI SMA sederajat se-Kab Muara Enim	64
45	Guru BI SMA Kab Bengkulu Selatan	67
46	Guru BI SMP/SMA Yapermas	20
47	Guru BI SMP/SMA se-Kab Padang Pariaman	96
48	Guru BI SMP/SMA se-Kab Pasaman Timur	83
49	Guru BI SMP/SMA se-Kab Sijunjung	91
50	Guru BI SMP/SMA se-Kab Dharmasraya	90
51	Guru BI SMP/SMA se-Kab Solok Selatan	87
52	Guru BI SMP/SMA se-Kab Solok	93
53	Guru BI SMP/SMA se-Kab Pesisir Selatan	85
	TOTAL	2.969

Ketidaktercapaian target kinerja pada indikator ini karena rencana pelaksanaan kegiatan UKBI pada bulan November di Papua hanya dapat dilakukan di dua kabupaten, yaitu Merauke dan Manokwari. Hal itu disebabkan oleh kondisi keamanan di Papua yang tidak memungkinkan dan tidak sempat dialihkan ke daerah lain.

Upaya pengoptimalan dan percepatan standardisasi kemahiran berbahasa Indoensia bagi guru bahasa Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga terampil pelaksana tes UKBI.
2. Kerja sama atau sinergi pelaksanaan tes UKBI dengan instansi lain di dalam dan di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, serta lembaga swasta.
3. Pengembangan program peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia guru bahasa Indonesia sebagai program tindak lanjut standardisasi kemahiran berbahasa Indonesia guru bahasa Indonesia.
4. Peningkatan jumlah anggaran pelaksanaan tes UKBI pada tahun anggaran berikutnya.

Berikut grafik tren persentase guru bahasa Indonesia memiliki standar kemahiran berbahasa Indonesia dari tahun 2011—2013.



2. **IKU "Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) bahasa Indonesia"**, pada tahun 2013 tingkat pencapaian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2012 telah berhasil dibentuk 1 TUK, yaitu TUK di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat. Target Pada tahun anggaran 2013 dialokasikan untuk pembentukan TUK di 7 provinsi. Ke 7 provinsi tersebut adalah Balai Bahasa Sumatera Barat, Balai Bahasa Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Riau, Balai Bahasa Provinsi Aceh, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, dan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi kinerja IKU "Jumlah TUK (tempat uji kemahiran) bahasa Indonesia" tahun 2013 adalah 5 tempat uji kemahiran dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 7 tempat uji kemahiran di 7 provinsi, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 71,4%. Ke 5 tempat uji kemahiran yang dibentuk pada tahun 2013 ini adalah TUK di Balai Bahasa Provinsi Bandung, Balai Bahasa Provinsi Riau, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Bahasa Provinsi Aceh, dan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan 2 TUK (tempat uji kemahiran) yang tidak terealisasi yaitu di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai Bahasa Sumatera Barat.

Tidak terealisasinya pembentukan TUK (tempat uji kemahiran) di 2 provinsi diakibatkan anggaran belanja modal pembentukan TUK (tempat uji kemahiran) sampai akhir masa anggaran mengalami pemblokiran. Penyebab pemblokiran tersebut

dikarenakan surat rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum kurang lengkap sehingga dalam proses revisi DIPA mengalami hambatan/tidak dapat dilakukan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan di atas langkah antisipasi yang diambil adalah:

1. perencanaan yang terukur, terarah, dan sistematis; dan
2. koordinasi yang tepat dan cepat antara satker di daerah dengan satker pusat.

c. meningkatkan ketertiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui beberapa IKU "jumlah provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik".

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya ketertiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik	jumlah provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik	30%	54,5%	180	20	24	120

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 tingkat pencapaian IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi IKU "Jumlah provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik" adalah 73% atau 24 provinsi dari target kinerja 61% atau 20 provinsi, sehingga realisasi kinerja pada IKU tersebut adalah 120%. Daftar daerah pemantauan penggunaan bahasa Indonesia pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	KAB./KOTA	PROVINSI	PERINGKAT
1	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Terkendali I
2	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Terkendali I
3	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Terkendali I
4	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Terkendali I
5	Kab. Lombok Utara	NTB	Terkendali II
6	Kota Semarang	Jateng	Terkendali III
7	Kota Solok	Sumbar	Terkendali III
8	Kota Jambi	Jambi	Terkendali III
9	Kota Pematangsiantar	Sumut	Terkendali III
10	Kab. Badagai	Sumut	Terkendali III
11	Kab. Lombok Timur	NTB	Terkendali III
12	Kota Bogor	Jabar	Terkendali III

NO.	KAB./KOTA	PROVINSI	PERINGKAT
13	Kota Depok	Jabar	Terkendali III
14	Kab. Pandeglang	Banten	Terkendali III
15	Kota Cilegon	Banten	Terkendali III
16	Kab. Maros	Sulsel	Terkendali III
17	Kab. Gianyar	Bali	Terkendali III
18	Kab. Karangasem	Bali	Terkendali III
19	Kab. Klungkung	Bali	Terkendali III
20	Kab. Kupang	NTT	Terkendali III
21	Kab. Sleman	DIY	Terkendali III
22	Kab. Kubu Raya	Kalbar	Terkendali III
23	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kalsel	Terkendali III
24	Kab. Kampar	Riau	Terkendali III
25	Kota Pekanbaru	Riau	Terkendali III
26	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Terkendali III
27	Kab. Kudus	Jateng	Terkendali IV
28	Kab. Lampung Selatan	Lampung	Terkendali IV
29	Kab. Lampung Tengah	Lampung	Terkendali IV
30	Kab. Lampung Utara	Lampung	Terkendali IV
31	Kota Padang	Sumbar	Terkendali IV
32	Kab. Padang Pariaman	Sumbar	Terkendali IV
33	Kota Ambon	Maluku	Terkendali IV
34	Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	Terkendali IV
35	Kab. Maluku Tengah	Maluku	Terkendali IV
36	Kab. Tojo Una-Una	Sulteng	Terkendali IV
37	Kab. Morowali	Sulteng	Terkendali IV
38	Kab. Demak	Jateng	Terkendali IV
39	Kab. Sumbawa Barat	NTB	Terkendali IV
40	Kab. Muaro Jambi	Jambi	Terkendali IV
41	Kab. Batanghari	Jambi	Terkendali IV
42	Kab. Ogan Ilir	Sumsel	Terkendali IV
43	Kab. Ogan Komering Ulu	Sumsel	Terkendali IV
44	Kab. Ogan Komering Ilir	Sumsel	Terkendali IV
45	Kab. Serang	Banten	Terkendali IV
46	Kab. Poso	Sulteng	Terkendali IV
47	Kab. Deli Serdang	Sumut	Terkendali IV
48	Kab. Bengkulu Tengah	Bengkulu	Terkendali IV
49	Kab. Kepahiang	Bengkulu	Terkendali IV
50	Kab. Rejang Lebong	Bengkulu	Terkendali IV
51	Kab. Jombang	Jatim	Terkendali IV
52	Kab. Rokan Hulu	Riau	Terkendali IV
53	Kab. Sukabumi	Jabar	Terkendali IV
54	Kab. Kapuas	Kalteng	Terkendali IV
55	Kab. Katingan	Kalteng	Terkendali IV
56	Kab. Pulangpisau	Kalteng	Terkendali IV

NO.	KAB./KOTA	PROVINSI	PERINGKAT
57	Kota Bitung	Sulut	Terkendali IV
58	Kab. Minahasa Selatan	Sulut	Terkendali IV
59	Kab. Minahasa Tenggara	Sulut	Terkendali IV
60	Kab. Takalar	Sulsel	Terkendali IV
61	Kab. Jeneponto	Sulsel	Terkendali IV
62	Kota Kupang	NTT	Terkendali IV
63	Kab. Timur Tengah Selatan	NTT	Terkendali IV
64	Kab. Bantul	DIY	Terkendali IV
65	Kab. Kulonprogo	DIY	Terkendali IV
66	Kab. Landak	Kalbar	Terkendali IV
67	Kab. Tanah Laut	Kalsel	Terkendali IV
68	Kab. Tapin	Kalsel	Terkendali IV
69	Kab. Mojokerto	Jatim	Terkendali IV
70	Kab. Nganjuk	Jatim	Terkendali IV
71	Kab. Pidie	Aceh	Terkendali V
72	Kab. Bireun	Aceh	Terkendali V
73	Kota Banda Aceh	Aceh	Terkendali V
74	Kab. Sanggau	Kalbar	Terkendali V

Kriteria penilaian tertib penggunaan bahasa Indoneisa di ruang publik dilihat dari peringkat terkendalinya, jenis peringkat sebagai berikut.

- 1) Peringkat Terkendali I untuk kabupaten/kota yang penggunaan bahasa asingnya sangat kurang terkendali tanpa mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah.
- 2) Peringkat Terkendali II untuk kabupaten/kota yang penggunaan bahasa asingnya kurang terkendali dengan kurang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah yang kurang menguatkan bahasa nasional.
- 3) Peringkat Terkendali III untuk kabupaten/kota yang penggunaan bahasa asingnya cukup terkendali dengan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah yang cukup menguatkan bahasa nasional.
- 4) Peringkat Terkendali IV untuk kabupaten/kota yang penggunaan bahasa asingnya sangat terkendali dengan sangat mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah yang sangat menguatkan bahasa nasional.

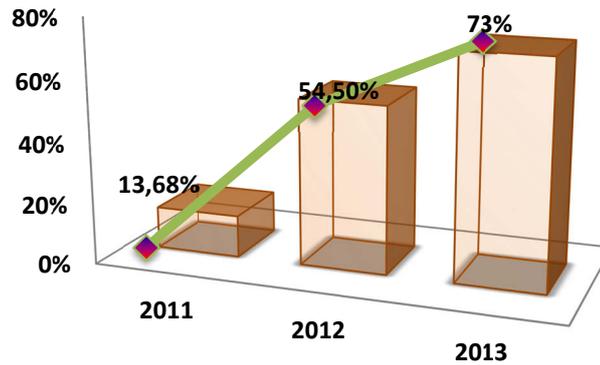
- 5) Peringkat Terkendali V untuk kabupaten/kota yang penggunaan bahasa asingnya luar biasa terkendali dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia yang luar biasa dan pelestarian bahasa daerah sebagai penguat utama bahasa nasional.

Untuk penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimasukan ke dalam penilaian peringkat terkendali IV dan peringkat terkendali V. Pada tahun 2013 terdapat 48 kabupaten/kota yang termasuk pada pemeringkatan tersebut.

Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini, pada tahun 2013 tidak mengalami kendala, namun karena keterlambatan terbitnya DIPA tahun anggaran 2013 mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda. Sebagai upaya menuju optimalisasi dan percepatan pengendalian penggunaan bahasa di Indonesia perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan di setiap kabupaten/kota.
- 2) Kerja sama pembinaan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang intensif dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 3) Pelaksanaan lokakarya hasil pemantauan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di daerah.
- 4) Pemberian penghargaan/apresiasi terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang dalam penggunaan bahasa Indonesiannya sudah sesuai kaidah yang berlaku.

Berikut grafik tren kenaikan pencapaian indikator kinerja provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tahun 2010—2013.



Selain upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, pada tahun 2013 ini, Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga melakukan upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana amanat dari Pasal 44 UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Kongres Bahasa X pada Bulan Oktober 2013 dengan tema "Penguatan Bahasa Indonesia di Dunia Internasional".



Mendikbud, Mohammad Nuh membuka Kongres Bahasa Indonesia X di Hotel Sahid, Jakarta (28/10), KBI ke-X dihadiri oleh perwakilan atau utusan Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (Mabbim), dosen dari berbagai universitas dalam dan luar negeri, pengajar bahasa Indonesia dari berbagai sekolah dalam dan luar negeri, pengajar Bahasa Indonesia untuk Asing (BIPA) dari dalam dan luar negeri, insan media massa dan wirausahawan, perwakilan dari berbagai kementerian, serta para pemakalah internal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa/Balai Bahasa

Melalui upaya itu bahasa dan budaya serta bangsa Indonesia dapat turut berperan dalam percaturan global untuk membangun konvergensi peradaban dunia. Hasil Kongres Bahasa Indonesia X yang merangkum dari arahan menteri pendidikan dan kebudayaan, paparan 6 makalah sidang pleno tunggal, 16 makalah sidang pleno panel, dan 104 makalah sidang kelompok tertuang dalam 33 rekomendasi berikut.

1. Pemerintah perlu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penerbitan, baik nasional maupun internasional, untuk mengejawantahkan konsep-konsep ipteks berbahasa Indonesia guna menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh lapisan masyarakat.
2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan penelitian, diskusi, penataran, penyegaran, simulasi, dan pendampingan dalam implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa dalam buku materi pelajaran.
4. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka memperkuat jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan.
5. Pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa.
6. Pemerintah perlu memfasilitasi studi kewilayahan yang berhubungan dengan sejarah, persebaran, dan pengelompokan bahasa dan sastra untuk memperkuat NKRI.
7. Pemerintah perlu menerapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk menyeleksi dan mempromosikan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, guna memperkuat jati diri dan kedaulatan NKRI, serta memberlakukan UKBI sebagai “paspor bahasa” bagi tenaga kerja asing di Indonesia.
8. Pemerintah perlu menyiapkan formasi dan menempatkan tenaga fungsional penyunting dan penerjemah bahasa di lembaga pemerintahan dan swasta.
9. Untuk mempromosikan jati diri dan kedaulatan NKRI dalam rangka misi perdamaian dunia, Pemerintah perlu memperkuat fungsi Pusat Layanan Bahasa (*National Language Center*) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
10. Kualitas dan kuantitas kerja sama dengan berbagai pihak luar negeri untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, baik di tingkat komunitas ASEAN maupun dunia internasional, dengan dukungan sumber daya yang maksimal.
11. Pemerintah perlu melakukan “diplomasi total” untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
12. Presiden/wakil presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.
13. Perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.
14. Pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan pemanfaatan sastra untuk mendukung berbagai bentuk industri kreatif.
15. Pemerintah perlu lebih meningkatkan kerja sama dengan komunitas-komunitas sastra dalam membuat model pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lisan, program penulisan kreatif, dan penerbitan buku sastra yang dapat diapresiasi siswa dan peminat sastra lainnya.
16. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.
17. Pelindungan bahasa-bahasa daerah dari ancaman kepunahan perlu dipayungi dengan produk hukum di tingkat pemerintah daerah secara menyeluruh.

18. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan perencanaan dan penetapan korpus bahasa daerah untuk kepentingan pemerdayaan dan peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa penjaga kemajemukan Indonesia dan pilar penting NKRI.
19. Pemerintah perlu memperkuat peran bahasa daerah pada jalur pendidikan formal melalui penyediaan kurikulum yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan faktual daerah dan pada jalur pendidikan nonformal/informal melalui pembelajaran bahasa berbasis komunitas.
20. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan pengawasan penggunaan bahasa untuk menciptakan tertib berbahasa secara proporsional.
21. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung eksistensi karya sastra, termasuk produksi dan reproduksinya, yang menyentuh identitas budaya dan kelokalannya untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia.
22. Penggalan karya sastra harus terus digalakkan dengan dukungan dana dan kemauan politik pemerintah agar karya sastra bisa dinikmati sesuai dengan harapan masyarakat pendukungnya dan masyarakat dunia pada umumnya.
23. Pemerintah perlu memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada sastrawan untuk meningkatkan dan menjamin keberlangsungan daya kreativitas sastrawan sehingga sastra dan sastrawan Indonesia dapat sejajar dengan sastra dan sastrawan dunia.
24. Lembaga-lembaga pemerintah terkait perlu bekerja sama mengadakan lomba-lomba atau festival kesastraan, khususnya sastra tradisional, untuk memperkenalkan sastra Indonesia di luar negeri yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, selain mendukung festival-festival kesastraan tingkat internasional yang sudah ada.
25. Peran media massa sebagai sarana pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia di kancah internasional perlu dioptimalkan.
26. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu mengingatkan dan memberikan teguran agar lembaga penyiaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
27. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima usulan dari masyarakat untuk menyampaikan teguran kepada lembaga penyiaran yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
28. Diperlukan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, seperti pejabat negara, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, media massa, Dewan Pers, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, demi terwujudnya bahasa media massa yang logis dan santun.
29. Literasi pada anak, khususnya sastra anak, perlu ditingkatkan agar nilai-nilai karakter yang terdapat dalam sastra anak dipahami oleh anak.
30. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus memperkuat unit yang bertanggung jawab terhadap sertifikasi pengajar dan penyelenggara BIPA.
31. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkoordinasi dengan para pakar pengajaran BIPA dan praktisi pengajar BIPA mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan silabus yang standar, termasuk bagi Komunitas ASEAN.
32. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memfasilitasi pertemuan rutin dengan SEAMEO Qitep Language, SEAMOLEC, BPKLN Kemendikbud, dan perguruan tinggi untuk menyinergikan penyelenggaraan pengajaran BIPA.
33. Pemerintah Indonesia harus mendukung secara moral dan material pendirian pusat studi/kajian bahasa Indonesia di luar negeri.

8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan dukungan manajemen dan koordinasi sehingga program-program teknis yang ada dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka mencapai tujuan

strategis Kemendikbud yang ke tujuh (T7), yaitu Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Suatu pengelolaan keuangan yang akuntabel suatu instansi pemerintah diukur dari opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemegang otoritas dalam pemeriksaan keuangan. Untuk tahun 2013 BPK belum mengeluarkan penilaian atas laporan keuangan instansi pemerintah termasuk laporan keuangan Kemendikbud. Tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan dari BPK. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar setelah pada tahun 2011 dan 2010 BPK tidak memberikan pendapat (TMP) atas laporan keuangan Kemendikbud.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui beberapa IKU berikut ini.

- 1) Persentase satker tertib pengelolaan SAK dan SIMAK BMN;
- 2) Laporan keuangan unit utama tertintegrasikan/terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Persentase satker tertib pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	90%	90%	100	95%	100%	105.26
	Laporan keuangan unit utama terintegrasikan/terkonsolidasi sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100	100%	100%	100

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. **IKU "persentase satker tertib pengelolaan SAK dan SIMAK BMN"** pada tahun 2013 tingkat pencapaiannya telah mencapai target yang ditetapkan. Bahkan capaiannya

melebihi target. Dari target sebesar 95% dapat direalisasikan 100%, sehingga capaian kinerja 105,26%.

Secara kuantitatif indikator kinerja ini dapat mencapai sasaran, kendala yang ada dapat diatasi. Permasalahan yang diperkirakan berpotensi adalah, terdapat infrastruktur yang masih lemah sehingga dimungkinkan menimbulkan hambatan dimasa akan datang.

Untuk mengantisipasi potensi negatif tersebut perlu disiapkan infrastruktur untuk mendukung metode pengumpulan data berbasis IT.

2. **IKU “laporan keuangan unit utama terintegrasi/terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**, pada tahun 2013 tingkat pencapaian telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 100% dapat terrealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Tingkat ketercapaian indikator kinerja tersebut terlihat dengan telah terkonsolidasikannya laporan keuangan unit utama di lingkungan Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu bahwa laporan keuangan yang disusun secara yuridis formal telah sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57 tahun 2013.

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari telah dilakukannya koordinasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan dan penyebarluasan informasi tentang peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang terbaru kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud secara terus menerus.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga sasaran strategis Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012 belum dapat tercapai antara lain :

1. permasalahan kas BLU dan dana titipan;
2. adanya return BANSOS akhir tahun belum tersalur;
3. permasalahan dalam piutang internal pada PTN;
4. permasalahan aset tetap; dan 5) penganggaran BANSOS 45% jadi BMN.

Ke depan upaya dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Kemendikbud perlu terus ditingkatkan agar pada tahun 2013 target WTP yang telah

ditetapkan dapat tercapai. Beberapa langkah yang dilakukan agar sasaran strategis tersebut dapat tercapai diantaranya:

1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemendikbud;
2. Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan;
3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
5. Audit secara regular dari Itjen;
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
7. Rivi laporan keuangan oleh Itjen.

b. terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel di lingkungan Kemendikbud

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Skor Lakip Kementerian”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tewujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel di lingkungan Kemendikbud	Skor Lakip Kementerian	77	72.88 “B”	94.6	78	71.70 “B”	91.92

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Skor Lakip Kemendikbud” untuk tahun 2013 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 78 poin, Kemendikbud baru berhasil mencapai poin sebesar 71.70. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3770/M.PANRB/11/2013, perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tanggal 22 November 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh predikat “B” dengan nilai 71.70. Adapun rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2010	Nilai 2011	Nilai 2012	Nilai 2013
1	Perencanaan Kinerja	35	22.83	25.59	27.40	27.61
2	Pengukuran Kinerja	20	16.00	14.70	14.03	13.33
3	Pelaporan Kinerja	15	10.38	10.63	11.87	11.52
4	Evaluasi Kinerja	10	6.92	6.12	7.67	7.27
5	Capaian Kinerja	20	16.54	13.18	11.92	11.97
Nilai Hasil Evaluasi		100	72.67	70.22	72.88	71.70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B

Sesuai data hasil evaluasi kinerja di atas, selama empat tahun terakhir nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud mengalami naik turun. Namun begitu tingkat akuntabilitas kinerja masih berada pada predikat "B".

Dibandingkan dengan tahun 2012 nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.18 poin. Komponen yang mengalami penurunan adalah komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja. Adapun komponen yang mengalami peningkatan adalah komponen perencanaan kinerja dan capaian kinerja.

Berikut beberapa kekurangan/permasalahan yang dihadapi Kemendikbud yang menyebabkan sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai:

1) Perencanaan Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

- a) Rencana strategis di lingkungan Kemendikbud belum seluruhnya menyajikan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada hasil/*outcome* dan dilengkapi dengan indikator kinerja *outcome* yang relevan dan terukur.
- b) Penetapan kinerja belum seluruhnya menyajikan suatu perjanjian hasil/kinerja yang akan dicapai.

2) Pengukuran Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

- a) Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagian masih bersifat output dan belum menggambarkan ukuran keberhasilan/*outcome* organisasi;
- b) Indikator kinerja yang telah ditetapkan masih perlu direview/ditingkatkan agar dapat menjadi dasar untuk mengukur kinerja organisasi yang sesungguhnya;
- c) Belum dimilikinya indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi.

3) Pelaporan Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

- a) LAKIP di lingkungan Kemendikbud belum seluruhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi hasil/outcome berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dengan dilengkapi perbandingan data kinerja;
- b) LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

4) Evaluasi Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

- a) Belum secara optimal melakukan pemantauan tentang kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya;
- b) Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja;
- c) Evaluasi rencana aksi belum dilaksanakan secara optimal dalam rangka pengendalian kinerja;
- d) Hasil evaluasi kinerja belum secara optimal dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.

5) Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencapaian target, keandalan data kinerja dan keselarasan antara kinerja *output* dengan kinerja *outcome*. Selain itu capaian kinerja juga mencakup kinerja pencatatan keuangan, transparansi, kinerja dari stakeholder, termasuk penghargaan yang diperoleh. Capaian kinerja output cukup baik, namun capaian *outcome* masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Rendahnya capaian *outcome* terutama disebabkan oleh indikator-indikator kinerja *outcome* yang belum relevan dan tidak cukup untuk menggambarkan keberhasilan.

Melihat kekurangan/permasalahan yang dihadapi di atas KemenPAN dan RB memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan Kemendikbud agar nilai akuntabilitas kinerja dapat meningkat di masa datang antara lain:

- 1) meningkatkan kualitas rencana strategis di lingkungan Kemendikbud, yaitu dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi pada hasil/*outcome* dengan dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur;
- 2) menyusun penetapan kinerja dengan menyajikan suatu perjanjian kinerja yang menggambarkan hasil/kinerja yang akan dicapai;
- 3) unit kerja agar menyelaraskan indikator kinerja yang dirumuskan dengan indikator kinerja Kementerian;
- 4) unit kerja perlu menetapkan indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU;
- 5) unit kerja perlu meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil pengukuran kinerja sebagai media untuk pengendalian dan pemantauan kinerja;
- 6) LAKIP yang disusun di lingkungan Kemendikbud perlu menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada hasil/*outcome* melalui evaluasi dan analisis yang memadai dengan dilengkapi perbandingan data kinerja;
- 7) meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud; dan
- 8) meningkatkan kualitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, selain harus melaksanakan rekomendasi tersebut beberapa strategis yang dilakukan Kemendikbud agar akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud dapat meningkat antara lain:

1. Melakukan Koordinasi antar unit kerja/satker dengan unit vertikal di atasnya dan dengan Setjen Kemendikbud;
2. Melakukan pembinaan SAKIP dengan pendampingan/assistensi penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP oleh Biro Keuangan, BPKP, dan Kemenpan dan RB;
3. Meningkatkan fungsi pengawasan oleh Itjen;

c. Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui beberapa IKU berikut ini.

- 1) Persentase anggaran yang tidak di blokir;
- 2) Persentase realisasi anggaran kementerian.

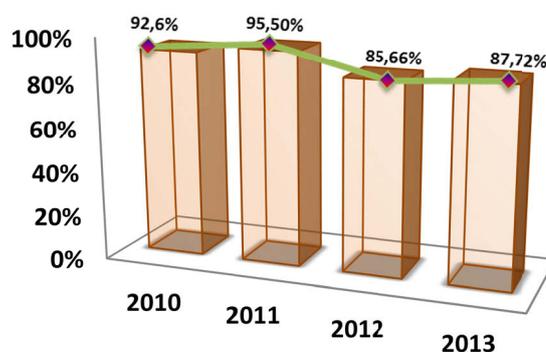
Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya	Persentase anggaran yang tidak diblokir	98%	95%	96.94	98%	95%	96.94
	Persentase realisasi anggaran kementerian	96%	85.66	89.23	97%	87,72%	90,43

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. **IKU "persentase persentase anggaran yang tidak diblokir"**, pada tahun 2013 tingkat pencapaian belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 98% anggaran yang tidak diblokir, namun baru terrealisasi sebesar 95% dengan persentase capaian sebesar 96.94%.
2. **IKU "persentase realisasi anggaran kementerian"**, pada tahun 2013 tingkat pencapaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. Target penyerapan anggaran tingkat kementerian yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebesar 97%, dari target tersebut sesuai dengan sumber data dari DSP-DJPBN Kementerian keuangan per 10 Februari 2014 daya serap Kementerian pada tahun 2013 mencapai 87.72%, dengan persentase capaian sebesar 90,43%.

Berikut grafik persentase tingkat penyerapan anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan selama tiga tahun terakhir.



Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian daya serap yang ditargetkan antara lain adanya keterlambatan pengesahan dokumen anggaran, adanya keterlambatan pengesahan tersebut mengakibatkan kekurangan waktu pelaksanaan kegiatan.

Melihat permasalahan dan kendala tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan perbaikan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Perbaikan penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut telah terlihat dengan telah disahkannya dokumen anggaran secara cepat pada tahun 2014.

9. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur merupakan yang pelaksanaannya berada di bawah tanggungjawab Inspektorat Jenderal. Program ini bertujuan untuk mendukung tujuan strategis yang ketujuh yaitu Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Mengawal Tercapainya Opini Audit BPK RI Atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Mulai Tahun 2012, sasaran strategis ini perealisasiannya didukung oleh satu IKU, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut :

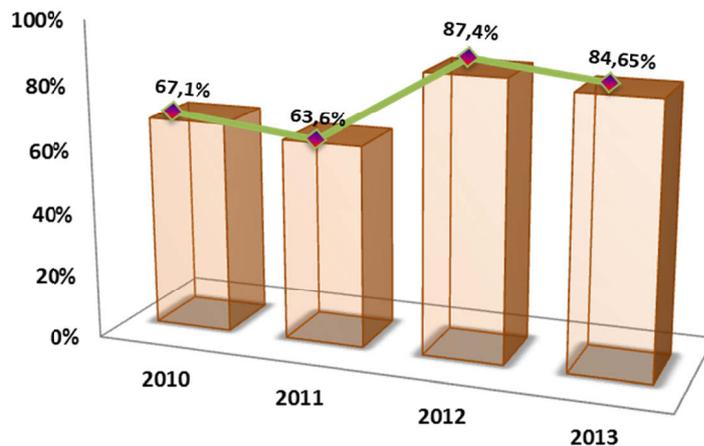
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Mengawal tercapainya Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	Persentase penyelesaian temuan audit	76,9	65,42	85,07	78,8	84,65	107,42

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Penyelesaian Temuan Audit capaian kerjanya terealisasi 84,65% melebihi target yang

direncanakan dalam renstra sebesar 78,8 % dengan persentase 107,42%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar 65,42% dengan persentase 85,07% ada peningkatan sebesar 22,35%. Hal ini dikarenakan :

- 1) Satuan kerja telah menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan,
- 2) Koordinasi yang baik antara Satker dengan Itjen dalam langkah-langkah penyelesaian temuan hasil pemeriksaan

Berikut grafik tingkat penyelesaian temuan audit dari tahun 2010-2013.



Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh IKK Jumlah Laporan Hasil Audit Pada 10 Unit Utama di lingkungan Kemendikbud didukung melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Monitoring;
- 2) Rapat koordinasi;
- 3) Penyelesaian kasus khusus atas tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit Itjen, BPK-RI dan BPKP.

Sekalipun target kinerjanya dari IKU tersebut di atas terealisasi melebihi target namun dalam pelaksanaannya ditemukan juga hambatan dan kendala sebagai berikut:

- 1) Waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terlambat disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, sehingga proses penyelesaian Tindak Lanjut di Lingkungan Kemendikbud juga mengalami keterlambatan.

- 2) Terdapat perbedaan persepsi antara Satuan Kerja dengan Inspektorat dalam hal penyelesaian rekomendasi yang menyangkut dengan administrasi dan keuangan.
- 3) Pada saat dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat kondisi yang terjadi pada satuan kerja di daerah otonomi yang kerap melakukan proses mutasi dan promosi, sehingga aparat yang bertanggungjawab untuk menangani tindak lanjut tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara optimal.

Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi hambatan dan kendala dihadapi, adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan intensifikasi penyelesaian tindak lanjut melalui program monitoring, rapat koordinasi, dan penyelesaian kasus khusus atas tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit Itjen, BPK-RI, dan BPKP.
- 2) Berkoordinasi dengan auditor eksternal (BPKP) untuk melakukan konsultasi terkait dengan adanya kendala terhadap temuan-temuan yang sulit diselesaikan.
- 3) Memanggil seluruh Satuan Kerja terkait untuk segera dapat melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi pada Satuan Kerjanya.

b. Mengawal Implementasi Inpres Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sasaran strategis ini perealisasiannya didukung oleh dua IKU, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Mengawal Implementasi Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta	12	6.62	55.17	9	6,70	74.44
	Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja	100	100	100	100	100	100

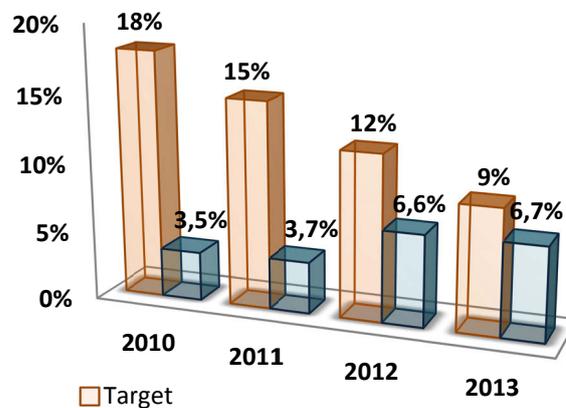
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. IKU Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta.

Berbeda dengan IKU lainnya, keberhasilan IKU ini diukur dengan capaian menurun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta, capaian kinerjanya terealisasi melebihi target yang direncanakan dalam renstra sebesar 9% terealisasi sebesar 6,70%, dengan persentase 74,44%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar 6,62% dengan persentase 55,17% ada peningkatan sebesar 19,27%. Hal ini disebabkan karena SDM telah menunjukkan kinerjanya yang professional, independen dan berintegritas yang cukup signifikan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan satuan kerja.

Berikut grafik tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase satuan kerja dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran negara >500 juta dari tahun 2010-2013.



Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan audit program strategis dan menurunnya temuan yang bersifat materiil dari sisi pengawasan.

Meskipun target kinerja tersebut telah berhasil, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

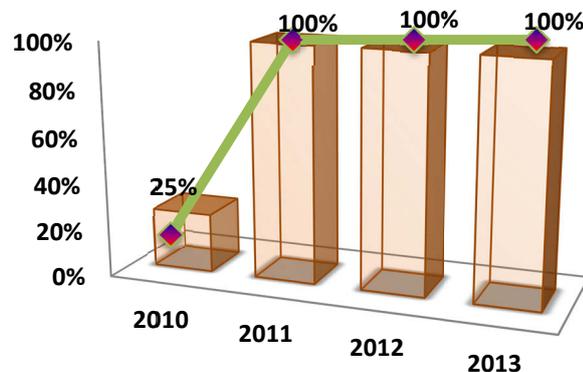
- 1) Pengendalian internal di satuan kerja masih lemah;
- 2) Tim pengelola keuangan satker belum sepenuhnya taat azas.

Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Melakukan peningkatan kompetensi SDM;
- 2) Melakukan upaya pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan program dan anggaran sedini mungkin melalui pendampingan;
- 3) Memberdayakan SPI Satuan Kerja secara optimal.

2. **IKU Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja**, capaian kinerjanya terealisasi sesuai target yang direncanakan di dalam renstra sebesar 100% sama seperti capaian realisasi tahun 2012.

Berikut grafik tingkat ketercapaian unit yang diaudit manajemen berbasis kinerja dari tahun 2010-2013.



Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Audit Unit Utama
- b. Audit Dini

- c. Audit Perbidang (Bidang Dikti, Bidang Dikmen, Bidang Dikdas, Bidang PAUDNI, Bidang Bahasa, Bidang Kebudayaan, dan Bidang BPSDMP)

Meskipun target kinerja tersebut telah berhasil, namun dalam pelaksanaannya, kemungkinan masih ditemukan hambatan dan permasalahan yang signifikan, akan tetapi dapat diselesaikan secara langsung disaat melakukan audit tersebut.

Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Perlu peningkatan kompetensi dan integritas auditor melalui Diklat Penjenjangan, Diklat Bidang dan Diklat Pembentukan Karakter;
- 2) Manajemen berbasis resiko menjadi salah satu skala prioritas sebagai tolak ukur mengantisipasi hambatan dan permasalahan dalam pengawasan;
- 3) Penatausahaan, dokumentasi arsip, aset dan BMN lainnya juga harus mendapat skala prioritas.

c. Meningkatkan Sinergitas Antar Aparat Pengawasan Pemerintah, sasaran strategis ini perealisasiannya didukung oleh satu IKU, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Sinergitas antar aparat pengawasan pemerintah	Persentase satker di lingkungan Kemendikbud memiliki SPI	100	92,86	92,86	100	95	95

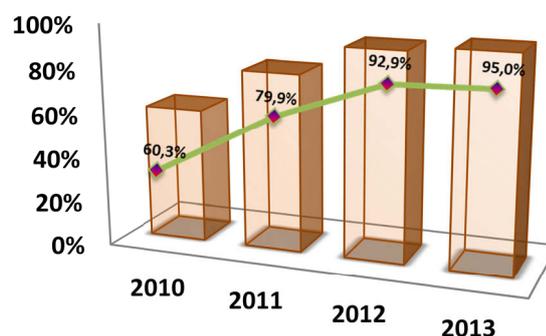
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud Memiliki SPI, capaian kinerjanya tidak terealisasi sesuai target yang direncanakan dalam renstra sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 95%, dengan persentase 95%, Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar 92,86% dengan persentase 92,86% ada peningkatan sebesar 2,14%. Hal ini disebabkan karena adanya kepedulian dari para pimpinan satuan kerja Kemendikbud akan pentingnya peran pengawasan dalam tata kelola yang efektif, dengan membentuk unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) sehingga pimpinan satuan kerja dapat menjalankan fungsi manajerialnya

dengan lebih intensif. SPI menjadi mitra pimpinan satuan kerja, yang membantu dalam mengidentifikasi kelemahan tata kelola organisasi dan memberikan rekomendasi solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Dari 302 Satuan Kerja Kemendikbud diprioritaskan untuk membentuk unit SPI tahun 2013 sebanyak 111 Satuan Kerja, yang meliputi unit utama, perguruan tinggi negeri, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sampai saat ini baru terbentuk 105 SPI. Diharapkan ke depan satuan-satuan kerja Kemendikbud yang belum memiliki SPI dapat segera membentuknya demi untuk peningkatan tata kelola yang semakin baik.

Beberapa SPI yang berkinerja baik telah menunjukkan perannya yang signifikan dalam membantu pimpinan satuan kerja dalam membenahi tata kelola. Filosofi pengawasan intern yang membenahi banyak aspek manajemen satuan kerja sebelum diaudit oleh Inspektorat Jenderal dan aparat pengawasan eksternal benar-benar dapat dijalankan dengan baik. Di samping pengawasan, SPI juga telah menjalankan tugas lainnya yang sangat positif bagi perbaikan manajemen satuan kerja antara lain melaksanakan asistensi penyusunan laporan keuangan, pendampingan pengadaan barang/jasa, dan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan.

Berikut grafik tren kenaikan satker di lingkungan Kemendikbud yang memiliki SPI dari tahun 2010-2013.



Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan Inspektorat Jenderal selaku pembina teknis SPI antara lain adalah:

1. Rapat Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan setahun sekali untuk mensosialisasikan regulasi pengelolaan keuangan negara dan mengkoordinasikan program pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan SPI satuan kerja.
2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) peningkatan kompetensi anggota SPI yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal secara rutin setiap tahun untuk menjamin bahwa anggota SPI telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan. Beberapa Diklat yang telah diselenggarakan Inspektorat Jenderal adalah Diklat Audit Intern, Diklat Pengadaan Barang/Jasa, Diklat Laporan Keuangan, Diklat Audit Program, dan Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
3. Bimbingan teknis dan supervisi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal kepada tim SPI satuan kerja. Bimbingan diberikan dalam bentuk penjelasan Standar Operasional Prosedur sejak dari penyusunan rencana program pengawasan, pengumpulan bukti, perumusan Kertas Data Audit, dan pelaporan.
4. Mentoring dilakukan Inspektorat Jenderal dengan mengikutsertakan anggota SPI secara langsung dalam kegiatan audit reguler Itjen. Dalam mentoring ini SPI diajak untuk turut serta melakukan audit agar dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama Diklat ke dalam praktek audit yang sesungguhnya.
5. Penerbitan regulasi Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 5173 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat membantu SPI dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsi secara lebih efektif.

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Masih adanya SPI yang berkinerja rendah. Permasalahan umum yang terkait dengan kinerja rendah tersebut adalah kurangnya kompetensi anggota SPI yang bersangkutan. Selain itu juga masih ada kesan pada beberapa SPI bahwa SDM

yang ditugaskan untuk menjadi anggota SPI adalah orang buangan atau orang yang bermasalah sehingga disisihkan dengan menjadi anggota SPI. Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan karena Inspektorat Jenderal mengharapkan SPI beranggotakan SDM yang handal dan berkompotensi tinggi.

2. Masih kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja terhadap keberadaan SPI. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya SPI yang belum memiliki ruangan sekretariat atau belum didukung dengan anggaran dan peralatan kerja yang memadai. Hal ini mengesankan bahwa pimpinan satuan kerja hanya membentuk unit SPI sebagai formalitas belaka tetapi kurang memfungsikannya secara optimal.
3. Masih adanya citra negatif dari kolega terhadap pengawasan yang dilakukan SPI. Kolega masih merasa kalau diawasi itu tidak enak walaupun dilakukan oleh teman sendiri. Pandangan seperti itu tentu saja keliru karena SPI adalah mitra satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola. SPI akan membantu untuk memperbaiki penyimpangan sebelum dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal dan BPK-RI.

Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan dialog dengan pimpinan satuan kerja agar lebih memerankan tugas dan fungsi SPI secara proporsional sesuai amanat yang dibebankan dalam Permendiknas Nomor 47 tahun 2011. Dialog ini dapat dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang materinya dipertajam dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Meningkatkan jaringan sesama anggota SPI Kemendikbud se-Indonesia melalui milis internet dan memanfaatkan radio streaming Inspektorat Jenderal yang memiliki program siaran selama 24 jam sepanjang 7 hari penuh.
3. Inspektorat Jenderal akan terus melanjutkan dan meningkatkan kualitas program pelatihan bagi anggota SPI untuk meningkatkan kompetensi yang relevan dengan mandat pengawasan internal.

4. Inspektorat Jenderal akan memberikan anugerah penghargaan resmi dalam suatu acara seremoni yang formal kepada SPI yang berkinerja baik. Hal ini merupakan wujud komitmen Inspektorat Jenderal untuk memberikan apresiasi kepada SPI yang telah menunjukkan capaian prestasi yang tinggi.

10. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA

Pelestarian budaya merupakan rangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kebanggaan, penghargaan, dan keikutsertaan masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pengembangan sejarah dan nilai budaya, pembinaan kesenian dan perfilman, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, internalisasi nilai dan diplomasi budaya, pengelolaan permuseuman, pengelolaan peninggalan purbakala, dan pelestarian sejarah dan nilai tradisional.

Program pelestarian budaya pelaksanaannya teknisnya berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Kebudayaan. Program ini dilaksanakan guna mencapai terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat, yaitu dengan melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pelestarian budaya, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Terlestarikannya budaya Indonesia

Pengertian kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata,

misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Seiring dengan pembangunan nasional kebudayaan, pelestarian budaya melalui upaya-upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan karya dan warisan budaya (benda dan tak benda) sebagai hasil budaya bangsa untuk masa depan, diperlukan strategi tertentu untuk membentuk ketahanan budaya bangsa Indonesia.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU berikut ini:

- 1) Jumlah cagar budaya yang dilestarikan;
- 2) Jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi;
- 3) Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan;
- 4) Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlestarikannya budaya Indonesia	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	6,470	0	0	8470	10235	121
	Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi	3,000,000	5,754,884	192	4000000	8.629.355	215
	Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan				20	77	385
	Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya	12,000,000	13,117,140	105	15,000,000	18,645,290	124

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) **IKU "jumlah cagar budaya yang dilestarikan"** pada tahun 2013 tingkat pencapaiannya telah melebihi target yang ditetapkan, dari sebanyak 8470 cagar budaya yang ditargetkan untuk dilestarikan, Kemendikbud telah berhasil melestarikan sebanyak 10235 cagar budaya, dengan persentase capaian 121%.

Pelestarian cagar budaya adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya baik

di darat maupun hasil pengangkatan di air, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pelestarian cagar budaya saat ini harus menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah melestarikan cagar budaya dengan target indikator kinerja utama "Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan" sebanyak 8.470 Cagar Budaya selama tahun anggaran 2013.

Berikut rincian jumlah cagar budaya yang telah berhasil dilestarikan selama tahun 2013.

URAIAN	TARGET	REALISASI
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman		
1. CB yang diregistrasi (yang didaftar dan ditetapkan)	500	529
2. CB yang dikelola	2500	2500
3. CB yang direvitalisasi	18	17
UPT Pelestarian Cagar Budaya		
1. CB yang dilestarikan	2.960	2.199
2. CB yang dikelola	206	218
3. CB yang diinventarisasi	1.928	2.372
4. CB yang dilindungi	358	2.400
TOTAL	8.470	10.234

Tingkat pencapaian indikator kinerja yang melebihi target tersebut didukung oleh beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Registrasi cagar budaya, meliputi:
 - a. Pendaftaran 517 tinggalan purbakala;
 - b. Penetapan 12 cagar budaya nasional.
2. Cagar Budaya yang dikelola, meliputi:
 - a. Konservasi 1500 keramik;
 - b. Konservasi 1000 negative kaca;
3. Cagar Budaya yang direvitalisasi, meliputi:
 - a. Penyusunan dua DED, yaitu Kawasan Keraton Cirebon dan Kawasan Banda Naira;

- b. Penyusunan masterplan terdiri dari 2 masterplan yaitu Kawasan Banda Baira dan Situs Indrapurwa;
- c. Kajian pelestarian Situs Indrapurwa;
- d. Revitalisasi situs dan kawasan cagar budaya, meliputi enam situs dan kawasan cagar budaya:
 - 1) Kawasan bersejarah Bung Karno di Ende (3 lokasi);
 - 2) Situs dan museum Trinil Ngawi;
 - 3) Situs Samudera Pasai Aceh Utara;
 - 4) Kawasan Waduk Jati Gede Sumedang;
 - 5) Kawasan Keraton Cirebon;
 - 6) Situs-situs wali atau tokoh agama.

Realisasi kinerja utama tahun 2012 sebesar 0% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 121%. Realisasi ini didukung telah berfungsinya sistem registrasi nasional cagar budaya secara *on-line*, telah dilakukan pembinaan teknis petugas pendaftaran cagar budaya di daerah yang diikuti sebanyak 283 orang petugas pendaftaran, dan telah tersedianya fasilitas pendaftaran cagar budaya di daerah sebanyak 180 kabupaten/kota di 7 provinsi yaitu: Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.



Pada tahun 2013 permasalahan yang dihadapi khususnya registrasi nasional cagar budaya tersebut telah dapat diatasi dengan telah tersedianya sistem registrasi nasional cagar budaya secara *on-line*, telah dilakukan pembinaan teknis petugas pendaftaran cagar budaya di daerah yang telah diikuti sebanyak 283 orang petugas pendaftaran, dan telah tersedianya fasilitas pendaftaran cagar budaya di daerah

sebanyak 180 kabupaten/kota di 7 provinsi yaitu: Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Adapun yang telah dilakukan berupa pendaftaran tinggalan purbakala sebanyak 517 dan ditetapkan cagar budaya nasional sebanyak 12 cagar budaya. Sedangkan dari output cagar budaya yang direvitalisasi sebanyak 17 cagar budaya yang berbeda dengan target sarannya sebanyak 18 cagar budaya. Sedangkan output yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang dilakukan oleh 12 Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Konservasi peninggalan Borobudur, dan Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran yaitu output cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 2.199 cagar budaya yang berbeda dengan target sasaran sebanyak 2.960; output cagar budaya yang dikelola sebanyak 218 melebihi target sebanyak 206 cagar budaya; output cagar budaya yang diinventarisasi sebanyak 2.371 melebihi target sasaran sebanyak 1.928 cagar budaya; dan output cagar budaya yang dilindungi sebanyak 2.400 cagar budaya melebihi target sasaran sebanyak 358 cagar budaya. Dengan demikian target kinerja utama tahun 2013 sebanyak 8.470 cagar budaya dan dapat tercapai sebanyak 10.235 cagar budaya atau 121%. (disesuaikan dengan target 2013)

2) **IKU "jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi"** pada tahun 2013 tingkat pencapaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaiannya melebihi target. Dari jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi sebanyak 4.000.000 orang yang ditargetkan, Kemendikbud telah berhasil merealisasikannya sebanyak 8.629.355 orang, dengan persentase capaian 215%. Data pencapaian tersebut diperoleh dari sebanyak 150 museum di Indonesia.

Realisasi kinerja utama jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi sebanyak 8.629.355 orang melebihi target kinerja yang ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan dampak keberhasilan kegiatan prioritas nasional revitalisasi museum yang menyangkut aspek-aspek: fisik, manajemen, program, kebijakan, jejaring, dan pencitraan.

Realisasi kinerja utama jumlah pengunjung museum yang direvitalisasi tahun 2013 sebesar 215% dan realisasi tahun 2012 sebesar 192% maka telah terjadi kenaikan

sebesar 23%. Kenaikan kinerja utama tersebut didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kongres Museum Nasional se-Indonesia yang diapresiasi oleh seluruh peserta sebanyak 250 orang
2. Pemasyarakatan Museum dan Cagar Budaya melalui media (3 event), diapresiasi sebanyak 100.000 orang
3. Publikasi tentang Museum dan Cagar Budaya, diapresiasi sebanyak 2.000 orang
4. Pameran Cagar Budaya dan Permuseuman, diapresiasi pengunjung sebanyak 2.100 orang
5. Pameran HUT 100 Tahun Purbakala di Museum Fatahillah sebanyak 9.000 orang.



Selain pelaksanaan kegiatan evan-even tersebut, indikator kinerja utama ini didukung pula dengan kegiatan revitalisasi dua belas museum dan pembangunan sembilan museum.

Berikut dua belas museum yang berhasil direvitalisasi:

- 1) Museum Soesilo Sudarman, Cilacap;
- 2) Museum Radyapustaka, Solo;

- 3) Museum Gayo, Aceh Tengah;
- 4) Museum Museum Kebangkitan Nasional;
- 5) Museum Basoeeki Abdullah;
- 6) Museum Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Museum Provinsi Bali;
- 8) Museum Provinsi Kalimantan Barat;
- 9) Museum Provinsi Lampung;
- 10) Museum Pangeran Cakrabuana, Cirebon;
- 11) Museum Presiden RI, Bogor;
- 12) Museum Benteng Vredeburgh, Yogyakarta.

Berikut sembilan museum yang berhasil dibangun:

1. Museum Coelacanth Ark, Manado;
2. Museum Noken di Papua;
3. Museum Budaya Gunung Merapi di Yogyakarta;
4. Museum Maritim di Bangka Belitung;
5. Monumen PDRI di Kabupaten Limapuluh Koto, Padang;
6. Museum Kerinci di Jambi;
7. Museum Keris Sriwedari di Surakarta Jawa Tengah;
8. Museum Perang Dunia II di Morotai, Maluku Utara;
9. Museum Mansinam, Manokwari Papua Barat.

Berikut grafik tren peningkatan jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi selama dua tahun terakhir.



3) **IKU "jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan"** pada tahun 2013 tingkat pencapaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaiannya telah melebihi target. Pada tahun 2013 dari 20 warisan budaya nasional yang ditargetkan untuk ditetapkan, Kemendikbud berhasil merealisasikannya sebanyak 77 warisan budaya nasional yang berhasil ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 385%.

Penetapan karya budaya yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 yang semula ditargetkan sebanyak 20 karya budaya ternyata pada pelaksanaannya di lapangan mencapai 77 karya budaya. Meliputi 7 karya budaya yang sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO tapi belum ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan 70 karya budaya yang merupakan hasil sidang verifikasi layak ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Tim Ahli.



"Tari Saman" salah satu 7 karya budaya yang sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO

Meningkatnya capaian karya budaya yang ditetapkan ini disebabkan karena meningkatnya antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan budaya yang dimilikinya kepada pemerintah. Data yang ada telah mencapai 1.377 kekayaan budaya

yang didaftarkan kepada pemerintah. Berdasarkan kelengkapan data yang memenuhi kriteria dan hasil verifikasi tim ahli diputuskan untuk menetapkan sebanyak 77 karya budaya sebagai warisan budaya nasional.

Pada tahun 2012, terdapat 536 kekayaan budaya yang berhasil dicatat, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1.377 kekayaan budaya yang berhasil dicatat dan telah sebanyak 77 warisan budaya nasional yang ditetapkan pada tahun 2013.



Berikut 77 karya budaya yang berhasil ditetapkan sebagai warisan budaya nasional:

A. Warisan Budaya Takbenda Tradisi Lisan:

1. Gurindam Duabelas
2. Pantun Betawi
3. Kabanti
4. Sinriliq
5. Pakkarena

B. Warisan Budaya Takbenda Tarian Tradisional:

1. Tor-Tor
2. Maengket
3. Saman
4. Hudoq
5. Raigo
6. Lariangi
7. Pa'gellu
8. Molapi Saronde
9. Ehe Lawn
10. Maku-Maku
11. Soya-Soya
12. Yosim Pancar (Yospan)

C. Warisan Budaya Takbenda Seni Pertunjukan Tradisional:

1. Gordang Sambilan
2. Dulmuluk
3. Tabot Dan Tabuik
4. Krinok
5. Makyong
6. Gazal
7. Dambus
8. Debus Banten
9. Ondel-Ondel
10. Topeng Betawi Dan Lenong
11. Ronggeng Gunung
12. Sisingaan
13. Reog Ponorogo

14. Sapi Sonok
 15. Gandrung Banyuwangi
 16. Saiyyang Pattu'du
 17. Gendang Baleq
 18. Wayang Kulit Sasak
 19. Bambu Gila
 20. Tifa
 21. Angklung
 22. Wayang
- D. Warisan Budaya Takbenda Kuliner Tradisional
1. Randang
- E. Warisan Budaya Takbenda Kearifan Lokal
1. Materinial Khas Minangkabau
 2. Belian Bawo
 3. Mane'e
 4. Kalosara
- F. Warisan Budaya Takbenda Kerajinan Tradisional
1. Songket Palembang
 2. Tenun Siak
 3. Tapis
 4. Gerabah Kasongan
 5. Bidaei (Bide')
 6. Songket Sambas
 7. Sasirangan
 8. Ulap Doyo
 9. Tais Pet
 10. Ukiran Asmat
 11. Batik Indonesia
 12. Keris
 13. Tenun Ikat Sumba
 14. Noken
- G. Warisan Budaya Takbenda Makna Arsitektur Tradisional
1. Rumah Adat Karo
 2. Rumah Gadang
 3. Rumah Panjang Dayak (Lamin, Betang, Radaakng, Uma Dadog)
 4. Rumah Bale'

- H. Warisan Budaya Takbenda Naskah Tradisional
 - 1. Aksara Dan Naskah Kha-Ga-Nga

- I. Warisan Budaya Takbenda Ritual Tradisional
 - 1. Muah Jong
 - 2. Barappen

- J. Warisan Budaya Takbenda Musik Tradisional
 - 1. Calung
 - 2. Kentrung
 - 3. Karungut
 - 4. Kolintang
 - 5. Sasandu (Sasando)

- K. Warisan Budaya Takbenda Permainan Tradisional
 - 1. Karaben Sape (Karapan Sapi)
 - 2. Makepung
 - 3. Kagati
 - 4. Caci

- L. Warisan Budaya Takbenda Teknologi Tradisional
 - 1. Pinisi
 - 2.

- M. Warisan Budaya Takbenda Senjata Tradisional
 - 1. Rencong
 - 2. Kujang

4) **IKU “Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya”** pada tahun 2013 tingkat pencapaian indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditentukan. Dari jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya yang ditargetkan sebanyak 15.000.000 orang, Kemendikbud berhasil merealisasikan sebanyak 18.645.290 orang, dengan persentase capaian 124%.



Salah satu bentuk Pelestarian dan Apresiasi Budaya

Realisasi indikator kinerja utama jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya sebagaimana dalam tabel berikut ini.

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	163.049
2.	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	8.726
3.	Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	2.122.856
4.	Internalisasi dan Diplomasi Budaya	15.227
5.	Jumlah pengunjung situs cagar budaya yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis:	
5.1.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Jawa Timur	8.882.215
5.2.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Prambanan Jawa Tengah	633.563
5.3.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta	1.883.595
5.4.	Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran	204.637
5.5.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh	220.968
5.6.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar	24.589
5.7.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar	410.585
5.8.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	200.785
5.9.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar	123.217
5.10.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang	914.895
5.11.	Balai Konservasi Borobudur	2.836.383
	JUMLAH	18.645.290

Realisasi kinerja utama jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya tahun 2013 sebesar 124 % dan realisasi kinerja tahun 2012 sebesar 105 % maka terjadi kenaikan sebesar 19 %. Kenaikan kinerja utama tersebut didukung dengan pelaksanaan even-even dan publikasi melalui media skala nasional maupun internasional.

Pelaksanaan kegiatan strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, di antaranya:

1) Penyelenggaraan World Culture Forum 2013

Pembukaan Resmi WCF 2013 dihadiri oleh Bapak Presiden RI beserta Ibu Ani Yudhoyono, juga dihadiri oleh Menteri-Menteri RI, Menteri Kebudayaan dari beberapa Negara, Organisasi kebudayaan dunia, para tokoh dan ahli kebudayaan serta *keynote*



speaker (pembicara kunci) WCF, yakni Prof. Dr. Armatya Sen dan Dr. Fareed Zakaria.

Sebanyak 600 seniman dari negara-negara yang mewakili lima benua mengadakan pementasan pada gala dinner yang bertempat di Garuda Wisnu Kencana, Bertemakan "Swarming Intelligence Carnival", pementasan tersebut diadakan untuk menyambut pembukaan Forum Budaya Dunia (WCF).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh, dan Menteri Kebudayaan Republik Rakyat Cina, Cai Wu, menandatangani *Joint Communiqué* (pernyataan bersama) di bidang kebudayaan. Mewakili Indonesia dan Cina, penandatanganan pernyataan bilateral ini dilaksanakan di *Bali International Convention Center* (BICC). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan rasa bahagiannya atas penandatanganan *Joint Communiqué* antara Indonesia dan Cina yang bermakna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Mohammad Nuh menyampaikan bahwa "Indonesia dan Cina sampai saat ini memiliki hubungan kerjasama antar negara yang strategis dan komprehensif, sebuah bentuk hubungan bilateral tertinggi. Namun itu dari sisi hubungan antar negara yang umum. Pada tingkat kementerian, kami baru memulai untuk membuatnya lebih kuat," Lebih jauh lagi, beliau optimis bahwa hubungan kedua negara ini akan semakin kuat sejalan waktu. "Dengan *Joint Communiqué* ini, kami berencana untuk membangun rumah budaya di masing-masing negara."

Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan Forum Budaya Dunia yang dilakukan dengan sepengetahuan UNESCO. Beliau menyatakan pula bahwa UNESCO secara jelas telah memosisikan budaya sebagai penggerak pembangunan, memanfaatkan keragaman, memperdalam akar pembangunan bagi komunitas dunia.

Hari pertama Forum Budaya Dunia menampilkan Forum Kunci Tingkat Menteri, di mana para menteri kebudayaan dari berbagai negara menghadiri sidang. Pada sidang ini semua menteri menyatakan strategi dan kebijakan budaya dalam pembangunan negara-negara bersangkutan. Para menteri kebudayaan tersebut adalah Muhammad Nuh dari Indonesia, Cai Wu dari Republik Rakyat China, Mohamed Nazri bin Tan Sri Abdul Aziz dari Malaysia, Lana Mamkegh dari Yordania, Dato Seri Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah dari Brunei Darussalam, Sultanbai Raev dari Republik Kyrgyztan, Elia Ravelomanatsoa dari Madagaskar, Felipe M. De Leon, Jr. Dari Filipina, Mari Isabel de Jesus Ximenes dari Timor Leste, Marcelo Pedroso dari Brazil, Sam Tan dari Singapura, dan Masanori Aoyagi dari Jepang.

Hari kedua Forum Budaya Dunia menggelar forum diskusi yang membahas berbagai wacana serta masalah kebudayaan dan pembangunan dan diberi nama *symposia*.

Simposium 1: Pendekatan Holistik terhadap Budaya dalam Pembangunan

Tinjauan dari praksis terakhir dan terkini sehubungan seni, budaya dan peninggalan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Simposium ini dimoderatori oleh Madame Alissandra Cummins dari Barbados. Cummins adalah kepala NATCOM. Pidato utama diberikan oleh Prof. Rick West, Presiden dan CEO The Autry, Amerika; Prof. Jean Couteau dari Indonesia, ahli budaya, penulis multi lingual serta kolomnis; Dr. Bussakorn Binson dari Thailand, Associate Professor dari Musik di Fakultas Seni Rupa dan Terapan, Universitas Chulalongkorn, di Bangkok; Dr. Nanda Wickramasinghe, Sekretaris Kementerian Warisan Budaya Sri Langka, Frank J. Hoff dari Amerika, Presiden Atlantis Publications; Lynne Patchett dari Inggris, Kepala Budaya, Unit Eksekutif, Markas UNESCO, dan Radhar Panca Dahana, dosen Universitas Indonesia dan kepala beberapa perusahaan media.

Simposium 2: Masyarakat Madani dan Demokrasi Kebudayaan

Simposium ini menyoroti demokrasi partisipan dan tata kelola inklusif sebagai isu penting dalam keterlibatan masyarakat madani. Simposium ini dimoderatori oleh Dr. Hans d'Orville dari Prancis sebagai moderator, Asisten Direktur Jenderal Kantor Perencanaan Strategis UNESCO; Para pembicara adalah: Goenawan Mohammad, pakar budaya dan pendiri majalah Tempo; Vladimir Tolstoy, Penasihat Kebudayaan Presiden Rusia; Kigge Hvid dari Denmark, Direktur dan CEO INDEX Biennale; Mark Miller, Ketua Program Remaja di Tate London; Jordi Pascual dari Spanyol, Koordinator Agenda 21 untuk budaya; Yasmin Khan dari Inggris, ahli gender mainstreaming melalui transformasi antar generasi di sektor budaya.

Simposium 3: Kreativitas dan Ekonomi Kebudayaan

Wawasan dalam pendekatan berdasarkan fakta baik kualitatif maupun kuantitatif oleh Prof. Dr. David Throsby dari Australia, Ketua Penasihat UN/UNESCO tentang Ekonomi Kebudayaan. Pembicara utamanya adalah Prof. Dr. Sri Edi Swasono, profesor ekonomi di Universitas Indonesia; Dr. Hubbert Gijzen, Direktur Regional dan Wakil UNESCO, Prof. Dr. James J. Fox dari Australia, konsultan pemerintah Indonesia program mikro ekonomi; Anaya Bhattacharya dari India, pengusaha sosial bekerja untuk pendidikan komunitas dan pembangunan kapasitas menggunakan pendekatan budaya inovatif; dan Alexander Syoenko, Direktur Museum Seni Terapan dan Dekoratif Rusia.

Simposium 4: Budaya dalam Kelestarian Lingkungan

Simposium ini membahas peninggalan kolonialisme dalam dikotomi alam-budaya. Para pembicara: Dr. Erna Witoelar, mantan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Indonesia; Prof. Dr. Renato Flores, Ajudan Khusus dan Kepala Presiden EPGE, Kepala Unit Inteligen FGV, Brasil, Prof. Dr. Emil Salim, ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia; Ngaire Blankenberg dari Prancis, ahli perencana dan pembangunan kota yang berkelanjutan dengan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman budaya di beberapa kota di dunia; Dr. Yusria Abdel Rahman, direktur konservasi wanita pertama dan ahli budaya remaja dalam pembangunan dari Mesir; Prof. Dr. Slikkerveer dari Universitas Leiden, Belanda; Dr. Thomas Schaaf dari Jerman, mantan Kepala Divisi dari Ilmu Ekologi dan Bumi, Program

Manusia dan Biosfir, UNESCO; dan Khaliffa Sall dari Senegal, Walikota Dakar dan Presiden SCLG Afrika.

Simposium 5: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

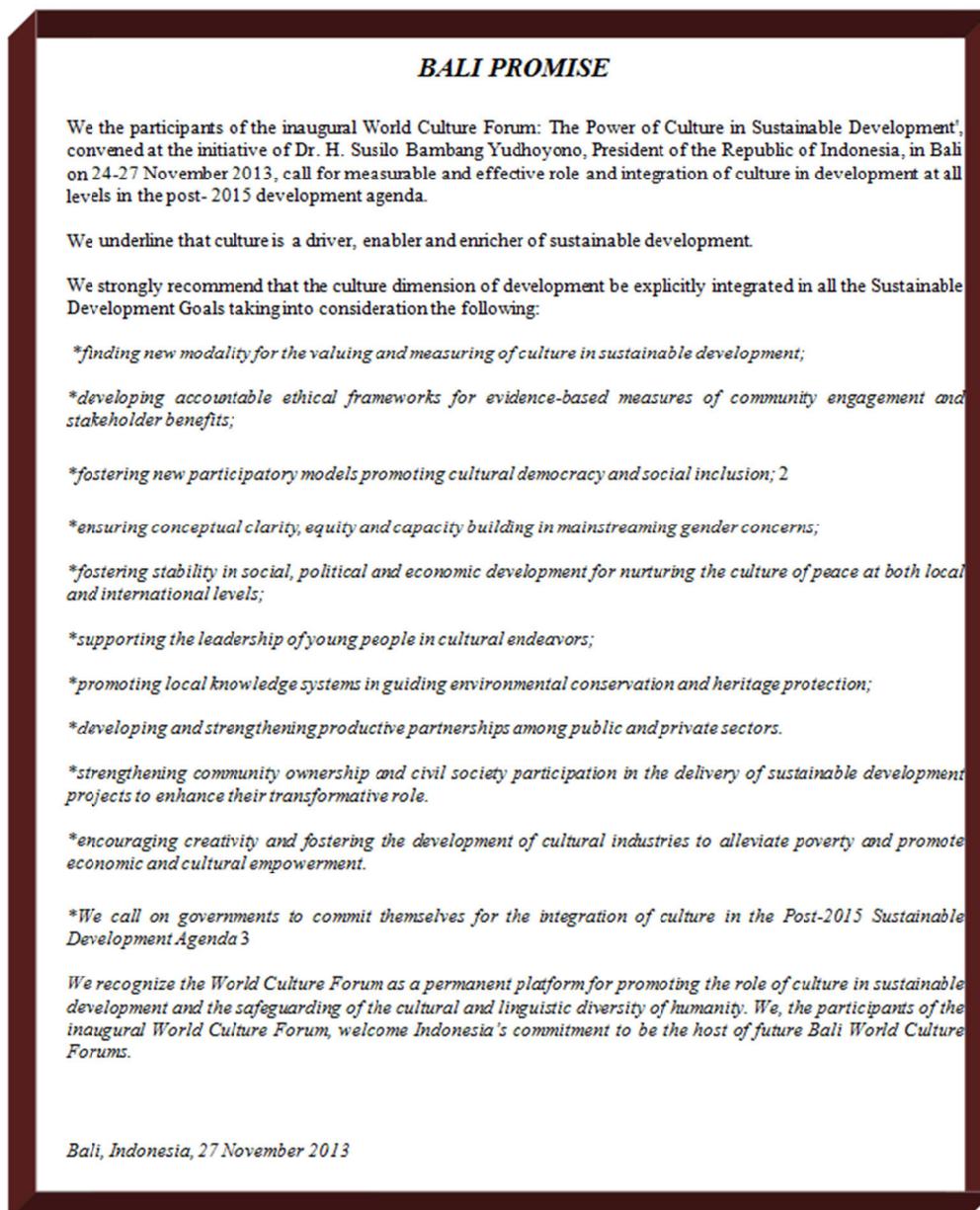
Mendiskusikan pergerakan populasi dan bagaimana pendekatan diimplementasikan agar kota berkembang sebagai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Simposium ini dimoderatori oleh Dr. Augusto Vilalon, Arsitek Konservasi Kota dan Dewan Internasional untuk monumen dan situs, Filipina. Pembicara utama adalah presiden dan profesor Minja Yang, Pusat Konservasi Internasional Raymond Lemaire, Inggris; Mohammad Basyir Ahmad, Walikota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia; Hlaing Maw oo Hock dari Departemen Pembangunan Pemukiman dan Perumahan Masyarakat, Myanmar; Rebecca Matthews, managing director Pusat Budaya Eropa, Denmark; Ratish Nanda, Direktur Proyek Aga Khan Trust untuk budaya, New Delhi, India; Sabina Santarossa, Direktur Pertukaran Kebudayaan, Yayasan Asia Eropa.

Simposium 6: Dialog Antar Agama dan Pembangunan Komunitas

Diskusi mendalam tentang pentingnya pemahaman keyakinan dan toleransi agama sebagai elemen penting dalam dimensi budaya pembangunan yang berkelanjutan. Simposium ini menyajikan Dr. Clarence G. Newsome dari National Underground Railroad Freedom Centre, Amerika. Sebagai pembicara utama yaitu: Prof. Dr. Azyumardi Azra, Profesor Sejarah di Universitas Sejarah di Universitas Islam Negeri Jakarta; Dr. Chung Hyun Kyung, teolog Kristen Korea, penulis "Struggle to be the Sun Again: Introducing Asian Women's Theology", Korea Selatan; Rabi Jeremy Jones, Pengacara dan Promotor Dialog Antar Agama dari Sydney, Australia; Prof. Dr. Luh Ketut Suryani, Psikiater Bali, Pengajar Meditasi; Syarif Istvan Horthy, Wakil Ketua Yayasan Guerrand-Hermes, Hongaria; Darwis Khudori, Profesor dari Universitas Le Havre, Prancis; Seiichi Kondo, Badan Komisioner untuk Urusan Budaya Jepang; Prof. Dr. Michael Hitchcock, Profesor manajemen turisme dan dekan Universitas Keilmuan dan Teknologi, Macau.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menutup forum ini, dengan *Bali Promise* yang dibacakan oleh delegasi internasional: Audrey Harare Chihota Charamba dari Zimbabwe, Shireen Mohammad Azis dari Irak dan David Throsby dari

Australia Keputusan untuk menamakan *Bali Promise* dibuat pada hari Minggu 24 November melalui *steering committee* WCF, yang menandakan hari pertama forum pak Muhammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidato penutupnya berterima kasih pada partisipan atas kontribusi dalam mewujudkan inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



2) Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2013

Kongres Kebudayaan Indonesia diadakan di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, pada tanggal 8 s.d 11 Oktober 2013 yang merupakan Kongres ke-16 dan merupakan kelanjutan dari kongres-kongres kebudayaan sebelumnya yang telah dilakukan sejak tahun 1918.

Sambutan Wamendikbud Bidang Kebudayaan dalam pembukaan Kongres Kebudayaan Indonesai tahun 2013, berharap Kongres Kebudayaan Indonesia ini dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk pembangunan manusia dan budaya Indonesia kedepan.



Wamendikbud membuka secara resmi kongres Kebudayaan

Kongres kebudayaan Indonesia ini dibagi menjadi lima topik yaitu: demokrasi berkebudayaan dan budaya berdemokrasi, warisan dan pewarisan budaya, diplomasi kebudayaan, pengelolaan kebudayaan, sumberdaya kebudayaan.

Hasil rumusan Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2013 sebagai berikut:

1. Demokrasi Berkebudayaan dan Budaya Berdemokrasi

Penerapan demokrasi lebih mengedepankan individualisme tanpa diimbangi dengan kapasitas individual dalam pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan hakikatnya telah mengakibatkan menguatnya lokalitas yang cenderung mengganggu keindonesiaan yang kita cita-citakan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi yang mencerminkan kebudayaan sebagai mainstream pembangunan keindonesiaan belum tampak jelas ditunjukkan ke dalam perilaku budaya berdemokrasi. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang digali dan dikembangkan dari lokalitas tertentu pada prinsipnya dapat dimanfaatkan untuk perkuatan demokrasi. Penggalian dan pengungkapan kearifan lokal dilakukan dalam konteks sejarah lokal atau daerah dengan perspektif keindonesiaan. Sementara itu pemanfaatan dan penerapannya ke dalam demokrasi harus bertumpu pada landasan konstitusi dan realitas kekinian.

2. Warisan dan Pewarisan Budaya

Pewarisan kebudayaan merupakan dasar bagi pengembangan kebudayaan dan tumbuhnya peradaban. Melalui proses pewarisan itulah capaian-capaian dan kemajemukan kebudayaan yang telah dihasilkan oleh suatu generasi, dapat dimiliki dan dikembangkan lebih lanjut oleh generasi-generasi selanjutnya. Muncul akulturasi kemajuan kebudayaan yang ketika diwariskan dari generasi ke generasi kemudian menjadi jati diri yang kokoh dari pemilik kebudayaan.

Ketika suatu kebudayaan semakin terbuka terhadap pengaruh dari luar, proses pewarisan kebudayaan dan unsur-unsur budaya yang diwariskan akan mengalami proses perubahan. Proses pewarisan menuntut adanya proses seleksi, adopsi dan adaptasi unsur-unsur budaya dari luar sehingga unsur budaya asing dapat diterima dan diadopsi dalam sistem budaya yang ada. Di sinilah terjadi pertemuan kebudayaan yang melibatkan proses glokalisasi dan menghasilkan pola-pola kebudayaan yang baru.

Keberagaman budaya tradisi yang diwariskan di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan ruang pertumbuhannya secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan kebudayaan Indonesia. Interaksi warisan tradisi lokal dan kebudayaan Indonesia yang setara akan membangun keindonesiaan yang lebih tangguh menghadapi tantangan dalam menggapai masa depan yang bermartabat. Interaksi dan pewarisan budaya tradisi memerlukan ruang khusus di semua bentuk media (khususnya televisi budaya) yang aktual dalam kehidupan masyarakat.

3. Diplomasi Budaya

Kebudayaan Indonesia telah memasuki lingkup dunia internasional tanpa batas. Hal ini menuntut adanya kemampuan untuk mengembangkan diplomasi dalam bidang kebudayaan, baik ke dalam maupun keluar dengan cara yang lebih strategis, sistematis, dan terencana. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan peran semua pihak yang lebih aktif, baik pemerintah maupun non pemerintah.

4. Pengelolaan Budaya

Kebudayaan tidak perlu dikelola dari luar, karena pada dasarnya kebudayaan dapat mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan baru diperlukan dalam hubungannya dengan pembentukan keindonesiaan sesuai dengan semangat zaman.

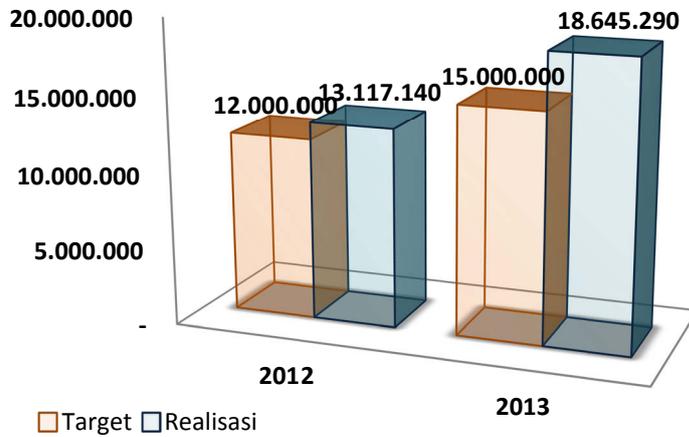
5. Sumberdaya Kebudayaan

Indonesia memiliki sumberdaya kebudayaan baik tangible maupun intangible yang sangat beragam. Pada masa kini dan di masa depan kebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi muda sebagai pemangku kebudayaan di masa depan dituntut untuk memiliki kemampuan memanfaatkan keragaman sumberdaya kebudayaan untuk pembentukan keindonesiaan.

Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2013 ditutup oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2013 adalah :

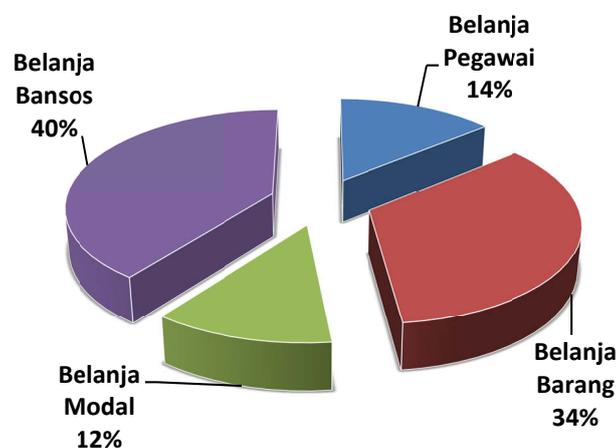
1. Menciptakan kehidupan demokrasi yang berwawasan budaya melalui pengungkapan kearifan lokal yang relevan.
2. Pendidikan baik formal maupun non formal harus lebih mampu berperan dalam pewarisan kebudayaan Indonesia dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana.
3. Menyusun Grand Design Diplomasi Kebudayaan yang dapat menciptakan keindonesiaan yang unggul dan kompetitif.
4. Menciptakan system pengelolaan kebudayaan yang terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi serta menguatkan peran segenap pemangku kebudayaan.
5. Menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan sumber daya kebudayaan untuk pembentukan keindonesiaan yang bermartabat dan mengembangkan sumberdaya kebudayaan secara berkelanjutan.

Berikut grafik tren jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya tahun 2012 dan tahun 2013.



B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

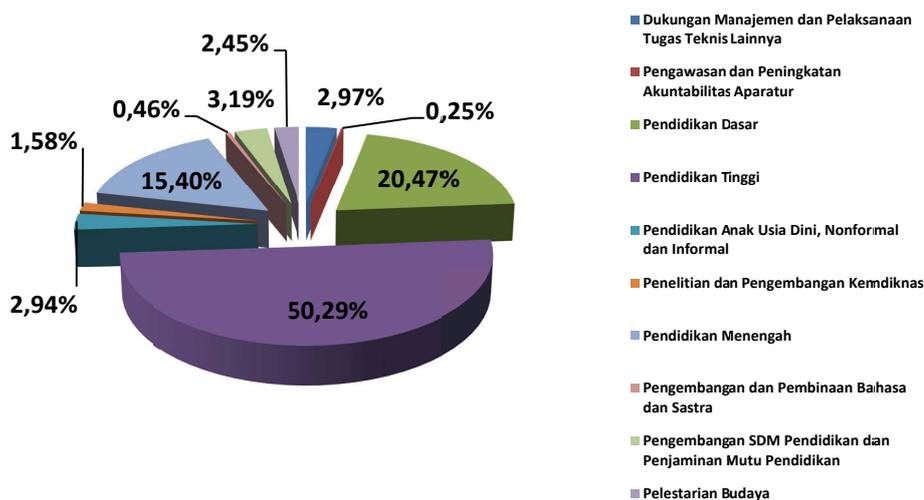
Pagu belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA 2013 dibagi dalam empat pos pengeluaran, yaitu (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal, (4) Bantuan Sosial (Bansos). Pos pengeluaran belanja pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, misalnya gaji dan tunjangan-tunjangan. Pos pengeluaran belanja barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Pos pengeluaran belanja bansos yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan bantuan sosial kepada penyelenggaraan pendidikan



berupa dana 1) Imbal Swadana; 2) Bantuan Kegiatan Mengajar (BKM); 3) *Safe Guarding*; 4) Lembaga; 5) Beasiswa; 6) Rehabilitasi; 7) Taman Bacaan Masyarakat; 8) Perpustakaan; dan 9) Kursus-kursus, dll.

Berikut persentase pengalokasian anggaran yang terbagi atas empat pos pengeluaran. Total pagu anggaran belanja pada DIPA Kemendikbud tahun 2013 sebesar Rp 82.124.617.244.000. Dari jumlah tersebut belanja bantuan sosial mendapatkan alokasi sebesar 40% atau Rp32.589.641.252.000, Belanja Pegawai mendapatkan alokasi 14% atau Rp 11.516.737.855.000, Belanja Barang mendapatkan alokasi 34.% atau Rp 28.101.296.949.000, dan Belanja Modal mendapatkan alokasi 12% atau Rp 9.916.941.188.000. Dari empat pos belanja tersebut belanja bansos memperoleh alokasi terbesar. Besarnya alokasi belanja bansos tersebut karena Kemendikbud memiliki kebijakan yang memihak pada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya pada mereka yang berkontribusi pada memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Berikut grafik pengalokasian anggaran tahun 2013 pada sepuluh program Kemendikbud.



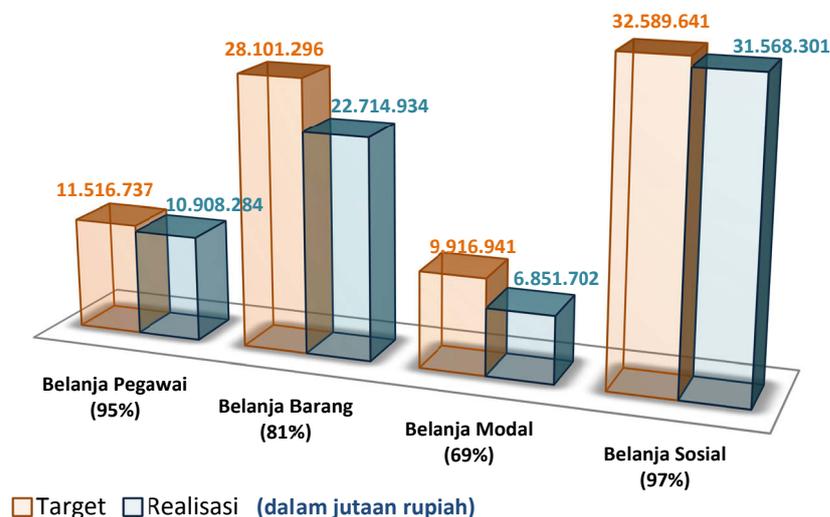
Anggaran Kemendikbud tahun 2013 sebesar Rp 82.124.617.244.000 yang tersebar ke sepuluh unit utama seperti terlihat dalam grafik di atas digunakan untuk membiayai

sepuluh program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Kesepuluh program tersebut antara lain 1) program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal; 2) program pendidikan dasar; 3) program pendidikan menengah; 4) program pendidikan tinggi; 5) program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan; 6) program penelitian dan pengembangan; 7) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra; 8) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dan 10) program pelestarian budaya

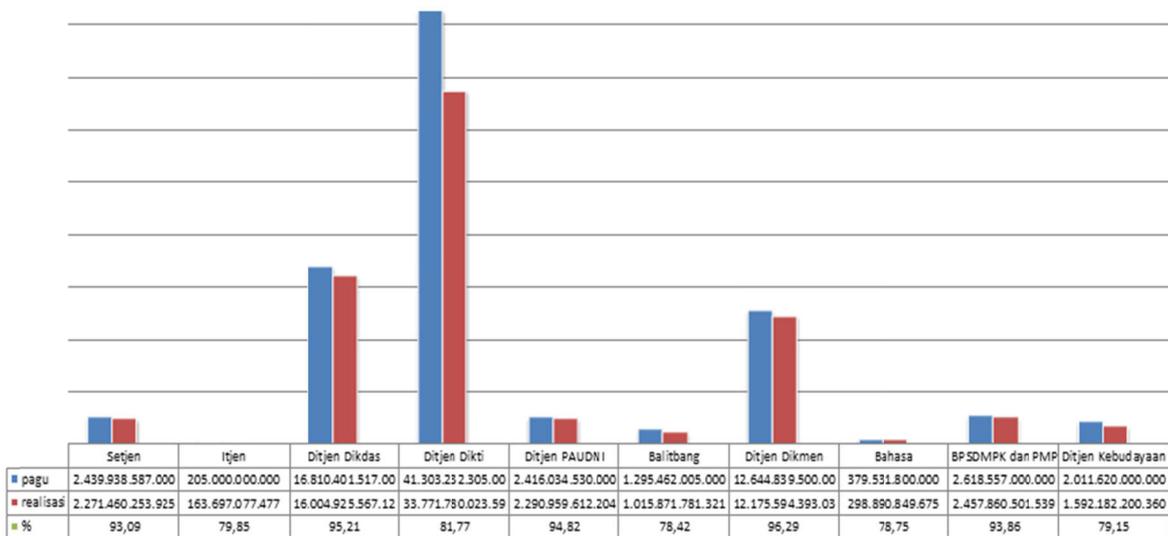
1. Realisasi Anggaran

Total anggaran Kemendikbud tahun 2013 sebesar Rp 82.124.617.244.000. Realisasi daya serap sampai bulan Desember tahun 2013 sebesar Rp 72.043.222.260.252 sehingga persentase daya serap anggaran Kemendikbud sampai Desember 2013 adalah sebesar 87.72%.

Berikut ini grafik realisasi daya serap DIPA 2013 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masing-masing pos pengeluaran.



Berikut grafik daya serap anggaran untuk sepuluh program yang dilaksanakan oleh sepuluh unit utama selama tahun 2013.



Berikut realisasi kinerja keuangan pada sepuluh program yang ada di lingkungan Kemendikbud yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1. Program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.416.034.530.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.290.959.612.204 dengan persentase sebesar 94,82%;
2. Program pendidikan dasar, dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.810.401.517.000 telah terealisasi sebesar Rp. 16.004.925.567.121 dengan persentase sebesar 95,21%;
3. Program pendidikan menengah, dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.644.839.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 12.175.594.393.034 dengan persentase sebesar 96,29%;
4. Program pendidikan tinggi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 41.303.232.305.000 telah terealisasi sebesar Rp. 33.771.780.023.596 dengan persentase sebesar 81,77%;
5. Program penelitian dan pengembangan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.295.462.005.000 telah terealisasi sebesar Rp. 1.015.871.781.321 dengan persentase sebesar 78,42%;

6. Program pengembangan sumberdaya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.618.557.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.457.860.501.539 dengan persentase sebesar 93.86%;
7. Program pengembangan dan pembinaan bahasa, dari pagu anggaran sebesar Rp. 379.531.800.000 telah terealisasi sebesar Rp. 298.890.849.675 dengan persentase sebesar 78.75%;
8. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.439.938.587.000 telah terealisasi sebesar Rp 2.271.460.253.925 dengan persentase sebesar 93.09%;
9. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dari pagu anggaran sebesar Rp. 205.000.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 163.697.077.477 dengan persentase sebesar 79,85%;
10. Program pelestarian budaya, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.011.620.000.000 telah terealisasi sebesar Rp 1.592.182.200.360 dengan persentase sebesar 79,15%;

Beberapa permasalahan membuat daya serap anggaran Kemendikbud pada tahun 2013 rendah antara lain::

- a. Adanya keterlambatan pengesahan dokumen anggaran
- b. Keterbatasan waktu pelaksanaan DIPA, dimana pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada bulan Mei
- c. Adanya efisiensi anggaran pengadaan barang/jasa;
- d. Adanya beberapa paket kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena DIPA masih di blokir;
- e. Adanya alokasi bantuan sosial yang tidak dapat dicairkan.
- f. pengesahan dokumen anggaran untuk kegiatan belanja barang baru dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013, sedangkan untuk belanja modal pada sebagian besar perguruan tinggi baru disahkan pada akhir Oktober 2013. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan belanja modal tidak memungkinkan untuk dapat direalisasikan.

Melihat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tersebut beberapa langkah antisipasi yang dilakukan antara lain memperbaiki proses penyusunan

RKAKL sehingga akan mempercepat proses pembahasan anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan memperpendek proses pertanggungjawaban dan pencairan anggaran dengan membentuk satuan kerja baru, dengan adanya satker baru ini diharapkan pencairan anggaran bisa lebih cepat dan tidak bergantung dengan satuan kerja lain.

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM STRATEGIS KEMENDIKBUD

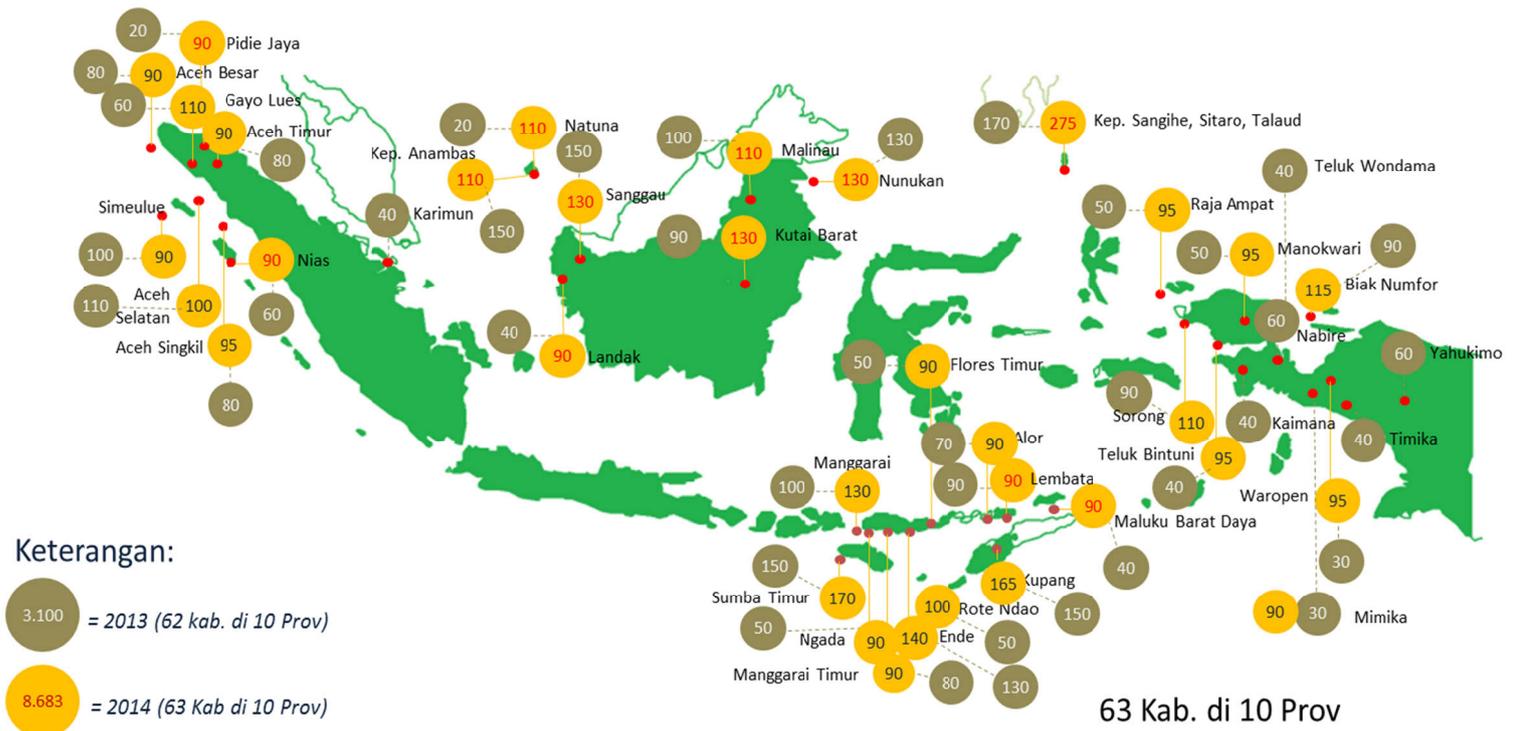
Berikut kinerja yang berhasil dicapai dari beberapa program strategis yang dilaksanakan Kemendikbud pada tahun 2013.

1. PPG SM-3T

Sebagai Negara kepulauan dengan luas wilayah 5.193.250km² dengan sepertiga wilayahnya berupa daratan dan dua per tiga berupa lautan. Dengan jumlah pulau yang mencapai lebih dari 17.000 membuat percepatan pembangunan di semua wilayah kurang merata. Banyak wilayah yang kualitas pendidikannya kurang bisa berkembang yang disebabkan oleh kendala geografis maupun ekonomi. Untuk meningkatkan akselerasi pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Dit. Dikendik menyelenggarakan Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T).

Hasil analisis awal ditemukan setidaknya terdapat empat permasalahan pendidikan di wilayah 3T yaitu kekurangan tenaga guru, distribusi guru yang tidak merata, kualifikasi guru, dan ketidaksesuaian antara kualifikasi dengan matapelajaran yang diampu. Pemecahan secara tuntas terhadap permasalahan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan menuntut komitmen dari berbagai pihak. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dalam jangka pendek, pengiriman Sarjana Mengajar di wilayah 3T.

Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia yang kegiatannya adalah mengirimkan para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru. Para sarjana ini ditugaskan di wilayah 3T selama setahun untuk menjadi guru di SD, SMP, maupun SMA.



Disamping sebagai usaha untuk mengatasi masalah kekurangan guru, program ini juga sebagai salah satu usaha untuk mengasah Sarjana Pendidikan untuk lebih professional, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Program ini juga dimaksudkan untuk menanamkan jiwa pendidik, nasionalisme, bercita-cita luhur untuk mencerdaskan anak-anak bangsa seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini. Program SM-3T adalah Program Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan



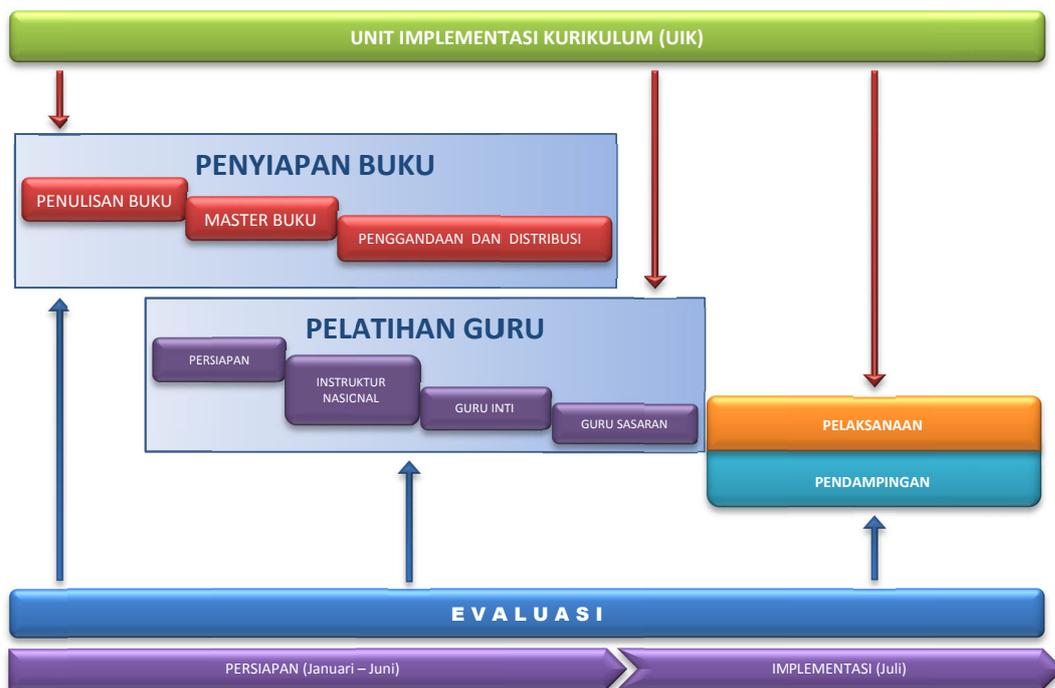
Salah satu guru peserta program sarjana mendidik di daerah 3T, sedang mengajar pada salah satu sekolah di daerah Ende, NTT

pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru.

Pada tahun 2013 peserta SM3T diterjunkan di 63 kabupaten yang tersebar di 10 provinsi. Provinsi NTT mendapatkan proporsi yang paling besar yaitu 725 peserta atau sekitar 26% diikuti oleh provinsi Papua dan Aceh yang masing-masing mendapatkan 21% dan 18%. Sedangkan provinsi Sumatera Utara hanya mendapatkan 38 peserta atau sekitar 1%.

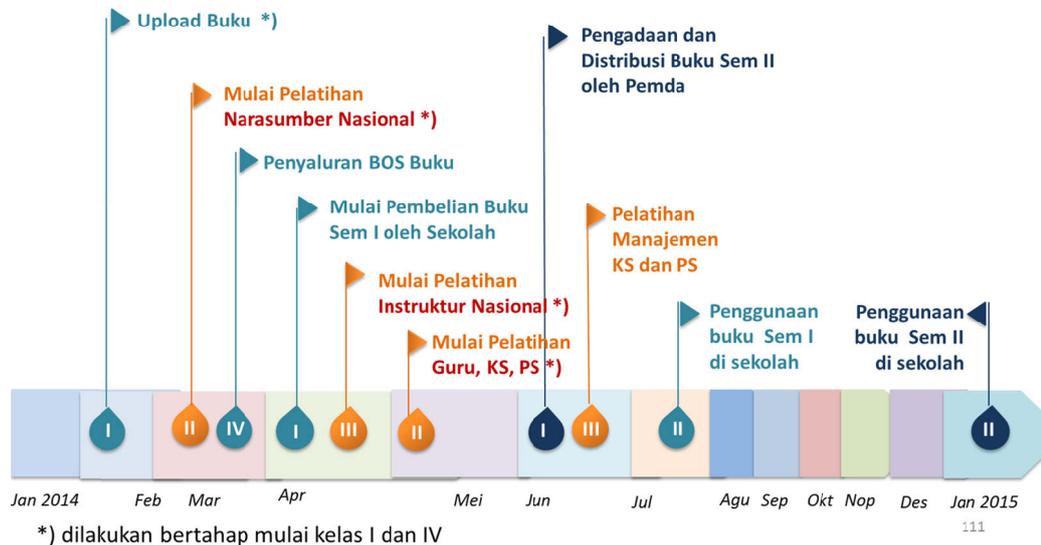
2. Kurikulum 2013

Kegiatan Kurikulum 2013 pada Badan PSDMPK-PMP meliputi persiapan kegiatan persiapan (penyiapan buku siswa dan buku guru, serta pelatihan guru), pelaksanaan pelatihan guru, evaluasi, dan pendampingan guru dalam implementasi digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Berikut skema implementasi kurikulum 2013 pada tahun 2014 sampai tahun 2015.

Skema Implementasi



Pelatihan bagi guru dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 diharapkan mampu mengubah pola pikir (*mindset*) guru dalam mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan baik dan benar, sesuai materi pelatihan yang terdiri dari rasional Kurikulum 2013, elemen perubahan kurikulum, standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), dan kompetensi dasar (KD), strategi implementasi Kurikulum 2013, isi Buku Guru, isi Buku Siswa, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), cara penilaian sesuai tuntutan Kurikulum 2013, cara melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013; dan skenario pelaksanaan pelatihan dan metodologi pelatihan Implementasi Kurikulum 2013.

Sedangkan instruktur nasional dan guru inti pada akhirnya diwajibkan memiliki



Sosialisasi Kurikulum 2013 oleh Mendikbud dihadapan guru se-Propinsi Jawa Tengah

kemampuan sebagai pelatih dalam pelatihan Implementasi Kurikulum 2013; dan memahami mekanisme pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013.

Pada tahap awal, Badan PSDMPK-PMP memberikan pelatihan kepada sejumlah 544 instruktur nasional sebagai Tim Pelaksana Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Pusat.

Tabel Sebaran Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 Instruktur Nasional

NO	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH	GURU									
			RENCANA					REALISASI				
			GURU	WI	DOSEN	Lainnya	TOTAL	GURU	WI	DOSEN	Lainnya	TOTAL
1	SD	2.598	72	36	36	-	144	51	25	28	-	104
2	SMP	1.436	108	54	54	-	216	86	135	56	1	278
3	SMA	1.270	36	18	18	-	72	32	32	17	8	89
4	SMK	1.021	40	20	20	-	80	33	24	12	4	73
	TOTAL	6.325	256	128	128	-	512	202	216	113	13	544

Selanjutnya, jumlah guru inti yang diberikan pelatihan Kurikulum 2013 adalah sejumlah 3.200 guru, terdiri dari 400 guru SMK, 358 guru SMA, 1.346 guru SMP, 1.094 guru SD. Instruktur nasional dan guru inti kemudian memberikan pelatihan kepada sejumlah 131.448 guru sasaran sebagai Pelaksana Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2013, Badan PSDMPK-PMP telah melakukan pelatihan kepada 1.986.902 dari target total jumlah guru 2.925.676 guru atau 67,91% atau naik sebesar 4,49% dari tahun 2012 yang mencapai 1.855.454 guru.

Kegiatan	Real. s.d. 2012	%	Real. s.d. 2013	%	% Kenaikan
Peningkatan Kompetensi dan Professionalisme Pendidik (Total 2.925.676)	1.855.454	63,42	1.986.902	67,91	4,49

Tabel Realisasi Jumlah Guru yang Telah Mengikuti
Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2013

No	Nama Satker	Realisasi Guru	Realisasi Dana*(Rp)
1	LPMP Lampung	9,243	18,780,625,000
2	LPMP DKI Jakarta	1,851	6,583,998,000
3	LPMP Sumatera Utara	3,118	10,515,045,800
4	LPMP Kalimantan Barat	2,143	4,798,260,300
5	LPMP Babel	1,222	3,271,160,660
6	LPMP Sumatera Barat	4,857	10,989,614,000
7	LPMP Kalimantan Tengah	1,770	9,778,679,150
8	LPMP Jambi	4,218	9,525,650,000
9	LPMP Papua Barat	935	8,018,580,000
10	LPMP Kalimantan Selatan	1,830	3,913,761,227
11	LPMP Sulawesi Selatan	4,650	10,466,134,000
12	LPMP Aceh	1,850	4,558,543,081
13	LPMP Bengkulu	823	2,560,415,200
14	LPMP Jawa Tengah	10,637	24,831,237,848
15	LPMP Kalimantan Timur	3,849	7,352,217,557
16	LPMP Papua	254	2,301,548,700
17	LPMP Maluku Utara	489	2,453,575,000
18	LPMP NTB	2,663	4,764,254,200
19	LPMP Sumatera Selatan	2,791	7,533,548,637
20	LPMP Riau	3,834	8,635,916,000
21	LPMP NTT	964	2,281,707,200
22	LPMP Bali	2,995	7,213,036,000
23	LPMP Maluku	672	3,082,186,000
24	LPMP Gorontalo	1,804	3,043,902,544
25	LPMP Jawa Barat	8,490	19,778,539,200
26	LPMP Jawa Timur	11,368	34,902,292,000
27	LPMP Sulawesi Utara	2,074	6,802,695,000
28	LPMP Sulawesi Tengah	1,109	2,490,716,000
29	LPMP Sulawesi Tenggara	1,283	2,714,887,500
30	LPMP Sulawesi Barat	991	3,002,276,700
31	LPMP Kep. Riau	435	1,867,561,000
32	LPMP Banten	4,640	9,715,261,650
33	LPMP DI Yogyakarta	2,425	6,073,273,000
34	PPPPTK Matematika	4,650	18,183,259,657
35	PPPPTK Pertanian	240	3,288,060,000
36	PPPPTK IPA	1,216	8,132,109,477
37	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	2,877	15,334,824,200
38	PPPPTK BMTI	466	3,911,465,825
39	LPPKS	511	3,401,392,000
40	PPPPTK PKN dan IPS Malang	3,034	10,559,801,570
41	PPPPTK TKPLB	2,322	6,922,132,770
42	PPPPTK BBL Medan	994	4,370,700,866
43	PPPPTK Bahasa	5,660	34,192,471,000
44	PPPPTK Penjas dan BK	2,511	13,423,725,750
45	PPPPTK Kesenian	1,381	7,852,723,244
46	PPPPTK BOE Malang	1,092	7,360,362,000
47	Pusbang Prodik	1,169	24,718,108,000
48	Pusbang Tendik	1,048	11,920,890,000
49	Sekretariat Badan*	---	1,495,700,000
TOTAL		131,448	439,668,824,513

*Termasuk dana pendampingan, sensus dan manajemen.

Selanjutnya, peningkatan kompetensi bagi kepala sekolah dan pengawas untuk tahun 2013 ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Pelatihan tentang Implementasi Kurikulum 2013. Tujuan pelatihan bagi kepala sekolah mempunyai tujuan umum yaitu mengubah *mindset* kepala sekolah agar dapat menerima perubahan kurikulum sebagai kebutuhan dan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola perubahan, bertindak sebagai pemimpin pembelajaran dan menciptakan budaya sekolah sehingga implementasi Kurikulum 2013 dapat terlaksana secara efektif dan efisien di sekolah. Sedangkan tujuan pelatihan Kurikulum 2013 pengawas sekolah adalah 1) Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial pada kurikulum 2013; 2) Menyusun rancangan supervisi pembelajaran yang bersifat klinis yang relevan dengan tuntutan kurikulum 2013; 3) Melaksanakan simulasi model supervisi pembelajaran klinis pada kurikulum 2013; 4) Mengaplikasikan evaluasi penilaian otentik dalam supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan dimiliki setelah para pengawas mengikuti pelatihan, yaitu mampu melakukan: 1) supervisi pembelajaran dalam Kurikulum 2013; 2) penilaian otentik untuk meningkatkan kreativitas; 3) *coaching* dengan menggunakan model GROW ME untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran; 4) penilaian autentik untuk meningkatkan kreatifitas; 5) berkomunikasi lisan dan tulis dengan runtut, benar, dan santun dalam menyampaikan ide, gagasan dan pendapat; dan 6) bersikap terbuka dan dapat menerima model supervisi pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

Selama tahun anggaran 2013, Badan PSDMPK-PMP telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 783 instruktur nasional kepala sekolah dan 514 instruktur nasional pengawas sekolah. Jumlah kepala sekolah dan pengawas yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 dalam rangka dan pengawas peningkatan keprofesian berkesinambungan secara berturut-turut berjumlah 7.609 dan 6.712. Sehingga jumlah realisasi kepala sekolah dan pengawas sekolah sampai dengan tahun 2013 yang telah dilatih oleh Badan PSDMPK-PMP secara berturut-turut adalah 61.021 atau 25,35% dari total jumlah kepala sekolah 240.676 dan 44.597 atau 142,03% dari total pengawas sekolah 31.399 (sumber data: Aplikasi Verval PADAMU Tahun 2013).

Tabel Realisasi Jumlah Kepala Sekolah yang Telah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2013

No	Nama Satker	Realisasi Kepala Sekolah	Realisasi Dana (Rp)
1	LPMP Lampung	82	458,040,000
2	LPMP DKI Jakarta	69	240,830,000
3	LPMP Sumatera Utara	101	711,211,500
4	LPMP Kalimantan Barat	35	98,118,600
5	LPMP Babel	36	136,082,800
6	LPMP Sumatera Barat	163	699,460,000
7	LPMP Kalimantan Tengah	24	185,190,000
8	LPMP Jambi	36	202,940,000
9	LPMP Papua Barat	30	281,280,000
10	LPMP Kalimantan Selatan	46	221,735,000
11	LPMP Sulawesi Selatan	257	569,145,000
12	LPMP Aceh	41	107,507,800
13	LPMP Bengkulu	33	62,439,000
14	LPMP Jawa Tengah	345	1,215,939,682
15	LPMP Kalimantan Timur	92	311,800,000
16	LPMP Papua	31	78,879,200
17	LPMP Maluku Utara		---
18	LPMP NTB	86	110,000,000
19	LPMP Sumatera Selatan	128	452,618,088
20	LPMP Riau	37	150,390,000
21	LPMP NTT	26	49,827,600
22	LPMP Bali	73	363,599,000
23	LPMP Maluku		---
24	LPMP Gorontalo	33	53,711,000
25	LPMP Jawa Barat	514	924,675,000
26	LPMP Jawa Timur	469	2,765,554,000
27	LPMP Sulawesi Utara	62	322,220,000
28	LPMP Sulawesi Tengah	25	105,740,000
29	LPMP Sulawesi Tenggara	54	142,028,500
30	LPMP Sulawesi Barat	46	143,742,000
31	LPMP Kep. Riau	22	135,807,000
32	LPMP Banten	77	406,705,000
33	LPMP DI Yogyakarta	123	290,280,000
34	PPPPTK Matematika	81	413,083,918
35	PPPPTK Pertanian	713	3,149,640,128
36	PPPPTK IPA	259	527,335,915
37	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	319	1,769,846,425
38	PPPPTK BMTI	363	2,390,215,971
39	LPPKS	531	2,887,337,310
40	PPPPTK PKN dan IPS Malang	532	2,431,863,362
41	PPPPTK TKPLB	270	2,193,906,150
42	PPPPTK BBL Medan	301	2,001,422,732
43	PPPPTK Bahasa	222	1,765,710,000
44	PPPPTK Penjas dan BK	323	1,737,369,900
45	PPPPTK Kesenian	49	402,863,500
46	PPPPTK BOE Malang	150	1,209,844,000
47	Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan	300	3,511,874,000
	TOTAL	7,609	38,389,809,081

Tabel Realisasi Jumlah Pengawas Sekolah
yang Telah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2013

No	Nama Satker	Realisasi Pengawas Sekolah	Realisasi Dana (Rp)
1.	LPMP DKI Jakarta	88	151,795,000
2.	LPMP Papua Barat	32	
3.	LPMP Banten	58	112.470.000
4.	PPPPTK Matematika	145	733,046,795
5.	PPPPTK Pertanian	906	6,569,952,550
6.	PPPPTK IPA	870	5,524,216,150
7.	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	579	2,675,214,270
8.	PPPPTK BMTI	298	2,131,702,988
9.	PPPPTK PKN dan IPS Malang	178	1,235,897,020
10.	PPPPTK TKPLB	298	2,344,412,350
11.	PPPPTK BBL Medan	626	5,292,601,350
12.	PPPPTK Bahasa	351	3,102,858,000
13.	PPPPTK Penjas dan BK	485	3,197,934,750
14.	PPPPTK Kesenian	878	5,249,226,008
15.	PPPPTK BOE Malang	920	7,124,061,000
	TOTAL	6.712	45,445,388,231

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas, antara lain:

1. Tidak terdistribusikannya undangan pelatihan secara maksimal dikarenakan waktu pelaksanaan dari satu pelatihan ke pelatihan berikutnya sangat dekat dan terkendalanya akses informasi karena posisi geografis, sarana dan parasana yang kurang mendukung;
2. Waktu pelaksanaan yang sempit dan terkesan terburu-buru berdampak pada pemahaman, percaya diri dan pada akhirnya mengakibatkan pelaksanaan menjadi kurang sesuai dengan standar sehingga sisi kualitas dan kuantitas instruktur nasional menjadi terbatas;
3. Terkendalanya aplikasi Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum (SEPIK) 2013.
4. Penambahan materi pelatihan mengakibatkan waktu pelatihan yang disediakan menjadi tidak sebandingnya sehingga alokasi waktu menjadi kurang memadai;
5. Padatnya kegiatan pengawas sekolah bersamaan dengan kegiatan lain (akreditasi, EDS, dan lain-lain);

6. Minimnya pendampingan terhadap guru dalam merancang bentuk penilaian dan pengelolaan nilai karena cukup banyaknya aspek yang harus dinilai (misalnya membuat rubrik penilaian); dan
7. Sulitnya mengubah mindset ke arah pendekatan *scientific*, cara mengimplementasikan strategi pembelajaran dan penilaian.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun berikutnya antara lain 1) waktu persiapan harus lebih diperhitungkan; 2) dilaksanakannya pendampingan yang lebih intensif terhadap kualitas narasumber dan instruktur nasional yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hasil pelatihan bagi guru sasaran dan kepala sekolah dan pengawas dalam implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran; 3) kebutuhan alokasi waktu pelaksanaan pelatihan dibandingkan jumlah materi yang diberikan perlu ditinjau ulang; 4) dilakukannya program berkesinambungan untuk lebih mensukseskan implementasi Kurikulum 2013 di masing-masing satuan pendidikan, antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sekolah binaan, dengan petugas gabungan antara penyelenggara pelatihan dan dinas pendidikan terkait; 5) diikutsertakannya para kepala seksi Kurikulum tingkat kota dan kabupaten agar pada pelaksanaan Kurikulum 2013 berikutnya muncul persepsi dan pemahaman yang sama; 6) dilakukannya penguatan/pemantapan terhadap pengembangan dokumen Kurikulum 2013; 7) tersedianya wadah untuk berbagi pengalaman di tingkat nasional dan daerah dalam hal pengembangan Kurikulum 2013; 8) disempurnakannya dokumen dan perangkat dari Pusat untuk selanjutnya dikomunikasikan ke daerah; dan 9) dilaksanakannya pembekalan yang lebih intensif/berkelanjutan terhadap pengawas sekolah karena kesempatan ini sangat diharapkan pihak sekolah.

Selain dilakukan oleh Badan PSDMPK-PMP, dalam rangka mewujudkan pengimplementasi kurikulum 2013 yang sempurna, upaya itu juga dilakukan unit kerja teknis. Salah satu instansi yang berkepentingan untuk keberhasilan program tersebut adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Adapun yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar adalah;

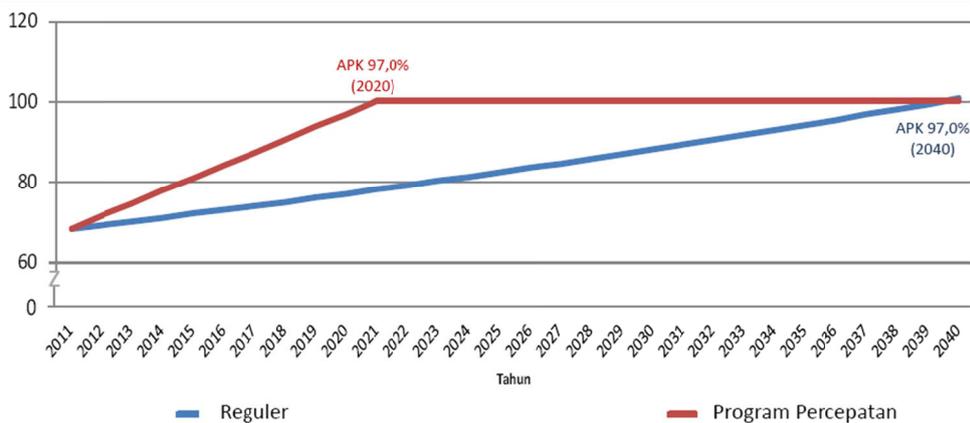
1. Penyiapan dokumen Kurikulum sebanyak 79 dokumen.
2. Sosialisasi/Workshop/Pendampingan implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 41.898 sekolah.
3. Penulisan dan pengadaan buku siswa dan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB sebanyak 131 judul dan 72.863.838 eksemplar.
4. Pelatihan guru SD/SDLB dan guru SMP/SMPLB sebanyak 1.130.014 guru.

3. Pendidikan Menengah Universal

Pendidikan menengah universal dicanangkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara usia 16-18 tahun dapat mengenyam pendidikan menengah yang bermutu. Program yang sangat strategis untuk pembangunan bangsa Indonesia di masa depan dalam rangka menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Program PMU ini diharapkan dapat mempercepat kenaikan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah. Dengan PMU, ditargetkan pada tahun 2020 APK pendidikan menengah dapat meningkat menjadi 97%,.

Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah

...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah..



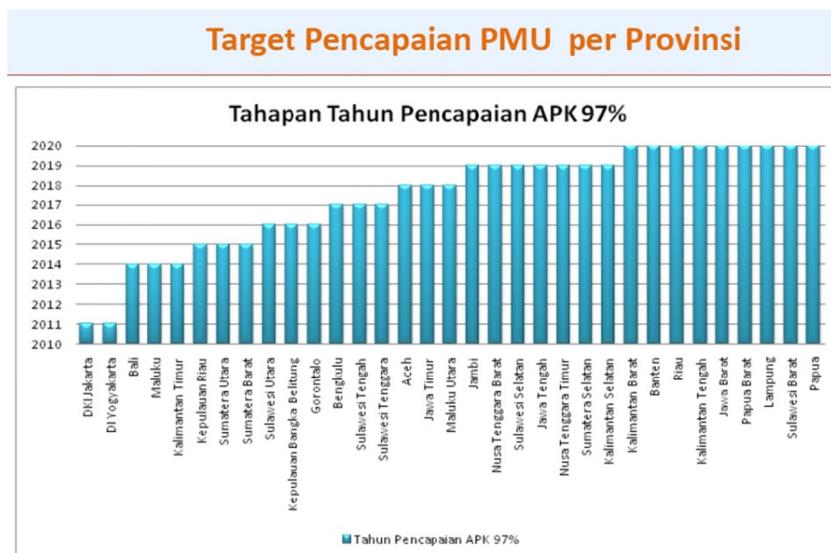
.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040.....

Sebagai konsekuensi logis atas dilaksanakannya kebijakan PMU ini, Pemerintah mulai tahun ajaran 2013/2014 akan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan menengah. Nilai nominal BOS tersebut yaitu Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun untuk seluruh siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta.



Selain itu pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari program PMU ini.

Alokasi anggaran Pendidikan Menengah Universal (PMU) belum sepenuhnya dapat terpenuhi oleh pemerintah, sehingga di tahun 2013 untuk pemenuhan akses telah membangun Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 89 SMA, 134 SMK, dan 20 SMALB, dan menambah Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB), baru mengalokasikan 2.699 ruang SMA, 3.376 ruang SMK serta 120 ruang SMALB; Untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di tahun 2013 telah mengalokasikan kepada 4.085.600 siswa SMA, 4.157.682 siswa SMK, dan 7.130 siswa PKLK dengan besaran satu juta persiswa;



Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan Menengah antara lain:

1. Penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan membangun unit sekolah baru di wilayah 3T (terpencil, tertinggal dan terluar), di wilayah yang masih kekurangan SMA dan SMK, membangun ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah yang jumlah rombelnya melebihi jumlah ruang kelas, merehabilitasi ruang kelas yang rusak;
2. Memberikan bantuan biaya subsidi pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), memberikan bantuan subsidi kepada anak-anak berkebutuhan khusus tingkat pendidikan menengah, serta memberikan subsidi bantuan kepada daerah yang mengalami musibah dan bencana Alam;
3. Pembangunan sekolah berasrama untuk memberikan layanan kepada peserta didik-peserta didik yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan sulit untuk memperoleh akses pendidikan;
4. Memperkuat lembaga-lembaga pendidikan swasta untuk berperan dalam memberikan layanan pendidikan masyarakat;
5. Mendorong partisipasi dan peran serta pemerintah provinsi dan kab/kota serta masyarakat untuk menyediakan akses;
6. Melakukan berbagai upaya pencitraan program Pendidikan Menengah Universal secara lebih intensif melalui media televisi, internet, radio, Koran dan lain-lain, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat baik melalui media elektronik dan cetak guna menarik minat siswa lulusan SMP untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Menengah, dan
7. Menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah antara sekolah yang belum maju dengan sekolah lebih maju (dalam dan luar negeri).

4. Bidik Misi

Program Bidikmisi yang telah dijalankan sejak tahun 2010 merupakan program Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) guna memberikan peluang bagi anak bangsa yang memiliki kemampuan akademik sangat baik, namun memiliki kekurangan kemampuan ekonomi, sehingga diduga tidak dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Misi dari program Bidik misi ini sendiri adalah memberikan harapan pada semua anak bangsa bahwa pendidikan tinggi tidak hanya untuk orang yang berpunya dan memberdayakan sumber daya insani bagi penerima program Bidikmisi untuk nantinya dapat memutus mata rantai kemiskinan dari dirinya sendiri. Harapan tersebut adalah membebaskan kekhawatiran paling mendasar yang terkait dengan biaya pendidikan dan kekhawatiran tentang biaya hidup. Bidikmisi sendiri bukan hanya program yang membebaskan dana, tapi program yang menyebarkan informasi, menjemput anak-anak bangsa yang kurang beruntung ini sampai nantinya bisa memutus mata rantai kemiskinan kelak di masa mendatang.

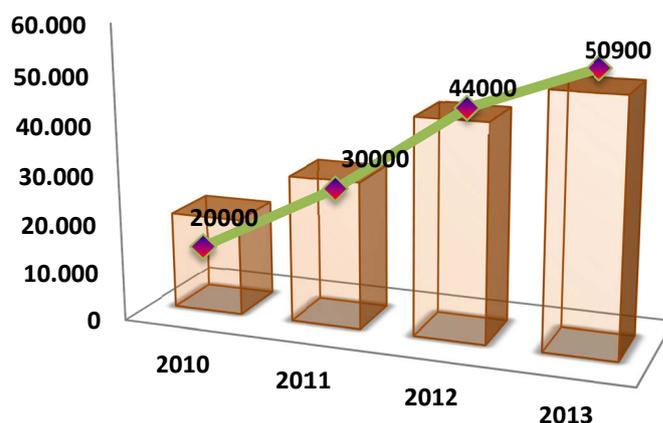
Sebanyak 20.000 kuota diberikan untuk pertama kali kepada 82 Perguruan Tinggi Negeri Kemdikbud dan Kemenag. Pada tahun 2011 diberikan sebanyak 30.000 kuota untuk 87 PT, dan pada tahun 2012 disediakan sebanyak 42.000 kuota



termasuk 2000 kuota untuk PTS yang pertama kali diberikan. Pada tahun 2013 disediakan 50.900 kuota Bidikmisi (termasuk 8000 kuota untuk PTS), namun demikian realisasi mencapai 61.571 melebihi ketentuan kuota. Hal ini disebabkan adanya optimalisasi sisa dana Bidikmisi dari mahasiswa Bidikmisi yang lulus dari Program D3 angkatan 2010, sehingga diberikan kepada perguruan tinggi negeri yang memerlukan tambahan. Sampai tahun 2013, bantuan ini telah diberikan kepada 147.821 orang mahasiswa yang tersebar di 98 PTN dan 590 PTS. Pada tahun 2013 program Bidikmisi

telah menghasilkan lulusan dari program D3 sebanyak 1.823 mahasiswa. Pada tahun 2014 ini sudah menginjak tahun ke lima berjalan, dan akan meluluskan mahasiswa Bidikmisi dari Program S1 dan D4 sebanyak 16.325 dari angkatan 2010 dan program D3 angkatan 2011 sebanyak 2234 mahasiswa.

Berikut grafik peningkatan jumlah kuota bidikmisi selama empat tahun terakhir.



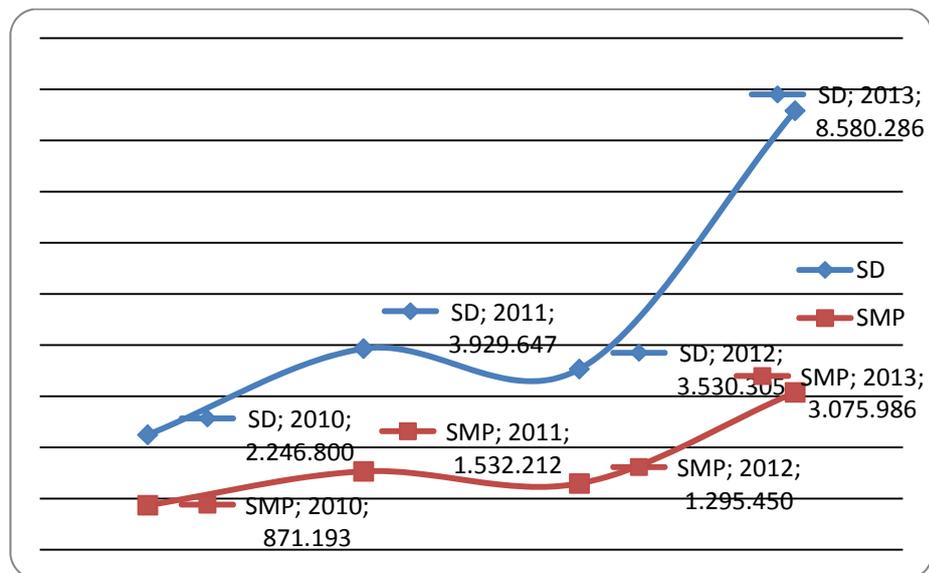
Sampai semester genap tahun 2012/2013 dari hasil evaluasi kinerja mahasiswa melalui penelaahan IPK menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan. Mahasiswa penerima tahun 2010 (6 semester) sebanyak 88,13% memiliki IPK di atas 2,75 dan tercatat sebanyak 279 mahasiswa tersebut memiliki IPK di atas 3,90. Penerima tahun 2011 (4 semester) sebanyak 85,64% memiliki IPK di atas 2,75 dan tercatat sebanyak 306 mahasiswa tersebut memiliki IPK di atas 3,90. Sedangkan Penerima tahun 2012 (2 semester) sebanyak 85,70% memiliki IPK di atas 2,75 dan tercatat sebanyak 512 mahasiswa tersebut memiliki IPK di atas 3,90. Penerima 2012 PTS sebanyak 79,68% memiliki IPK di atas 2,75 dan tercatat sebanyak 42 mahasiswa tersebut memiliki IPK di atas 3,90. Selain itu di antara mereka banyak telah meraih prestasi ko-ekstra kurikuler baik di tingkat nasional maupun internasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam program Bidikmisi adalah dalam hal proses penyaluran dana bantuan Bidikmisi yang disebabkan oleh lambatnya proses validasi data yang dilakukan perguruan sehingga berdampak pada penetapan penerima Bidikmisi dari Perguruan Tinggi penyelenggara dan terlambatnya penyampaian dokumen maupun adanya penggantian penerima pada saat proses pencairan. Direncanakan tahun 2014 ini

akan dialokasikan kembali sebanyak 60.000 kuota untuk mahasiswa baru dengan rincian 50.000 untuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, 5000 kuota untuk Politeknik, dan 5000 kuota untuk perguruan tinggi swasta.

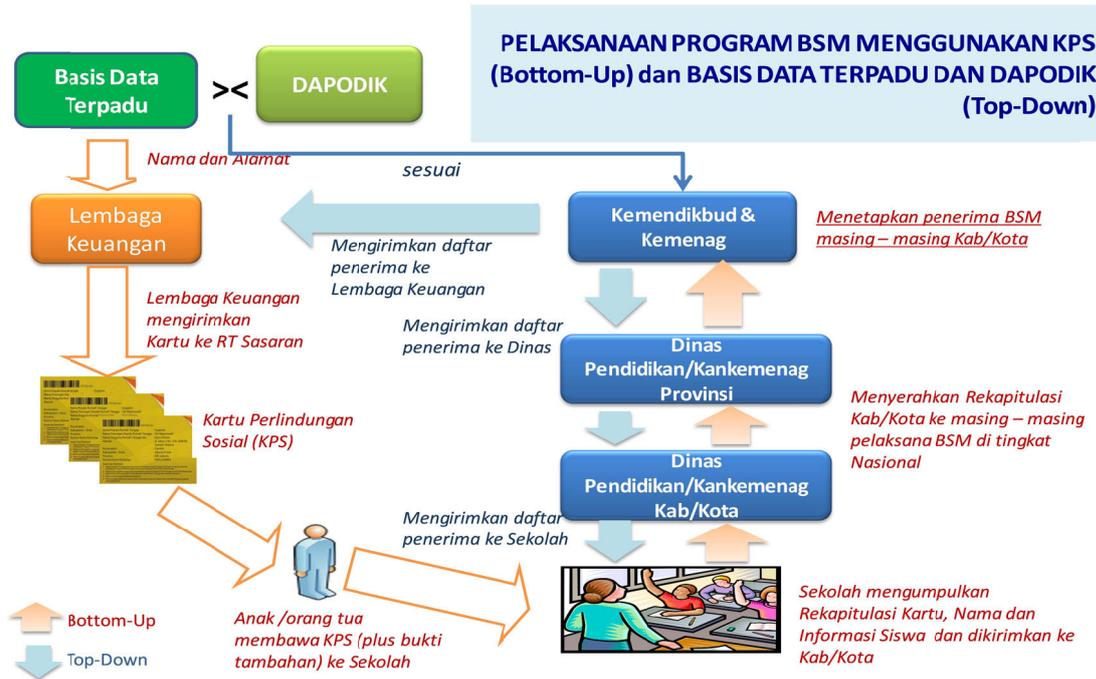
5. Bantuan Siswa Miskin

Bantuan Siswa Miskin (BSM) SD) sebanyak siswa dengan unit cost sebesar Rp.364.000/siswa/ tahun. Sementara itu untuk BSM SMP untuk Kelas 7 dan kelas 8 sebesar Rp550.000/siswa/ pertahun, Kelas 9 sebesar Rp281.000/siswa/semester, dan Kelas 7 baru sebesar Rp282.000/ siswa/ semester. Kenaikan sasaran BSM pada APBN-P 2013 untuk mengurangi beban orang tua siswa yang terkena dampak inflasi kenaikan BBM yang diperkirakan mencapai 7,2%. Berikut grafik perkembangan jumlah penerima bantuan siswa miskin.

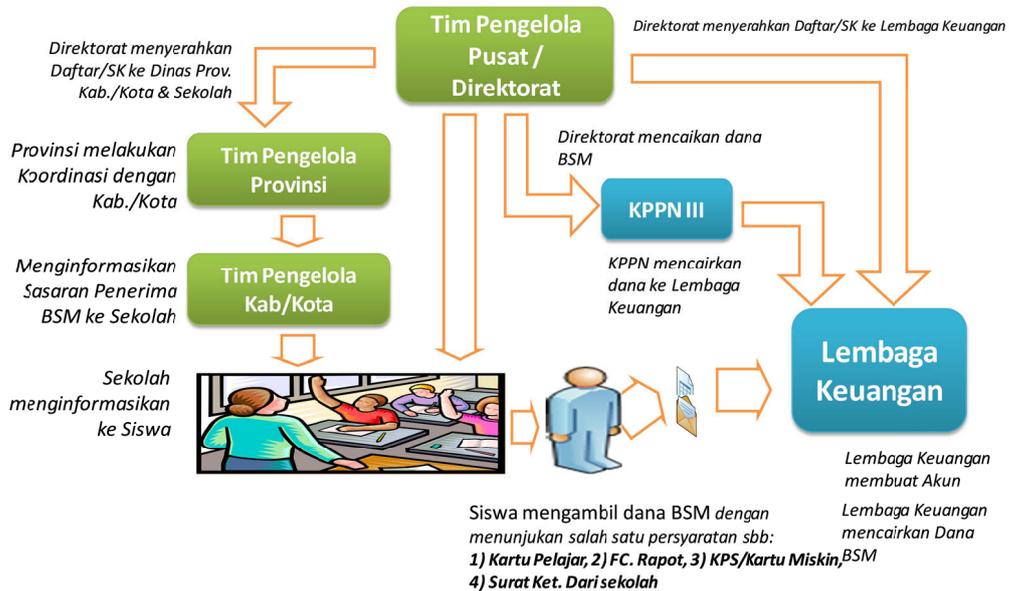


Adapun syarat penerima BSM adalah:

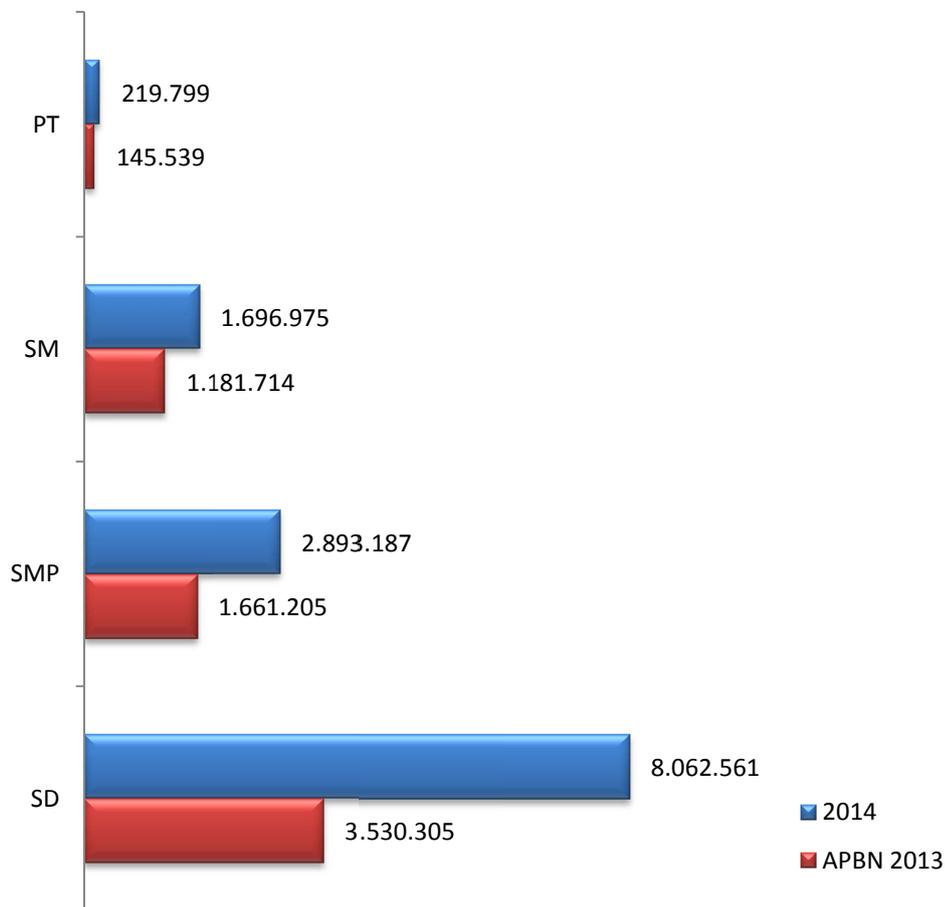
- Orangtua siswa terdaftar sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.
- Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.
- Siswa yatim, piatu atau yatim piatu.
- Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik berasal atau dari Rumah Tangga Miskin atau memiliki 3 saudara yang berusia dibawah 18 tahun.



Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BSM



Berikut alokasi jumlah bantuan dan alokasi biaya siswa/mahasiswa miskin tahun 2013 dan 2014.



Jenjang	2013	2014
SD	360.000	450.000
SMP	560.000	750.000
SM	1.000.000	1.000.000
PT	12.000.000	12.000.000

6. Tunjangan Guru

Tunjangan guru diberikan dengan tujuan agar guru dapat meningkatkan kompetensi dan kesejahteraannya. Tunjangan guru yang diberikan terbagi atas empat macam

tunjangan yaitu tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan peningkatan kualifikasi, dan tunjangan khusus.

Mulai tahun 2013 tunjangan guru langsung disalurkan ke rekening guru, tidak melalui pemerintah Kab/Kota. Kebijakan ini dilakukan karena penyaluran dana lewat pemerintah kab/kota sering kali terlambat di terima guru. Berikut rincian jumlah sasaran pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar yang mendapatkan tunjangan.

No	Nama Tunjangan	Sasaran	Realisasi	%
1	Tunjangan Profesi bagi PTK Non-PNS dan PNS Binaan Provinsi	87.836 orang	74.804 orang	85.16
2	Tunjangan Fungsional	196.529 orang	196.529 orang	100
3	Tunjangan khusus guru SD/SDLB	53.038 orang	54.0948 orang	101.85
5	Bantuan peningkatan kualifikasi S1/D4	89.207 orang	89.207 orang	100

- a. Penyaluran tunjangan profesi guru dilaksanakan melalui dana yang disalurkan melalui dana pusat direktorat Pembinaan PTK Dikdas, yang pencairannya dilaksanakan secara triwulan. Tunjangan ini diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan baik PNS dan non PNS. Pada tahun 2013 bantuan peningkatan kualifikasi guru telah disalurkan kepada sebanyak 74.804 guru dengan capaian target 85,16%. PTK dikdas yang mendapatkan tunjangan profesi ditargetkan sebanyak 87,836 orang guru menerimanya. Realisasi jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi sebanyak 74.804 orang guru terbayar hingga triwulan 4. Sisanya sebanyak 13.032 orang tidak dapat disalurkan karena merupakan guru tidak tetap (3.310 orang), tidak memenuhi 24 jam (6.180 orang) dan sudah pensiun (3.542 orang).
- b. Penyaluran tunjangan fungsional non PNS dilaksanakan melalui dana pusat pada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, dengan mekanisme pencairan tunjangan dilakukan per semester. Pada tahun 2013 tunjangan fungsional non PNS telah direalisasikan dengan sasaran sebanyak 196.529 guru dengan capaian target 100%.
- c. Penyaluran tunjangan peningkatan kualifikasi (S1) bertujuan untuk membantu guru yang belum berkualifikasi S1, dapat melanjutkan kualifikasi pendidikannya. Pada tahun 2013, tunjangan telah diberikan kepada 89.207 guru.

- d. Penyaluran tunjangan khusus dilaksanakan melalui dana pusat pada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, dengan mekanisme pencairan tunjangan secara triwulan. Pada tahun 2013 penyaluran tunjangan khusus telah direalisasikan kepada sebanyak 53.038 guru dengan capaian target 100%.

Berikut rincian jumlah sasaran pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah yang mendapatkan tunjangan.

No	Nama Tunjangan	Realisasi
1	Tunjangan sertifikasi PNS	182.272 guru
2	Tunjangan sertifikasi non PNS	47.234 guru
3	Tunjangan fungsional bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi	43.624 guru
5	Tunjangan melanjutkan jenjang ke S1/D4	2.284 guru
6	Tunjangan khusus bagi guru 3T	6.907 guru
7	Pemberian Subsidi kepada pengawas dikmen	1.237 pengawas

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pemberian tunjangan ini antara lain; sebagian calon penerima bantuan peningkatan kualifikasi guru sudah diajukan di APBD provinsi tahun 2013, calon penerima bantuan telah dimutasikan ke jenjang non dikdas dan sebagian drop out dari kampus.

Beberapa hambatan dalam penyaluran tunjangan profesi guru adalah adanya guru yang mutasi ke instansi lain, pindah jenjang, pindah ke struktural, pensiun dan meninggal dunia sehingga tunjangan tidak dapat dibayarkan satu tahun penuh. Sesuai PP 74/2009 Guru Tidak Tetap (GTT) tidak dapat menerima tunjangan profesi walaupun mereka sudah disertifikasi karena jam mengajar guru calon penerima tunjangan <24 jam perminggu, dan Kabupaten kekurangan waktu untuk verifikasi dan validasi data.

Penyaluran tunjangan fungsional non PNS menghadapi kendala berupa: jumlah SK penerima lebih sedikit dari pada sasaran, tidak cukup waktu untuk realokasi; jam mengajar guru calon penerima tunjangan < 24 jam perminggu; nama penerima dalam SK tetapi tidak berhak menerima tunjangan karena sudah berstatus PNS; guru sudah mendapat tunjangan profesi; dan guru yang pensiun dan meninggal dunia.

Sedangkan kendala penerima tunjangan khusus terkendala oleh: guru dipindahkan dari daerah khusus ke daerah non khusus; beberapa kab/kota yang tidak menerbitkan SK Bupati tentang daerah khusus; guru yang pensiun dan meninggal dunia; dan sekolah tempat mengajar di tutup.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah yang telah Direktorat P2TK Dikdas agar target kinerja dapat tercapai adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan 33 dinas pendidikan provinsi untuk menjaring, meng-update dan memvalidasi data calon penerima 4 tunjangan.
2. Memperbaiki dan menyesuaikan pedoman penyaluran 4 tunjangan tahun anggaran 2013 agar mekanisme pelaksanaan penyaluran tunjangan menjadi lebih baik.
3. Mengadakan sosialisasi kebijakan dan pedoman penyaluran 4 tunjangan tahun anggaran 2013.
4. Mengadakan sosialisasi dan bimtek (TOT) penggunaan Aplikasi online DAPODIK kepada dinas pendidikan Kab/Kota.
5. Berkoordinasi dengan dinas Kab/Kota agar mendorong dan memantau sekolah untuk segera meng-entry dan mengupdate data penerima 4 tunjangan melalui Aplikasi online DAPODIK.

7. BOPTN

Meningkatnya biaya pendidikan yang dibebankan kepada calon mahasiswa maupun mahasiswa baik dalam bentuk uang pangkal maupun SPP oleh sejumlah PTN telah mengkhawatirkan banyak pihak karena dianggap akan mengganggu akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sinyal kekhawatiran ini ditanggapi oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui sejumlah kebijakan untuk membatasi PTN dalam pemungutan biaya pendidikan dari mahasiswa. Kompetisi dari pembatasan ini adalah Pemerintah menyediakan bantuan BOPTN.

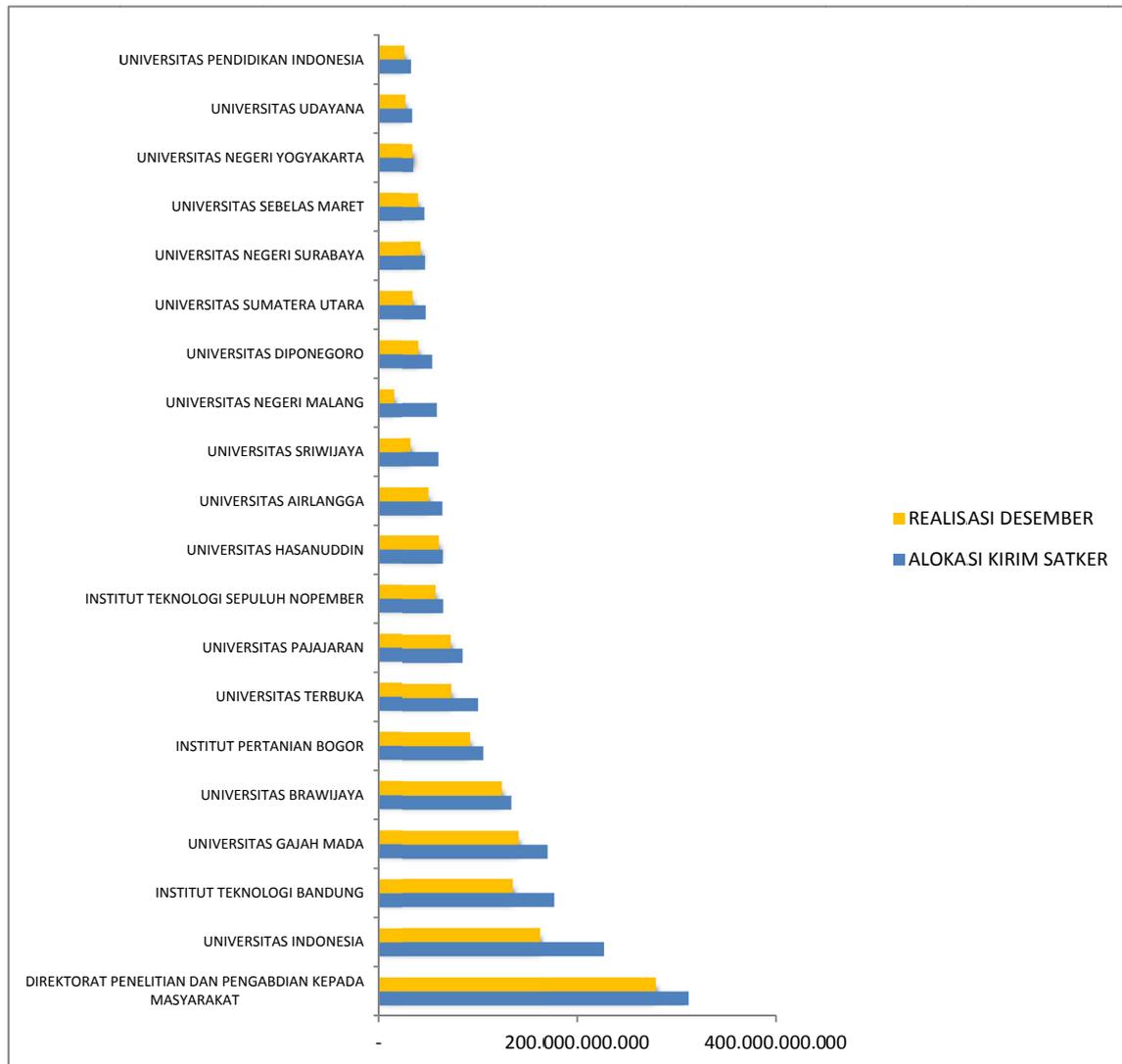
Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 305/E/T/2012 Tentang Tarif Uang Kuliah (SPP) memohon kepada para Rektor/Direktur dan Ketua Perguruan Tinggi Negeri tidak menaikkan tarif uang kuliah (SPP) untuk tahun

akademik 2012-2013. Permintaan ini disertai pernyataan bahwa Pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi sebagian dari biaya periyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain biaya investasi dan operasional. Sejalan dengan Surat Edaran ini, beberapa waktu kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah diterbitkan. Bantuan ini kemudian dikenal dengan nama Bantuan Operasional PTN atau BOPTN. Pada Permen ini dijelaskan bahwa BOPTN dimaksudkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional PTN sebagai akibat penetapan penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar kelangsungan proses belajar mengajar di PTN sesuai dengan standar pelayanan minimal tetap terjaga.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Permen di atas, BOPTN diberikan kepada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kriteria: 1) jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per mahasiswa untuk jenjang S1 dan diploma; 2) proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa; 3) proporsi PNBP dari SPP lainnya; 4) indeks terhadap jenis/karakteristik program studi; 5) akreditasi program studi; 6) jenis perguruan tinggi; 7) proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat; dan 8) jumlah mahasiswa perguruan tinggi.

Pada tahun 2013, dana BOPTN dianggarkan sebesar Rp 2.70 triliun untuk 110 satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besaran nilai BOPTN per PTN berkisar antara Rp 1.15 Milyar (Politeknik Pertanian Negeri Samarinda) dan Rp 226.79 Milyar (Universitas Indonesia). Bantuan operasional ini juga dialokasikan ke PTN baru senilai Rp 25.35 Milyar. Disamping sebagai bantuan biaya operasional, BOPTN juga dianggarkan untuk penelitian sebesar Rp 500 Milyar.

Berikut grafik Realisasi BOPTN berdasarkan 20 Penerima Dana BOPTN Tertinggi.



Berikut adalah sepuluh PTN penerima BOPTN terbesar:

No	Nama Perguruan Tinggi	Dana BOPTN (Rp Milyar)*
1	Universitas Indonesia	226.79
2	Institut Teknologi Bandung	176.88
3	Universitas Gadjah Mada	170.14
4	Universitas Brawijaya	133.06
5	Institut Pertanian Bogor	105.18
6	Universitas Terbuka	100.00
7	Universitas Padjajaran	84.62
8	Institut Teknologi Sepuluh November	65.28
9	Universitas Hasanuddin	64.98
10	Universitas Airlangga	64.39

*) Angka dibulatkan ke atas

Bantuan Biaya Operasional yang diberikan oleh Pemerintah jelas dapat menekan *gap* PNBPN yang terjadi akibat adanya penurunan biaya pendidikan yang dipungut dari mahasiswa. Komponen yang dapat dibiayai oleh dana BOPTN yang diperbolehkan di dalam Permen Nomor 58 Tahun 2012 tidak mencakup seluruh komponen yang selama ini dapat dibiayai oleh PNBPN PTN. Komponen tersebut antara lain insentif manajemen serta pembiayaan investasi minor. Disamping itu, BOPTN yang merupakan bagian dari APBN yang harus dikelola mengikuti peraturan keuangan negara, dapat menyebabkan PTN (termasuk PT-BH) penerima BOPTN dalam jumlah besar mungkin kurang maksimal dalam penyerapan anggarannya. Kendala berikutnya adalah jika pencairan BOPTN mengalami keterlambatan, maka dapat dipastikan sebagian kegiatan operasional PTN akan terganggu. Hal ini dapat terjadi mengingat sejumlah PTN yang telah menerapkan UKT mengalami penurunan penerimaan PNBPN yang selama ini digunakan untuk menutup biaya operasional. Jika penurunan penerimaan ini tidak segera ditutupi oleh dana BOPTN, maka kegiatan operasional PTN jelas akan terganggu. Tantangan lainnya adalah besaran dana BOPTN per PTN hanya didasarkan pada kriteria yang ada pada Permen Nomor 58 Tahun 2012, tanpa diikuti proposal perencanaan program yang komprehensif. Hal ini dapat mengganggu efektifitas penggunaan dana ini.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemendikbud tahun 2013 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK). Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dunia pendidikan dan kebudayaan. LAKIP Kemendikbud tahun 2013 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari sepuluh program yang dilaksanakan Kemendikbud.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian IKU Kemendikbud tahun 2013 adalah sebesar **108,24%**. Dari sebanyak 66 IKU Kemendikbud, sebanyak 36 IKU (55%) capaian kinerjanya memuaskan, 19 IKU (29%) capaian kinerjanya sangat baik, 5 IKU (8%) capaian kinerjanya baik, 3 IKU (5%) capaian kinerjanya cukup, dan 3 IKU (5%) capaian kinerjanya kurang.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama tahun 2013.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	%
I	Capaian \geq 100%	Memuaskan	36	55%
II	$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%	Sangat Baik	19	29%
III	$70\% \leq$ Capaian $<$ 85%	Baik	5	8%
IV	$55\% \leq$ Capaian $<$ 70%	Cukup	3	5%
V	Capaian $<$ 55%	Kurang	3	5%

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kemendikbud tahun 2013 adalah sebesar **87,12%**. Dari sebanyak 10 program Kemendikbud, sebanyak 5 (50%) program capaian kinerja keuangannya sangat baik, 5 (50%) program capaian kinerja keuangannya baik,

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan di sepuluh program Kemendikbud selama tahun 2013.

Urutan	Rentang Capaian daya serap anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program	%
I	Capaian \geq 100%	Memuaskan	-	-
II	85% \leq Capaian < 100%	Sangat Baik	5	50%
III	70% \leq Capaian < 85%	Baik	5	50%
IV	55% \leq Capaian < 70%	Cukup	-	-
V	Capaian < 55%	Kurang	-	-

Selain capaian kinerja tersebut, capaian kinerja lain yang berhasil dicapai Kemendikbud adalah rehabilitasi ruang kelas rusak untuk sekolah SD dan SMP, bantuan bagi guru, pemberian beasiswa, penanganan layanan pendidikan di daerah bencana, dan pemberian layanan pendidikan di daerah tertinggal, daerah terluar maupun daerah perbatasan, diperolehnya opini WDP atas laporan keuangan tahun 2012, diraihnya peringkat keenam tingkat kementerian dalam hal integritas sektor publik tahun 2013 dan diperolehnya predikat B atas akuntabilitas kinerja Kemendikbud tahun 2013.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun keempat dari Renstra Kemendikbud tahun 2010--2014, merupakan dasar berpijak bagi Kemendikbud untuk dapat melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain adanya keterlambatan pengesahan dokumen anggaran tahun 2013, masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar, tingkat pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan di beberapa daerah yang masih rendah, mutu pendidikan yang masih rendah, masih lemahnya SDM bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kemendikbud akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab dapat terealisasi.

LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja Kemendikbud tahun 2013

2. Pengukuran Kinerja

Penetapan Kinerja Kemendikbud Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemendikbud	61%	Pendidikan Anak Usia Dini,	2.416.034.530.000
Anak Lulus SMP tidak Melanjutkan, Putus dan/atau Lulus Sekolah Menengah tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	17%	Nonformal dan Informal	
Meningkatnya Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi A dan B	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B	9%		
Menurunnya penduduk Tuna Aksara Usia Dewasa	Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa	4,03%		
Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah mengarustamakan Gender bidang pendidikan	Persentase Kab/Kota yang telah menerapkan pengarustamaan gender bidang pendidikan	61%		
Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A	APM SD/ SDLB/Paket A	85,80%	Pendidikan Dasar	16.810.401.517.000
Menurunnya peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,9%		
Meningkatnya lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan	96%		
Meningkatnya SD/SDLB yang berakreditasi	Persentase SD/SDLB yang berakreditasi	75%		
Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Tingkat Pendidikan Dasar	Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar	185		
Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B	APK SMP/SMPLB/Paket B	77,36%		
Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B	APM SMP/SMPLB/Paket B	57,66%		
Menurunnya Peserta Didik SMP/SMPLB yang Putus Sekolah	Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	1,2%		
Meningkatnya Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	Persentase lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah	92%		
Meningkatnya SMP/SMPLB yang memperoleh Berakreditasi	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi	58,5%		
Meningkatnya Guru SD/SDLB dalam Jabatan yang Berkualifikasi Akademik S1/D4	Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4	55%		
Terpenuhinya rasio Guru Terhadap Siswa SD	Rasio guru terhadap siswa SD	1:29		
Meningkatnya Guru SMP/SMLB dalam	Persentase guru SMP/SMLB dalam jabatan berkualifikasi	85%		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Jabatan yang Berkualifikasi Akademik S1/D4	akademik S1/D4			
Terpenuhinya rasio Guru terhadap Siswa SMP	Rasio guru terhadap siswa SMP	1:33		
Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menerima Tunjangan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100		
Meningkatnya APK Nasional SMA, SMK, SMLB, MA dan Paket C	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA Paket C	79.5%	Pendidikan Menengah	12.664.839.500.000
	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/ Paket C	72%		
Meningkatnya Persentase SMA/SMK/SMLB dan Paket C yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi Minimal B	Persentase SMA, SMK, SMLB Dan PAKET C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	57%		
Meningkatnya Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP	Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP	70%		
Terwujudnya pendidikan tinggi indonesia yang bermutu dan relevan	1 Persentase prodi yang terakreditasi	100%	Pendidikan Tinggi	41.303.232.305.000
	2 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	57,03%		
	3 Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	8		
	4 Persentase Dosen Berkualifikasi S2	65,5%		
	5 Persentase Dosen Berkualifikasi S3	12,5%		
	6 Persentase Dosen Bersertifikat	62,5%		
	7 Persentase Dosen dengan Publikasi Nasional	5,5%		
	8 Persentase Dosen dengan Publikasi Internasional	0,7%		
Kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi	1 APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	29,87%		
	2 APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	7,00%		
	3 Ratio Kesetaraan Gender PT	109,6%		
	4 Ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1	16,6%		
	5 Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	11,30%		
Terwujudnya perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel	1 Jumlah PK BLU/BLU (BHP)	35		
	2 Jumlah PT beropini WTP dari KAP	26		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Interaksi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan	Jumlah HKI yang Dihasilkan	130		
Tersedianya guru yang profesional dan berkompeten	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	66,4%	Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	2.618.557.000.000
	2. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	47%		
Meningkatnya mutu satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan	50%		
Meningkatnya kualitas kurikulum, sistem pembelajaran dan Perbukuan	Persentase penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan	100%	Penelitian dan Pengembangan	1.295.462.005.000
Meningkatnya Hasil penelitian untuk perumusan kebijakan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%		
Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan	Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan	100%		
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan yang Bermanfaat untuk Merumuskan Bahan Kebijakan dan Masyarakat Luas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%		
Meningkatnya program/satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi	Persentase program/satuan pendidikan PNF, sekolah/madrasah, prodi dan institusi PT, LPTK yang di akreditasi	100%		
	Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan	100%		
Terlindunginya bahasa daerah dari kepunahan	Jumlah Bahasa Daerah di Indonesia Teridentifikasi	619	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	379.531.800.000
Meningkatkan kemahiran berbahasa Indoensia	jumlah Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional	13,179		
	Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) Bahasa Indonesia	7		
Meningkatkan ketertiban penggunaan bahasa di ruang publik	Jumlah Provinsi Tertib dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	20		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Terwujudnya Opini Audit BPK RI atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1. Persentase satker tertib pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	95%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.439.938.587.000
	2. Laporan keuangan unit-unit utama terintegrasi/ terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%		
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel di lingkungan Kemendikbud	Skor LAKIP Kementerian	78		
Realisasi Penyerapan Anggaran 100% setiap Tahunnya	1. Persentase anggaran yang tidak diblokir	98%		
	2. Persentase realisasi anggaran Kementerian	97%		
Mengawal tercapainya Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	Persentase penyelesaian temuan audit	78,8%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	205.000.000.000
Mengawal Implementasi Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta	9%		
	Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja	100%		
Meningkatkan Sinergitas antar aparat pengawasan pemerintah	Persentase satker di lingkungan Kemendikbud memiliki SPI	100%		
Terlestarikannya budaya Indonesia	1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	8470	Pelestarian Budaya	2.011.620.000.000
	2. Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi	4,000,000		
	3. Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan	20		
	4. Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya	15.000.000		

Lampiran Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Program	Anggaran		%
		Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	
Meningkatnya APK PAUD Kemendikbud	APK PAUD Kemendikbud	61%	68.10%	111.64	Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	2.416.034.530.000	2.290.959.612.204	94.82
Anak Lulus SMP tidak Melanjutkan, Putus dan/atau Lulus Sekolah Menengah tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	17%	16.34%	96.12				
Meningkatnya Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi A dan B	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B	9%	11.75%	130.56				
Menurunnya penduduk Tuna Aksara Usia Dewasa	Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa	4,03%	4.03%	100				
Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah mengutamakan Gender bidang pendidikan	Persentase Kab/Kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	61%	64.78%	106,2				
Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A	APM SD/ SDLB/Paket A	85,80%	86.03%	100.2				
Menurunnya peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,9%	0,47%	191.5				
Meningkatnya lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan	96%	99,5%	103.65				
Meningkatnya SD/SDLB yang berakreditasi	Persentase SD/SDLB yang berakreditasi	75%	73.83	98.44				
Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Tingkat Pendidikan Dasar	Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar	185	61	32,97				
Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B	APK SMP/SMPLB/Paket B	77,36%	77,58%	101				
Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B	APM SMP/SMPLB/Paket B	57,66%	65,10%	112,9				
Menurunnya Peserta Didik SMP/SMPLB yang Putus Sekolah	Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	1,2%	1,57%	69.17				
Meningkatnya Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	Persentase lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah	92%	93,17	101,4				
Meningkatnya SMP/SMPLB yang memperoleh Berakreditasi	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi	58,5%	58,54%	100				
Meningkatnya Guru SD/SDLB dalam Jabatan yang Berkualifikasi Akademik S1/D4	Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4	55%	50%	90,9				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Program	Anggaran		%
		Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	
Terpenuhinya rasio Guru Terhadap Siswa SD	Rasio guru terhadap siswa SD	1:29	1:20	110				
Meningkatnya Guru SMP/SMLB dalam Jabatan yang Berkualifikasi Akademik S1/D4	Persentase guru SMP/SMLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4	85%	80	94.11				
Terpenuhinya rasio Guru terhadap Siswa SMP	Rasio guru terhadap siswa SMP	1:33	1:32	100.2				
Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menerima Tunjangan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100	100%	100				
Meningkatnya APK Nasional SMA, SMK, SMLB, MA dan Paket C	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA Paket C	79.5%	81.26%	102.2	Pendidikan Menengah	12.664.839.500.000	12.175.594.393.034	96.29
	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/ Paket C	72%	72.1%	101.1				
Meningkatnya Persentase SMA/SMK/SMLB dan Paket C yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi Minimal B	Persentase SMA, SMK, SMLB DAN PAKET C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	57%	57.1%	100.18				
Meningkatnya Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP	Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP	70%	70.3%	100.4				
Terwujudnya pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan	1 Persentase prodi yang terakreditasi	100%	88%	88	Pendidikan Tinggi	41.303.232.305.000	33.771.780.023.596	81.77
	2 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	57,03%	49,3%	86				
	3 Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	8	2	25				
	4 Persentase Dosen Berkualifikasi S2	65,5%	60,67%	92,62				
	5 Persentase Dosen Berkualifikasi S3	12,5%	11,8%	94,4				
	6 Persentase Dosen Bersertifikat	62,5%	72,28%	115,09				
	7 Persentase Dosen dengan Publikasi Nasional	5,5%	10,5%	190,9				
	8 Persentase Dosen dengan Publikasi Internasional	0,7%	2,1%	300				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Program	Anggaran		%
		Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	
Kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi	1 APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	29,10%	29,87%	102,64				
	2 APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	9%	7,00%	77,77				
	3 Ratio Kesetaraan Gender PT	103,2%	109,6%	106,2				
	4 Ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1	27%	16,6%	61,48				
	5 Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	18%	11,30%	62,77				
Terwujudnya perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel	1 Jumlah PK BLU/BLU (BHP)	35	33	94,3				
	2 Jumlah PT beropini WTP dari KAP	26	-	0%				
Interaksi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan	Jumlah HKI yang Dihasilkan	130	152	116,92				
Tersedianya guru yang profesional dan berkompeten	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	66,4%	84,94%	127,92	Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	2.618.557.000.000	2.457.860.501.539	93.86
	2. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	47%	78,12%	166,21				
Meningkatnya mutu satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan	50%	92,82)	185,64				
Meningkatnya kualitas kurikulum, sistem pembelajaran dan Perbukuan	Persentase penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan	100%	90,81%	90,81	Penelitian dan Pengembangan	1.295.462.005.000	1.015.871.781.321	78.42
Meningkatnya Hasil penelitian untuk perumusan kebijakan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%	98,97%	98,97				
Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan	Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan	100%	70,47%	70,47				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Program	Anggaran		%
		Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan yang Bermanfaat untuk Merumuskan Bahan Kebijakan dan Masyarakat Luas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100%	72,22%	72,22				
Meningkatnya program/satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi	Persentase program/satuan pendidikan PNF, sekolah/madrasah, prodi dan institusi PT, LPTK yang di akreditasi	100%	85,04%	85,04				
	Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan	100%	97,59%	97,59				
Terlindunginya bahasa daerah dari kepunahan	Jumlah Bahasa Daerah di Indonesia Teridentifikasi	619	614	99,16	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	379.531.800.000	298.890.849.675	78,75
Meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia	jumlah Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional	13,179	11.778	89,4				
	Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) Bahasa Indonesia	7	5	71,4				
Meningkatkan ketertiban penggunaan bahasa di ruang publik	Jumlah Provinsi Tertib dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	20	24	120				
Terwujudnya Opini Audit BPK RI atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1. Persentase satker tertib pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	95%	100%	105,26	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.439.938.587.000	2.271.460.253.925	93,09
	2. Laporan keuangan unit-unit utama terintegrasi/ terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100				
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel di lingkungan Kemendikbud	Skor LAKIP Kementerian	78	71,70 "B"	91,92				
Realisasi Penyerapan Anggaran 100% setiap Tahunnya	3. Persentase anggaran yang tidak diblokir	98%	95%	96,94				
	4. Persentase realisasi anggaran Kementerian	97%	87,72%	90,43				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Program	Anggaran		%
		Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	
Mengawal tercapainya Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	Persentase penyelesaian temuan audit	78,8%	84,65	107.47	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	205.000.000.000	163.697.077.477	79.85
Mengawal Implementasi Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta	9%	6.70	74.44				
	Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja	100%	100	100				
Meningkatkan Sinergitas antar aparat pengawasan pemerintah	Persentase satker di lingkungan Kemendikbud memiliki SPI	100%	95	95				
Terlestarikannya budaya Indonesia	1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	8470	10235	121	Pelestarian Budaya	2.011.620.000.000	1.592.182.200.360	79.15
	2. Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi	4,000,000	8.629.355	215				
	3. Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan	20	77	385				
	4. Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya	15.000.000	18,645,290	124				